



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 perlu disesuaikan dengan situasi dan kebijakan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2024, penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemangku kepentingan di daerah selama kurun waktu Tahun 2021-2024.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
BAB VIII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB IX	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB X	PENUTUP

(3) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB II RUANG LINGKUP Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. RKPD Tahun 2019 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019;
- b. RKPD Tahun 2021 dan perubahan RKPD Tahun 2021 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021.

5. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-227/2021)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan situasi dan dinamika hukum saat ini, serta telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Dihapus.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 81

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan antar Dokumen	1-8
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD	1-9
1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi	1-10
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional.....	I-11
1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW	I-13
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	I-13
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan RKPD.....	I-13
1.3.7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral	I-14
1.4 Maksud dan Tujuan	1-14
1.5 Sistematika Penyusunan	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	II-1
2.1.2. Topografi.....	II-2
2.1.3. Geologi.....	II-3
2.1.4. Hidrologi	II-4
2.1.5. Klimatologi.....	II-5
2.1.6. Penggunaan Lahan.....	II-6
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-12
2.1.9. Kondisi Demografi.....	II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-25
2.2.2 Laju Inflasi	II-33
2.2.3 PDRB Perkapita	II-34
2.2.4 Pemerataan Pembangunan.....	II-35
2.2.5 Penduduk Miskin	II-37
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-42
2.2.7 Angka Partisipasi Kasar	II-45
2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM)	II-46
2.2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	II-46
2.2.10 Angka Pendidikan yang Ditamatkan.....	II-48
2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-49
2.2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-50
2.2.13 Kebudayaan	II-51
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-51
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-51
2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-53
2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-62
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-68

2.3.5	Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan	II-70
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-75
2.4.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-75
2.4.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-105
2.4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-144
2.4.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-161
2.5	Pandemi <i>COVID-19</i>	II-171
2.5.1	Jumlah dan Sebaran <i>COVID-19</i>	II-171
2.5.2	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)	II-174
2.5.3	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i>	II-175
2.6	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	II-179
2.6.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-180
2.6.2	Aspek Daya Saing	II-181
2.6.3	Aspek Pelayanan Umum	II-183
2.7	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-207
2.7.1	SPM Bidang Urusan Pendidikan	II-207
2.7.2	SPM Bidang Urusan Kesehatan	II-208
2.7.3	SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II-212
2.7.4	SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	II-213
2.7.5	SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-214
2.7.6	SPM Bidang Urusan Sosial	II-216
2.8	Evaluasi Kinerja Indikator Program.....	II-218

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kondisi Perekonomian Daerah	III-1
3.2.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3
3.2.1	Pendapatan Daerah.....	III-4
3.2.2	Belanja Daerah	III-8
3.2.3	Pembiayaan Daerah	III-11
3.3.	Analisa Kesehatan Keuangan Daerah	III-12
3.3.1.	Analisis Pendapatan Daerah Perkapita	III-12
3.3.2.	Analisis Elastisitas Pajak.....	III-13
3.3.3.	Rasio Kemandirian Daerah.....	III-14
3.3.4.	Ruang Fiskal Daerah.....	III-15
3.3.5.	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah.....	III-18
3.3.6.	Belanja Modal	III-21
3.3.7.	Belanja Pegawai Tidak Langsung.....	III-22
3.3.8.	Tax Ratio.....	III-23
3.3.9.	Perkembangan Neraca Daerah	III-25
3.3.10.	Rasio Likuiditas	III-30
3.3.11.	Rasio Solvabilitas	III-31
3.3.12.	Rasio Leverage.....	III-32
3.4.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	III-32
3.4.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-33
3.4.2.	Analisis Pembiayaan	III-37
3.4.3.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil	III-37
3.4.4.	Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	III-39

	3.4.5.	Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	III-39
	3.5.	Kerangka Pendanaan	III-41
	3.5.1.	Proyeksi Belanja dan Pendapatan Tahun 2021-2024	III-41
	3.5.2.	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-51
BAB IV		PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1	Lingkungan Strategis	IV-1
	4.1.1.	Lingkungan Global.....	IV-1
	4.1.2.	Lingkungan Nasional	IV-3
	4.1.3.	Lingkungan Provinsi	IV-9
	4.2	Permasalahan Pembangunan	IV-17
	4.2.1	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan	IV-18
	4.2.2	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan	IV-20
	4.2.3	Masih Tingginya Jumlah PMKS	IV-21
	4.2.4	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	IV-22
	4.2.5	Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka	IV-22
	4.2.6	Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender.....	IV-22
	4.2.7	Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik.....	IV-23
	4.2.8	Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	IV-24
	4.2.9	Belum Optimalnya Daya Saing Sosial Ekonomi Daerah	IV-28
	4.2.10	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	IV-33
	4.2.11	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV-34
	4.2.12	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	IV-36
	4.2.13	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	IV-37
	4.2.14	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian.....	IV-37
	4.3	Isu-isu Strategis	IV-38
	4.3.1	Kualitas Sumberdaya Manusia	IV-38
	4.3.2	Daya Saing Daerah.....	IV-42
	4.3.3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.....	IV-44
BAB V		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
	5.1.	Visi	V-1
	5.2.	Misi.....	V-2
	5.3.	Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan.....	V-3
	5.4.	Tujuan dan Sasaran.....	V-8
BAB VI		STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1

BAB VII	ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG.....	VII-1
7.1.	Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.....	VII-1
7.2.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030	VII-2
7.2.1.	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah.....	VII-2
7.2.2.	Perwujudan Struktur Ruang.....	VII-4
7.2.3.	Perwujudan Pola Ruang	VII-6
7.3.	Peraturan Penataan Ruang Lainnya	VII-8
7.3.1.	Perpres Nomer 58 Tahun 2014.....	VII-8
7.3.2.	Perpres Nomer 70 tahun 2014.....	VII-8
7.3.3.	Perda Nomer 16 Tahun 2019.....	VII-9
7.4.	Arah Pembembangan Wilayah	VII-11
7.4.1.	Keterkaitan antara RPJMD dengan Indikasi Program RTRW Kabupaten Magelang.....	VII-11
7.4.2.	Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah berdasarkan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Tengah.....	VII-13
7.4.3.	Keterkaitan Perpres 79 tahun 2019 dengan RPJMD.....	VII-14
7.4.4.	Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019- 2024 dengan Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030	VII-18
BAB VIII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VIII-1
8.1.	Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	VIII-1
8.2.	Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	VIII-40
BAB IX	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	IX-1
9.1	Indikator Kinerja Utama.....	IX-1
9.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) ..	IX-10
9.3	Indikator Kinerja Daerah.....	IX-35
BAB X	PENUTUP.....	X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keselarasan Dokumen RPJMD dan RPJPD	I-10
Tabel 1.2.	Keselarasan Dokumen RPJMD dan RPJMD Provinsi	I-11
Tabel 1.3.	Keselarasan Dokumen RPJMD dan RPJMN.....	I-12
Tabel 2.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan , serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2.	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang.....	II-3
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Ha)	II-6
Tabel 2.4.	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2020	II-7
Tabel 2.5.	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang	II-9
Tabel 2.6.	Desa Bersaudara (<i>Sister Village</i>).....	II-15
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-18
Tabel 2.8.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2016 - 2020	II-19
Tabel 2.9.	Perkembangan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-20
Tabel 2.10.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020.....	II-21
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020	II-22
Tabel 2.12.	Jumlah penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-24
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-25
Tabel 2.14.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-27
Tabel 2.15.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-27
Tabel 2.16.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Miliar Rupiah)	II-29
Tabel 2.17.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang	II-30
Tabel 2.18.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)...	II-31
Tabel 2.19.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)...	II-32
Tabel 2.20.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-32
Tabel 2.21.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-33
Tabel 2.22.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-33
Tabel 2.23.	Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2020.....	II-35
Tabel 2.24.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-36
Tabel 2.25.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-37

Tabel 2.26.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020.....	II-42
Tabel 2.27.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016 - 2020	II-43
Tabel 2.28.	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-45
Tabel 2.29.	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-45
Tabel 2.30.	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-46
Tabel 2.31.	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah dan Indonesia Tahun 2016 - 2020..	II-47
Tabel 2.32.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-49
Tabel 2.33.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-50
Tabel 2.34.	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-51
Tabel 2.35.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020.....	II-51
Tabel 2.36.	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-53
Tabel 2.37.	Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-53
Tabel 2.38.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020..	II-53
Tabel 2.39.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-55
Tabel 2.40.	Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang.....	II-56
Tabel 2.41.	Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang.....	II-57
Tabel 2.42.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-58
Tabel 2.43.	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-60
Tabel 2.44.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-60
Tabel 2.45.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-61
Tabel 2.46.	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-61
Tabel 2.47.	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-62
Tabel 2.48.	Angka Kriminalitas tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-63
Tabel 2.49.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-63
Tabel 2.50.	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-65
Tabel 2.51.	Status Desa Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2020	II-67
Tabel 2.52.	Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-67
Tabel 2.53.	Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-67
Tabel 2.54.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-69

Tabel 2.55.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-70
Tabel 2.56.	Produk Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 ..	II-71
Tabel 2.57.	Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-73
Tabel 2.58.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.	II-74
Tabel 2.59.	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-74
Tabel 2.60.	Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-75
Tabel 2.61.	Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-76
Tabel 2.62.	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-76
Tabel 2.63.	Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-77
Tabel 2.64.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-80
Tabel 2.65.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-81
Tabel 2.66.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-81
Tabel 2.67.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-82
Tabel 2.68.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-84
Tabel 2.69.	Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-85
Tabel 2.70.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-85
Tabel 2.71.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-87
Tabel 2.72.	Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-87
Tabel 2.73.	Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-88
Tabel 2.74.	Penyakit Tidak Menular Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Magelang	II-88
Tabel 2.75.	Kondisi Dasar Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-89
Tabel 2.76.	Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2016 - 2020	II-90
Tabel 2.77.	Kondisi Standar Jalan Kewenangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-91
Tabel 2.78.	Kondisi Dasar Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2020.....	II-91
Tabel 2.79.	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2020.....	II-92
Tabel 2.80.	Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-93
Tabel 2.81.	Pembangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-93
Tabel 2.82.	Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-94

Tabel 2.83.	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-94
Tabel 2.84.	Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020	II-96
Tabel 2.85.	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-96
Tabel 2.86.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-97
Tabel 2.87.	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-98
Tabel 2.88.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019	II-99
Tabel 2.89.	Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-100
Tabel 2.90.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.	II-101
Tabel 2.91.	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-102
Tabel 2.92.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2020	II-103
Tabel 2.93.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016 – 2020	II-103
Tabel 2.94.	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2016 - 2020	II-104
Tabel 2.95.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-105
Tabel 2.96.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.97.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.98.	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-107
Tabel 2.99.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2020	II-108
Tabel 2.100.	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek).....	II-109
Tabel 2.101.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2016 -2020	II-110
Tabel 2.102.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-110
Tabel 2.103.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-111
Tabel 2.104.	Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-112
Tabel 2.105.	Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang 2020	II-114
Tabel 2.106.	Ketersediaan Komoditas selain beras tahun 2020 ,, ,, ,,	II-115
Tabel 2.107.	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Magelang	II-115
Tabel 2.108.	Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-117
Tabel 2.109.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-117
Tabel 2.110.	Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru Tahun 2017 - 2020	II-118

Tabel 2.111.	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-119
Tabel 2.112.	Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020 ..	II-120
Tabel 2.113.	Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-120
Tabel 2.114.	Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-121
Tabel 2.115.	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-121
Tabel 2.116.	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-122
Tabel 2.117.	Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-123
Tabel 2.118.	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-123
Tabel 2.119.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-125
Tabel 2.120.	Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-125
Tabel 2.121.	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020.....	II-126
Tabel 2.122.	Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-127
Tabel 2.123.	Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-128
Tabel 2.124.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian Material di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-128
Tabel 2.125.	Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.126.	Predikat Indeks Tingkat Kematangan SPBE	II-131
Tabel 2.127.	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Sarana TIK yang Memenuhi Standart Komunikasi Informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-132
Tabel 2.128.	Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik di Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2020	II-133
Tabel 2.129.	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI Di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-134
Tabel 2.130.	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-134
Tabel 2.131.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-136
Tabel 2.132.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-136
Tabel 2.133.	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-137
Tabel 2.134.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-137
Tabel 2.135.	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-138
Tabel 2.136.	Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-138

Tabel 2.137.	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-139
Tabel 2.138.	Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-140
Tabel 2.139.	Persentase Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi Dalam Sistem informasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-141
Tabel 2.140.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi Secara Terintegrasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-141
Tabel 2.141.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-142
Tabel 2.142.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-142
Tabel 2.143.	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-144
Tabel 2.144.	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-148
Tabel 2.145.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (ADHK) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-148
Tabel 2.146.	Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-149
Tabel 2.147.	Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-149
Tabel 2.148.	Total Produksi Sayur-Sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-152
Tabel 2.149.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-152
Tabel 2.150.	Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-153
Tabel 2.151.	Persentase Kenaikan Luas Lahan Pertanian Unggulan Tahun 2016 – 2020	II-153
Tabel 2.152.	Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kab. Magelang Tahun 2016 - 2020	II-155
Tabel 2.153.	Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-155
Tabel 2.154.	Perkembangan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-156
Tabel 2.155.	Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-157
Tabel 2.156.	Rasio Penyuluh Pemerintah dengan kelompok tani Tahun 2016 - 2020	II-157
Tabel 2.157.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-158
Tabel 2.158.	Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-159
Tabel 2.159.	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-159
Tabel 2.160.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-160
Tabel 2.161.	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-161
Tabel 2.162.	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2016 - 2020	II-162

Tabel 2.163.	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 ..	II-162
Tabel 2.164.	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-163
Tabel 2.165.	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020..	II-163
Tabel 2.166.	Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-164
Tabel 2.167.	Kepemilikan Saham BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020	II-164
Tabel 2.168.	Penyertaan Modal dan Penerimaan Deviden BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020	II-165
Tabel 2.169.	Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2016 - 2020 (Juta Rupiah)	II-165
Tabel 2.170.	Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-167
Tabel 2.171.	Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-168
Tabel 2.172.	Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-168
Tabel 2.173.	Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2.174.	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020..	II-170
Tabel 2.175.	Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-170
Tabel 2.176.	Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020 (Orang)	II-171
Tabel 2.177.	Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II- 171
Tabel 2.178.	Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang Bulan Maret – 17 Juni 2021	II-172
Tabel 2.179.	Jumlah Kasus Covid-19 Per Kecamatan di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021	II-173
Tabel 2.180.	Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-179
Tabel 2.181.	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-180
Tabel 2.182.	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing	II-182
Tabel 2.183.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan.....	II-183
Tabel 2.184.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-184
Tabel 2.185.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	II-185
Tabel 2.186.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-185
Tabel 2.187.	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-186
Tabel 2.188.	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-187
Tabel 2.189.	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II-188
Tabel 2.190.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-188
Tabel 2.191.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-189
Tabel 2.192.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-190
Tabel 2.193.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-191
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-192
Tabel 2.195.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-192

Tabel 2.196.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-193
Tabel 2.197.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-194
Tabel 2.198.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-194
Tabel 2.199.	Capaian Kinerja Urusan Pangan	II-195
Tabel 2.200.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-195
Tabel 2.201.	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-196
Tabel 2.202.	Capaian Kinerja Urusan Persandian	II-197
Tabel 2.203.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	II-197
Tabel 2.204.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ...	II-198
Tabel 2.205.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-198
Tabel 2.206.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-199
Tabel 2.207.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-201
Tabel 2.208.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-201
Tabel 2.209.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	II-202
Tabel 2.210.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-202
Tabel 2.211.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ...	II-203
Tabel 2.212.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	II-204
Tabel 2.213.	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	II-204
Tabel 2.214.	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan.	II-205
Tabel 2.215.	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	II-205
Tabel 2.216.	Capaian Kinerja Pada Layanan Fungsi Lainnya	II-206
Tabel 2.217.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	II-207
Tabel 2.218.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020	II-209
Tabel 2.219.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-212
Tabel 2.220.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-213
Tabel 2.221.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020	II-214
Tabel 2.222.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	II-217
Tabel 2.223.	Capaian Kinerja Indikator Program RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2020.....	II-219
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang 2016-2020.....	III-7
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.....	III-10
Tabel 3.3.	Tabel Pendapatan Perkapita Tahun 2016 – 2020.....	III-13
Tabel 3.4.	Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kab. Magelang Tahun 2014-2020.....	III-14
Tabel 3.5.	Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2014-2020	III-15
Tabel 3.6.	Ruang Fiskal Kabupaten Magelang 2016–2020	III-17
Tabel 3.7.	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020	III-20
Tabel 3.8.	Belanja Modal Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020.....	III-22
Tabel 3.9.	Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	III-23
Tabel 3.10.	<i>Tax Ratio</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020	III-24
Tabel 3.11.	Neraca Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020.	III-27
Tabel 3.12.	<i>Current Ratio</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020....	III-30

Tabel 3.13.	<i>Cash Ratio</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-31
Tabel 3.14.	<i>Quick Ratio</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-31
Tabel 3.15.	<i>Rasio Solvabilitas</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-32
Tabel 3.16.	<i>Rasio Leverage</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 .	III-32
Tabel 3.17.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-34
Tabel 3.18.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-34
Tabel 3.19.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-36
Tabel 3.20.	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.....	III-38
Tabel 3.21.	Komposisi Penutup Defisit Riil (%) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.....	III-39
Tabel 3.22.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-40
Tabel 3.23.	Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2024 pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	III-47
Tabel 3.24.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024	III-52
Tabel 3.25.	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024	III-54
Tabel 4.1.	Usulan Program/Kegiatan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Magelang.....	IV-6
Tabel 4.2.	Isu-isu Strategis Pembangunan Global,Nasional dan Daerah.....	IV-49
Tabel 5.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	V-11
Tabel 5.2.	Pertimbangan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	V-18
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	VI-7
Tabel 6.2.	Implementasi Program Prioritas Daerah Tahun 2019-2024.....	VI-36
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah yang Diserai Pagu Indikatif Kabupaten Magelang	VI-55
Tabel 7.1.	Keterkaitan Indikasi Program RTRW	VII-11
Tabel 7.2.	Keterkaitan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Tengah dengan RPJMD Kabupaten Magelang	VII-13
Tabel 7.3.	Kesesuaian RTRW dalam Kegiatan Perpres 79 tahun 2019	VII-16
Tabel 7.4.	Matrik Kebutuhan Kegiatan Pendukung Perpres 79	VII-19
Tabel 8.1.	Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2024 pada Perubahan RPJMD 2019-2024	VIII-2
Tabel 8.2.	Rencana Pendanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024	VIII-6
Tabel 8.3.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020 Kabupaten Magelang	VIII-42
Tabel 8.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Magelang	VIII-69
Tabel 9.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	IX-1

Tabel 9.2.	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	IX-4
Tabel 9.3.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	IX-10
Tabel 9.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	IX-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan yang Lain	I-9
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-1
Gambar 2.2.	Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang ...	II-3
Gambar 2.3.	Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang	II-8
Gambar 2.4.	Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang	II-8
Gambar 2.5.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-13
Gambar 2.6.	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang tahun 2020.....	II-19
Gambar 2.7.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020	II-23
Gambar 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun pada Tahun 2020.....	II-24
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-25
Gambar 2.10.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu tahun 2016 – 2020	II-26
Gambar 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten /Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020	II- 28
Gambar 2.12.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020.....	II- 30
Gambar 2.13.	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016 – 2020	II- 34
Gambar 2.14.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-34
Gambar 2.15.	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020	II-35
Gambar 2.16.	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2016 - 2020	II-38
Gambar 2.17.	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Maret 2020)	II-40
Gambar 2.18.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten /Kota di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016 – 2020	II-40
Gambar 2.19.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten /Kota di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016 – 2020	II-42
Gambar 2.20.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-43

Gambar 2.21.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Nasional Tahun 2016 - 2020	II-44
Gambar 2.22.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-45
Gambar 2.23.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-47
Gambar 2.24.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-48
Gambar 2.25.	Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/Kapita) Tahun 2020	II-52
Gambar 2.26.	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Jumlah Kelahiran di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-79
Gambar 2.27.	Persentase Kasus Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-83
Gambar 2.28.	Peta Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Magelang.....	II-90
Gambar 2.29.	Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu dan Prov. Jateng Tahun 2015 - 2020	II-107
Gambar 2.30.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2016 - 2020.....	II-109
Gambar 2.31.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-112
Gambar 2.32.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-113
Gambar 2.33.	Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-114
Gambar 2.34.	Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1).....	II-116
Gambar 2.35.	Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1).....	II-116
Gambar 2.36.	Peta Sebaran Terminal Di Kabupaten Magelang	II-127
Gambar 2.37.	Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-145
Gambar 2.38.	Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-145
Gambar 2.39.	Produksi Ikan Hias di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-146
Gambar 2.40.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-146
Gambar 2.41.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-147

Gambar 2.42.	Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-150
Gambar 2.43.	Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Ton)	II-151
Gambar 2.44.	Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-151
Gambar 2.45.	Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-154
Gambar 2.46.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 202	II-155
Gambar 2.47.	Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-156
Gambar 2.48.	Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021.....	II-174
Gambar 3.1	Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-5
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.....	III-6
Gambar 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-8
Gambar 3.4	Penerimaan Pembiayaan	III-11
Gambar 3.5	Pengeluaran Pembiayaan	III-12
Gambar 3.6	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Magelang 2016-2020	III-15
Gambar 3.7	Ruang Fiskal Kabupaten Magelang 2016-2020.....	III-18
Gambar 3.8	Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 2016-2020.....	III-21
Gambar 3.9	Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	III-22
Gambar 3.10	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.....	III-23
Gambar 3.11	<i>Tax Ratio</i> Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.....	III-24
Gambar 4.1.	Perbandingan IPM, UHH, HLS, dan RLS Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020	IV-39
Gambar 4.2.	Perbandingan <i>PPP</i> Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020	IV-41
Gambar 4.3.	Perbandingan Angka Kemiskinan kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	IV-41
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah Tahun 2019-2024.....	V-8

Gambar 6.1.	Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Tahun 2020-2024	VI-22
Gambar 7.1.	Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang	VII-5
Gambar 7.2.	Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang	VII-7

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7
TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, pada pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Pada pasal 342 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Mendasarkan hal-hal di atas dilakukan proses evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Magelang dengan hasil rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Awal tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD terjadi pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global dan regional, termasuk Kabupaten Magelang. Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020, dan di Kabupaten Magelang kasus positif Covid-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 15 Maret 2020. Sampai dengan saat ini kasus Covid-19 terkonfirmasi masih menyebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kejadian pandemi Covid-19 berdampak pada tekanan krisis multisektor akibat penyebaran yang luas dan cepat dari tingkat global hingga domestik. Tidak hanya pada sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi.

Sektor industri pengolahan, perdagangan, UMKM, IKM, pertanian, dan pariwisata yang selama ini berkontribusi besar pada ekonomi Kabupaten

Magelang menjadi salah satu sektor yang terdampak, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang sudah dirancang mengalami pertumbuhan, akan tetapi malah terjadi penurunan. Selain itu pandemi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat, antara lain menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah, bahkan diprediksi akan memunculkan penduduk miskin baru dan pengangguran baru akibat PHK. Hal lain yang perlu diwaspadai, pandemi dikhawatirkan akan berdampak pada kondusivitas wilayah yang diindikasikan dengan adanya peningkatan kasus-kasus kriminalitas di masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi Covid-19.

Dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 pada 26 Juli 2019 lalu, peraturan-peraturan yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional. Proses perubahan RPJMD dilakukan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dilakukan perubahan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Rancangan Awal; 2) Konsultasi Publik; 3) Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4) Konsultasi Rancangan Awal dengan Mendagri; 5) Penyusunan Rancangan; 6) Musrenbang RPJMD; 7) Penyusunan Rancangan Akhir; 8) Penyusunan Raperda Perubahan Perda RPJMD; 9) Persetujuan Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10) Evaluasi Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Gubernur; dan 11) Penetapan Perubahan Perda RPJMD.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah dalam melakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan dijabarkan lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2022, 2023 dan 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
34. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
35. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
38. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538);
 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

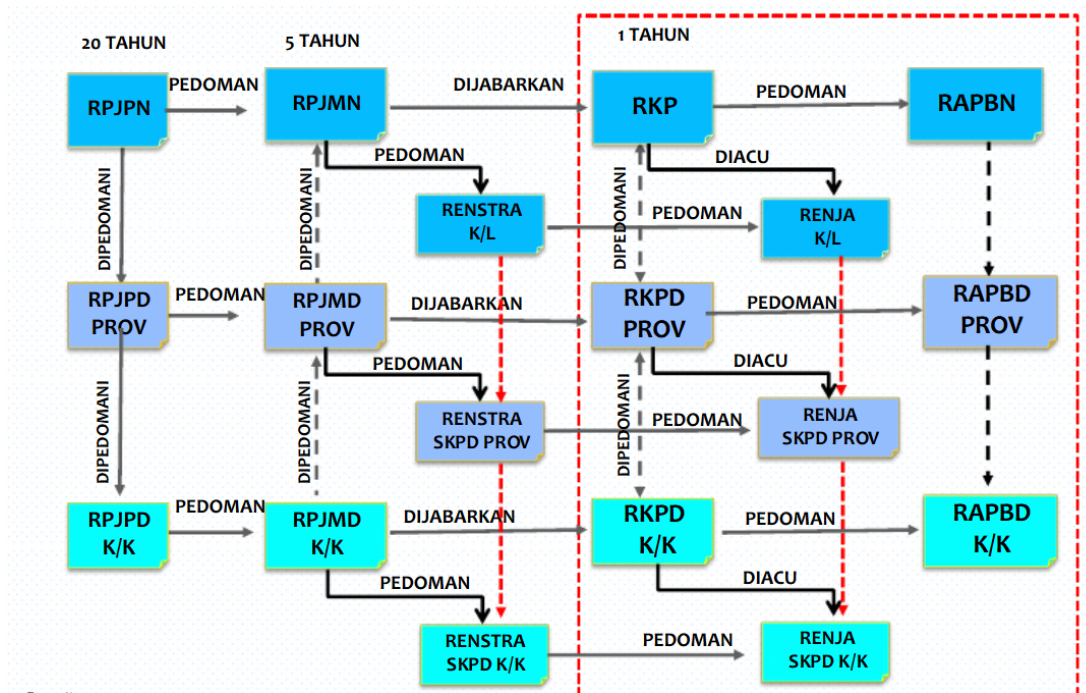
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, prinsip-prinsip dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah;

4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD berpedoman dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional. Selain itu, RPJMD yang disusun juga harus terkait dengan dokumen lain seperti RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Hubungan antar dokumen sebagaimana tergambar pada bagan alir berikut.



Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan yang lain

Keselarasan amanat dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024, dan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya dalam penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2019-2024 masuk pada periode pembangunan jangka menengah daerah untuk tahap ketiga dan keempat dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, permasalahan dan isu strategis terkait dengan sasaran pokok RPJPD akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sasaran pokok RPJPD yang merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD ditempuh melalui serangkaian aktivitas pembangunan yang direncanakan melalui RPJMD. Visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Keselarasan Dokumen RPJMD dan RPJPD

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
Visi	Visi
Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Madani	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya, Saing, dan Amanah
Misi	Misi
Misi 1: meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan local	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
Misi 2: menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
Misi 3: meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Misi 4: memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
Misi 5: mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Misi 1: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
Misi 6: membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan provinsi. Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD dan RPJMD Provinsi

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
Visi	Visi
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya, Saing, dan Amanah
Misi	Misi
Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
	Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
	Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional

RPJM Nasional 2020-2024 dipedomani dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Keselarasan Dokumen RPJMD dan RPJMN

RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
Visi	Visi
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya, Saing, dan Amanah
Misi	Misi
Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Misi 1: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
Misi 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
Misi 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
Misi 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
Misi 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 1: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
Misi 6: Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Misi 3: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
Misi 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 3: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
Misi 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 3: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
Misi 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 3: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

1.3.4 Hubungan RPJMD dan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 harus berpedoman pada RTRW yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Salah satu upaya pengintegrasian RTRW dalam RPJMD melalui penelaahan RTRW untuk menjamin arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Dalam menyusun RPJMD Tahun 2019-2024, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain dan regulasi tata ruang sektoral, yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Dengan memedomani hal tersebut diharapkan tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar provinsi/antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampu. Selama 5 (lima) tahun, rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memedomani RPJMD. Seluruh aktivitas Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus bermuara pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada pada RPJMD.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 nantinya setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya, perangkat daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 5) Grand Design Reformasi Birokrasi, 6) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 7) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang, 8) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, 9) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, 10) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 11) Pedoman Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah, 12) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 13) Standar Pelayanan Minimal, dan 14) Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Progo Tahun 2010-2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini adalah dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19, serta dinamika pembangunan baru lainnya di Kabupaten Magelang. Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, serta memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Perubahan RPJMD ini juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Magelang, dan menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 dan 2024 sebagai kelanjutan perencanaan pembangunan tahun 2019-2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2019-2024.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
7. Memberikan pedoman bagi penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD Tahun 2023 dan 2024, dan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu strategis yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada Bab Gambaran Umum Daerah.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bab ini menjelaskan juga tujuan dan sasaran yang di dalamnya juga memuat prioritas pembangunan.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih yang didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang

Bab ini memuat kondisi pengembangan wilayah; arah pengembangan wilayah dan arah pengembangan wilayah berdasarkan wilayah pengembangan disertai tabel arah kebijakan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah.

Bab VIII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.





Bab IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah





Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.








Bab X : Penutup







Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan.









Tabel 2.223
Capaian Kinerja Indikator Program RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2020

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1.1	Bidang : Pendidikan										
1.1.23	Program Pendidikan Sekolah Dasar										
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,07	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	80,00 
2.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	91,85	91,95	104,17	92,00	92,10	92,30	92,50	92,50	112,62 
3.	Persentase SD dengan Siswa Ideal	%	39,50	40,00	41,20	40,56	40,89	41,29	41,53	41,53	99,21 
4.	Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	%	NA	25,04	21,19	50,08	75,00	100,00	100,00	100,00	21,19 
5.	Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	72,14	73,13	NA	73,96	74,96	75,79	76,62	76,60	NA Berubahnya point penilaian akreditasi dari 8 standar menjadi 4 (Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan manajemen sekolah)







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	109,52 
2.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	79,60	79,95	100,58	80,45	80,65	80,85	81,00	81,00	124,17 
3.	Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	%	NA	38,46	26,92	53,85	69,23	84,62	100,00	100,00	26,92 
4.	Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal	%	35,16	35,94	36,64	36,72	37,50	38,28	39,06	39,06	93,80 
5.	Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	70,54	72,87	NA	74,42	76,74	79,07	80,62	80,62	NA Berubahnya point penilaian akreditasi dari 8 standar menjadi 4 (Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan manajemen sekolah)








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.25	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal										
1.	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)	%	54,35	60,87	52,27	67,39	73,91	82,61	89,13	89,13	58,64 
2.	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	%	37,75	48,99	43,14	60,22	71,46	82,70	93,93	93,93	45,93 
1.1.26	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan										
1.	Persentase Guru Bersertifikat	%	90,00	91,00	89,65	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	94,37 
2.	Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru	%	64,38	65,40	69,86	67,45	68,48	69,56	70,53	70,53	99,05 
1.2	Bidang : Kesehatan										
1.2.34	Program Pelayanan Kesehatan										
1.	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP	%	25	30	30	35	40	45	50	55	54,55 
2.	Cakupan Mutu Pelayanan FKTL	%	25	30	30	35	40	45	50	55	54,55 
3.	Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium	%	25	30	30	35	40	45	50	55	54,55 








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit										
1.	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IF K yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	25	30	30	35	40	45	50	50	60 
2.	Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	25	30	30	35	40	45	50	50	60 
3.	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	%	65,50	67,50	69,48	69,50	71,50	73,50	75,00	75,00	92,63 
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	%	79,40	79,60	82,86	79,80	80,00	80,50	81,00	81,00	102,29 
1.2.36	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
1.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)	%	100	100	57,94	100	100	100	100	100	57,94 
2.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)	%	100	100	35,66	100	100	100	100	100	35,66 
3.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko	%	100	100	91,77	100	100	100	100	100	91,77









Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	terinfeksi HIV *)										
4.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)	%	100	100	5	100	100	100	100	100	5 
5.	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	70	100	100	100	100	100	87,5 
6.	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
7.	Cakupan Surveilans dan Imunisasi	%	60	60	60	70	80	90	90	90	66,7 
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)	%	100	100	7,32	100	100	100	100	100	7,32 
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)	%	100	100	41,88	100	100	100	100	100	41,88 
1.2.37	Program Sumber Daya Kesehatan										
1.	Cakupan sumber daya manusia kesehatan	%	80	82	82	84	86	88	90	90	91,1 
2.	Cakupan sarana prasarana dan pembinaan	%	80	84	84	88	90	92	94	94	89,4







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	sumber daya kesehatan										
1.2.38	Program Kesehatan Masyarakat										
1.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir*)	%	100	100	99,02	100	100	100	100	100	99,02
2.	Pelayanan kesehatan balita*)	%	100	100	54,94	100	100	100	100	100	54,94
3.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar *)	%	100	100	17,4	100	100	100	100	100	17,4
4.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)	%	100	100	38,44	100	100	100	100	100	38,44
5.	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi	%	60	62	62	64	66	68	70	70	88,6
6.	Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor	%	70	74	74	78	82	86	90	90	82,2
7.	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	%	57	59	59	62	64	66	68	68	86,8
8.	Pelayanan kesehatan ibu hamil *)	%	100	100	94,01	100	100	100	100	100	94,01






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin *)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
1.3	Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.3.36	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan										
1.	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	%	92,78	94,37	93,39	95,77	97,18	98,59	100	100	93,39 
2.	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	%	76,55	77,71	77,74	78,89	80,08	81,27	82,47	82,47	94,26 
1.3.37	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi										
1.	Cakupan layanan jaringan irigasi	%	81,57	83,44	83,95	85,25	87,17	88,88	90,42	90,42	92,84 
2.	Cakupan layanan Sumber Daya Air	%	70,18	72,19	66,70	74,2	81,74	83,74	91,3	91,3	73,06 
1.3.38	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL										
1.	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	%	99,05	99,25	99,05	99,52	99,73	99,93	100	100	99,05 







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	0	12,5	0	25	50	75	100	100	0 
3.	Cakupan layanan air minum*	%	87,79	88,79	89,03	89,91	91,03	92,15	93,27	93,27	95,45 
4.	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*	%	86,67	87,7	100	88,73	89,76	90,79	91,82	91,82	100 
5.	Persentase terbangunnya Landmark	%	58,33	66,67	58,33	75	83,33	91,67	100	100	58,33 
1.3.39	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an										
1.	Cakupan sarana prasarana ke PU-an	%	79,33	82	92,67	86	90	95,33	100	100	92,67 
2.	Cakupan layanan Jasa konstruksi	%	37,52	51,33	57,64	62,95	73,9	88,05	100	100	57,64 
1.3.40	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang										
1.	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	%	33,02	39,49	50,65	45,96	52,57	59,19	65,8	65,8	76,98 
2.	Persentase kesesuaian tata ruang	%	34,1	42,39	69,50	50,87	59,34	67,99	76,64	76,64	90,68






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
3.	Cakupan kinerja pertanahan	%	16,67	33,33	40,00	50	66,67	83,33	100	100	40 
1.4	Bidang : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1.4.23	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman										
1.	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	73,7	78,96	79,98	84,23	89,49	94,74	100	100	79,98 
2.	Persentase pengendalian kawasan permukiman	%	52,83	62,26	73,58	71,7	81,13	90,57	100	100	78,58 
3.	Persentase penyediaan TPU	%	0	0	0	0	100	100	100	100	0 
4.	Persentase penanganan PSU Permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
1.4.25	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan										
1.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	39,04	43,6	52,90	48,16	52,71	57,27	61,83	61,83	85,56 
2.	Persentase Fasilitas penyediaan rumah bagi	%	16,67	33,33	66,67	50	66,67	83,33	100	100	100









Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MBR										
3.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	%	50	59,26	40,74	68,52	77,78	87,04	96,3	96,3	42,31 
4.	Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
5.	Persentase penanganan PSU Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
1.5	Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1.5.23	Program Penanggulangan Bencana										
1.	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	31,45	34,40	223,16	41,39	48,38	55,38	62,90	62,90	354,78 
2.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	%	100	100	292,55	100	100	100	100	100	292,55 
3.	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	85,00	85,00	100	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	117,65 
4.	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	30,74	32,17	156,90	36,96	41,01	43,79	47,91	47,91	372,49 
1.5.24	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat										








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Presentase ormas yang aktif	%	97	97,5	NA	98	98,5	99	99,5	99,5	NA Kegiatan tidak dilaksanakan karena Covid
2.	Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	87 
3.	Persentase kegiatan pembinaan politik	%	100	100	83,33	100	100	100	100	100	10 
1.5.25	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1.	Persentase penertiban yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase satlinmas yang aktif	%	70,00	71,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	94,67 
3.	Persentase pengamanan dan pengawalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
1.5.26	Program Penegakan Perda										
1.	Persentase penegakan perda	%	95,29	95,60	95,6	95,80	96,00	96,10	96,20	96,20	99,48 








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.27	Program Penanggulangan Kebakaran										
1.	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	%	53,00	57,00	75	61,00	65,00	70,00	75,00	75,00	100 
1.6	Bidang : Sosial										
1.6.23	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)										
1.	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	%	20,00	33,95	104,52	33,95	33,91	33,91	33,92	33,92	308,14 
2.	Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	35,00	45,25	105	45,25	45,33	45,35	45,35	45,35	230,47 
3.	Persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial*	%	NA	2,57	6,97	2,57	2,99	3,21	3,21	14,55	47,90 
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten **	%	35	100	100	100	100	100	100	100	100 
5.	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar,	%	100	100	82	100	100	100	100	100	82








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti * **										
1.6.24	Program Pemberdayaan Sosial										
1.	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)	%	40	8,96	8,75	8,96	10,22	10,22	10,22	48,59	18,01 
2.	Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan	%	NA	0,1	0	0,2	0,33	0,46	0,59	0,59	0 
3.	Persentase fakir miskin yang divalidasi	%	3	100	100	100	100	100	100	100	100 
2	Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2.1	Bidang : Tenaga Kerja										
2.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja										
1.	Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	%	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	100 
2.1.20	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja										
1.	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	%	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74	100 
2.2	Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan										








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlindungan Anak										
2.2.20	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak										
1.	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*	%	2,56	44,27	42,83	45,13	45,21	46,34	46,85	46,85	91,42 
2.	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar	%	0	57,00	20,32	71,00	85,00	85,00	100	100	20,32 
3.	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	%	100	100	85,22	100	100	100	100	100	85,22 
4.	Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	%	0	66,66	66,66	100	100	100	100	100	66,66 
2.3	Bidang : Pangan										
2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
1.	Penanganan daerah rawan pangan	%	67,10	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	100 
2.	Ketersediaan informasi pasokan. harga dan	%	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	100








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	akses pangan di daerah										
3.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	93,10	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	100 
4.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal	2000	2000	2673	2000	2000	2000	2000	2000	133,65 
5.	Ketersediaan protein per kapita	gram	53	53	71,59	53	53	53	53	53	135,08 
6.	Penguatan cadangan pangan	%	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100 
7	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	87,50	87,90	87,90	88,20	88,40	88,60	88,80	88,80	98,99 
8.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	89,00	90,00	100	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	111,11 
2.5	Bidang : Lingkungan Hidup										
2.5.29	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca										
1.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	%	22	31	11	39	47	56	64	64	17,19 








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	%	65	67	100	68	69	71	72	72	138,89 
3.	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	%	30	38	32	46	54	62	70	70	45,71 
4.	Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	%	19	18	18	18	22	25	27	27	66,67 
2.5.30	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup										
1.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	%	51,00	60,00	109	69,00	79,00	89,00	100	100	109 
2.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	%	100	100	0	100	100	100	100	100	0 
3.	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.	Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	%	29,00	48,00	0	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0 







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.31	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah										
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani*	%	19,40	20,00	17,32	21,12	25,41	29,99	30,43	30,43	56,92 
2.	Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	7,80	8,06	7,8	8,06	10,75	10,75	13,44	13,44	58,04 
3.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*	%	20,40	21,20	19,02	21,78	22,58	23,51	24,48	24,48	77,70 
2.5.32	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau										
1.	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	%	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,89	1,89	100 
2.	Persentase RTH Publik yang terkelola	%	25,04	25,20	25,69	25,37	25,53	25,70	25,86	25,86	99,34 
3.	Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	%	37,71	37,71	37,71	37,71	37,71	37,71	37,71	37,71	100 
2.5.33	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim										
1.	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	1,92	2,27	2,56	2,62	2,97	3,33	3,68	3,68	69,57 







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,51	0,59	0,78	0,66	0,74	0,81	0,88	0,88	88,64 
3.	Persentase mata air yang dikonservasi	%	10,00	14,00	14	19,00	23,00	28,00	32,00	32,00	50,44 
4.	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	3,23	4,57	4,57	5,91	7,26	8,60	9,95	9,95	56,78 
5.	Persentase sekolah Adiwiyata	%	14,17	15,88	15,88	16,82	17,41	17,81	18,11	18,11	107,95 
2.6	Bidang : Administrasi Kependudukan dan Capil										
2.6.16	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan										
1.	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	%	97,00	97,70	97,87	98,20	99,00	99,50	100,00	100,00	98,12 
2.	Persentase penerbitan KK	%	96,65	97,25	97,87	97,85	98,45	99,05	99,50	99,50	98,12 
2.6.17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil										
1.	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	%	87,50	90,00	13,11	92,50	95,00	97,50	100	100	131,112 
2.	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	40,00	50,00	80,33	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	89,26








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
3.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	NA	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	60 
2.6.18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data										
1.	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	60,00	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	77,78 
2.	Persentase Pemanfaatan Data	%	80,00	80,00	80,00	90,00	95,00	100	100	100	80,00 
2.7	Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa										
2.7.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1.	Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik	%	16,39	32,79	34	49,18	65,57	81,97	100	100	34 
3.	Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	%	27,25	32,7	29,97	38,15	43,5	49,05	54,5	54,5	55,00 
4.	Persentase TTG yang difasilitasi	%	12,11	28,35	0	44,59	60,82	77,06	100	100	0







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
5.	Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri	%	38,24	65,53	38,24	88,24	100	100	100	100	38,24 
6.	Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat	%	1,63	1,63	0	1,63	1,63	1,63	1,63	8,15	0 
2.7.22	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa										
1.	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya	%	4,76	4,76	0	4,76	4,76	4,76	4,76	23,80	0 
3.	Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi	%	0,24	0,39	0,10	0,54	0,69	0,84	0,99	0,99	9,62 
4.	Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	%	16,13	32,26	0	48,39	64,52	80,65	100,00	100,00	0 
2.7.23	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa										







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi	
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
3.	Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya	%	10,89	24,52	22,89	40,87	59,94	79,02	100,00	100,00	56,00	
2.8	Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.8.15	Program Keluarga Berencana											
1.	Persentase Peningkatan partisipasi ber-KB	%	0,00	2,41	-1,96	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43	-80,66	
2.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	%	0,00	90,84	90,8	91,00	91,50	91,75	91,75	91,75	98,96	
3.	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*	%	5,00	12,40	12,35	11,92	11,44	10,96	10,50	10,50	117,62	
4.	Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*	%	73,90	74,70	74,9	75,50	76,30	77,10	77,80	77,80	96,27	
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka		34,30	34,8	35	35,37	35,9	36,45	37	37	94,59	







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Panjang (MKJP)*										
2.8.26	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga										
1.	Usia Kawin Pertama (UKP)*	tahun	21	21	0	21,3	21,5	21,8	22	22	0 
2.	Cakupan pembangunan ketahanan keluarga	%	52,98	54,09	25,64	56,67	58,50	60,32	62,29	62,29	41,16 
3.	Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	87,00	55,06	53,83	55,89	57,57	54,22	59,25	59,25	90,88 
4.	Persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	0,00	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	100 
2.9	Bidang : Perhubungan										
2.9.17	Program peningkatan pelayanan angkutan										
1.	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	%	91,11	91,38	60,96	91,70	92,47	93,76	94,08	94,08	64,80 
2.9.22	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan										






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	%	76,37	81,10	78,41	85,82	90,55	95,27	100	100	78,41 
2.9.23	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas										
1.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	%	50,03	59,69	46,40	69,24	79,68	89,29	100	100	46,40 
2.	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	%	31,65	43,69	29,80	55,73	67,78	79,82	91,87	91,87	32,44 
2.10	Bidang : Komunikasi dan Informatika										
2.10.19	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi										
1.	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	36,77	48,48	53,37	60,19	71,90	83,61	100	100	53,37 
2.	Cakupan Layanan Komunikasi	%	75	75	75	77	80	80	82	82	91,46 
2.10.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika										
1.	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA	%	23,68	34,21	35	50	68,42	89,47	100	100	35,00 






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	%	0,27	10,27	34,40	20,68	42,26	64,5	94,96	94,96	36,23 
3.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.10.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik										
1.	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	%	100	100	119,05	100	100	100	100	100	100 
3.	Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	33,33	50	50	66,67	83,33	91,67	100	100	50 
4.	Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria	%	5,81	13,63	24,40	26,45	39,27	52,10	64,92	64,92	37,58 
5.	Cakupan diseminasi informasi melalui media massa	%	80	90	90	100	100	100	100	100	90 









Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	66,66	100	66,67	100	100	100	100	100	66,67 
7.	Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal	%	58,33	100	100	100	100	100	100	100	100 
8.	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	33,33	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.11	Bidang : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
1.	Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	%	78,13	78,13	6,54	78,13	80	80	80	80	8,18 
2.11.19	Program Pemberdayaan Usaha Mikro										
1.	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	%	0,73	0,73	0,02	0,73	0,73	0,75	0,77	3,71	0,54 
2.12	Bidang : Penanaman Modal										
2.12.18	Program Peningkatan dan Pelayanan Investasi										
1.	Persentase realisasi investasi	%	61,21	61,21	80,09	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	131 








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase pemantauan dan pengendalian investasi	%	0,01	0,01	41,15	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	205,75 
2.12.20	Program Pelayanan perijinan										
1.	Persentase pelayanan perijinan	%	1	1	0,7	1	1	1	1	1	70 
2.13	Bidang : Kepemudaan dan Olah Raga										
2.13.20	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga										
1.	Cakupan pembinaan olahraga	%	38,00	41,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	53,00	77 
2.13.22	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan										
1.	Cakupan pembinaan pemuda	%	39,00	41,00	32,41	44,00	46,00	48,00	51,00	51,00	63,55 
2.14	Bidang : Statistik										
2.14.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik										
1.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	78,94	100	97,5	100	100	100	100	100	97,5 
2.	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	78,94	100	97,5	100	100	100	100	100	97,5 






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	Bidang : Persandian										
2.15.15	Program Persandian										
1.	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	10	10	20	33	40	48	48	20,83 
2.16	Bidang : Kebudayaan										
2.16.21	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan										
1.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	9,48	10,54	10,54	11,59	12,64	13,70	14,75	14,75	71,46 
2.	Persentase Karya Budaya yang Terlayani	%	3,96	4,12	3,38	4,20	4,30	4,44	4,51	4,51	74,94 
3.	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	%	83,33	83,92	59,78	84,13	84,14	84,34	84,54	84,54	99,05 
2.17	Bidang : Perpustakaan										
2.17.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan										
1.	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten	%	0,0215	0,0221	0,0203	0,0230	0,0239	0,0251	0,0264	0,0264	77 
2.	Angka kepuasan pemustaka	Angka	79	79,5	85,66	80	80,5	81	81,5	81,5	105 






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	%	31,50	43,75	41,86	56,25	68,75	84,37	100	100	42 
2.18	Bidang : Kearsipan										
2.18.20	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan										
1.	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip	%	100	38,46	30,76	53,85	69,23	84,62	100	100	30,76 
2.18.21	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip										
1.	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola	%	1,69	3,33	31,21	6,45	9,09	11,11	12,50	12,50	250 
3	Urusan : Urusan Pilihan										
3.1	Bidang : Kelautan dan Perikanan										
3.1.28	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan										
1.	Cakupan pengembangan budidaya perikanan	%	0	5	5	5	5	5	5	25	20 
2.	Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan		0	100	100	100	100	100	100	100	100 
3.1.29	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan										






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	%	0	5	5	5	5	5	5	25	20 
2.	Angka konsumsi ikan	kg perkapit a perta huan	19,25	19,70	NA	19,90	20,10	20,30	20,50	20,50	NA
3.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	0	5	5	5	5	5	5	25	20 
4.	Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	%	0	3	3	3	3	3	3	15	20 
3.2	Bidang : Pariwisata										
3.2.18	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata										
1.	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik	%	27,2	36,36 %	18,18	45,45	54,54	63,63	72,72	72,72	25 
3.2.19	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif										
1.	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	33,33	44,00	35,43	59,67	71,33	75,00	87,00	87,00	40,72 
3.3	Bidang : Pertanian										
3.3.19	Program Peningkatan Produksi										







Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pertanian/Perkebunan										
1.	Produktivitas cengkeh	kw/ha	1,80	1,86	1,80	1,92	1,98	2,04	2,08	2,08	86,54 
2.	Produktivitas kelapa dalam	kw/ha	14,40	14,50	14,05	14,60	14,70	14,80	14,90	14,90	94,80 
3.	Produktivitas salak	kw/pohon	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	70,00 
4.	Produktivitas jeruk	kw/pohon	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,18	61,11 
5.	Produktivitas kelengkeng	kw/pohon	0,77	0,78	0,79	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	96,34 
6.	Produktivitas padi	kw/ha	60,10a	60,2	62,5	60,3	60,4	60,5	60,6	60,6	103,14 
	Produktivitas jagung	kw/ha	59,30	59,31	66,1	50,32	59,33	59,34	59,35	59,35	111,37 
7.	Produktivitas kopi	kw/ha	8,90	8,95	8,86	9,00	9,05	9,10	9,15	9,15	96,83 

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Produktivitas cabai	kw/ha	69,74	69,80	70,01	69,85	69,90	69,96	70,01	70,01	100 
9.	Produktivitas bawang putih	kw/ha	61,42	61,57	70,62	61,72	61,87	62,02	62,18	62,18	113,57 
3.3.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
1.	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	0	2	2	2	2	2	2	10	20 
2.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan	%	0	3	3	3	3	3	3	15	20 
3.	Cakupan penerapan teknologi peternakan	%	0	75	75	75	75	75	75	75	100 
4.	Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	%	0	3	3	3	3	3	3	15	20 
3.3.27	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian										
1.	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	%	0	20	16,67	20	20	20	20	100	16,67 










Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	%	4,58	5,01	5,82	5,45	5,89	6,32	6,76	6,76	86,61 
3.3.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian										
1.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	%	0	3,45	4,57	3,59	3,79	3,83	3,86	18,52	24,68 
3.3.29	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian										
1.	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	%	0	36,25	36,22	37,60	40,01	42,15	44,50	44,50	81,39 
3.3.30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan										
1.	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
3.6	Bidang : Perdagangan										
3.6.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan										
1.	Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas	%	NA	0	0	0	0	3	3	3	0 











Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Fluktuasi harga bapak (10 komoditas):beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu	%	<10	< 10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	100 
3.	Persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	NA	80	80	80	80	80	80	80	100 
3.6.22	Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar										
1.	Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik	%	81.25	85	85	86	87,25	90	92,25	92,25	92,14 
3.6.23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian										
1.	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah	%	47,61	58	-87,97	58	65	68	70	70	-125,67 
3.7	Bidang : Perindustrian										
3.7.20	Program Pengembangan industri										
1.	Cakupan Bina Industri Kecil	%	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	100 
4	Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Bidang : Administrasi Pemerintahan										
4.1.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah										
1.	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	94	100	100	100	100	100	94 
4.1.32	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan dan Bantuan Hukum										
1.	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
3.	Persentase permasalahan hukum yang didampingi	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.1.33	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan										
	Persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan	%	NA	90	100	90	90	95	95	95	100 
4.1.34	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan										








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kemasyarakatan										
1.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.1.35	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian										
1.	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan	%	0	100	138	100	100	100	100	100	138 
2.	Persentase BUMD yang Berkinerja Baik	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
3.	Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD	%	0	12	14,78	12	12	12	12	12	123 
4.1.36	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan										
1.	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.1.37	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi										
1.	Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 









Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.39	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa										
1.	Indeks Kematangan UKPBJ	level	3	3	2	4	4	5	5	5	22
4.1.40	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan										
1.	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.41	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD										
1.	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda	%	45	83,33	100	83,33	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
											100 
4.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan										
1.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Salaman	%	NA	90	100	90	90	90	90	90	111 
2.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Borobudur	%	NA	90	100	90	90	100	100	100	100 
3.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Ngluwar	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Salam	%	90	90	90	90	90	100	100	100	90 
5.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Srumbung	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
6.	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP Dukun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
7.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Muntilan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
8.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Mungkid	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
9.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan	%	NA	80	95	85	90	95	100	100	95









Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SP Sawangan										
10.	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Candimulyo	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
11.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Mertoyudan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
12.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Tempuran	%	NA	90	100	93	95	96	100	100	100 
13.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Kajoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
14.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Kaliangkrik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
15.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Bandongan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
16.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Windusari	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
17.	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Secang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
18.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP Tegalrejo	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 









Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Pakis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
20.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Grabag	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
21.	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Ngablak	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan										
	Salaman										
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	NA	100	99,86	100	100	100	100	100	99,86 
	Borobudur										
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	80	80	80	80	85	85	85	85	94,11 
	Ngluwar										
1.	Persentase desa yang tertib Administrasi	%	60	70	70	80	85	90	100	100	70








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Salam										
1.	Prosentase Kegiatan yang Dikoordinasikan	%	NA	100	95,54	100	100	100	100	100	95,54
											
2.	Prosentase Desa yang Tertib Adminstrasi	%	NA	33,33	33,33	41,66	49,99	58,32	66,65	66,65	50,01
											
	Srumbung										
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	87	87	100	87	87	87	87	87	114,94
											
2.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	30	45	47,05	60	75	90	100	100	47,05
											
	Dukun										
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
											
2.	Persentase desa yang tertib Administrasi	%	86,7	100	100	100	100	100	100	100	100
											
	Muntilan										








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	0	64	86	66	68	70	72	72	119,44 
2.	Pesentase kegiatan yang dikoordinasikan.	%	0	100	98	100	100	100	100	100	98 
Mungkid											
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Prosentase desa yang tertib administrasi	%	80	82	78,95	83	84	85	86	86	91,80 
Sawangan											
1.	Persentase desa/kel yang tertib Administrasi	%	NA	60	60	70	80	90	100	100	60 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100 
Candimulyo											
1.	Persentase desa yang tertib Administrasi	%	73,68	78,94	78,95	84,21	89,47	94,73	100	100	78,95 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 








Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mertoyudan	%									
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	0	64	66	64	65	65	66	66	100 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	96,33	100	100	100	100	100	96,33 
	Tempuran										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	70	75	75	80	85	90	100	100	75 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
	Kajoran										
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	91	100	100	100	100	100	91 
2.	Persentase desa yang tertib administrasi.	%	34,48	41,38	67,45	48,28	55,17	62,07	68,97	68,97	97,80 
	Kaliangkrik										
1.	Prosentase desa yang tertib administrasi	%	78	81	85	82	84	85	86	86	98,84 
2.	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100






Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bandongan										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
	Windusari										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	80	85	78,95	90	95	100	100	100	78,95 
2.	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
	Secang										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	40,00	55,00	100	65,00	75,00	85,00	100	100	100 
2.	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
	Tegalrejo										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	81	83	100	85	86	88	90	90	100 
2.	Prosentase kegiatan yg dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
	Pakis										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	40	75	75	80	85	90	95	95	78,95 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
	Grabag										
1.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
	Ngablak										
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase desa yang tertib administrasi	%	34,48	85	85	85	85	85	85	85	100 
4.2	Bidang : Pengawasan										
4.2.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
1.	Persentase Laporan Hasil Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Persentase tindak lanjut yang terselesaikan	%	85,5	86	80	87	88	89	90	90	88,89 
3.	Persentase dokumen SPIP PD yang memadai	%	56	66	73	70	77	83	100	100	73 
4.	Angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi	%	80	80	65,49	80	85	85	85	85	77,05 
4.3	Bidang : Perencanaan										
4.3.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
1.	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
3.	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	94,57	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.3.27	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam										
1.	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	NA	80,00	80,00	82,00	82,00	86,00	88,00	88,00	90,91 
4.3.28	Program Perencanaan Pembangunan										

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya										
1.	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	NA	63,38	75,56	67,14	69,95	72,77	83,10	83,10	85,77 
4.3.29	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur										
1.	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur	%	NA	88,71	88,71	90,32	91,94	96,77	98,39	98,39	90,16 
4.4	Bidang : Keuangan										
4.4.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1.	Persentase kenaikan Pajak	%	11,96	10,39	-26,36	11,28	10,70	10,17	9,69	9,69	-272 
2.	Persentase kenaikan retribusi	%	86,81	33,19	-4,57	-16,15	4,89	9,10	-3,31	-3,31	138 
3.	Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.4.19	Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
1.	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase serapan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,68 
4.	Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 
4.4.20	Program Pengelolaan Aset Daerah										
1.	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	%	100	100	97,92	100	100	100	100	100	98 
4.5	Bidang : Kepegawaian										
4.5.32	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai										
1.	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	%	70,04	71,97	71,97	75	77	78	79,97	79,97	90,00 
2.	Persentase keterisian formasi pegawai	%	73,29	74,12	98,12	75,10	75,87	76,63	78,03	78,03	125,75 
4.5.33	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur										
1.	Persentase ASN yang lulus diklat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	5,00 
2.	Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	%	8,85	9,13	2,33	9,70	10,21	10,71	10,77	50,52	4,61 

Kode	Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target				Kondisi Akhir RPJMD	Evaluasi
				Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	%	78	80	50,12	82	83	84	85	85	58,96 
4.	Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya	%	77	78	78	79	80	81	82	82	95,12 
4.5.34	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai										
1.	Persentase pembinaan ASN	%	0,40	0,40	0,23	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	57,50 
2.	Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN	%	100	100	100	100	100	100	100	100	20,00 
4.7	Bidang : Penelitian dan Pengembangan										
4.7.15	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah										
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100 
2.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100 

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Daerah

Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Selain itu, proses pemulihan pun akan memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Revisi proyeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor dan impor yang makin tertekan hampir di seluruh negara di dunia. Negara-negara di dunia mengalami disrupsi di dalam aktivitas perekonomian domestik akibat pembatasan sosial dan *lockdown* yang diterapkan untuk menekan angka persebaran *Covid-19*, dan investasi swasta tertahan dikarenakan perusahaan cenderung menunda belanja modal ditengah ketidakpastian yang tinggi. Pandemi ini tidak membuat negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang atau berbagai negara maju lainnya tangguh dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang merasakan dampak kontraksi minus pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen. Memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*. Meskipun pemerintah pusat telah berusaha keras mendorong kinerja perekonomian melalui stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi *Covid-19* dan program pemulihan ekonomi, namun akibat wabah *Covid-19* sejak Maret 2020 menyebabkan dilakukan banyak pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal melalui insentif perpajakan, belanja negara, dari pusat dan daerah yang dilakukan secara terus menerus, serta dukungan pembiayaan diharapkan akan mendorong berbagai kegiatan sektoral di pusat dan daerah. Realisasi APBN Tahun 2020 maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong pemulihan ekonomi dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat *Covid-19*.

Dampak yang terjadi juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Dampak yang signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan terdampak di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan (garmen, tekstil, dan meubel); jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan *New Normal* (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal

bulan Juni 2020. Kebijakan ini berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi *year on year* yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada Triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada Triwulan IV.

Pandemi *Covid-19* membuat kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar minus 2,65 persen (*year on year*) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Dari sisi permintaan (*demand*), pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (berkontribusi 60,96 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 1,42 persen; Konsumsi Pemerintah (berkontribusi 7,29 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 4,3 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (berkontribusi 30,98 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 6,98 persen; sementara Ekspor (berkontribusi 36,91 persen terhadap PDRB) dan Impor (berkontribusi 38,3 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi masing-masing minus 13,84 persen dan minus 14,82 persen. Dengan demikian, pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak Maret 2020 telah mengakibatkan aktivitas perekonomian dari sisi permintaan mengalami kontraksi sehingga menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2020 mengalami penurunan.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur, dan produk konsumsi masyarakat.

Dari Tahun 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang relatif stabil pada kisaran 5,28% - 5,5% dengan rata-rata 5,37%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,10%), dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (rata-rata 5,32%). Pandemi *Covid-19* menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,68%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi selama dua tahun, yaitu tahun 2016 dan 2017. Sedangkan, Kota Magelang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun

2018 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 secara sektoral didukung dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha, kecuali sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada masa pandemi *Covid-19* semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, yang terbesar pada sektor transportasi dan perdagangan sebesar -26.99 %. Namun, ada beberapa sektor tetap tumbuh positif, yang tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 15.68 %, diikuti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8.82%.

3.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pemahaman mengenai jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah pada dasarnya adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis pendapatan daerah termasuk pertumbuhan di dalamnya akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

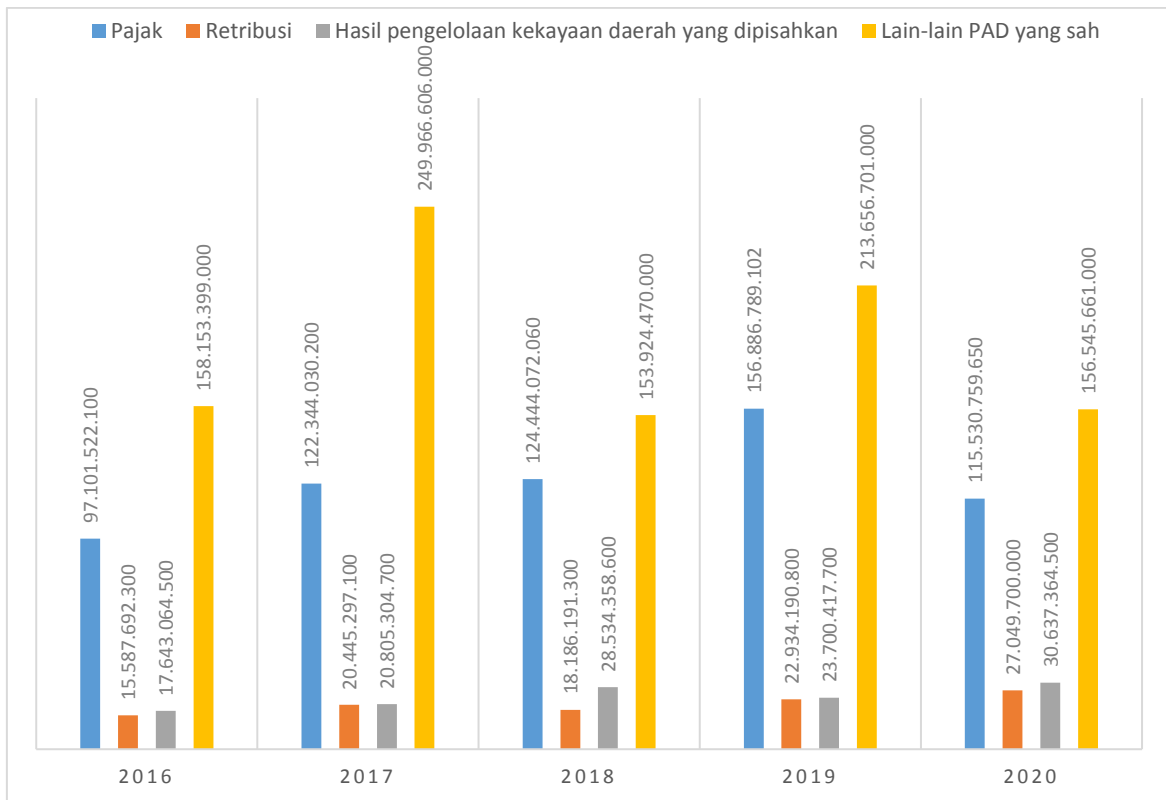
Kondisi keuangan daerah Kabupaten Magelang tergolong sudah stabil dan selalu mengalami peningkatan. Pendapatan daerah kabupaten Magelang tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 6,56% selama periode tahun anggaran 2016 hingga 2020. Sumber terbesar berasal dari Dana Perimbangan. Sumber pendapatan daerah lainnya juga turut meningkat kecuali bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya menurun 15,95 % dari tahun 2016 sampai tahun 2020.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.1.
Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

Seperti yang telah disebutkan di atas, dari ketiga sumber utama pendapatan, Dana Perimbangan berkontribusi paling besar terhadap total pendapatan daerah, Dana Perimbangan meningkat dengan laju rata-rata 5,32% selama tujuh dan cukup signifikan pada tahun 2016 karena peningkatan cukup besar terjadi pada setiap komponen. Sama halnya dengan Dana Perimbangan sumber pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil dan sangat dipengaruhi oleh penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar dengan laju pertumbuhan sebesar 10,83% dan pajak daerah yang meningkat 7,90% selama periode tahun 2014 hingga 2020. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2017 naik signifikan dari tahun 2016 karena adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Juknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan Negeri Dana BOS harus dianggarkan dan dicatat dalam Pendapatan Asli Daerah.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.2.
Grafik Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2016-2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang hingga tahun 2020 hanya mampu menyumbang 14,95% dari total pendapatan daerah, sedangkan Dana Perimbangan menyumbang sebesar 60,57%. Masih lebih tingginya proporsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah, menandakan bahwa pembiayaan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Magelang masih sangat bergantung pada besarnya dana yang digulirkan dari Pemerintah Pusat.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang 2016-2020

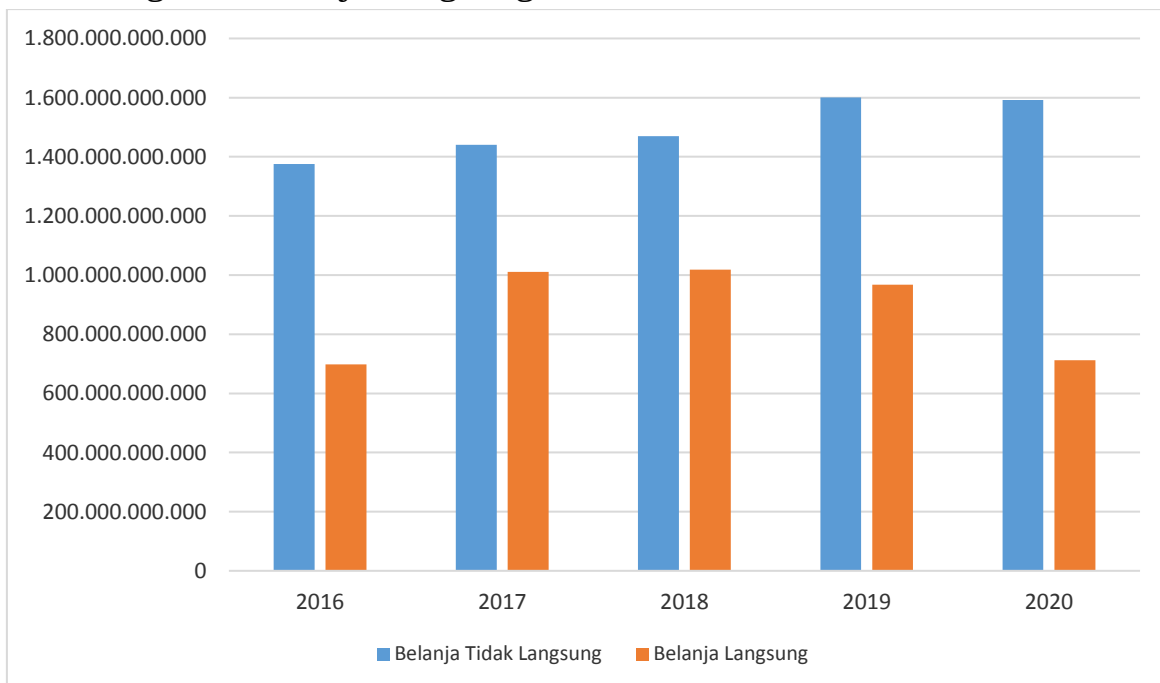
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	288.485.678.128	403.561.238.310	325.089.093.092	417.178.099.961	329.763.485.224	7.67
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532	7.90
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014	1.46
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	28.534.358.666	23.700.417.768	30.637.364.531	17.45
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	158.153.399.083	249.966.606.016	153.924.470.071	213.656.701.700	156.545.661.147	10.83
1.2	Dana Perimbangan	1.362.306.913.419	1.407.243.138.226	1.398.132.841.570	1.500.585.586.102	1.390.679.533.778	5.32
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	50.834.770.009	45.499.673.539	36.431.591.975	28.247.886.437	34.364.292.995	3.48
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.097.366.974.000	987.675.947.000	0.55
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	232.490.166.410	257.495.109.687	301.160.637.595	327.189.198.665	309.473.831.783	65.35
	Dana Insentif Daerah		44.220.622.000	-	47.781.527.000	59.165.462.000	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	385.517.497.881	460.531.639.322	578.968.608.954	657.676.139.692	660.008.953.602	14.66
1.3.1	Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	89.457.220.849	94.617.667.874	110.365.013.575	428.04
1.3.2	Dana Darurat						-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.190.533.220	151.472.357.647	154.791.322.105	167.256.161.818	147.910.429.045	8.11
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						47.25
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.503.500.000	15.643.871.000	9.359.234.000	12.730.533.000	10.689.403.000	(15.95)
1.3.6	Dana desa	226.980.301.000	289.613.899.000	325.360.832.000	383.071.777.000	391.044.107.982	36.83
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.036.310.089.428	2.271.336.015.858	2.302.190.543.616	2.575.439.825.755	2.380.451.972.604	6.56

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

Selama periode tahun 2016 hingga 2020, realisasi belanja daerah Kabupaten Magelang memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipenuhi. Baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, memiliki kecenderungan meningkat, meski Belanja Tidak Langsung tetap lebih besar dibandingkan Belanja Langsung.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.3.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun 2016 hingga 2019 belanja daerah selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 9,44%. Pertumbuhan paling signifikan terjadi dari tahun 2015 menuju 2016, yakni dari 1,7 triliun rupiah menjadi 2,07 triliun rupiah atau meningkat 18,86%. Apabila dilihat dari jenisnya, belanja tidak langsung cenderung meningkat stabil dibandingkan belanja langsung yang trennya cukup fluktuatif. Belanja tidak langsung yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, sedangkan Belanja Langsung dipengaruhi oleh besarnya belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Pada tahun 2018, proporsi Belanja Langsung Daerah hanya sebesar 40,92% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 59,08% dari total belanja daerah. Pengeluaran terbesar dari Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai yang proporsinya mencapai 33,89%, sedangkan proporsi terbesar dari Belanja Langsung adalah untuk belanja modal sebesar 20,89% dan belanja barang dan jasa sebesar 17,45 %.

Namun Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,28% yakni dari total belanja tahun 2019 sebesar Rp.2.568.593.603.007,00 menjadi Rp.2.304.375.917.161,00. Apabila dilihat dari jenis belanjanya, belanja langsung yang cenderung mengalami penurunan dari Rp.967.974.096.630,00 menjadi Rp.711.940.990.870,00.

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Rek	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	843.116.457.075	840.371.055.411	793.738.926.291
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	55.322.664.784	46.064.197.000	55.687.00.660
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	40.944.365.000	30.198.609.000	10.637.410.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	11.487.236.256	13.864.123.170	15.546.920.254	18.900.059.265	21.634.541.500
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	353.508.455.935	479.610.746.506	513.879.513.113	665.011.830.701	646.099.419.199
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	946.000.000	73.755.000	64.637.965.303
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.469.755.920.226	1.600.619.506.377	1.592.434.926.291
2.2	BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja Pegawai	63.264.041.605	82.845.345.123	82.099.898.924	77.570.824.535	56.156.083.197
2.2.2	Belanja Barang Jasa	281.492.262.808	424.757.302.457	434.066.204.801	503.873.276.251	441.377.849.271
2.2.3	Belanja Modal	353.167.692.583	503.401.567.905	501.927.208.762	386.529.995.844	214.407.058.402
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	697.923.996.996	1.011.004.215.485	1.018.093.312.487	967.974.096.630	711.940.990.870

Sumber: Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020

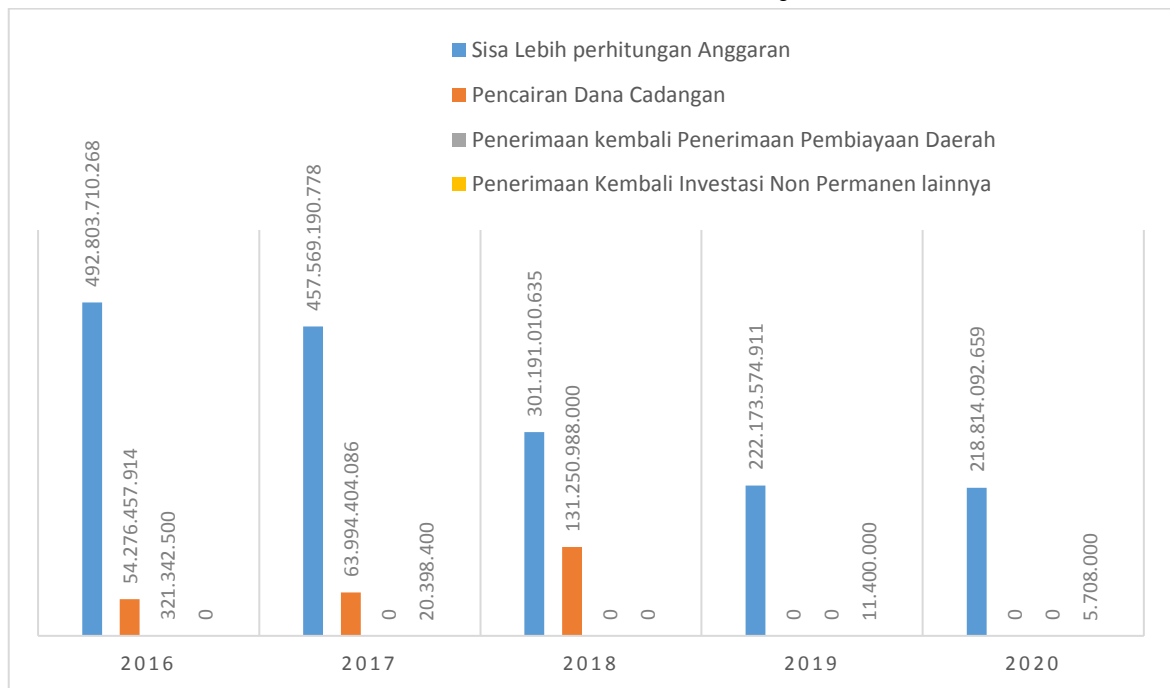
3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Seperti halnya kegunaan analisis pendapatan dan belanja daerah, analisis pembiayaan daerah juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang hingga tahun 2018 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali Pinjaman Daerah, Penerimaan Hasil Penarikan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.



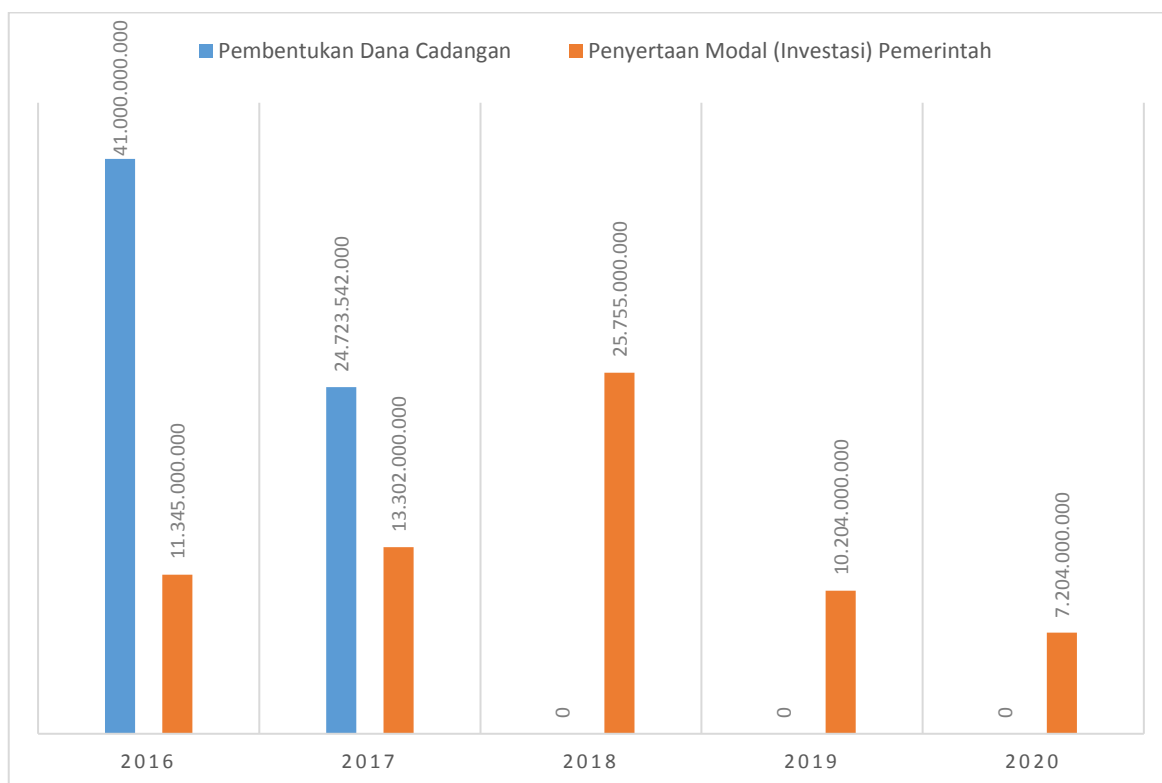
Gambar 3.4.
Penerimaan Pembiayaan

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sumber penerimaan pembiayaan yang terbesar adalah dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA).

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan seperti pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal

daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.5.
Pengeluaran Pembiayaan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran pembiayaan Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pengeluaran terbesarnya adalah untuk pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan yang lain adalah untuk penyertaan modal (investasi) dan pemberian pinjaman daerah.

3.3. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis kesehatan keuangan daerah ini diadopsi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Alat pengukuran ini memotret kondisi “kesehatan fiskal” antar pemerintah daerah (Pemda) dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

3.3.1. Analisis Pendapatan Daerah Perkapita

Pendapatan Daerah perkapita, rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi

dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan perkapita Pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan kondisi yang membaik dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019, meskipun pada Tahun 2020 pertumbuhannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2020 terjadi Pandemi *Covid-19* sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.

Tabel Pendapatan Perkapita Tahun 2016 – 2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita
2016	2.036.310.089.428	1.257.123.000	1.620
2017	2.271.336.015.858	1.268.396.000	1.791
2018	2.302.190.543.616	1.279.625.000	1.799
2019	2.575.439.825.755	1.295.019.000	1.989
2020	2.380.451.972.604	1.299.859.000	1.831

Sumber : BPS dan BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

3.3.2. Analisis Elastisitas Pajak

Elastisitas Pajak merupakan salah satu konsep penting dalam memahami berbagai permasalahan di bidang ekonomi. Pendekatan elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan dengan mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam hal pemungutan Pajak Daerah terhadap PDRB, elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan PDRB ketika terjadi perubahan pada tarif atau penerimaan Pajak Daerah. Perhitungan tingkat elastisitas dalam kasus ini dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan realisasi Pajak Daerah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB. Dalam pengukuran elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB, Halim (2004) mengungkapkan tiga kriteria yaitu:

1. Elastis ($E > 1$) : Sangat peka, dimana perubahan Pajak Daerah sebesar 1% menyebabkan perubahan pada penerimaan PDRB sebesar lebih dari 1%.
2. Inelastis ($E < 1$) : Kurang peka, dimana perubahan Pajak Daerah sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada penerimaan PDRB kurang dari 1%.
3. Elastis Uniter ($E = 1$) : Tepat atau sama, dimana perubahan Pajak Daerah sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada penerimaan PDRB sebesar 1%.

Analisis elastisitas, dilakukan untuk mengetahui derajat kepekaan dari PDRB ketika terjadi perubahan pada penerimaan Pajak Daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$E_{\text{Pajak Daerah terhadap PDRB}} = \frac{\Delta \text{PDRB}}{\Delta \text{PAJAK}} \times \frac{\text{PAJAK}}{\text{PDRB}}$$

Dimana :

$E_{\text{Pajak Daerah terhadap PDRB}}$ = Nilai elastisitas (%)
 ΔPDRB = Perubahan Produk Domestik Regional Bruto
 ΔPAJAK = Perubahan Realisasi Pajak Daerah
 PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Rp)
 PAJAK = Pajak Daerah (Rp)

Berdasarkan konsep elastisitas tersebut akan diperoleh kemungkinan-kemungkinan; Elastis ($E > 1$), Inelastis ($E < 1$), Elastis Unitary ($E = 1$).

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus, hasil dari perhitungan elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kab. Magelang Tahun 2014-2020

Tahun	PAJAK	PDRB	ΔPAJAK	ΔPDRB	Elastisitas (%)
2016	97.101.522.117	19.876.744.000.000	8.141.500.302	1.012.092.000.000	1,65
2017	112.344.030.430	20.882.801.000.000	15.242.508.313	1.006.057.000.000	2,82
2018	124.444.072.963	22.082.800.000.000	12.100.042.533	1.199.999.000.000	1,79
2019	156.886.789.644	23.253.150.000.000	32.442.716.681	1.170.350.000.000	4,11
2020	115.530.759.532	23.227.328.000.000	(41.356.030.112)	(25.822.000.000)	322,00

Sumber : BPS dan BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Magelang tahun 2014-2020 memiliki nilai lebih dari 1 ($E > 1$) atau elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perubahan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang maka PDRB Kabupaten Magelang juga akan mengalami perubahan.

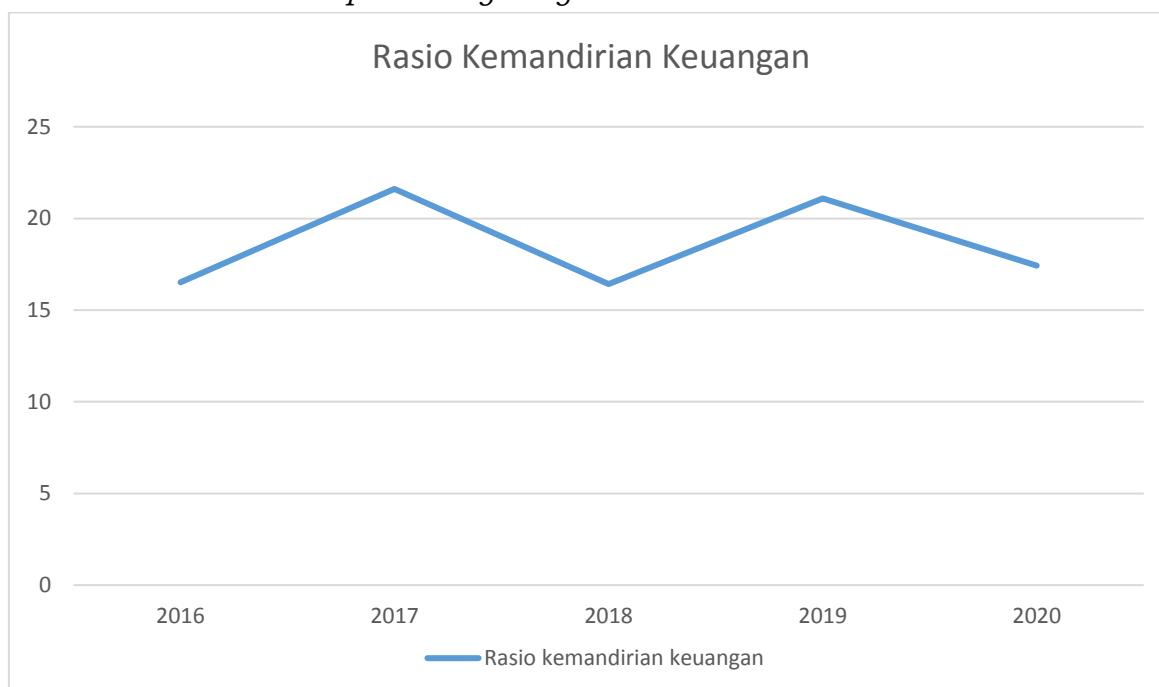
3.3.3. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan. Kondisi kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017 rasio kemandirian daerah mengalami kenaikan karena pada tahun tersebut dana DAU mengalami penurunan, pada Tahun 2019 mengalami kenaikan rasio kemandirian daerah karena adanya pencairan bunga deposito dana cadangan pembangunan Pasar Muntilan dan Rumah Sakit Merah Putih. Pada Tahun 2020 rasio kemandirian keuangan mengalami penurunan lagi karena adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak pandemik *Covid-19*. Secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Transfer Pusat	Lain-lain pendapatan daerah yang syah	Pinjaman	Rasio kemandirian (%)
2016	288.485.678.128	1.362.306.913.419	385.517.497.881	0	16,51
2017	403.561.238.310	1.407.243.138.226	460.531.639.322	0	21,61
2018	325.098.327.236	1.398.132.841.570	581.273.629.232	0	16,42
2019	417.178.099.961	1.883.657.363.102	94.617.667.874	0	21,09
2020	329.763.485.224	1.781.723.641.760	110.365.013.575	0	17,43

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang



Gambar 3.6.

Rasio kemandirian daerah Kabupaten Magelang 2016-2020

Dari gambar dapat dilihat bahwa kemandirian daerah Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi, Dari tahun 2014 menurun sampai tahun 2016 kemudian meningkat pada tahun 2017. Rasio kemandirian Kabupaten Magelang masih dalam kategori rendah, karena masih dibawah 25. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang masih sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.3.4. Ruang Fiskal Daerah

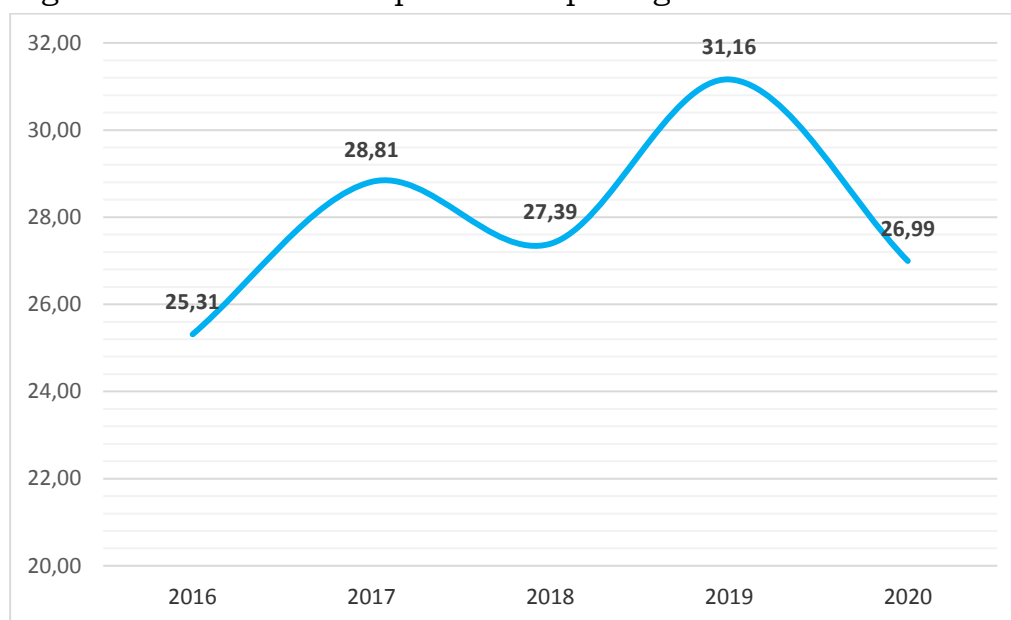
Ruang fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki pemerintah daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja. Besaran pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan undang-undang menambah berat ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

Tabel 3.6. Ruang Fiskal Kabupaten Magelang 2016 – 2020

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus / Dana Darurat	Dana Desa	Pendapatan BLUD	Pendapatan BOS	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal (%)
2016	2.036.310.089.428	1.843.163.661	232.490.166.410	0	226.980.301.000	102.795.578.835		956.765.652.145	515.435.227.377	25,31
2017	2.271.336.015.858	3.801.511.675	257.495.109.687	0	289.613.899.000	109.595.344.464	93.663.486.916	862.787.039.594	654.379.624.522	28,81
2018	2.304.504.798.038	1.500.000.000	301.160.637.595	0	325.360.832.000	111.918.650.973	90.262.241.127	843.116.457.075	631.185.979.268	27,39
2019	2.575.439.825.755	1.500.000.000	327.189.198.665	0	383.071.777.000	125.622.344.591	93.117.667.874	842.384.330.471	802.554.507.154	31,16
2020*	2.380.451.972.604	8.348.073.575	309.473.831.783	0	391.044.107.982	131.655.160.565	102.016.940.000	795.312.940.429	641.754.188.194	26,99

*Sumber : Hasil analisis BPPKAD 2020**

Dalam kurun tahun 2016-2020 kondisi ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif. Tahun 2016 hanya memiliki ruang fiskal sebesar 25,31% yang berarti kebebasan pemerintah untuk mendanai belanjanya sangat terbatas. Ruang Fiskal tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 31,16%. Pemerintah dituntut untuk bisa menyusun skala prioritas pendanaan agar penggunaan dana bisa maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7.

Ruang Fiskal Kabupaten Magelang 2016 – 2020

Diluar dana penyesuaian dan dana alokasi khusus, pendapatan yang sudah ditentukan arah penggunaannya adalah pendanaan hibah, BLUD, BOS dan dana desa. Tahun 2016 ke tahun 2017 celah fiskal Kabupaten Magelang meningkat karena belanja pegawainya menurun, tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19*.

3.3.5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Magelang mengalami fluktuatif pada tahun 2016-2020.

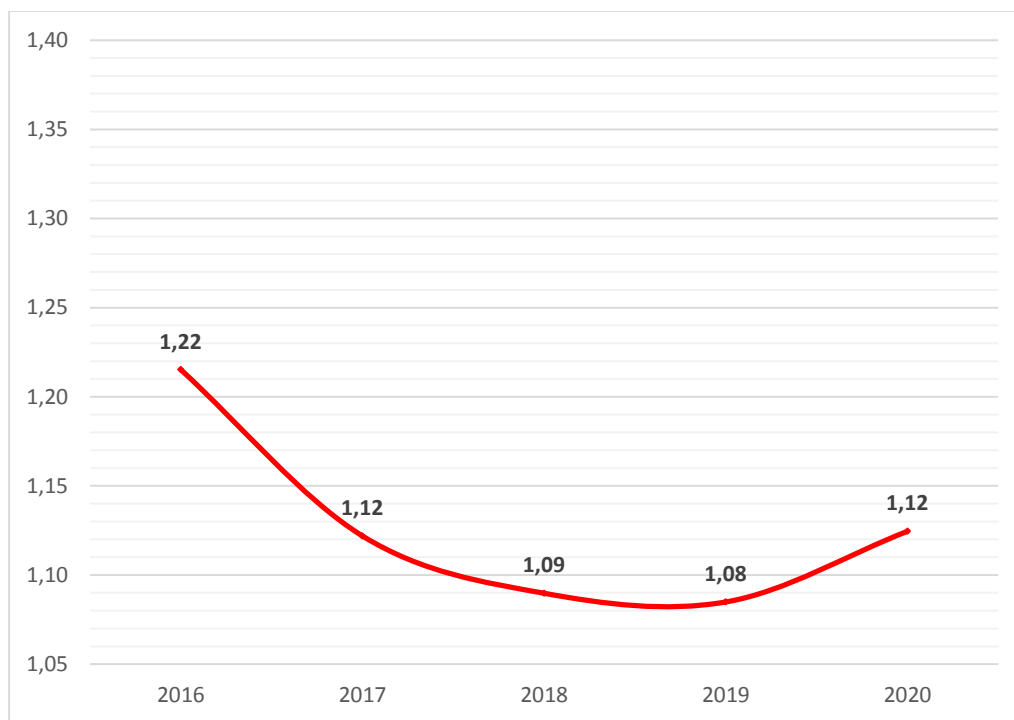
Kemampuan Menandani Belanja Daerah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Penurunan Tahun 2018 disebabkan karena adanya penurunan Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp69.000.000.000, disamping itu adanya penambahan alokasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD sebesar Rp25.755.000.000 dan adanya penambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebesar Rp30.000.000.000. Sedangkan Tahun 2019 penurunan terjadi karena adanya

penurunan Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp80.000.000.000. Meskipun mengalami penurunan tetapi keseluruhan secara keuangan Kabupaten Magelang belum perlu untuk mencari sumber pembiayaan lain seperti pinjaman daerah/obligasi atau kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta untuk mendapatkan pendanaan lainnya. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah penerimaan	Jumlah pengeluaran	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2016	2.036.310.089.428	547.401.510.682	2.073.797.409.332	52.345.000.000	2.583.711.600.110	2.126.142.409.332	1,22
2017	2.271.336.015.858	521.583.993.264	2.451.441.154.742	38.025.542.086	2.792.920.009.122	2.489.466.696.828	1,12
2018	2.302.190.543.616	432.441.998.635	2.486.540.561.169	25.755.000.000	2.734.642.542.251	2.513.604.232.713	1,09
2019	2.575.439.825.755	222.184.974.911	2.568.593.603.007	10.204.000.000	2.797.624.800.666	2.578.797.603.007	1,08
2020*	2.380.451.972.604	218.819.800.659	2.304.375.917.161	7.204.000.000	2.599.271.773.263	2.310.691.296.061	1,12

Sumber : BPPKAD Kab. Magelang, 2020



Gambar 3.8.
Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
2016-2020

3.3.6. Belanja Modal

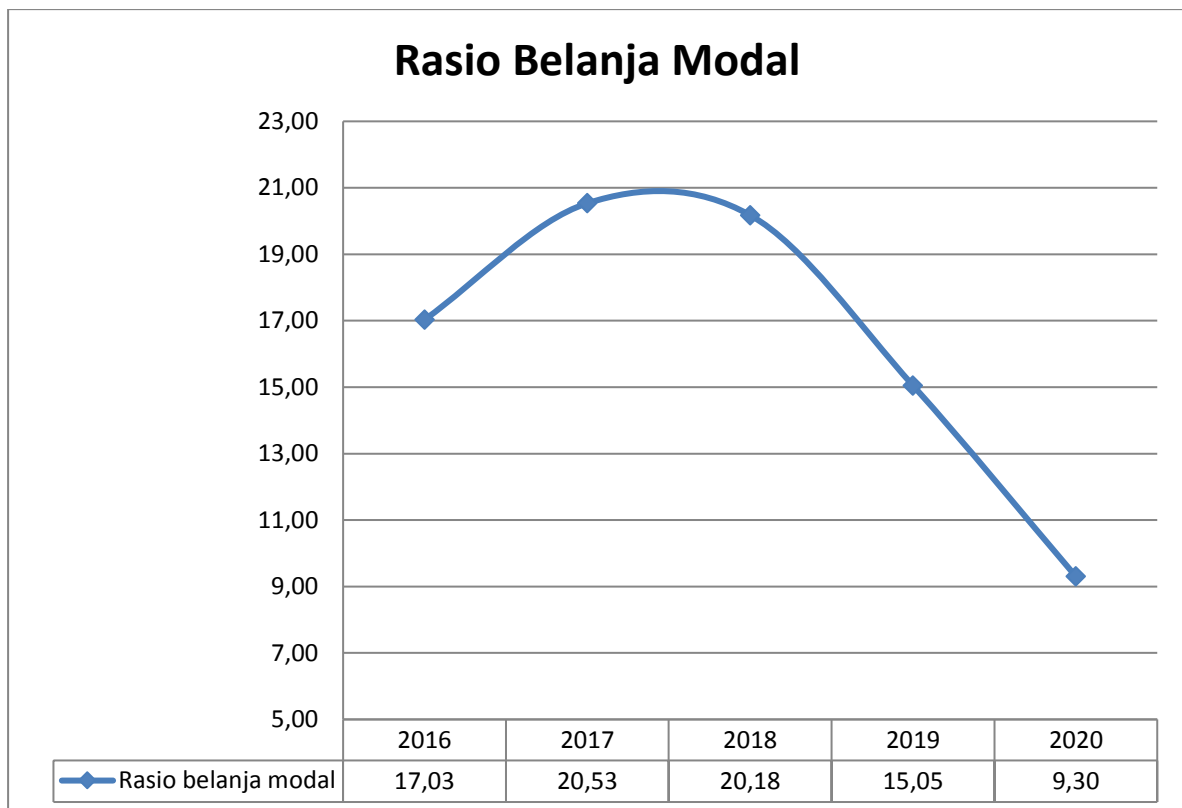
Kondisi rasio belanja modal Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif sejak tahun 2016-2020 sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Mulai tahun 2017 hingga tahun 2020 rasio belanja modal selalu mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terhadap belanja modal adalah tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini disebabkan pengalihan atau refocusing kegiatan untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tahun 2017 rasio belanja modal sebesar 20,53% merupakan belanja modal terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tahun 2016 – 2020.

Rata-rata belanja modal dalam periode tahun 2016 – 2020 adalah sebesar 16,56% pada 7 tahun terakhir. Rincian rasio belanja modal Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8.
Belanja Modal Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)
2016	353.167.692.583	2.073.797.409.332	17,03
2017	503.401.567.905	2.451.441.154.742	20,53
2018	501.927.208.762	2.487.849.232.713	20,18
2019	386.529.995.844	2.568.593.603.007	15,05
2020*	214.407.058.402	2.304.375.917.161	9,30

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang, 2020



Gambar 3.9
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 – 2020

3.3.7. Belanja Pegawai Tidak Langsung

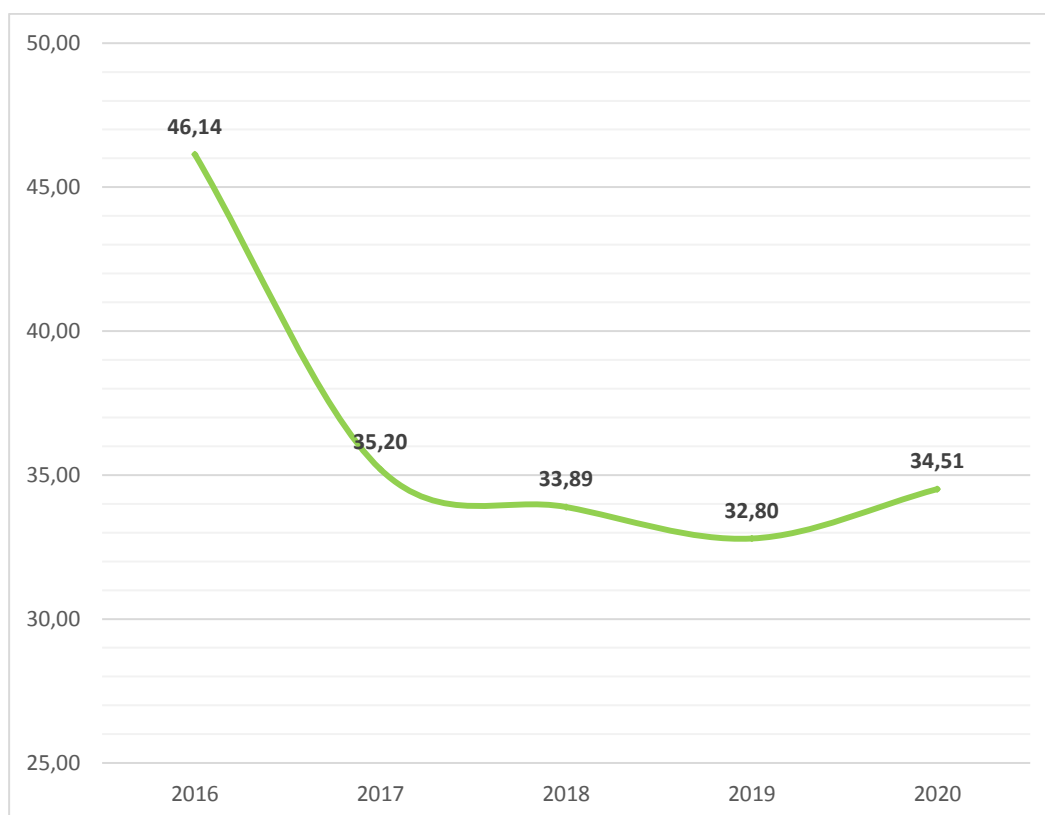
Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai Tidak Langsung (belanja aparatur) dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung terutama Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda perekonomian daerah. Rasio belanja pegawai tidak langsung dibandingkan dengan total belanja di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sampai dengan di bawah 50% pada tahun 2017 atau tepatnya 35,20%. Pada tahun 2016 Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar 46,14% dan dapat ditekan terus setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017 mencapai 35,20% dan hingga tahun 2019 mencapai 32,80%. Meskipun tahun 2020 mengalami kenaikan namun

tidak begitu signifikan. Efisiensi, efektifitas, dan profesionalisme sumber daya aparatur yang ada di Kabupaten Magelang telah dapat diterapkan dengan indikasi penurunan Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung tersebut terhadap total belanja. Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Magelang
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2016	956.765.652.145	2.073.797.409.332	46,14
2017	862.787.039.594	2.451.441.154.742	35,20
2018	843.116.457.075	2.487.849.232.713	33,89
2019	842.384.330.471	2.568.593.603.007	32,80
2020*	795.312.940.429	2.304.375.917.161	34,51

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang, 2020



Gambar 3.10.
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Magelang
Tahun 2016 – 2020

3.3.8. Tax Ratio

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *Tax Ratio* dapat dipergunakan

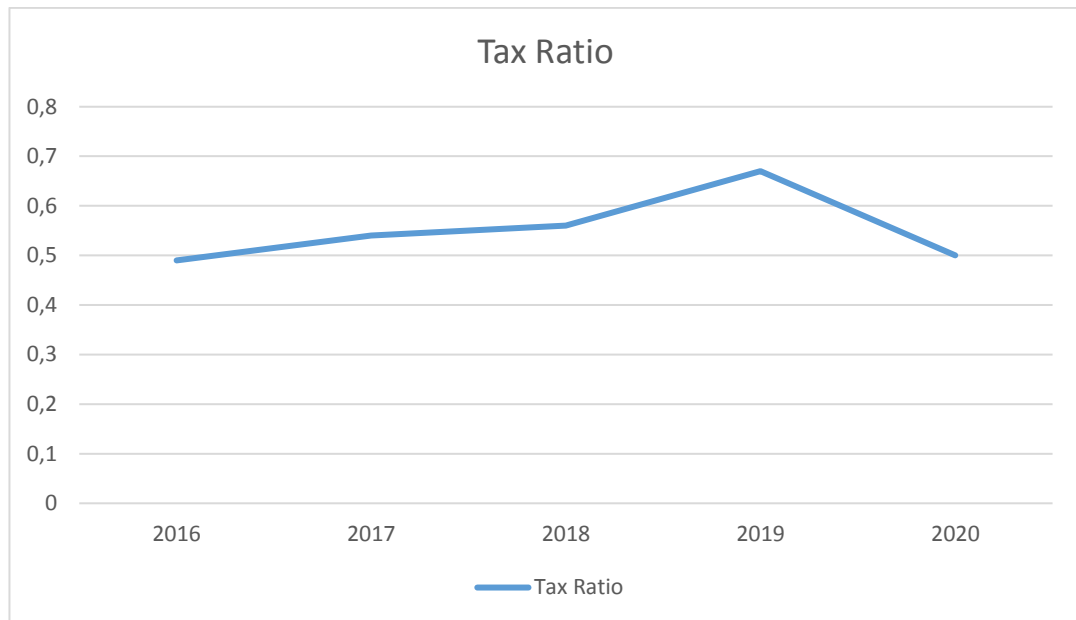
untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan.

Tax Ratio Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang semula pada tahun 2016 sebesar 0,49%, meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,67%, hal ini masih perlu ditingkatkan karena masih berada di bawah 1%. Namun, pada tahun 2020 *Tax Ratio* Kabupaten Magelang mengalami penurunan menjadi 0,50% akibat penurunan pendapatan pajak yang salah satu penyebabnya adalah pandemi *Covid-19*. Indikasi penyebab rendahnya angka *Tax Ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat perkembangannya, maka rata-rata per tahun *Tax Ratio*-nya sebesar 0,52% dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020. *Tax ratio* sebesar 0,67% pada tahun 2019 masih belum menggambarkan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menaikkan *Tax Ratio* melalui upaya peninjauan terhadap NJOP PBB serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Untuk mengetahui rincian *Tax Ratio* Kabupaten Magelang tahun 2016–2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Tax Ratio Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

TAHUN	PAJAK	PDRB	TAX RATIO
2016	97.101.522.117	19.876.744.000.000	0,49
2017	112.344.030.430	20.882.801.000.000	0,54
2018	124.444.072.963	22.082.800.000.000	0,56
2019	156.886.789.644	23.253.150.000.000	0,67
2020*	115.530.759.532	23.227.328.000.000	0,50

Sumber: Bappeda dan Litbangda, Kab. Magelang, 2020



Gambar 3.11.
Tax Ratio Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

3.3.9. Perkembangan Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal pelaporan di suatu pemerintah daerah.

- a. Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Aset diklasifikasikan menjadi :
 1. Aset Lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terikat penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pertumbuhan aset lancar mengalami penurunan pada Tahun 2017-2019 penurunan terjadi pada pos kas dan setara yang berisi sisa saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah. Tahun 2020 kembali meningkat pada pos Kas di Kas Daerah.
 2. Investasi Jangka Panjang berupa investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Magelang berupa penyertaan modal pada BUMD, investasi permanen dan non permanen lainnya. Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Magelang menambah pembiayaan penyertaan modal pada BUMD.
 3. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertumbuhan aset tetap Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah daerah berupa pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan yang menambah nilai aset tetap.

4. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dikhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang dilakukan pada Tahun 2016-2018 yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sedangkan Tahun 2019-2020 tidak ada penggunaan Dana Cadangan.
 5. Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainnya (barang yang diusulkan penghapusan) yang mengalami peningkatan.
- b. Kewajiban pada neraca menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 yaitu kewajiban jangka pendek yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang nilainya cukup signifikan yaitu utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban cukup signifikan masih dapat tertutup dengan nilai aktiva yang dibayar pada tahun berikutnya.
 - c. Ekuitas pada neraca menginformasikan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai hak residual pemerintah daerah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Pertumbuhan ekuitas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan pada tahun 2017-2020, hal ini mencerminkan adanya harmonisasi antar sumber pembiayaan eksternal dengan internal pemerintah daerah serta memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah telah mengkombinasikan antara kewajiban dengan ekuitas secara optimal.

Adapun perkembangan kondisi neraca daerah selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Neraca Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Neraca Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET						
1.1	Aset Lancar						
	Kas di Kas Daerah	108.344.800.628,00	69.356.173.654,00	56.941.053.981,00	196.367.954.777,00	243.633.990.241,00	14,29
	Kas di Kas Bendahara Penerimaan	271.753.350,00	161.820.300,00	101.836.500,00	124.504.800,00	5.273.326.030,00	31,30
	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.411.910,00	55.342.475,00	5.739.169,00	0,00	49.617.182,00	199,21
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	32.295.120.471,00	28.375.097.310,00	19.228.727.881,00	19.457.692.305,00	36.624.484.899,00	35,82
	Kas di Bendahara JKN						(25,00)
	Setara kas	57.000.000.000,00	22.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	58,51
	Kas BOS	3.198.790.968,00	3.746.993.336,00	1.347.001.214,00	2.943.171.436,00	2.175.397.305,00	33,45
	Investasi Jangka Pendek	260.000.000.000,00	180.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00	(4,65)
	Piutang	76.468.920.316,57	68.458.152.389,91	64.170.698.166,73	46.593.739.033,48	63.349.903.363,48	66,15
	Piutang Lain-lain	6.697.745.396,50	14.983.208.871,50	21.176.632.734,50	28.961.609.618,50	15.887.390.463,50	31,59
	Penyisihan Piutang	(12.858.633.424,89)	(15.315.805.574,79)	(19.040.616.049,74)	(21.283.715.218,95)	(25.218.911.053,79)	(0,27)
	Beban dibayar dimuka	389.762.600,00	324.097.600,00	4.844.352.786,00	248.030.000,00	200.637.083,00	358,79
	Persediaan	18.400.772.305,14	31.929.665.817,52	21.159.921.152,85	21.411.185.873,18	26.876.831.761,41	5,25
	JUMLAH ASET LANCAR	550.224.444.520,32	404.074.746.179,14	314.935.347.535,34	294.824.172.624,21	368.852.667.274,60	14,29
1.2	Investasi Jangka Panjang						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
	Dana Bergulir						
	Investasi Non Permanen Lainnya	255.273.593,75	82.449.000,00				
	JUMLAH Investasi Non Permanen	255.273.593,75	82.449.000,00	0	0	0	(64,96)
	Investasi jangka Panjang Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	171.786.310.531,31	198.455.511.055,31	254.588.708.906,93	277.196.942.571,74	283.363.261.640,94	15,86
	Investasi Permanen Lainnya	30.573.139.565,16	33.956.434.994,58				12,83
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	202.359.450.096,47	232.411.946.049,89	254.588.708.906,93	277.196.942.571,74	283.363.261.640,94	15,36

No	Neraca Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	202.614.723.690,22	232.494.395.049,89	254.588.708.906,93	277.196.942.571,74	283.363.261.640,94	15,80
1.3	Aset Tetap						
	Tanah	571.237.721.517,00	607.238.869.165,00	622.190.382.414,00	636.123.001.364,00	654.874.141.646,00	3,97
	Peralatan dan Mesin	419.198.808.997,59	508.330.162.235,00	560.091.205.789,00	678.220.691.293,00	806.067.100.577,00	18,56
	Gedung dan Bangunan	984.174.085.711,36	1.124.237.306.982,00	1.207.117.002.145,00	1.454.609.233.748,00	1.495.901.164.662,00	13,89
	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	1.078.014.971.456,40	1.232.641.769.993,00	1.398.989.695.546,00	1.491.832.021.332,00	1.544.043.850.715,00	22,91
	Aset tetap Lainnya	60.924.530.093,00	91.026.704.603,00	111.796.527.119,00	127.910.661.545,00	136.719.506.916,00	35,49
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.475.364.582,00	72.770.831.944,00	265.407.037.651,00	147.240.191.986,00	139.582.295.866,00	310,43
	Akumulasi Penyusutan	(1.282.276.365.922,06)	(1.463.195.890.899,92)	(1.668.332.032.603,36)	(1.869.066.203.593,32)	(2.034.641.613.540,50)	41,16
	JUMLAH ASET TETAP	1.837.749.116.435,29	2.173.049.754.022,08	2.497.259.818.060,64	2.666.869.597.674,68	2.742.546.446.841,50	3,75
1.4	Dana Cadangan	202.318.708.524,00	175.373.812.207,00	46.163.698.395,00	0,00	0,00	(4,89)
1.5	Aset Lainnya						
	Tagihan Jangka Panjang						
	Kemitran dengan Pihak Ketiga	9.344.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	(19,74)
	Aset Tidak Berwujud	4.524.376.479,00	6.208.898.489,00	10.634.928.970,00	14.204.015.977,00	15.844.033.482,00	70,91
	Aset Lain-lain	25.679.453.958,73	29.893.293.107,31	24.591.182.450,62	26.222.777.179,39	29.441.364.065,66	203,21
	Akumulasi Amortisasi	(2.224.203.290,00)	(3.851.119.026,33)	(8.377.546.500,00)	(10.652.705.455,00)	(12.434.575.416,25)	72,57
	JUMLAH ASET LAINNYA	37.324.267.147,73	34.215.712.569,98	28.813.204.920,62	31.738.727.701,39	34.815.462.131,41	122,81
	JUMLAH ASET	2.830.231.260.317,56	3.019.208.420.028,09	3.141.760.777.818,53	3.270.629.440.572,02	3.429.577.837.888,45	1,27
2.	KEWAJIBAN						
2.1	Kewajiban jangka Pendek						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	147.519.304,00	43.739.378,00	83.677.869,00	27.729.246,00	325.903.478,00	37,31
	Pendapatan diterima dimuka	2.197.027.350,50	2.920.851.093,78	2.102.986.887,04	1.522.561.528,44	893.708.599,22	(57,54)
	Utang Beban	2.282.129.323,00	3.465.455.500,00	3.717.040.828,00	3.748.230.281,00	17.318.697.534,00	38,96
	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.859.816.577,00	7.426.686.925,00	13.813442.557,00	8.373.942.721,75	2.564.350.016,00	37,92

No	Neraca Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.486.492.554,50	13.856.732.896,78	19.717.148.141,04	13.672.463.777,19	21.102.659.627,22	21,89
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-				
	Utang Dalam Negeri						
	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.486.492.554,50	13.856.732.896,78	19.717.148.141,04	13.672.463.777,19	21.102.659.627,22	37,31
3.	EKUITAS	2.818.744.767.763,06	3.005.351.687.131,31	3.122.043.629.677,49	3.256.956.976.794,83	3.408.475.178.261,23	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.830.231.260.317,56	3.019.208.420.028,09	3.141.760.777.818,53	3.270.629.440.572,02	3.429.577.837.888,45	1,23

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.3.10. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan:

- a. Rasio lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan Kewajiban Lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Rasio lancar (*Current Ratio*) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan kewajiban lancar Pemerintah Kabupaten Magelang cenderung mengalami fluktuatif. Namun demikian Kabupaten Magelang memiliki rasio diatas 1 dari tahun 2016-2020 artinya Kabupaten Magelang memiliki aset yang sangat lancar untuk melunasi kewajibannya. Untuk mengetahui rincian *Current Ratio* Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.

Current Ratio Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Lancar	Ratio
2016	550.224.444.520	11.486.492.555	47,90
2017	404.074.746.179	13.856.732.897	29,16
2018	314.935.347.535	19.717.148.141	15,97
2019	294.824.172.624	13.672.463.777	21,56
2020*	368.852.667.275	21.102.659.627	17,48

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

- b. Rasio Kas Rasio (*Cash Ratio*) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio kas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Rasio Kas dikatakan aman jika rasionya sebesar 1,0. Kabupaten Magelang memiliki rasio lebih dari 1,0 sehingga dapat dikatakan mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan segera atau menggunakan aset yang likuid yaitu kas. Untuk mengetahui rincian *Cash Ratio* Kabupaten Magelang tahun 2014-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Cash Ratio Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Kas	Investasi Jangka Pendek	Kewajiban Lancar	Ratio
2016	201.125.877.327	260.000.000.000	11.486.492.555	40,15
2017	123.695.427.075	180.000.000.000	13.856.732.897	21,92
2018	142.624.358.745	80.000.000.000	19.717.148.141	11,29
2019	218.893.323.318	0	13.672.463.777	16,01
2020*	287.756.815.657	0	21.102.659.627	13,64

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

- c. Rasio Cepat (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban. Rasio Cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat, semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuatif dengan rata-rata rasio sebesar 33,35. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas keuangan sangat tinggi sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dengan cepat. Untuk mengetahui rincian *Quick Ratio* Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Quick Ratio Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Lancar	Ratio
2016	550.224.444.520	18.400.772.305	11.486.492.555	46,30
2017	404.074.746.179	31.929.665.818	13.856.732.897	26,86
2018	314.935.347.535	21.159.921.153	19.717.148.141	14,90
2019	294.824.172.624	21.411.185.873	13.672.463.777	20,00
2020*	368.852.667.275	26.876.931.761	21.102.659.627	16,21

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.3.11. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 menunjukkan hasil diatas 100% yang artinya kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam memenuhi seluruh kewajibannya masih sangat *solvable*. Untuk mengetahui rincian Rasio Solvabilitas Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15.**Rasio Solvabilitas Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020**

Tahun	Total Aset	Total Kewajiban	Ratio
2016	2.830.231.260.318	11.486.492.555	246,40
2017	3.019.208.420.028	13.856.732.897	217,89
2018	3.141.760.777.819	19.717.148.141	159,34
2019	3.270.629.440.572	13.672.463.777	239,21
2020*	3.429.577.837.888	21.102.659.627	162,52

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.3.12. Rasio Leverage

Rasio Utang (*leverage*) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu Rasio Utang terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio/DER*). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan serapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over-laveraged*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio DER pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 menunjukkan cenderung kecil yaitu dengan rata-rata 0,004 yang menunjukkan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai aktiva atau kekayaan yang tinggi untuk membayar semua kewajibannya dengan modal yang telah dimiliki. Untuk mengetahui rincian DER Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16.**Rasio Leverage Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020**

Tahun	Total Kewajiban	Total Ekuitas	Ratio
2016	11.486.492.555	2.818.744.767.763	0,004
2017	13.856.732.897	3.005.351.687.131	0,005
2018	19.717.148.141	3.122.043.629.677	0,006
2019	13.672.463.777	3.256.956.976.795	0,004
2020*	21.102.659.627	3.408.475.178.261	0,006

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial serta fasilitas umum yang layak.

Mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks.

Tabel 3.17.**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	956.110.167.079	861.915.224.979	842.380.855.906	839.858.835.311	788.379.127.080
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	910.983.738.044	817.421.690.279	792.210.693.534	789.482.091.968	748.446.923.705
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	36.504.536.076	34.262.465.660	37.373.077.655	34.961.110.122	29.822.932.749
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.354.800.000	5.429.950.000	6.814.600.000	9.482.000.000	9.323.200.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	4.267.092.959	4.801.119.040	5.982.484.717	5.933.633.221	786.070.626
B	Belanja Langsung	210.599.409.161	336.969.324.379	392.935.267.710	289.785.399.568	142.867.479.048
1	Belanja Honorarium PNS**)	28.123.088.840	28.511.448.000	26.224.566.450	27.866.429.495	16.941.554.100
2	Belanja Uang Lembur**)	2.769.084.850	3.225.490.750	2.341.380.485	2.013.275.060	1.574.350.800
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	678.000.000	164.600.000	143.500.000	69.600.000	80.550.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3.914.577.619	5.082.933.898	4.039.624.395	5.380.213.843	2.204.008.873
5	Belanja premi asuransi kesehatan	226.256.610	2.808.459.850	5.315.277.800	20.208.530.586	18.374.981.940
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	19.878.497.750	25.010.099.661	27.407.960.045	34.770.420.180	15.979.629.162
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	241.345.225	180.199.000	489.178.400	353.228.000	319.830.000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	692.034.700	719.784.350	947.939.280	827.135.280	283.184.855
9	Belanja perjalanan dinas**)	35.569.084.821	46.660.770.519	43.451.449.528	45.462.451.742	21.314.294.279
10	Belanja perjalanan pindah tugas					
11	Belanja Pemulangan Pegawai					
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	118.507.438.746	224.605.538.351	282.574.391.327	152.834.115.382	65.795.095.039
	TOTAL	1.166.709.576.240	1.198.884.549.358	1.235.316.123.616	1.129.644.234.879	931.246.606.128

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Tabel 3.18.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	TA 2016	1.166.709.576.240	2.126.142.409.332	55%
2	TA 2017	1.198.884.549.358	2.489.466.696.828	48%
3	TA 2018	1.235.316.123.616	2.513.604.232.713	49%
4	TA 2019	1.129.644.234.879	2.578.797.603.007	44%
5	TA 2020	931.246.606.128	2.311.579.917.161	40%

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan namun hanya sebesar 1% dibanding tahun 2017. Berdasarkan persentase belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2016 persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur masih lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan. Sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 persentase belanja untuk pembangunan lebih besar dibanding belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

Selain analisis belanja kebutuhan aparatur, perlu dilihat juga analisis dari belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji, tunjangan pegawai, sewa kantor atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, contoh honorarium guru, tenaga medis, atau belanja sejenis lainnya.

Besar belanja wajib dan mengikat Kabupaten Magelang Tahun 2016 Belanja wajib dan mengikat mencapai 1,029 Triliun rupiah. Belanja wajib dan mengikat tahun 2018 turun menjadi 895,005 miliar rupiah. Penurunan ini antara lain diakibatkan adanya penurunan pengeluaran pembiayaan serta penurunan belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 3.19.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	926.825.774.300	836.715.763.449	814.572.213.788	817.864.151.233	779.404.665.205	7,76
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	910.983.738.044	817.421.690.279	792.210.693.534	789.482.091.968	748.446.923.705	7,36
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.354.800.000	5.429.950.000	6.814.600.000	9.482.000.000	9.323.200.000	12,75
3	Belanja Bunga						
4	Belanja bagi hasil	11.487.236.256	13.864.123.170	15.546.920.254	18.900.059.265	21.634.541.500	219,69
5	Dst..						
B	Belanja Langsung	61.179.663.497	69.075.981.822	80.432.873.310	50.935.157.078	47.447.598.709	9,26
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	37.148.603.310	44.519.767.199	56.579.353.149	25.074.971.495	20.794.650.102	11,34
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	678.000.000	164.600.000	143.500.000	69.600.000	80.550.000	30,08
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	23.353.060.187	24.391.614.623	23.710.020.161	25.790.585.583	26.572.398.607	9,83
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)						
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)						
	Dst ...						
C	Pembiayaan Pengeluaran	41.000.000.000	24.723.542.086	-	-	-	(31,72)
1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	-	-	-	(31,72)
2	Pembayaran pokok utang						
	Dst...						
	TOTAL (A+B+C)	1.029.005.437.797	930.515.287.357	895.005.087.098	868.799.308.311	826.852.263.914	5,87

3.4.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Daerah untuk mengukur kinerja APBD.

3.4.3. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah melakukannya adalah dengan mencari nilai defisit riil anggaran terlebih dahulu dan melihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, Surplus terjadi di tahun 2019 dan 2020 sedangkan tahun 2016 dan 2017, dan tahun 2018 mengalami defisit.

Tabel 3.20.
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.036.310.089.428	2.271.336.015.858	2.304.504.798.038	2.575.439.825.755	2.380.451.972.604
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	2.073.797.409.332	2.451.441.154.742	2.487.849.232.713	2.568.593.603.007	2.304.375.917.161
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	7.204.000.000
A	Surplus/(Defisit) Riil	(89.832.319.904)	(218.130.680.970)	(209.099.434.675)	(3.357.777.252)	68.872.055.443
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	492.803.710.268	457.569.190.778	303.453.312.294	222.173.574.911	218.814.092.659
5.	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.250.988.000	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	321.342.500	20.398.400	-	11.400.000	5.708.000
9.	Penerimaan Piutang Daerah					
10.	Penerimaan Hasil Penarikan					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	547.401.510.682	521.583.993.264	434.704.300.294	222.184.974.911	218.819.800.659
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	457.569.190.778	303.453.312.294	225.604.865.619	218.827.197.659	287.691.856.102

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020*

Defisit anggaran pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sudah dapat ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan tetap bersisa meski sudah digunakan untuk menutup defisit riil. Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.21.
Komposisi Penutup Defisit Riil (%) Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	548,58	209,77	145,12	101,53	76,06
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,60	0,29	62,77	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	1,00	1,00	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,36	0,01	-	0,01	0,01
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Hasil Penarikan Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.4.4. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan.

3.4.5 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran, dilakukan analisis terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.22.**Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Saldo kas neraca daerah	201.125.877.327	123.695.427.075	142.624.358.745	218.893.323.318	283.010.815.657
	Dikurangi:					
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	147.519.304	43.739.378	83.677.869	27.729.246	325.903.478
3.	Kegiatan lanjutan	133.276.911.825	135.397.608.000			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	67.701.446.198	-11.745.920.303	142.540.680.876	218.865.594.072	282.684.912.179

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

3.5. Kerangka Pendanaan

3.5.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2024

Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014-2020 mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pada tahun 2021 akan dilaksanakan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sesuai rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan adanya kondisi lingkungan strategi khususnya dampak pandemi *Covid-19* pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pada tanggal 6 Maret 2019 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat perbedaan kebijakan pengelolaan keuangan dan struktur kerangka pendanaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka Kabupaten Magelang Tahun 2020 sampai Tahun 2024 memproyeksikan pendapatan dan belanjanya mendasari peraturan terbaru.

Mendasarkan pada capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2014-2020, maka pendapatan daerah tahun 2021-2024 diharapkan dapat semakin meningkat. Kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Propinsi, SKPD Penghasil, BPKP maupun KP Pratama;
3. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi baik langsung maupun lewat media massa;
5. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan pajak daerah dari sisi basis pajaknya seperti NJOP PBB P2;
6. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

8. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
9. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
10. Perbaikan kualitas data base perpajakan dan pemungutan serta pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-PBB, e-SPTPD, e-BPHTB, e-MBLB, e-retribusi), serta pemasangan alat monitoring omzet pajak daerah seperti *tapping box*);
11. Pengintegrasian aplikasi pengelola pajak dan retribusi daerah dengan aplikasi yang terkait seperti *host to host* dengan Bank Jateng, BPN, KP Pratama, DPMPTSP.

Asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi pembentuk komponen Pendapatan Daerah dari Tahun 2021 - 2024

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Pajak dan Retribusi Daerah

Asumsi yang mendasari Proyeksi Tahun 2021 dan 2022 adalah sesuai dengan potensi dengan mempertimbangkan dampak Pandemi covid-19 terhadap perekonomian yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 saat Pandemi Covid-19, sedangkan proyeksi Tahun 2023 dan 2024 dengan asumsi perekonomian sudah normal dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan sektor ekonomi yang mempengaruhi jenis Pajak dan Retribusi Daerah.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Asumsi yang mendasari proyeksi Tahun 2021-2024 adalah sesuai dengan hasil rapat pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yang berpengaruh terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Asumsi yang mendasari Proyeksi Tahun 2021 – 2024 adalah data potensi aset yang dimiliki baik yang masih produktif atau yang sudah tidak produktif, pertumbuhan rasio BLUD saat pandemi Covid-19 dan atau sebelum Pandemi Covid-19 serta memperkirakan perkiraan suku bunga.

b. Pendapatan Transfer :

- 1) Proyeksi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 mendasari Surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya sedangkan proyeksi 2022 – 2024 adalah menggunakan realisasi rata-

rata pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir.

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, DID untuk Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021 mendasari Surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya. Proyeksi untuk Tahun 2022 sampai dengan 2024 sesuai dengan alokasi pada Tahun 2021.
 - 3) Pendapatan Transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat pada Komponen DAK Non Fisik Tahun 2021 mendasari Surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya. Juga mempertimbangkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan yaitu terdapat SiLPA sebesar Rp. 14.328.540.651,- atas LPP APBD tahun 2020 yang harus diperhitungkan kembali pada pada Tahun 202, sedangkan untuk Tahun 2022 sampai dengan 2024 sesuai dengan alokasi pada Tahun 2021.
 - 4) Transfer Antar Daerah :
Proyeksi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 sesuai SK Gubernur Tahun 2020 Tentang Alokasi 2021 sedangkan proyeksi Tahun 2022-2024 mendasari rata-rata pertumbuhan target Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten / Kota pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah
- 1) Hibah
Proyeksi Hibah dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 mendasari pada MOU antara Bupati Magelang dengan Kementerian Pertanian (Kementan) tentang pengelolaan dan memanfaatkan dana hibah dari *IsDB (Islamic Development Bank)* dan *IFAD (International Fund for Agricultural Development)* dalam pembangunan pertanian yang komprehensif berupa proyek Upland.
 - 2) Dana BOS
Proyeksi Dana BOS dari Tahun 2022 -2024 sesuai dengan alokasi pada Tahun 2021.

Belanja Daerah tahun 2021–2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi mendatang serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan guna mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19*

di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Proyeksi Belanja Tahun 2021 mengalami perubahan dan *refocusing* akibat adanya Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Adanya Peraturan tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 3,20%, dan penggunaannya untuk penanganan *Covid-19* sebesar minimal 8%;
2. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 2,50%;
3. Penggunaan DAK Fisik berpedoman pada dokumen rencana kegiatan dan juknis, dalam hal menu/kegiatan DAK Fisik belum dikontraskan, pelaksanaan DAK Fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal;
4. Dana Insentif Daerah (DID) digunakan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan penguatan perekonomian daerah;
5. Ketentuan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah;
6. DBHCHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBHCHT;

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021–2024 diarahkan untuk :

- a. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mengutamakan penyediaan Anggaran untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan;
- e. Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan Nomor 206/PMK.07/2020 untuk Program Pemulihan Ekonomi dan Kebutuhan Penanganan *Covid-19*.

Kebijakan Belanja Daerah terkait dengan Belanja Operasi antara lain:

1. Belanja Pegawai
Pada Tahun Anggaran 2022 - 2024 belanja pegawai mengalami kenaikan karena adanya kebijakan alokasi anggaran untuk Gaji PPPK, Gaji CPNS, dan Rencana kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta adanya pergeseran anggaran belanja pegawai bantuan operasional sekolah (BOS)

2. Belanja Barang dan Jasa

Pada Tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan disebabkan adanya rasionalisasi alokasi belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas, penyesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Jasa Konsultan untuk dialihkan ke dalam rekening Belanja Modal

3. Belanja Hibah

Pada Tahun 2022-2024 belanja hibah mengalami penurunan dikarenakan adanya pergeseran alokasi anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pindah ke Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial pada tahun 2022-2024 mengalami kenaikan dikarenakan adanya kenaikan alokasi anggaran untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kebijakan Belanja Daerah terkait Belanja Modal diasumsikan karena penyesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Jasa Konsultan untuk dialihkan ke dalam rekening Belanja Modal dan pergeseran dari belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan Belanja Daerah terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan BTT sebesar BTT APBD Tahun 2021 ditambah 5% dari BTT APBD Tahun Anggaran 2021, sedangkan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 mengalami penurunan diasumsikan hanya mengalokasikan BTT Reguler dan Bantuan Sosial tidak terencana. Kebijakan Belanja Daerah terkait Belanja Transfer untuk Tahun 2022-2024 antara lain Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dialokasikan naik sebanding dengan kenaikan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Pembiayaan Tahun 2021-2024 antara lain sebagai berikut:

1. SiLPA Tahun 2021 merupakan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan asumsi SiLPA Tahun 2022-2024 sebesar 5% dari belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun sebelumnya;
2. Tahun 2024 mengalokasikan pencairan dana cadangan untuk dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
3. Pengeluaran Pembiayaan mengalokasikan pembentukan dana cadangan pada tahun 2021-2023 untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;
4. Mengalokasikan Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Tahun 2021-2024.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024 merupakan angka optimal yang berdasarkan atas asumsi dan

trend rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021– 2024 pada Perubahan RPJMD mengalami perbedaan di struktur postur pendapatan daerah dan belanja daerah dikarenakan perubahan peraturan yang mempedomani penyusunan APBD. Tabel 3.21 menjelaskan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2021-2024.

Tabel 3.23.
Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021-2024 pada Perubahan RPJMD 2019-2024

NO	URAIAN	PROYEKSI PERUBAHAN 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	2.468.095.584.817	2.440.920.608.359	2.534.277.740.359	2.588.084.722.284
A	Pendapatan Asli Daerah	357.421.620.890	352.421.620.890	424.421.620.890	483.840.647.815
1	Pajak Daerah	112.347.877.076	120.827.282.454	161.822.957.906	167.849.077.763
2	Retribusi Daerah	15.676.434.886	24.414.190.110	30.925.190.014	32.104.775.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.715.782.928	29.084.407.273	30.239.029.928	31.134.481.017
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	202.681.526.000	178.095.741.053	201.434.443.042	252.752.314.196
B	Pendapatan Transfer	1.996.404.363.927	1.973.979.387.469	1.992.768.919.469	2.006.650.274.469
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.810.903.420.349	1.795.749.287.469	1.795.749.287.469	1.795.749.287.469
a	Dana Perimbangan	1.391.916.735.349	1.404.705.178.469	1.404.705.178.469	1.404.705.178.469
-	Dana Transfer Umum	1.009.571.985.000	1.008.031.887.469	1.008.031.887.469	1.008.031.887.469
1)	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.554.688.000	33.014.590.469	33.014.590.469	33.014.590.469
2)	Dana Alokasi Umum	975.017.297.000	975.017.297.000	975.017.297.000	975.017.297.000
-	Dana Transfer Khusus	382.344.750.349	396.673.291.000	396.673.291.000	396.673.291.000

NO	URAIAN	PROYEKSI PERUBAHAN 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1)	DAK Fisik	146.978.657.000	146.978.657.000	146.978.657.000	146.978.657.000
2)	DAK Non Fisik	235.366.093.349	249.694.634.000	249.694.634.000	249.694.634.000
b	Dana Insentif Daerah (DID)	27.942.576.000	-	-	-
c	Dana Desa	391.044.109.000	391.044.109.000	391.044.109.000	391.044.109.000
2	Transfer Pemerintah Daerah	185.500.943.578	178.230.100.000	197.019.632.000	210.900.987.000
a	Pendapatan Bagi Hasil	168.798.943.578	178.230.100.000	197.019.632.000	210.900.987.000
b	Bantuan Keuangan	16.702.000.000	-	-	-
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	114.269.600.000	114.519.600.000	117.087.200.000	97.593.800.000
1	Pendapatan Hibah	21.675.800.000	21.925.800.000	24.493.400.000	5.000.000.000
2	Dana Darurat	-	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000
2	BELANJA DAERAH	2.740.083.440.920	2.532.903.276.124	2.528.751.853.379	2.678.280.673.350
A	Belanja Operasi	1.745.176.107.816	1.520.599.080.644	1.618.026.436.403	1.754.981.854.007
1	Belanja Pegawai	991.783.224.268	1.129.295.669.248	1.168.771.256.248	1.223.419.883.711
2	Belanja Barang dan Jasa	637.941.628.522	273.215.388.196	236.005.756.955	337.805.947.096
3	Belanja Bunga	0	0	0	0

NO	URAIAN	PROYEKSI PERUBAHAN 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
5	Belanja Hibah	103.977.891.200	76.379.238.200	171.540.638.200	152.047.238.200
6	Belanja Bantuan Sosial	11.473.363.826	41.708.785.000	41.708.785.000	41.708.785.000
B	Belanja Modal	278.148.201.914	264.413.541.358	251.622.254.832	263.475.086.731
C	Belanja Tidak Terduga	74.895.309.115	102.188.159.514	8.650.000.000	8.650.000.000
D	Belanja Transfer	641.863.822.075	645.702.494.608	650.453.162.144	651.173.732.612
1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kab/Kota/Desa	13.219.497.782	14.745.647.256	19.496.314.792	20.216.885.260
2	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	628.644.324.293	630.956.847.352	630.956.847.352	630.956.847.352
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.740.083.440.920	2.532.903.276.124	2.528.751.853.379	2.678.280.673.350
	Surplus/Defisit	(271.987.856.102)	(91.982.667.765)	5.525.886.980	(90.195.951.066)
3	PEMBIYAAAN DAERAH				
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	287.691.856.120	120.482.667.765	27.974.113.020	93.695.951.066
1	SiLPA	287.691.856.120	120.482.667.765	27.974.113.020	28.695.951.066
2	Pencairan Dana Cadangan			0	65.000.000.000
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAAN	287.691.856.102	120.482.667.765	27.974.113.020	93.695.951.066
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.704.000.000	28.500.000.000	33.500.000.000	3.500.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	-

NO	URAIAN	PROYEKSI PERUBAHAN 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
3	Pembayaran pokok utang				
4	Pemberian pinjaman daerah				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.704.000.000	28.500.000.000	33.500.000.000	3.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	271.987.856.102	91.982.667.765	(5.525.886.980)	90.195.951.066
	Total APBD	3.012.071.297.022	2.624.885.943.889	2.523.225.966.399	2.768.476.624.416
	SiLPA Tahun Berkenaan				

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.5.2. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 3.24.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	2.468.095.584.818	2.440.920.608.359	2.534.277.740.359	2.588.084.722.284
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	65.000.000.000
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SilPA)	287.691.855.626	120.482.667.765	27.974.113.020	28.695.951.066
	Total Penerimaan	2.755.787.440.444	2.561.403.276.124	2.562.251.853.379	2.681.780.673.350
	Dikurangi				
4	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	873.995.439.938	1.027.567.315.035	1.041.646.225.981	1.053.722.626.697
5	Pengeluaran Pembiayaan	15.704.000.000	28.500.000.000	33.500.000.000	3.500.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	1.866.088.000.506	1.505.335.961.089	1.487.105.627.398	1.624.558.046.653

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Berdasarkan tabel kemampuan riil keuangan daerah selama lima tahun kedepan tersebut, diperoleh proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang dialokasikan untuk:

- a. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan;
- e. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan.

Berikut ini proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama lima tahun mendatang.

Tabel 3.25.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.866.088.000.506	1.505.335.961.089	1.487.105.627.398	1.624.558.046.653
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	1.179.504.485.343	696.271.521.324	650.041.499.080	764.600.504.079
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH dan Prioritas Pembangunan Daerah	987.191.585.921	445.035.129.554	487.592.599.288	536.431.033.819
1	Bantuan Hibah BOS	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000
	Hibah KPU dan Bawaslu (Pilkada)				65.000.000.000
2	Bantuan Sosial :	10.906.930.350	41.708.785.000	41.708.785.000	41.708.785.000
3	Belanja Bagi Hasil Kepada prov /Kab/Kota	13.916.859.958	14.745.647.256	19.496.314.792	20.216.885.260
4	Belanja Bunga Obligasi	-	-	-	-
5	Belanja Tidak Terduga	74.895.309.114	102.188.159.514	8.650.000.000	8.650.000.000
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	686.583.515.163	809.064.439.765	837.064.128.318	859.957.542.574
1	Tambahan Penghasilan	62.611.061.070	101.728.354.213	127.160.442.766	169.547.257.022
2	Bantuan Hibah :				
	Hibah Lainnya	7.713.241.200	76.379.238.200	78.946.838.200	59.453.438.200
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa	616.259.212.893	630.956.847.352	630.956.847.352	630.956.847.352
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Lingkungan Strategis

4.1.1 Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi tantangan bagi pembangunan Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2024 antara lain:

A. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Kejadian bencana non alam berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pertama kali ditemukan kasusnya di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Pandemi ini kemudian meluas ke berbagai negara sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan global hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat di penjuru dunia. Pada perekonomian global, bank dunia memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akan mengalami pertumbuhan negatif mencapai 5,2% sedangkan IMF memprediksikan bahwa kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 4,9%.

Dampak pandemi *Covid-19* juga mempengaruhi kenaikan kemiskinan secara global dan peningkatan kebutuhan akan ketersediaan pangan. *United Nation* mengatakan bahwa 71 juta orang masuk ke dalam jurang kemiskinan di tahun 2020, sedangkan *Food and Agriculture Organization* memprediksi sebanyak 132 juta orang kelaparan sampai dengan akhir tahun 2020.

Ketidaksiapan masyarakat dunia terhadap ancaman *Covid-19* terlihat dengan adanya respon panik masyarakat dengan terjadinya *panic buying*. Pada saat meluasnya *Covid-19* dan awal pemberlakuan pembatasan sosial skala besar/*lock down*, masyarakat secara berbondong-bondong memborong bahan kebutuhan pokok untuk ditimbun sebagai bahan persediaan. Hal ini tentunya memperparah kondisi perekonomian dengan adanya kelangkaan dan meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok.

Pandemi *Covid-19* tidak hanya menimbulkan dampak sepanjang tahun 2020, ke depan dampak ekonomi maupun sosial masih akan tetap dirasakan meskipun tidak sebesar yang dialami di tahun 2020. Dengan adanya penemuan vaksin untuk *Covid-19* maka dampak yang dialami tahun 2021 akan dapat diredam dan berganti fokus pada pemulihan ekonomi.

Berkenaan dengan pemulihan ekonomi global, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pada tahun 2021 perekonomian dunia akan menguat hingga mengalami pertumbuhan hingga 4%. Namun demikian, menurut lembaga internasional tersebut, kinerja perekonomian di tahun 2021 ini masih lebih rendah dari proyeksi sebelum pandemi yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5%. Meskipun terjadi pemulihan ekonomi mulai tahun 2021, namun prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian. Kunci

utama agar pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal adalah proses vaksinasi dan penanganan pandemi *Covid-19* secara efektif. Perlu gerakan serentak untuk melawan penyebaran *Covid-19* secara global sehingga perekonomian dunia dapat berjalan normal kembali.

B. Perkembangan Teknologi Informasi yang Sangat Cepat dan Menembus Batas-Batas Negara

Teknologi informasi pada era globalisasi, terlebih dalam masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung interaksi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan tatatan sosial dan ekonomi memaksa masyarakat untuk bertransformasi dan membiasakan diri dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bahkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu strategi untuk dapat bertahan menghadapi dampak pandemi *Covid-19*. Kemampuan teknologi mengintegrasikan tradisi perdagangan dengan pemasaran berbasis *online* menjadikan perdagangan semakin pesat berkembang dan bersifat lebih universal tidak terbatas spasial dan temporal.

Menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, perlu diantisipasi dengan mempersiapkan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan mentransformasikannya menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di tengah terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan dilaksanakannya pembatasan pergerakan manusia, maka penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi. Teknologi informasi dapat memberikan kemudahan, efisiensi waktu, biaya serta tenaga. Namun demikian, hal ini mengandung konsekuensi bahwa tanpa disadari masyarakat sudah mengalami ketergantungan terhadap teknologi informasi.

Lebih lanjut dengan dimulainya era industri 4.0 yaitu industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet, dan cetak tiga dimensi, maka hal ini menjadi tantangan ke depan yang harus dihadapi. Penerapan teknologi pada sektor industri akan mengurangi keterlibatan tenaga manusia dalam sistem produksi. Perlu strategi mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan adaptif terhadap teknologi serta perlu juga dipersiapkan lapangan usaha lain di luar sektor industri.

4.1.2 Lingkungan Nasional

Setidaknya terdapat empat hal berkenaan dengan kondisi lingkungan nasional yang akan mempengaruhi perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang. Pertama adalah pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional akibat dampak pandemi *Covid-19*, kedua adalah arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) yang berkaitan dengan Kabupaten Magelang, ketiga adalah rencana pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di Kabupaten Magelang, dan keempat adalah isu strategis nasional yang tertuan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

A. Pemulihan Kondisi Kesehatan Masyarakat dan Perekonomian Nasional Akibat Dampak Pandemi *Covid-19*.

Sejak awal ditemukannya kasus *Covid-19* di Indonesia yang kemudian berlangsung menjadi pandemi selama tahun 2020 hingga sekarang, *Covid-19* telah membawa dampak yang sangat besar hampir di seluruh aspek kehidupan terutama di sektor kesehatan dan perekonomian. Di sektor kesehatan, berdasarkan data nasional sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 pandemi *Covid-19* telah menyebabkan 1.353.834 orang terkonfirmasi *Covid-19* dan 36.721 orang diantaranya meninggal dunia. Penanganan di sektor kesehatan terus diupayakan bahkan telah ditetapkan untuk mendapat prioritas anggaran di samping pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*, mulai tahun 2021 dilaksanakan vaksinasi secara nasional yang membutuhkan biaya besar baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Perlu pengalokasian anggaran yang cukup di tengah-tengah keterbatasan keuangan untuk dapat menyukseskan vaksinasi tersebut secara nasional.

Pada sektor ekonomi, pandemi *Covid-19* juga membawa dampak yang tidak kalah besar dibanding dengan dampak di sektor kesehatan. Awalnya, pandemi *Covid-19* mengakibatkan terjadinya kontraksi pada sisi eksternal berupa kenaikan jumlah komoditas impor dari China. Namun seiring dengan perkembangan kejadian *pandemi Covid-19* yang semakin meluas dan cepat, stabilitas perekonomian nasional ikut terganggu sepanjang tahun 2020. Nilai tukar rupiah turut melemah, sementara pasar bursa pun terkena dampaknya dengan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata yang menjadi penggerak perekonomian nasional justru menjadi sektor yang paling terdampak pandemi *Covid-19*. Terjadinya pengurangan tenaga kerja akibat PHK dan ditutupnya destinasi wisata menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Dampak ekonomi lainnya yang dialami adalah melemahnya berbagai sektor ekonomi yang kemudian mengoreksi pertumbuhan ekonomi nasional hingga angka -2,07% pada tahun 2020.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah kemudian menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional sekaligus menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian di ubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020. Adapun fokus dari program PEN ini adalah pada belanja kesehatan, jaring pengaman

sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pada tahun 2021, program PEN masih menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Selaras dengan hal itu, penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah harus menyesuaikan dengan arahan dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

B. Arahan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Di dalam RTRWN, arahan pemanfaatan ruang yang terkait dengan Kabupaten Magelang dan menjadi salah satu isu strategis adalah arahan rencana pembangunan jalan bebas hambatan (tol) antara kota Yogyakarta–Bawen. Selain jalan tol, pembangunan bandar udara baru *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan revitalisasi kereta api Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Magelang. Salah satu wilayah yang terkena dampak pembangunan bandara Kulon Progo adalah Kabupaten Magelang yang merupakan lokasi KSPN Borobudur. Dampak terbesar dari adanya bandara Kulon Progo atau YIA bagi Kabupaten Magelang adalah kesiapan terhadap penyediaan layanan infrastruktur yang menghubungkan bandara dengan kawasan Borobudur.

Kabupaten Magelang dalam arahan pemanfaatan ruang RTRWN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, yakni Kawasan Borobudur dan sekitarnya serta Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dalam kaitan dengan pembangunan daerah, meskipun Candi Borobudur dan Gunung Merapi berada di wilayah Kabupaten Magelang, akan tetapi pengelolaan kedua kawasan tersebut sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Kabupaten Magelang hanya dapat memanfaatkan peluang pengelolaan untuk pembangunan yang berada di luar kewenangan pemerintah pusat.

Kabupaten Magelang juga memiliki kewajiban menjaga dan memelihara Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional. Selain itu, Kabupaten Magelang wajib menjalin kerja sama dengan DIY dan Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait pemanfaatan sungai sebagai sumber daya air karena dalam RTRWN ditetapkan wilayah Sungai Progo-Opak-Serang yang melintasi Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

C. Rencana Pelaksanaan Proyek-Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Magelang

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional guna meningkatkan daya saing daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi

daerah maupun nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi ini dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membagi wilayah Jawa Tengah menjadi 3 kawasan yaitu:

1. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal, Kota Semarang, Semarang, Kota Salatiga, Demak, Grobogan;
2. Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Temanggung; dan
3. Kawasan Bergasmalang yang terdiri atas Brebes, Kota Tegal, Tegal, dan Pemasang.

Kabupaten Magelang termasuk dalam kawasan Purwomanggung dengan *quick win* pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Sebagai mahakarya budaya dunia, KSPN Borobudur diharapkan menjadi magnet daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang mampu menjadi pengungkit pengembangan potensi bagi kawasan sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan hal itu, perlu strategi penguatan konektivitas yang mampu menghubungkan infrastruktur dengan sentra produksi ekonomi. Penguatan konektivitas infrastruktur telah diimplementasikan melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk di Kabupaten Magelang. Untuk kawasan Purwomanggung terdapat 35 usulan program/kegiatan PSN, diantaranya sebanyak 15 program/kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Total estimasi biaya investasi yang diperlukan untuk pelaksanaan 15 program/kegiatan PSN di Kabupaten Magelang adalah sebesar 33,852 T. Secara rinci usulan program/kegiatan PSN yang lokasinya terdapat di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Usulan Program/Kegiatan Proyek Strategis Nasional
di Kabupaten Magelang

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	APBN
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana
1	2	3	4
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/Museum Widayat/ Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN

Sumber: Perpres Nomor 79 Tahun 2019

Keberhasilan pelaksanaan PSN di atas membutuhkan peran serta dan sinergi dari segenap pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Magelang. Tidak terkecuali juga peran swasta dan masyarakat. Terkait dengan peran pemerintah daerah, dengan ditetapkannya 15 program/kegiatan PSN maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus menindaklanjuti dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan dukungannya yang dapat berupa kesiapan lahan, studi kelayakan, *Detailed Engineering Design*, maupun ijin lingkungan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mempersiapkan strategi untuk dapat menangkap manfaat dari pembangunan PSN tersebut.

D. Isu Strategis Nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Selain tiga kondisi lingkungan strategis nasional sebagaimana sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, terdapat isu-isu strategis nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Isu-isu strategis nasional tersebut dikelompokkan ke dalam 7 agenda

pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan akan mempengaruhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan isu strategis:
 - a. Keberlanjutan sumber daya alam;
 - b. Efektifitas tata kelola sumber daya ekonomi;
 - c. Transformasi struktural berjalan lambat;
 - d. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan isu strategis masih adanya ketimpangan antar wilayah.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan isu strategis:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - c. Pemenuhan layanan dasar;
 - d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - e. Pengentasan kemiskinan;
 - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan isu strategis:
 - a. Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
 - b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
 - c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti;
 - d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
 - e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan;
 - f. Belum optimalnya peran keluarga;
 - g. Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan isu strategis:
 - a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau;
 - b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - c. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - d. Keselamatan dan keamanan transportasi;
 - e. Ketahanan kebencanaan infrastruktur;
 - f. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
 - g. Konektivitas jalan;
 - h. Konektivitas kereta api;
 - i. Konektivitas laut;
 - j. Konektivitas darat;
 - k. Transportasi perkotaan;
 - l. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan;

- m. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - n. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan;
 - o. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan;
 - p. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - q. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan;
 - r. Kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - s. Penuntasan infrastruktur TIK;
 - t. Pemanfaatan infrastruktur TIK;
 - u. Fasilitas pendukung transformasi digital;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan isu strategis:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Depleksi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup;
 - c. Meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. Tingginya risiko bencana di Indonesia;
 - e. Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah;
 - f. Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK melalui pembangunan rendah karbon;
 - g. Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan isu strategis:
- a. Demokrasi prosedural;
 - b. Tidak meratanya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dan kejahatan transnasional;
 - d. Masih adanya perilaku koruptif dan penegakan hukum yang belum optimal.

4.1.3 Lingkungan Provinsi

Lingkungan strategis provinsi sangat penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun ke depan. Pembangunan di kabupaten sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai representasi dari pemerintah pusat. Adapun isu Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan yang akan berpengaruh terhadap Kabupaten Magelang sebagai berikut:

A. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses

pelayanan dasar (*basic needs access*), meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, listrik, dan kesehatan, serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Kelemahan tersebut ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Selain itu, kondisi pandemi *Covid-19* juga berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu menimbulkan kerentanan baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan tersebut adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah (desil 1-4) dan masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap setiap bulannya, yaitu didominasi oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek, dan lain sebagainya. Tekanan ekonomi global yang ditunjukkan dengan adanya tekanan dari sektor produksi akibat ketergantungan industri pada bahan baku impor dan turunnya permintaan ekspor pada masa pandemi kemudian diikuti dengan rasionalisasi jumlah tenaga kerja. Akibatnya sebagian kelompok masyarakat yang semula berada pada kelompok rentan miskin kemudian menjadi masuk dalam kelompok masyarakat miskin (bergeser dari desil 5-6 ke desil 1-4).

Berbagai kondisi tersebut diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Jawa Tengah. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan menjadi 6,48 persen di bulan Agustus. Angka kemiskinan meningkat menjadi 11,41 persen pada periode Maret 2020, dan diperkirakan menjadi 13,40-12,30 persen pada periode September 2020.

B. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jawa Tengah

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari 71,73 pada tahun 2019 menjadi 71,87 di tahun 2020. Namun, apabila dilihat capaian dari masing-masing komponen pembentuk IPM, yaitu komponen pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah/RLS dan Harapan Lama Sekolah/HLS), komponen standar hidup layak (pengeluaran per kapita), dan komponen kesehatan (Umur Harapan Hidup/UHH), hanya komponen kesehatan saja yang telah melampaui nasional. Hal tersebut menyiratkan bahwa sektor pendidikan dan sektor perekonomian merupakan sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar lagi dari pemerintah.

Isu pendidikan yang penting diperhatikan adalah sistem pendidikan yang dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal lain yang penting diperhatikan dalam aspek pendidikan, yaitu pemerataan layanan pendidikan, baik dari sisi ketersediaan sekolah dan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maupun ketersediaan guru dan tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter.

Isu lain berkaitan dengan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana proporsi jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Di masa mendatang, sebagai dampak dari bonus demografi tersebut adalah struktur penduduk memasuki masa penuaan penduduk (*population ageing*), dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya (mencapai 10 persen). Apabila penuaan penduduk tersebut disertai pula dengan peningkatan rasio dependensi, maka akan berdampak pada bertambahnya beban pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia secara sinergis, antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (*senescent diseases*) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (*savings*) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.

Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Paradigma pembangunan kesehatan yang selama ini mengarah pada tindakan kuratif, ke depan akan bergeser menjadi tindakan *preventif* dan *promotif*. karena mempertimbangkan gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi dan tren peningkatan penyakit katastropik yang berdampak pada semakin besarnya beban pembiayaan jaminan kesehatan. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembelajaran yang diperoleh dari pandemi Covid-19 adalah perlunya dilakukan penguatan sistem kesehatan daerah melalui pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan (*health security*), penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Ancaman lain yang hingga saat ini terus merongrong kualitas sumber daya manusia adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa dan sendi “ke-Bhinneka Tunggal Ika-an”, banyaknya kasus kekerasan

yang dilatarbelakangi oleh paham radikalisme dan terorisme, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA.

Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan Jawa Tengah melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak, dan perilaku masyarakat.

C. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun karena terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Tengah di tahun 2020 mengalami kontraksi, termasuk pada sektor unggulan (industri pengolahan, perdagangan dan jasa), kecuali sektor pertanian yang masih tumbuh positif sampai triwulan 3. Beberapa kondisi yang akan dihadapi ke depan antara lain sebagai berikut.

1) Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Namun demikian, kondisinya saat ini industri yang berkembang masih didominasi oleh industri padat karya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Di sisi lain, perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang menggabungkan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi).

Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75 persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat

menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi, sarana dan prasarana industri yang memadai, sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta kesiapterapan teknologi merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk mengembangkan perindustrian di Jawa Tengah.

2) Sektor Perdagangan dan Jasa

Salah satu sektor unggulan Jawa Tengah lainnya adalah perdagangan dan jasa, yang meskipun trennya dari tahun ke tahun meningkat namun masih menghadapi persoalan berupa neraca perdagangan defisit, dimana impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Penyebabnya antara lain rendahnya ekspor antar daerah dan pasar ekspor yang masih terbatas pada pangsa pasar konvensional.

Selain itu, sektor produksi didominasi oleh industri skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki keterbatasan teknologi akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha. Tren pengembangan *e-commerce* juga belum dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan *e-commerce* tersebut secara optimal.

Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong agar menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Di sektor pariwisata perlu didorong upaya untuk menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumber daya manusia. Pengembangan pariwisata perlu mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Jawa Tengah, untuk dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah mestinya ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*Eco-Socio Tourism*) dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan, laut, sungai, karst, danau, dan pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata. Pengembangan pariwisata perlu didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku wisata.

3) Sektor Pertanian

Sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor unggulan dan penyumbang PDRB ketiga terbesar di Jawa Tengah, menghadapi persoalan berupa menurunnya kontribusi terhadap PDRB, semakin berkurangnya minat angkatan kerja untuk menekuni bidang pertanian, dan semakin terbatasnya lahan pertanian karena

banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri. Persoalan sektor pertanian sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan. Hal tersebut dikarenakan pertama, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian, walaupun jumlahnya cenderung semakin menurun dan yang tersisa adalah petani usia tua. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi, transportasi, dan komunikasi belum memadai. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar. Sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar.

Satu tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.

4) Investasi

Tingkat pertumbuhan investasi di Jawa Tengah belum cukup tinggi walaupun realisasi investasinya membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah belum optimalnya kecepatan pelayanan perizinan, promosi investasi, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi, penggunaan teknologi, dan pelayanan birokrasi yang belum efisien. Selain itu juga, pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata di Jawa Tengah, khususnya di wilayah perbatasan barat dan timur, serta wilayah selatan.

Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Namun demikian, persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah didominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain.

Maka, tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global. Membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api antar kota), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, termasuk proyek strategis nasional, karena adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19. Tertundanya pembangunan tersebut juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor infrastruktur.

D. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah

Dampak perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor, dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan implementasi konsep pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini selaras dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dimana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut, dan pemeliharaan ekosistem darat. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/*catchment area*, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Hal tersebut diperparah juga dengan peningkatan pencemaran limbah industri yang disebabkan karena belum optimalnya penanganan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, baik dari cakupan wilayah, pengadaan lahan, biaya operasional, pemeliharaan, dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha (masyarakat/industri) dalam pengelolaan limbah.

Masih maraknya kegiatan pertambangan yang belum menerapkan *good mining practice* berpotensi dapat merusak lahan, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait perizinan dan pembinaan/pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya,

pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir, dan konflik sosial terkait alih fungsi lahan.

Dikaitkan dengan isu kebencanaan kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan wilayah melalui pembentukan pusat pertumbuhan baru dan implementasi proyek strategis nasional perlu didukung dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana terhadap hasil-hasil pembangunan serta untuk menghindari potensi hambatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

E. Kedaulatan Pangan dan Energi

Secara statistik, perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya, seperti kedelai dan jagung yang masih harus ditingkatkan ke depan. Di sisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Menyempitnya lahan pertanian (LP2B) karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menyebabkan menurunnya persediaan dan produksi pangan.

Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat juga masih menjadi isu penting dalam kedaulatan pangan. Melihat skor Pola Pangan Harapan di bawah angka 100 dan cakupan konsumsi masyarakat Jawa Tengah tertinggi adalah beras, dapat digambarkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah belum beragam. Hal tersebut berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya yang memiliki ketergantungan pada beras. Mutu dan keamanan pangan juga harus tetap diperhatikan karena saat ini mulai banyak ditemukan produk pangan yang diindikasikan tidak terjamin mutu dan keamanannya. Satu tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi yang menunjukkan pentingnya ketersediaan energi guna menunjang dinamika pembangunan, dimana kebutuhan masyarakat akan energi terus mengalami peningkatan sedangkan pemakaian energinya cenderung masih bergantung pada sumber energi fosil. Tantangan pemenuhan

energi di Jawa Tengah, terutama bagi kegiatan industri, dihadapi dengan penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi utamanya terkait jaringan listrik dan jaringan gas, serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Budaya hemat energi di masyarakat juga masih perlu digalakkan lagi. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong gerakan budaya hemat energi telah dilakukan dengan gerakan budaya hemat energi dan pengembangan desa mandiri energi.

F. Kesenjangan wilayah

Perkembangan wilayah di Jawa Tengah hingga saat ini belumlah merata. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 di tahun 2019. Selain itu, pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Untuk itu, membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian/integrasi antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting.

Untuk mendukung perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga diperlukan pengembangan infrastruktur perhubungan, antara lain meliputi pengembangan pelabuhan di wilayah utara Jawa Tengah, dan pengembangan pelabuhan di selatan Jawa yang dilengkapi dengan kapal logistik ke Indonesia Bagian Timur, serta pengembangan bandara sebagai *hub/transit* internasional.

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, diantaranya dapat berbentuk ketersediaan ruang pengaduan masyarakat yang terbuka. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Sehingga pengembangan teknologi dan inovasi pelayanan publik menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang kompeten, progresif, dan adaptif,

serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan. Hal tersebut didukung dengan penempatan talenta ASN yang tepat pada jabatannya. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi birokrasi agar efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan dan hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka penyederhanaan organisasi. Tantangan lain dalam implementasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah adalah penerapan *dynamic governance* agar pemerintah daerah dapat bertindak lebih progresif dan adaptif dalam penanganan berbagai persoalan pembangunan daerah dari sudut pandang lintas sektor.

Kondisi pandemi *Covid-19* juga memberikan dampak bagi aspek tata kelola pemerintahan, diantaranya merubah tata kelola, pola, dan sistem kerja birokrasi. Pemberlakuan *work from home* menuntut optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi dalam bekerja (digitalisasi tata kelola). Pelayanan publik, rapat/pertemuan, pembelajaran pendidikan dan pelatihan secara *online*, serta tata naskah dinas elektronik menjadi hal yang harus dioptimalkan dalam pola kerja birokrasi di Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kerja, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

4.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, ini memunculkan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab 2, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

4.2.1 Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah yang lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional (Tahun 2020: Kabupaten Magelang 12,54, Provinsi Jawa Tengah: 12,70 dan nasional: 12,70), Rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari nasional (Tahun 2020: Kabupaten Magelang 7,78, Provinsi Jawa Tengah 7,69 dan nasional 8,4) dan pencapaian nilai akreditasi sekolah PAUD, SD dan SMP yang berakreditasi minimal B belum mencapai 100%.

Pembangunan pendidikan didukung oleh banyak urusan, diantaranya adalah: urusan pendidikan, urusan perpustakaan, urusan pemuda dan olah raga serta urusan kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang, adalah:

A. Urusan Pendidikan

Ada dua masalah pokok dalam urusan pendidikan yaitu:

1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%, yaitu sebesar 99,85 untuk usia 7-12 tahun, 97,47 untuk usia 13-15 tahun dan 68,67 untuk usia 16-18 tahun. APS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan. Target kinerja indikator APS adalah 100%. Ini berarti bahwa target SPM Bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang belum tercapai, antara lain dikarenakan:

- a) Belum optimalnya pengelolaan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan;
- b) Belum optimalnya mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan.

Akses masyarakat terhadap Pendidikan yang belum optimal ini terutama disebabkan karena pengelolaan Pendidikan, baik Pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar, (SD sederajat dan SMP sederajat), Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non-Formal/kesetaraan belum efektif, efisien serta optimal.

2) Belum optimalnya mutu pendidikan, yang utamanya disebabkan oleh belum optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Terkait mutu pendidik, dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2020 untuk jenjang SD/MI: 95,61% dan pada jenjang SMP/MTs: 96,98%. Sementara itu guru bersertifikasi pada jenjang SD/MI: 87,64% dan pada jenjang SMP/MTs: 95,57%.

Pada masa pandemi *Covid-19* ini, belum optimalnya mutu Pendidikan ditandai dengan banyaknya keluhan dari pendidik, peserta didik, maupun orang tua terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah secara daring (dalam jaringan). Adapun permasalahan terkait mutu Pendidikan pada masa pandemi *Covid-19* antara lain: (1). belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru; (2). belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh secara daring, yang meliputi kesiapan pendidik, peserta didik, orang tua dan pemangku kepentingan; (3). Belum adanya kurikulum yang tepat dalam mengantisipasi perubahan yang cepat akibat pandemi *Covid-19*.

B. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pokok pada Urusan Perpustakaan adalah masih rendahnya minat baca masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengunjung perpustakaan yang masih kecil. Apalagi dengan adanya pandemi *Covid-19*, pengunjung perpustakaan tahun 2020 sebanyak 22.629 orang turun dari tahun 2019 sebanyak 95.965 orang pengunjung. Minat baca masyarakat yang masih rendah ini utamanya disebabkan oleh kurangnya pembinaan perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca.

C. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama terkait urusan kebudayaan adalah belum optimalnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan. Kondisi ini disebabkan:

- 1) belum optimalnya perlindungan dan pengembangan Kebudayaan, termasuk pengembangan kesenian tradisional
- 2) pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum optimal.

Salah satu hal yang menunjukkan masalah diatas adalah jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya yang jumlahnya tetap dari tahun 2016-2019, yaitu 25 buah, dan kemudian menjadi nol di tahun 2020 karena tidak ada kegiatan festival seni sebagai akibat diberlakukannya aturan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan pengalihan alokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19*.

D. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Generasi muda yang berprestasi merupakan salah satu wujud keberhasilan pembangunan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan yang disebabkan rendahnya kapasitas daya saing pemuda dan olah raga, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan dan peningkatan kapasitas daya saing olahraga melalui pembinaan dan pengembangan Atlet Daerah.

4.2.2 Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Magelang yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan. Permasalahan daerah urusan kesehatan adalah belum optimalnya kinerja pembangunan kesehatan, yang ditandai dengan capaian angka harapan hidup yang masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Keberhasilan kinerja pembangunan kesehatan didukung oleh urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

A. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan yang baik. Dalam upaya pencapaian peningkatan derajat kesehatan tersebut, di Kabupaten Magelang masih mempunyai permasalahan terkait belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat, yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- 2) belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan;
- 3) ketersediaan farmasi dan alat kesehatan serta penjaminan kesehatan makanan minuman di masyarakat belum optimal;
- 4) pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan belum optimal; dan
- 5) belum optimalnya kualitas rumah sakit dan puskesmas;

Permasalahan-permasalahan di atas bisa dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita; Mutu FKT/FKTL/Laboratorium yang perlu ditingkatkan; masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular; belum terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat serta belum terpenuhinya sumber daya kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Beberapa kasus di atas merupakan indikator SPM Bidang urusan Kesehatan. Target capaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah 100% setiap tahun, namun pada tahun 2020 capaian kinerjanya baru 53,61%. Permasalahan pada pencapaian SPM Bidang urusan Kesehatan antara lain:

- a). Keterbatasan Sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan, anggaran dan sebagainya, yang merupakan pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
- b). Adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan semua kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal seperti kegiatan pengumpulan massa (rapat-rapat koordinasi, peningkatan kapasitas petugas, kader maupun kelompok sasaran, pelayanan Rumah Sakit) dan sebagainya

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, namun juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sehat dan sejahtera. Permasalahan utama yang masih perlu mendapat perhatian pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah menurunnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan masih tingginya persentase Keluarga Pra Sejahtera.

Permasalahan di atas disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya pelayanan dan pembinaan KB, dan kesehatan reproduksi; dan
- 2) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan pembangunan ketahanan keluarga;

4.2.3 Masih Tingginya Jumlah PMKS

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang adalah masih tingginya jumlah PMKS, yaitu sebanyak 136.993 orang pada tahun 2020. Adapun permasalahan utama pada urusan sosial adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang bisa dilihat dari cakupan penanganan PMKS yang masih rendah, yaitu kurang dari 50% selama periode tahun 2016-2019 (tahun 2019 sebesar 42,13).

Kondisi permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Belum optimalnya rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih relatif rendah; dan
- 3) Pemberdayaan sosial relatif masih rendah.

Terkait SPM bidang urusan sosial, terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM ini, antara lain jumlah Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas serta adanya *refocusing* anggaran karena Pandemi *Covid -19* sehingga pengiriman PMKS ke Rumah Singgah menjadi sangat terbatas.

4.2.4 Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Magelang belum optimal yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan sebesar 76,32 dari skala 100. Kendala yang masih dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya ketersediaan, pola konsumsi masyarakat dan keamanan pangan yang disebabkan antara lain oleh: (1). belum optimalnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (2). belum optimalnya penanganan kerawanan pangan; dan (3). belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.

4.2.5 Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Bonus demografi berimplikasi pada terciptanya banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu,

pembangunan ketenagakerjaan menjadi penting untuk menjadi perhatian berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Dalam lima tahun ini, tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jateng. Namun demikian, masih ada permasalahan pokok yang memerlukan perhatian ke depan yaitu belum optimalnya akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi tenaga kerja yang disebabkan oleh: (1). belum optimalnya informasi pasar kerja, kesempatan kerja dan penempatan penduduk usia kerja/produktif; (2). belum optimalnya sarana, prasarana, jumlah Instruktur pelatihan kerja serta produktivitas tenaga kerja.; dan (3). belum optimalnya hubungan industrial dengan Stakeholder.

4.2.6 Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Gender mengacu pada atribut, harapan, dan norma sosial, perilaku, dan budaya yang terkait dengan menjadi perempuan atau laki-laki. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan implementasi dari pembangunan berbasis gender. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berbasis gender di Kabupaten Magelang memiliki permasalahan belum optimalnya keberdayaan berbasis gender, yang ditunjukkan dengan Indeks Keberdayaan Gender (IDG) Pada tahun 2019 sebesar 67,74, menurun drastis jika dibandingkan dengan angka tahun 108 (71,21) serta lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Belum optimalnya keberdayaan berbasis gender ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga, antara lain ditunjukkan dengan rendahnya prosentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif, minimnya perempuan yang mendapat pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi serta sedikitnya perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga ini dapat ditingkatkan dengan mengatasi permasalahan di bawahnya yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 2) Belum optimalnya perlindungan perempuan;
- 3) Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak.

4.2.7 Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik

Permasalahan pokok daerah berkaitan dengan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang adalah belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik. Hal tersebut ditandai dengan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang hanya masuk dalam kategori cukup dengan nilai IKLH 71,18 pada tahun 2020. Nilai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi air, udara, dan tutupan lahan.

Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia menimbulkan permasalahan yang menyebabkan nilai IKLH Kabupaten Magelang belum termasuk kategori baik, yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penerapan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan di atas ditandai dengan masih adanya perusahaan dan/atau kegiatan yang tidak berdokumen lingkungan. Selain itu perusahaan/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan juga belum sepenuhnya menaati rekomendasi pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya kasus lingkungan baik berupa pencemaran bahkan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan.

- 2) Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan di Kabupaten yang mendesak untuk ditangani. Sampai dengan tahun 2020, persentase pengelolaan sampah baru mencapai 36,32%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jangkauan pelayanan sampah oleh Pemerintah dan belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan sampah juga disebabkan keberadaan TPA yang kapasitasnya sudah *overload* dan pemrosesan sampahnya tidak dapat sepenuhnya dilakukan dengan teknologi *controlled landfill*;

- 3) Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal

Pencemaran lingkungan di Kabupaten Magelang diindikasikan dengan terjadinya pencemaran air. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks kualitas air pada tahun 2020 sebesar 50,77 atau masuk dalam kategori buruk. Penyebab terjadinya pencemaran air salah satunya adalah adanya aktivitas industri yang belum melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik. Selain mencemari lingkungan, industri tersebut juga menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca. Terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri dapat dilihat dari rendahnya persentase perusahaan minimal berpredikat proper biru;

- 4) Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim

Konservasi sumber daya alam merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan. Kinerja pelaksanaan konservasi sumber daya alam masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase luasan daerah resapan air dan rawan bencana yang dikonservasi masih di bawah angka 2%. Selanjutnya

berdasarkan hasil KLHS RPJMD, daya dukung air permukaan Kabupaten Magelang sebesar 1,28 masuk dalam kategori sedang dan 73,83% wilayah Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana Kelas Sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bencana sehingga perlu upaya mitigasi yang salah satunya dapat dilakukan melalui konservasi sumber daya alam.

- 5) Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3
- 6) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 7) Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas
- 8) Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang

4.2.8 Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Disamping kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun, konsep pengembangan wilayah yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum maupun infrastruktur perhubungan; menjadi penyebab belum optimalnya cakupan dan layanan infrastruktur.

A. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya Penyelenggaraan jalan;
Infrastruktur jalan merupakan salah satu prasarana yang digunakan dalam mengembangkan suatu kawasan. Namun dalam penerapannya, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Magelang belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah, hal ini ditunjukkan dengan kondisi:
 - a. Pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi, jalur ekonomi yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan kawasan-kawasan potensial masih rendah.
 - b. Jalan kabupaten yang memenuhi standar dan ketentuan jalan kabupaten masih rendah.

- c. Pembangunan jalan belum terintegrasi dengan bagian-bagian jalan lainnya seperti bangunan pelengkap jalan (drainase, trotar, dan talud/dinding penahan jalan).
 - d. Ketahanan/umur jalan kabupaten masih pendek.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air;
Kinerja layanan infrastuktur sumber daya air di Kabupaten Magelang hanya diukur dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik dinilai belum dapat mewakili gambaran kinerja layanan infrastruktur sumber daya air di suatu wilayah. Kinerja layanan infrastruktur sumber daya air akan lebih tepat bila dilihat dari kondisi fisik jaringan irigasi dan layanan sumber daya airnya. Beberapa kondisi yang menyebabkan layanan infrastruktur sumber daya air belum optimal, yaitu:
- a. Pembangunan saluran irigasi belum terintegrasi dengan bangunan irigasi;
 - b. Belum seluruh saluran irigasi dan bangunan irigasi yang berfungsi dengan baik;
 - c. Masih rendahnya ketersediaan air untuk irigasi terutama pada musim kemarau;
 - d. Masih terdapat areal sawah yang belum terakses air irigasi;
 - e. Masih terdapat konflik pemanfaatan air irigasi dengan air minum;
 - f. Belum optimalnya kinerja kelembagaan petani pengelola air irigasi;
- 3) Belum optimalnya penataan bangunan gedung yang disebabkan oleh:
- a. Ketersediaan bangunan gedung pemerintah dan publik yang belum memadai;
 - b. Masih rendahnya bangunan penanda ciri suatu kawasan yang dibangun;
 - c. Belum adanya bangunan gedung pemerintah yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- 4) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
- 5) Belum optimalnya layanan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- 6) Belum optimalnya layanan sanitasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- Layanan air minum dan sanitasi air limbah domestik ini menjadi indikator SPM bidang urusan Pekerjaan Umum. Target kinerja indikator Bidang urusan ini setiap tahun adalah 100%. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja sebesar 68,62, atau belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian target SPM ini adalah:

- 1) Adanya Pandemi *Covid-19* sehingga alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdampak *refocusing*.
- 2) Terdapat perbedaan kriteria penilaian Capaian Layanan Pengelolaan Air limbah domestic, pada tahun 2019 penilaian dihitung berdasarkan capaian akses layanan dalam STBM yaitu Akses Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan Sharing serta Akses IPAL Komunal, sedangkan untuk tahun 2020 penilaian akses layanan hanya kriteria JSP, JSSP dan IPAL Komunal.
- 7) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- 8) Belum pengembangan permukiman
- 9) belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS
- 10) Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana jasa konstruksi yang belum memadai, belum optimalnya fungsi penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan bidang ke-PU an, dan belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang ke-PU an;
- 11) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang terutama terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang, belum sepenuhnya mengacu RTRW Kabupaten Magelang. Disamping hal tersebut, ketidaksesuaian terbesar terdapat pada pola ruang Kawasan pertanian, dimana persentase ketidaksesuaian pola ruang di Kabupaten Magelang sebesar 2,76%
- 12) Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

B. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah belum optimalnya layanan hunian yang layak dan berkualitas, termasuk rumah layak huni bagi korban bencana. Layak dan berkualitasnya sebuah hunian diukur mulai dari kondisi lingkungan yang paling kecil, yaitu dari rumah/bangunan tempat tinggal, perumahan, permukiman, lingkungan hunian sampai dengan kawasan permukiman.

Di Kabupaten Magelang, munculnya permasalahan pokok tersebut di atas disebabkan oleh penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman berkualitas yang belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengembangan perumahan disebabkan oleh:
 - a. belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana; dan

- b. belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi warga relokasi warga terdampak proyek pemerintah
- 2) Belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh, disebabkan oleh:
 - a. jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Magelang masih tinggi; backlog rumah tinggi;
 - b. belum optimalnya fasilitasi ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 3) Belum optimalnya penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, yang disebabkan:
 - a. belum ada PSU perumahan yang diserahkan-terimakan pengembang kepada pemerintah;
 - b. belum tersedianya TPU yang dikelola pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan warga pendatang dan warga yang tinggal di perumahan, dan
 - c. belum optimalnya pemeliharaan PSU perumahan.
- 4) Belum optimalnya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
- 5) Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman layak, disebabkan oleh: disebabkan masih adanya permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani, dan masih terdapatnya kawasan permukiman yang belum tertata dan diduga kumuh

Selain hal-hal tersebut di atas, ada permasalahan dalam pelaksanaan amanat SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang perlu mendapat perhatian. Target kinerja SPM urusan bidang urusan Perumahan Rakyat adalah 100%, dan capaian pada 2020 adalah 10,72%. Rendahnya capaian tersebut, diantaranya karena permasalahan yang ada dalam pencapaian SPM bidang urusan ini, yaitu:

- 1) Tidak ada rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati (lewat BPBD) sehingga tidak ada dasar untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

C. Pertanahan

Lokasi atau ketersediaan lahan yang jelas peruntukannya merupakan salah satu *readiness criteria* yang harus dipenuhi dalam pembangunan. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul yaitu belum optimalnya fasilitasi pembebasan tanah dalam pembangunan dan masih banyak tanah yang belum bersertifikat.

D. Perhubungan

Transportasi atau perhubungan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Magelang permasalahan utama urusan perhubungan adalah belum optimalnya

penyelenggaraan layanan perhubungan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

4.2.9 Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan *output* (inti dari kinerja perekonomian), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing dilakukan dengan menetapkan kebijakan, perkuatan, kelembagaan dan tata kelola serta membangun infrastruktur. Ketiga hal tersebut untuk menghasilkan (1) peningkatan produktivitas daerah pada skala ekonominya, (2) inovasi, (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan (4) penyempurnaan struktur sistem pembangunan nasional/daerah.

Keberhasilan peningkatan daya saing bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai kendala, antara lain investasi (pelayanan perizinan, iklim investasi dan kondusivitas daerah), SDM, serta teknologi. Minimalisasi kendala investasi untuk menarik masuk modal asing swasta dan modal publik. Pengembangan tenaga kerja mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif, menciptakan lingkungan kondusif, dan menyediakan pasar tenaga kerja domestik. Pengembangan teknologi untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan.

Permasalahan belum optimalnya daya saing sosial ekonomi daerah dapat dijabarkan dalam beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagai berikut:

A. Pertanian

Pembangunan pertanian adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan agroindustri serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang diunggulkan di Kabupaten Magelang, bersama dengan sektor pariwisata dan sektor UKM. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini, sektor pertanian masih menjadi penyumbang PDRB dengan persentase terbesar. Selain itu, pertanian juga mampu menampung tenaga kerja pertanian paling banyak.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah:

1. Masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani, yang disebabkan oleh:
 - a. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - b. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - c. Perizinan usaha pertanian masih rendah;
 - d. SDM Pertanian perlu ditingkatkan
 - e. Kurangnya daya saing produksi pertanian;
2. Produktivitas usaha peternakan belum optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana peternakan serta pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat *veteriner*;

B. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Permasalahan pokok dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian, yaitu lambatnya pertumbuhan dan rendahnya daya saing industri yang disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri dan kondisi data industri belum dikelola secara informatif dan akurat.

C. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada permasalahan penting yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu belum optimalnya distribusi perdagangan dan perdagangan yang berdaya saing, yang disebabkan oleh:

- 1) Terganggunya stabilisasi harga barang terutama barang kebutuhan pokok;
- 2) Belum optimalnya pengembangan produk yang berdaya saing;
- 3) Sarana dan prasarana pasar rakyat belum secara optimal menunjang peningkatan sektor perdagangan;
- 4) Belum optimalnya standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen;

D. Koperasi dan UKM

Pemberdayaan koperasi dan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan masalah pokok: belum optimalnya kinerja koperasi dan UKM, yang disebabkan oleh

- 1) Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi
- 2) Belum optimalnya SDM Koperasi
- 3) Rendahnya omset penjualan produk usaha mikro (UMKM)
- 4) Belum optimalnya keberdayaan UMKM

E. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu, pariwisata juga mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif. Sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat masalah pokok yang memerlukan perhatian, yaitu masih lambatnya jumlah kunjungan dan terbatasnya lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang, yang disebabkan oleh:

- 1) Atraksi, amenities, dan aksesibilitas destinasi pariwisata belum optimal dan
- 2) Belum optimalnya peran ekonomi kreatif dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata

F. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang berada di tengah perbukitan dan tidak memiliki laut. Namun demikian, budidaya perikanan masih diandalkan oleh sebagian masyarakatnya sebagai sumber utama penghasilannya maupun sebagai tambahan. Produktivitas usaha perikanan yang belum optimal menjadi

permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan budidaya perikanan ini. Adapun penyebabnya adalah:

- 1) keterbatasan sarana prasarana perikanan dan SDM perikanan
- 2) belum optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- 3) masih terbatasnya jenis produk olahan hasil perikanan dan belum optimalnya pemasaran produk perikanan

G. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan pokok yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu belum optimalnya pelayanan investasi dan pelayanan perijinan di daerah, yang disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya upaya meminimalkan hambatan-hambatan Investasi;
- 2) Terbatasnya promosi penanaman modal;
- 3) Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 4) Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- 5) Belum optimalnya proses pelayanan perizinan.

H. Ketentraman dan Ketertiban serta Pelindungan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perlu didukung 3 (tiga) hal: 1) Penegakan Perda, terutama berkaitan dengan penciptaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 2) Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana bencana; dan ke 3) Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Permasalahan pokok yang harus ditangani dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- 1) Belum optimalnya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang disebabkan oleh:
 - a) Belum optimalnya penertiban dan penegakan Perda dalam mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b) Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- 2) Belum optimalnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana yang disebabkan oleh belum optimalnya penanggulangan bencana yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak;
- 3) Belum optimalnya wawasan kebangsaan dan pendidikan politik yang disebabkan oleh:

- a) Tingkat wawasan kebangsaan masyarakat dan pendidikan politik masyarakat masih relatif rendah
- b) Belum optimalnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Sejalan dengan pemenuhan SPM Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang belum mencapai target 100% (realisasi 65,45%) pada tahun 2020, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu antara lain:

- 1) Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2020 belum dianggarkan.
- 2) Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran perda dan perkara, sehingga capaian 0%.
- 3) Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 1429 orang, dari Jumlah Warga Negara yang mejadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 1429 orang dari 91 kejadian kebakaran sehingga capaian 100%, yang dapat tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
- 4) Pada sasaran Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setiap tahun ditargetkan tidak terjadi bencana dan ada warga negara yang diselamatkan dan dievakuasi, namun pada tahun 2020 terdapat 526 warga yang mengungsi untuk diselamatkan dan dievakuasi.

I. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan pokok yang harus ditangani dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa adalah belum optimalnya kemajuan dan kemandirian desa. Adapun hal ini disebabkan antara lain:

- a. Belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa;
- b. Masih lemahnya kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan *stakeholder*;
- c. Fasilitasi terhadap administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih kurang;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya.

4.2.10 Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perlu di evaluasi dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah sebagaimana

yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang terkait hal ini adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditandai dengan nilai AKIP tahun 2019 dengan nilai 60,10 (B).

Akuntabilitas kinerja pemerintahan dapat diwujudkan melalui dukungan kinerja beberapa urusan, yaitu urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan, urusan pengawasan dan urusan administrasi pemerintahan

Pada urusan-urusan tersebut ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

A. Urusan Perencanaan

Pada urusan perencanaan ditemukan permasalahan belum optimalnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD belum mencapai 100%. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum terpadunya perencanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

B. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan sangat mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan dimanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan dalam penentuan kebijakan, maka kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan efisien. Permasalahan yang dihadapi pada urusan ini adalah belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Belum terintegrasinya hasil kajian penelitian dan pengembangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan;
- 2) Belum optimalnya daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta inovasi daerah terhadap pembangunan daerah.

C. Urusan Pengawasan

Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada, sehingga kinerja pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Permasalahan yang ada pada urusan pengawasan adalah belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dilihat dari nilai maturitas SPIP tahun 2020 sebesar 3. Nilai maturitas ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan praktek pengendalian internal namun tidak terdokumentasi dengan baik dan belum melibatkan semua unit organisasi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan; dan

- 2) Belum optimalnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;

D. Urusan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan administrasi pemerintah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah dan sekretariat dewan memiliki beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Belum optimalnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang disebabkan belum optimalnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 2) Belum optimalnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan;
- 3) Belum optimalnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah yang disebabkan belum optimalnya kualitas urusan pemerintahan daerah di bidang penataan organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum kesekretariatan daerah;
- 4) Belum optimalnya fasilitasi layanan lembaga DPRD yang disebabkan oleh belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4.2.11 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pada era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah sesuai dengan misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati maka Kabupaten Magelang berusaha untuk mewujudkan *Smart Regency*. Permasalahan pokok daerah yang dihadapi berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) belum dilaksanakan secara optimal di Kabupaten Magelang. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 yaitu 2,74 dari skala 5 atau masuk dalam kategori baik.

Untuk dapat meningkatkan kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, diperlukan dukungan dari urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Namun demikian dalam pelaksanaannya pada urusan tersebut ditemui permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Namun demikian, amanah ini belum dapat

dilakukan secara optimal di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya pelaksanaan *e-government* yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya prasarana dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi publik perlu didukung ketersediaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana antara lain belum semua Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dapat difasilitasi jaringan komunikasi data yang stabil. Selain itu masih terdapat wilayah di Kabupaten Magelang yang merupakan *blankspot area* yaitu sebesar 17% dari total wilayah Kabupaten Magelang.

- 2) Belum optimalnya diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat.

Sesuai amanah keterbukaan informasi publik, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan diseminasi informasi publik melalui berbagai media. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya diseminasi ini adalah pada pelaksanaan diseminasi melalui media baru yaitu melalui *website*. Berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, *website* Kabupaten Magelang masih dalam kategori kurang informatif.

Berkaitan dengan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat, masih terdapat permasalahan belum terpenuhinya cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas, dan pelajar.

B. Persandian

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan persandian, antara lain belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Magelang menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan dan *hacking*. Hal ini dapat mengancam keamanan dan kerahasiaan data atau informasi Pemerintah Daerah.

C. Statistik

Permasalahan penyelenggaraan urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data statistik daerah.

Data merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Magelang belum semua urusan terintegrasi dalam *big data*. Hal ini menyebabkan belum dapat diterapkannya kebijakan satu data di Kabupaten Magelang.

Jumlah urusan yang sudah terintegrasi dalam *big data* sebanyak 7 urusan atau sebesar 21%.

Big data merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang data dalam variasi, volume, dan kecepatan aliran yang sangat besar, baik yang terstruktur (seperti dalam bentuk tabular pada basis data) maupun yang tidak terstruktur (seperti data percakapan pada berbagai media sosial, video, dan audio). Saat ini banyak data-data maupun informasi aplikasi di Kabupaten Magelang yang tersebar di masing-masing perangkat daerah dan belum terintegrasi. Oleh karena itu pengintegrasian data dan aplikasi menjadi salah satu prioritas guna mendukung misi III yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

4.2.12 Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan daerah terkait urusan keuangan adalah belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah
- 2) Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan aset daerah;

4.2.13 Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Terkait hal tersebut, Kabupaten Magelang memiliki permasalahan daerah yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Guna mencapai pelayanan publik yang baik, diperlukan dukungan kinerja dari beberapa urusan, yaitu:

A. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Oleh karena itu, layanan dan data kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Permasalahan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil. Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya cakupan dan pelayananan pendaftaran kependudukan;
- 2) Belum optimalnya pencatatan sipil terutama kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian;

- 3) Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
- 4) Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan.

B. Kecamatan

Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Permasalahan yang muncul di kecamatan adalah belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
- 4) Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban umum.

C. Kearsipan

Permasalahan terkait pembangunan kearsipan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pelayanan kearsipan yang ditunjukkan dengan rendahnya persentase pengolah/lembaga pencipta arsip yang mengelola arsip secara baku. Permasalahan tersebut disebabkan oleh pengelolaan kearsipan belum sesuai standar baku dan upaya perlindungan dan penyelamatan terhadap arsip masih rendah.

4.2.14 Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi atau institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah institusi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan institusi tersebut. Saat ini, karyawan bukan dianggap sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset utama bagi institusi. Permasalahan utama terkait sistem manajemen kepegawaian adalah belum optimalnya kualitas aparatur. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan daerah.

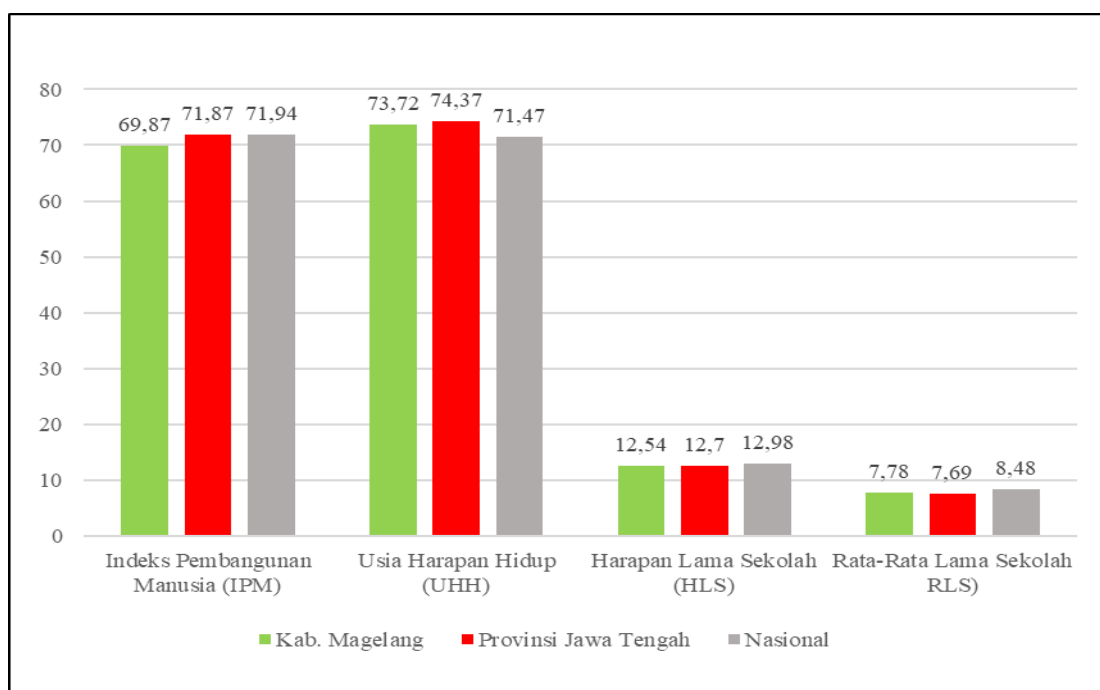
4.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada penelaahan terhadap gambaran umum kondisi daerah, kondisi lingkungan strategis global, nasional, provinsi, permasalahan pembangunan yang dihadapi dan perubahan kebijakan nasional terutama pada kondisi terkini dengan adanya pandemi *Covid-19*. Isu Strategis dirumuskan dari permasalahan pokok daerah sedangkan permasalahan pokok daerah dirumuskan dari permasalahan masing-masing urusan. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Magelang dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan manifestasi dari kualitas sumber daya manusia dari tiga komponen yaitu kualitas pendidikan, kesehatan dan taraf hidup layak. IPM di Kabupaten Magelang mengalami perkembangan positif dari tahun 2016 sebesar 67,85 menjadi 69,87 tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, nilai IPM tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Walaupun nilai indikator IPM Kabupaten Magelang mengalami pertumbuhan positif akan tetapi nilai indikator IPM masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Magelang berada pada status sedang karena memiliki nilai berkisar antara 60–70. Apabila di bandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-24. Sedangkan untuk wilayah Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-3 setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Diagram berikut menunjukkan perbandingan antara IPM dan komponen pembentuknya dilihat dari dimensi pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020.



Gambar 4.1

Perbandingan IPM, UHH, HLS, dan RLS Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Kinerja pembangunan manusia dari sisi pendidikan dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2016 – 2020 cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 nilai HLS sebesar 12,15 tahun, meningkat sebesar 0,39 menjadi 12,54 tahun pada tahun 2020. Berdasarkan data, HLS di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun untuk RLS, selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 di Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 0,38 tahun dari 7,40 tahun pada 2016 menjadi 7,78 tahun pada 2020. Capaian nilai RLS di Kabupaten Magelang tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah namun masih lebih rendah daripada nasional. Selanjutnya apabila dikonversi ke jenjang pendidikan sekolah, maka rata-rata penduduk di Kabupaten Magelang hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SD dan melanjutkan sampai dengan kelas 8 SMP. Dengan demikian, untuk pendidikan di Kabupaten Magelang belum memenuhi target program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Berkenaan dengan pendidikan, terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi yaitu partisipasi pendidikan untuk jenjang SD dan SMP serta belum optimalnya mutu pendidikan. Hal tersebut kemudian diperparah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Pada jenjang SD, pembelajaran secara daring dinilai tidak efektif karena akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan. Ketergantungan pembelajaran pada orang tua dimana di satu sisi orang tua mempunyai kesibukan dalam bekerja menyebabkan ilmu yang didapat oleh siswa pada jenjang SD tidak optimal. Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap pendidikan anak dalam jangka panjang.

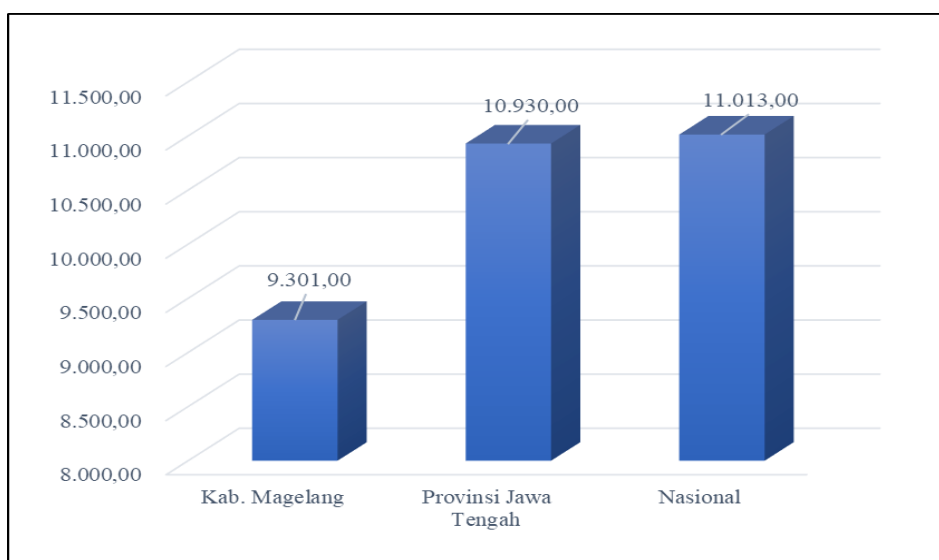
Sementara untuk kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH). UHH di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan 0,39 tahun atau sebesar 0,13% per tahun. UHH merupakan representasi dari kesehatan individu di suatu daerah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu bayi lahir dalam keadaan hidup dari ibu usia produktif, layanan kesehatan ibu dan balita, serta ketersediaan fasilitas kesehatan. Capaian UHH Kabupaten Magelang tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah akan tetapi lebih tinggi dibandingkan nasional. Apabila dibandingkan dengan UHH Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maka Kabupaten Magelang menempati urutan ke-27 sehingga kualitas kesehatan individu di Kabupaten Magelang masih harus ditingkatkan.

Di bidang kesehatan, permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita, kasus penyakit menular, kecenderungan meningkatkan kasus penyakit tidak menular, stunting, dan belum terpenuhinya sumber daya kesehatan. Pada masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini, permasalahan berkaitan dengan kesehatan sangat penting untuk segera mendapatkan penanganan.

Tingginya angka kematian akibat *Covid-19* di Kabupaten Magelang perlu ditindaklanjuti dengan strategi pencegahan dan penanganan yang tepat. Kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, penerapan protokol kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan menjadi hal yang harus selalu ditingkatkan pelaksanaannya.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia ditinjau dari taraf hidup yang layak dapat diukur dari indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity-PPP*). Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019, PPP Kabupaten Magelang mengalami peningkatan sebesar 3,47% per tahun. Namun kemudian menurun 0,9% pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.301 ribu/orang/tahun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 9.387 ribu/orang/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan daya beli di masyarakat. Menurunnya kemampuan daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh terjadinya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada kondisi perekonomian secara global, nasional maupun regional. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disusul dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan interaksi sosial ekonomi di masyarakat menjadi sangat terbatas. Hal ini berakibat banyak usaha yang berhenti beroperasi, pemutusan hubungan kerja, serta kontraksi pada sisi *demand* dan *supply* yang pada akhirnya semakin mempersulit kondisi perekonomian.

Berdasarkan data tahun 2020, *PPP* Kabupaten Magelang berada di peringkat 31 dari 35 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Apabila disandingkan dengan data provinsi dan nasional, *PPP* Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai provinsi maupun nasional sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

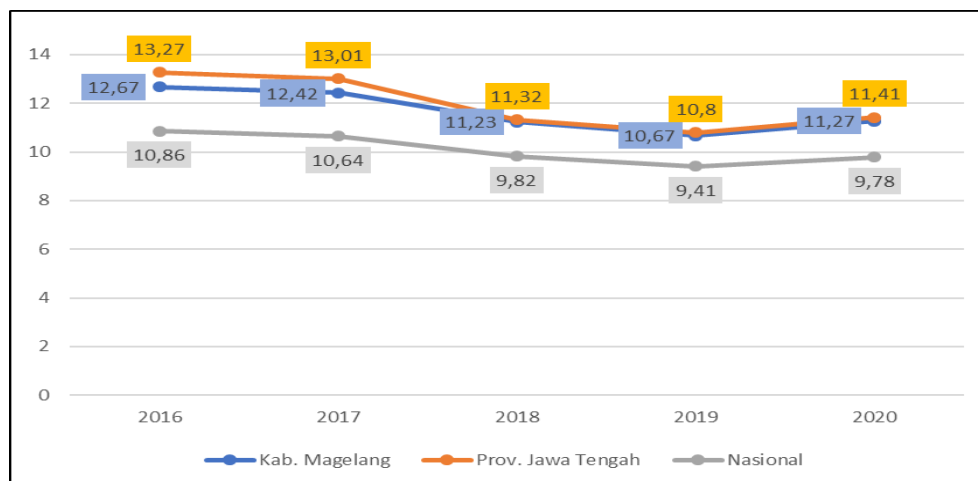


Gambar 4.2

Perbandingan *PPP* Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan tren menurun setiap tahunnya pada kurun waktu lima tahun dari 2015 hingga 2019. Periode Maret 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Magelang

mengalami peningkatan sebesar 0,60% dari 10,67% pada tahun 2019 menjadi 11,27% pada tahun 2020. Adapun jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 137,45 ribu jiwa, bertambah menjadi 146,34 ribu jiwa. Angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2020 berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tapi di atas angka kemiskinan nasional. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang menempati posisi ke-20. Perbandingan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional sebagaimana tergambar pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.3

Perbandingan *Angka Kemiskinan* Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar dan optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan difabel. Selain hal tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah dampak *Covid-19* terhadap perekonomian di Kabupaten Magelang. Terjadinya pemutusan hubungan kerja menyebabkan naiknya tingkat pengangguran terbuka dari 3,12% pada tahun 2019 menjadi 4,27% pada tahun 2020. Hal ini berpotensi untuk memunculkan warga miskin baru sehingga kemiskinan cenderung meningkat.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga akan dilaksanakan dengan mangakomodasi persoalan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mangakomodasi persoalan gender. IPG diukur berdasarkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2019 IPG Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 0,45 menjadi 91,78 yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 92,23. Hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kualitas sumber dayamanusia berbasis gender di Kabupaten Magelang.

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan

pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi berpartisipasi politik diwakili dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dimensi ekonomi dan pengambilan keputusan diwakili oleh perempuan sebagai tenaga profesional teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan. Dimensi terakhir adalah dimensi penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. IDG Kabupaten Magelang mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 72,18 dari yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 74,03. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pengarusutamaan Gender di Indonesia, telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Isu strategis Kualitas Sumber Daya Manusia dirumuskan dari 6 (enam) permasalahan pokok daerah yaitu, Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan, Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan, Masih Tingginya Jumlah PMKS, Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah, Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender.

4.3.2 Daya Saing Daerah

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan cenderung melambat mengindikasikan belum optimalnya daya saing ekonomi Kabupaten Magelang. Di sisi lain, sebenarnya Kabupaten Magelang memiliki potensi yang cukup banyak tercermin dari 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah. Namun dengan adanya pandemi *Covid-19*, ketiga sektor unggulan yang selama ini menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Magelang turut terdampak sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi -1,98% pada tahun 2020.

Dalam era globalisasi dan bisnis modern di mana banyak wilayah yang memiliki produk hampir sama, maka merek atau *brand* menjadi suatu keharusan. Sampai saat ini, Kabupaten Magelang belum memiliki *branding* yang diharapkan menjadi diferensiasi, memperkuat identitas, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, perlu dibangun *branding* Kabupaten Magelang yang akan menjadi salah satu cara efektif meningkatkan daya saing dan mampu mencakup aspek-aspek potensial Kabupaten Magelang secara menyeluruh, walaupun tetap ada penekanan pada aspek yang paling “menjual”. Potensi Kabupaten Magelang berupa Candi Borobudur beserta candi-candi lainnya, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing serta pegunungan Menoreh serta pegunungan lainnya merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan daya saing.

Selain hal yang dikemukakan di atas, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur. Isu strategis di Kabupaten Magelang

berkaitan dengan hal tersebut adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, dan persampahan, di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Dalam rangka mewujudkan daya saing daerah, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan, dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, mengurangi laju pemanasan global, serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis sumber daya alam sebagai modal pembangunan daerah. A

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi risiko terhadap bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana alam.

Pembangunan daerah terutama dalam merespon tantangan global dan kondisi pandemi *Covid-19* seperti saat ini tidak dapat hanya mengandalkan cara-cara biasa. Perlu adanya strategi dan kreatifitas untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan. Di tengah persaingan bebas, daya saing daerah menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional.

Peningkatan daya saing daerah bagi Kabupaten Magelang merupakan satu isu yang harus terus diupayakan pencapaiannya. Pembangunan daerah dalam merespon tantangan global persaingan bebas dan ditambah lagi dengan kejadian pandemi *Covid-19*, tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan cara-cara yang biasanya. Diperlukan strategi baru dan inovasi dalam setiap bidang pembangunan. Terlebih lagi dengan telah

disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal ini menjadi momentum bagi Kabupaten Magelang dan tentunya daerah lain untuk dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuannya sehingga mampu mewujudkan cita-cita dari UU Cipta Kerja tersebut. Harapannya, di tengah persaingan dunia yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, daerah dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya melalui peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UKM serta kemudahan investasi proyek pemerintah.

Sebagai respon dari penetapan UU Cipta Kerja dalam mendukung percepatan peningkatan daya saing Kabupaten Magelang maka optimalisasi potensi sektor unggulan yang ada meliputi pertanian, pariwisata, dan industri yang berbasis potensi lokal penting untuk dapat digarap secara serius. Ketiga sektor ini nantinya akan dapat menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Magelang untuk memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di Kabupaten Magelang.

Isu Strategis Daya Saing Daerah dirumuskan dari 3 (tiga) permasalahan pokok daerah yaitu Belum Optimalnya Daya Saing Sosial Ekonomi Daerah, Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dan Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur.

4.3.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif.

Berdasarkan sejarahnya, *good governance* diterapkan sejak dimulainya era reformasi di mana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Magelang.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magelang. Tantangan tersebut dapat muncul baik dari sisi internal maupun eksternal. Pandemi *Covid-19* menyebabkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan

perubahan sistem kerja pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan sistem *work from home* dan pembatasan kegiatan masyarakat memaksa penyelenggaraan pemerintahan harus adaptif terhadap penggunaan teknologi informasi. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sehingga pemerintah harus berinovasi agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik dapat terpenuhi.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan salah satu arah kebijakan RPJP Kabupaten Magelang, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Dalam mencapai arah kebijakan itu, maka ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 2) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 3) Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat berbagai kendala yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan. Kendala yang pertama adalah membenahi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. Akuntabilitas kinerja menunjukkan seberapa kinerja pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang menjadi persoalan tersendiri, mengingat terdapat beberapa hal yang masih belum mencapai standar atau target yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal. Sistem tersebut dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaporan implementasi, monitoring dan evaluasi (monev). Kendala utama yang dihadapi dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas kinerja yang optimal terletak pada indikator-indikator perencanaan yang belum sinkron dan terukur. Indikator yang sinkron dan terukur menjadi penting dalam tahapan-tahapan sistem pemerintahan karena indikator tersebut menunjukkan keterkaitan antar tahapan dan keterukuran proses perencanaan hingga pengawasan program atau kegiatan. Apabila indikator suatu program dapat tersinkronisasi dan terukur, maka dapat tercipta pelayanan publik yang baik karena tujuan

dari program tersebut menjadi lebih jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya indikator yang baik, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang akan menjadi belum optimal yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magelang.

Sistem manajemen pemerintahan merupakan suatu bentuk inovasi birokrasi yaitu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka proses pengelolaan SDM akan menjadi lebih mudah. Pengelolaan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mendorong kualitas pelayanan publik tersebut adalah melalui pelaksanaan pembangunan berbasis *Smart City*.

Konsep *Smart City* merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan. Terlebih dengan terjadinya pandemi *Covid-19*, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan untuk diterapkan. Pelaksanaan kebijakan *work from home*, pembatasan kerumunan, perubahan mekanisme pembelajaran dari tatap muka ke pelaksanaan secara daring menuntut adaptasi perubahan perilaku untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Magelang juga mengindikasikan belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Suatu perda disusun sebagai sebuah regulasi yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerja sama lintas sektoral. Komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan terus memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas penegakan perda. Sedangkan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder bertujuan untuk terbentuknya kesepakatan terkait peraturan-peraturan yang sudah disepakati, sehingga pelanggaran perda dapat diminimalisasi. Saat ini, komitmen pemerintah Kabupaten Magelang dalam penegakan perda masih belum optimal, mengingat masih adanya otoritas penegak perda yang belum difasilitasi dengan baik dan komunikasi pihak-pihak terkait penegakan perda masih belum optimal. Apabila penegakan perda dapat berjalan dengan baik, maka pelayanan publik di Kabupaten Magelang menjadi lebih optimal karena ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kondusif.

Fungsi penelitian dan pengembangan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan pemerintahan melalui penelitian dan

pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Magelang menjadi penting karena pada zaman modern ini, diperlukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Fungsi penelitian dan pengembangan yang belum berjalan dengan optimal dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang tingkat efektifitas dan efisiensinya. Produk dari penelitian dan pengembangan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magelang.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Hampir seluruh aspek membutuhkan izin dalam pelaksanaannya, yang berarti hampir seluruh elemen masyarakat berurusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perizinan. Kabupaten Magelang memiliki permasalahan tersendiri terkait perizinan, yaitu belum optimalnya pelayanan perizinan terpadu. Pelayanan perizinan terpadu adalah proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan. Dengan pelayanan perizinan terpadu yang optimal dapat meningkatkan nilai investasi karena iklim investasi yang lebih terjaga.

Kendala yang kedua adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya kendala dalam menciptakan aparatur yang profesional, maka kualitas dan kuantitas ASN mutlak untuk ditingkatkan. Hal tersebut berkaitan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu *recruitment*, *promotion*, dan *utilization* (pemanfaatan). Apabila ketiga aspek tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka kuantitas dan kualitas ASN dapat meningkat. Saat ini, Kabupaten Magelang mengalami masalah terkait dengan kualitas dan kuantitas ASN. Dari segi kualitas, masih ada pegawai yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Adapun dari segi kuantitas, Pemerintah Kabupaten Magelang masih mengalami kekurangan jumlah ASN. Kurangnya kualitas dan kuantitas ASN tersebut menjadi tantangan tersendiri yang wajib diselesaikan, selain pembenahan kelembagaan dan sistem demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal.

Berdasarkan uraian mengenai isu strategis di atas menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi terutama sebagai respon terjadinya pandemi *Covid-19* maka isu strategis yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 masih relevan. Untuk mengetahui keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Magelang dengan isu global, nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dirumuskan dari 5 (lima) permasalahan pokok daerah, yaitu Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Belum Optimalnya

Kualitas Pelayanan Publik, Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian.

Tabel 4.2
Isu-isu Strategis Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab. Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024	Isu Strategis RPJMD Kab. Magelang 2019-2024
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 7. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi struktural berjalan lambat; 2. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3. Pemenuhan layanan dasar; 4. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 5. Pengentasan kemiskinan; 6. Peningkatan produktivitas dan daya saing manusia; 7. Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa; 8. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; 9. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti; 10. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama; 11. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan; 12. Belum optimalnya peran keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kontinuitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga 2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pengembangan lembaga pendidikan formal dan non formal 3. Peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman usaha pertanian dan pengelolaan hasil pertanian 4. Pemerataan dan perluasan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) melalui penerapan dan peningkatan pelayanan prima aparatur pemerintah dan partisipasi swasta dan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Ketenagakerjaan 5. Kesetaraan gender dan jaminan sosial 6. Ketahanan pangan 	<p>Kualitas sumber daya manusia</p>

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab. Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024	Isu Strategis RPJMD Kab. Magelang 2019-2024
<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih dan sanitasi 2. Energi 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 4. Infrastruktur 5. Kesenjangan 6. Kota dan Permukiman 7. Perubahan iklim 8. Ekosistem daratan 	<ol style="list-style-type: none"> 13. Keberlanjutan sumber daya alam; 14. Efektifitas tata kelola sumber daya ekonomi; 15. masih adanya ketimpangan antar wilayah; 16. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 17. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau; 18. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 19. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 20. Keselamatan dan keamanan transportasi; 21. Ketahanan kebencanaan infrastruktur; 22. Konektivitas jalan; 23. Konektivitas darat; 24. Transportasi perkotaan; 25. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; 26. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 5. Kedaulatan pangan dan energi 6. Kesenjangan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Optimalisasi lembaga usaha dan keuangan daerah (BUMD) untuk pemberdayaan ekonomi rakyat 6. Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan petani, PDRB dan PAD 7. Pengembangan komoditas unggulan daerah dengan kegiatan dan mekanisme agribisnis dan agropolitan 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 9. Pengembangan aneka usaha sektor unggulan daerah dengan berpedoman pada perencanaan teknis yang akurat 10. Pengembangan kebijakan untukantisipasi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana 11. Peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana untuk menunjang dan memperlancar 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Resiko bencana 8. Kapasitas air baku 9. Akses sarana prasarana permukiman (air minum, sanitasi, rumah layak huni, pelayanan sampah, RTH) 10. Pengelolaan lingkungan hidup 11. Keretakan terhadap perubahan iklim 12. Kontribusi per sektor dalam PDRB dan PAD 13. Pemberdayaan UMKM 	<p>Daya saing daerah</p>

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab. Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024	Isu Strategis RPJMD Kab. Magelang 2019-2024
	<p>aman, dan terjangkau di perkotaan;</p> <p>27. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;</p> <p>28. Deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup;</p> <p>29. Meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>30. Tingginya risiko bencana di Indonesia;</p> <p>31. Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah;</p> <p>32. Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK melalui pembangunan rendah karbon;</p> <p>33. Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon;</p>		<p>pembangunan daerah</p> <p>12. Peningkatan akses pemasaran, permodalan, manajemen, teknologi dan jaringan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah</p> <p>13. Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup melalui optimalisasi perencanaan dan antisipasi berbasis data dan partisipasi masyarakat</p>		
9. Kemitraan global	<p>34. Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital;</p> <p>35. Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas;</p> <p>36. Infrastruktur dan</p>	7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	<p>14. Peningkatan akuntabilitas publik bidang keuangan dengan mengaplikasikan sistem anggaran berbasis kinerja</p> <p>15. Peningkatan kualitas</p>	<p>14. Kemampuan keuangan daerah</p> <p>15. Akses terhadap teknologi dan informasi</p> <p>16. Tata kelola</p>	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab. Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024	Isu Strategis RPJMD Kab. Magelang 2019-2024
	ekosistem TIK perkotaan; 37. Penuntasan infrastruktur TIK; 38. Pemanfaatan infrastruktur TIK; 39. Fasilitas pendukung transformasi digital; 40. Tidak meratanya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 41. Masih adanya perilaku koruptif dan penegakan hukum yang belum optimal		perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah untuk mengoptimalkan strategi pemanfaatan potensi daerah 16. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan berbasis pada pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah dan kualitas manajemen pemerintahan 17. Peningkatan efektivitas penataan kelembagaan Pemda agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 18. Peningkatan kinerja pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui optimalisasi pendayagunaan sumberdaya milik daerah	pemerintahan 17. Pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	
10. Sumberdaya kelautan		-	-	-	-

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2021; data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, dari ke 3 (tiga) isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Isu strategis 1: Kualitas sumber daya manusia, mengakomodir 7 (tujuh) isu global (TPB/SDGs); 6 (enam) isu nasional; 2 (dua) isu provinsi; 4 (empat) isu yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Magelang Tahun 2010-2025 dan 4 (empat) isu strategis yang ada dalam dokumen KLHS;
2. Isu strategis 2: Daya saing daerah, mengakomodir 7 (tujuh) isu global (TPB/SDGs); 14 (empat belas) isu nasional; 4 (empat) isu provinsi; 9 (sembilan) isu yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Magelang Tahun 2010-2025 dan 2 (dua) isu strategis yang ada dalam dokumen KLHS;
3. Isu strategis 3: Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengakomodir 1 (satu) isu global (TPB/SDGs); 3 (tiga) isu nasional; 1 (satu) isu provinsi; 5 (lima) isu yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Magelang Tahun 2010-2025 dan 1 (satu) isu strategis yang ada dalam dokumen KLHS.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun. Di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi, dan RPJMN, dengan dilakukan penyesuaian terhadap RPJMN 2020 – 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19 dan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang
yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”
(SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah yang disingkat menjadi “Sedayaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituiil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir, batin, adil dan merata. Dalam terminologi Jawa, komponen kebutuhan dasar ini adalah *wareg*, *wutuh*, *waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan; *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan; *waras* adalah

terjaminnya kesehatan masyarakat jasmani dan rohani; sementara *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

2. Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang memiliki kemampuan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan baik domestik, regional maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
3. Amanah adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia

Salah satu indikator tercapainya kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan. Komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan. Sementara komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan masyarakat baik organisasi kemasyarakatan maupun pribadi masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut, diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian, pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM); pengembangan sarana dan prasarana publik; serta pengembangan kepemudaan dan olahraga.

Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat. Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

5.3 Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, dirumuskan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dan program unggulan sebagai berikut:

1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia

Peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia, diantaranya melalui:

- a. pembangunan *islamic center*;

- b. bantuan pembangunan tempat ibadah;
 - c. bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter;
 - d. peningkatan kesejahteraan guru ngaji.
2. Pendidikan
- Peningkatan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan, diantaranya melalui:
- a. pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK;
 - d. peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut;
 - e. peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan kejuruan;
SMK/SLTA merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun Pemerintah Kabupaten Magelang berperan dalam pemenuhan *readiness criteria* diantaranya penyediaan tanah dan dokumen perencanaan sekolah menengah kejuruan (SMK) Pariwisata di Kecamatan Pakis;
 - f. penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
3. Kesehatan
- Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau, diantaranya melalui:
- a. bantuan ambulan desa;
 - b. mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap;
 - c. peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit (Grabag dan Salaman);
 - d. peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah;
 - e. peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit;
 - f. peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
4. Penanggulangan Kemiskinan
- Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, diantaranya melalui:
- a. RTLH plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin;
 - b. optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa dan dusun);
 - c. optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan difabel;
 - d. bantuan modal dan alat bagi warga miskin.

5. Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM
Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:
 - a. pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik;
 - b. pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat;
 - c. pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis;
 - d. pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
 - e. pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumber daya lokal.
6. Sarana dan Prasarana Publik
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, diantaranya melalui:
 - a. peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi);
Peningkatan infrastruktur ini termasuk di dalamnya untuk memenuhi capaian SPM Sarana dan Prasarana layanan dasar Pekerjaan Umum yaitu cakupan layanan air minum dan cakupan layanan sanitasi air limbah domestik;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah.
7. Lingkungan Hidup
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:
 - a. pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
 - d. konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air;
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.
8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui:
 - a. *E-Government/Smart Regency*;
 - b. optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
 - c. peningkatan layanan publik;
 - d. peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
 - f. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan);

- g. meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;
 - h. melanjutkan reformasi birokrasi;
 - i. penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel.
9. Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya melalui:
- a. peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban;
 - b. penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan).
10. Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi, diantaranya melalui:
- a. peningkatan peran serta kepemudaan;
 - b. pembangunan *sport centre* dan pengembangan pembinaan olahraga berprestasi;
 - c. peningkatan pengembangan olahraga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
 - d. penghargaan atlet berprestasi.

Penjabaran implementasi Program Unggulan dalam RPJMD berupa strategi rencana tindak pada Tahun 2020 sudah dilaksanakan oleh seluruh OPD penanggungjawab, namun belum dapat dilakukan pengukuran ketercapaian/keberhasilannya, diantaranya adalah:

1. bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter;
2. peningkatan kesejahteraan guru ngaji;
3. pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin;
4. meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK;
5. penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
6. bantuan ambulan desa;
7. peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah;
8. RTLH plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin;
9. optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa dan dusun);
10. pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM
11. pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumber daya lokal.
12. peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi);
13. pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
14. konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air;

15. *E-Government/ Smart Regency*;
16. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan);
17. meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;
18. peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban;
19. pembangunan *sport centre* dan pengembangan pembinaan olahraga berprestasi;

Masih terdapat beberapa implementasi penjabaran prioritas pembangunan sampai dengan sekarang yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat terutama pembangunan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional Borobudur.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dan dengan adanya pandemi Covid-19 maka pelaksanaan program pembangunan dan program unggulan tersebut harus memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut pula maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian target capaian program unggulan 5 tahun atau target tahunan sehingga dapat diukur tingkat ketercapaian dan penjabaran maupun pelaksanaannya. Program unggulan saat ini masih berkesan menjadi sektor unggulan OPD yang seharusnya dimaknai sebagai program unggulan Kepala Daerah yang harus didukung lintas OPD maupun multi sektor. Di bawah ini gambaran keterkaitan antara visi, misi, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran.



Gambar 5.1.

Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah Tahun 2019-2024

5.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Upaya mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 meliputi 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 14 (empat belas) sasaran daerah dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran daerah yang diuraikan sebagai berikut.

1. Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”.

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.

- a. Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - 1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B;
 - 2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.
 - b. Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - 1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
 - 2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
 - 3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT);
 - c. Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan predikat kabupaten layak anak.
2. Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

- a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.
3. Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”.

Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Adapun sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:

- a. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
- b. meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- e. meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
 Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah”

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	
1.1.1	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia															
	Tujuan: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,58	69,58	69,83	70,25	70,09	70,33	70,57	69,87	70,64	71,03	71,42	71,42	
1.1.1.1	Sasaran: Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	7,86	8	7,89	8,14	8,27	8,41	7,78	8,00	8,11	8,22	8,22	
		2. Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,76	12,92	12,57	13,02	13,17	13,27	12,54	12,60	12,63	12,66	12,66	
		3. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41	94,41	94,79	94,41	95,19	95,56	95,94	93,10	94,79	95,12	95,56	95,56	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	
1.1.1.2	Sasaran: Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4. Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,56	73,61	73,85	73,65	73,7	73,75	73,72	73,97	74,10	74,22	74,22	
1.1.2	Tujuan: Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	2. Inflasi	persen	2,5-4,0	2,5-4,5	2,5-4,0	2,0-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	
		3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.400,64	9.401,64	9.762,42	9.443,22	9.900,38	10.262,16	10.400,12	9.301,00	9.587,62	9.734,22	9.883,06	9.883,06	
		4. Angka Kemiskinan	persen	9,43- 10,43	13,90- 12,80	8,78- 9,78	12,44- 11,52	8,13- 9,13	7,48-8,48	6,83-7,83	11,27	11,27- 10,52	10,67- 9,92	10,07- 9,32	10,07- 9,32	
1.1.2.1	Sasaran: Menurunnya jumlah PMKS	5. Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58	
1.1.2.2	Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6. Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	78,42	78,42	79,47	79,47	80,52	81,57	82,62	81,27	81,30	81,57	82,62	82,62	
1.1.2.4	Sasaran: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	2,4-3,0	5,38- 6,25	2,25- 2,65	4,54- 5,17	2,25- 2,65	2,25-2,60	2,25-2,55	4,27	3,93- 3,87	2,4-3,0	2,25-2,65	2,25-2,65	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023		2024
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia															
1.1.3	Tujuan: Meningkatnya pembangunan berbasis gender	5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	93,21	93,21	93,31	91,91	93,81	94,11	94,41	91,81	92,40	92,70	92,99	92,99	
1.1.3.1	Sasaran: Meningkatnya keberdayaan gender	8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	69,33	69,33	69,63	69,75	69,93	70,23	70,53	69,65	69,93	70,23	70,53	70,53	
		9. Predikat Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	utama	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	
	Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1.2.1	Tujuan: Meningkatnya daya saing daerah	6. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	69,93	69,93	72,98	72,16	76,42	79,83	83,29	66,60	73,45	76,58	82,22	82,22
		7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,1-5,6	1,7 - 2,9	5,2-5,7	3,3-4,3	5,3-5,8	5,4-5,9	5,5-6,0	-1,68	3,4-4,4	3,5-4,5	3,6-4,6	3,6-4,6
		8. PDRB Perkapita	juta rupiah	26,7	26,7	28,21	26,84	29,71	31,21	32,72	24,94	27,78	28,68	29,52	29,52
1.2.1.1	Sasaran: Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (0-100)	72,12	72,12	72,14	71,32	72,16	72,18	72,2	71,30	71,34	71,36	71,38	71,38
1.2.1.2	Sasaran: Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	11. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah***)	persen	67,74	69,93	73,81	73,00	80,68	87,48	94,38	61,90	75,56	81,80	93,07	93,07
1.2.1.3	Sasaran: Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	12. Cakupan hunian layak dan berkualitas**)	persen	63,77	63,77	68,66	-	86,04	90,93	95,81	67,73	-	-	-	-
1.2.1.4	Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13. Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.868,86	4.868,86	5.208,43	5.208,43	5.547,99	5.887,55	6.227,11	4.306,14	5.547,99	5.887,55	6.227,11	6.227,11

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	
		14. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	7.373,16	7.373,16	7.748,63	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	6.914,81	8.124,10	8.499,56	8.875,03	8.875,03	
		15. Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.648,6	7.648,6	8.139,8	8.139,8	8.631	9.122,2	9.613,39	7.264,81	8.631	9.122,2	9.613,39	9.613,39	
		16. Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.523,19	1.523,19	1.630,14	1.630,14	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.274,04	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.951,00	
		17. Pertumbuhan Investasi	persen	5	5	5	5	5	5	5	13	10	10	10	10	
		18. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	82,2	86,42	83,62	83,62	84,99	86,33	87,76	94,00	84,99	86,33	87,76	87,76	
		19. Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	0,68	0,68	0,69	0,69	0,7	0,71	0,72	0,68	0,7	0,71	0,72	0,72	
	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah															
1.3.1	Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka (0-100)	65,53	65,53	67,25	67,25	68,96	70,68	72,39	61,07	68,96	70,68	72,39	72,39	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	
1.3.1.1	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20. Nilai AKIP	Angka (0-100) (huruf)	63,03 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	60,33 (B)	67,01 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	60,33 (B)	61,04 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	65,02 (B)	
1.3.1.2	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka (0-5)	2,31-2,50	2,31-2,50	2,51-2,61	2,51-2,61	2,62-2,72	2,73-2,85	2,86-3,1	2,94	3,0-3,20	3,21-3,40	3,41-3,60	3,41-3,60	
1.3.1.3	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22. Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
1.3.1.4	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka (0-100)	83	83	83,75	83,75	84,5	85,25	86	83,69	84,5	85,25	86	86	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian RPJMD Murni							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian Perubahan RPJMD			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				2020	2020*)	2021	2021*)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1.3.1.5	Sasaran: Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24. Indeks Sistem Merit	angka	0,55	0,55	0,6	0,58	0,66	0,69	0,71	0,60	0,60	0,70	0,76	0,76

Keterangan: *) Target perubahan/berubah akibat adanya pandemi Covid-19

***) Indikator yang tidak menjadi sasaran daerah pada Perubahan RPJMD 2019-2024

****) Indikator yang mengalami perubahan formula perhitungannya pada Perubahan RPJMD 2019-2024

Pada Tabel 5.1 di atas, terdapat pergeseran dimana indikator sasaran daerah meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan indikator cakupan hunian layak dan berkualitas tidak ditargetkan capaiannya di tahun 2021 sampai dengan 2024. Indikator ini bergeser menjadi indikator sasaran pada perangkat daerah yang menangani yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Selain itu, beberapa indikator tujuan dan sasaran pembangunan mengalami penyesuaian target pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Adapun penyesuaian target tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Realisasi capaian target Kabupaten Magelang Tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD;
- b. Target tahun sebelumnya (tahun 2021);
- c. Target Indikator Makro yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Magelang Tahun 2022 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- d. Hasil proyeksi dengan metode statistik;
- e. Hasil Kajian Proyeksi dan Upaya Pencapaian Target IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
- f. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19.

Penjelasan secara rinci untuk penyesuaian target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Pertimbangan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Status Penyesuaian/Tetap	Pertimbangan Dilakukannya Penyesuaian Target
1	2	3	4
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Penyesuaian (naik)	Menggunakan target moderat berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah tentang “Proyeksi dan Upaya Pencapaian Target IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024”
2.	Inflasi	Penyesuaian (naik)	Sesuai dengan target inflasi Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan BPS tidak menghitung inflasi untuk semua Kabupaten/Kota
3.	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Penyesuaian (turun)	Menggunakan target moderat berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah tentang “Proyeksi dan Upaya Pencapaian Target IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024”
4.	Angka Kemiskinan	Penyesuaian (naik)	Target angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2022 sesuai target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Adapun target angka kemiskinan untuk tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Magelang diproyeksikan turun 0,6% per tahun (sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan per tahun yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024)
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penyesuaian (turun)	Target disesuaikan dengan perhitungan 98,5% dari nilai target RPJMD Murni per tahun dengan pertimbangan bahwa realisasi IPG tahun 2020 adalah sebesar 98,5% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020 pada RPJMD Murni
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Penyesuaian (turun)	Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik 0,1% (sesuai dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024) dengan angka dasar menggunakan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Tahun 2021 ditetapkan menjadi tahun dasar perhitungan ulang target untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 karena adanya Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Status Penyesuaian/Tetap	Pertimbangan Dilakukannya Penyesuaian Target
1	2	3	4
7.	PDRB Per Kapita	Penyesuaian (turun)	<p>Berdasarkan pada proyeksi ulang (menggunakan metode <i>forecasting</i>) dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari sensus ke sensus sebesar 9,09%. 2) Rata-rata LPP tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,9574% per tahun. 3) PDRB ADHB menggunakan metode forward forecasting 5 tahun, dengan X0 pada tahun 2015
8.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	Penyesuaian (turun)	<p>Terdapat perubahan rumus perhitungan</p> <p>Semula, Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan = $0,5 \times (\text{Persentase ketercapaian IKLH} + (\text{Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang} + \text{Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan})/2)$</p> <p>Menjadi, Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan = $0,5 \times (\text{Persentase ketercapaian IKLH} + ((\text{Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang} + \text{Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)} + \text{Cakupan pembangunan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman})/3)$</p>
9.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Tetap	Pandemi Covid-19 tidak menjadi alasan untuk melakukan penyesuaian target IRB namun kinerja ASN yang harus ditingkatkan agar target IRB tercapai

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Tujuan pertama dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dan meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan
- c. Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
- d. Meningkatkan pengelolaan kebudayaan
- e. Meningkatkan minat baca masyarakat
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat
- g. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan pendidikan formal/kesetaraan
- b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Meningkatkan kapasitas daya saing olahraga
- d. Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda
- e. Meningkatkan pengembangan kebudayaan
- f. Meningkatkan pengembangan kesenian tradisional
- g. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- h. Meningkatkan pembinaan perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca
- i. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

- j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
- k. Meningkatkan ketersediaan farmasi, dan alat kesehatan serta penjaminan kesehatan makanan minuman di masyarakat
- l. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- m. Meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit termasuk pemenuhan sarana, prasarana dan SPM rumah sakit
- n. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan KB, dan kesehatan reproduksi
- o. Meningkatkan pengendalian penduduk
- p. Meningkatkan pemberdayaan pembangunan ketahanan keluarga

Tujuan kedua dalam misi pertama ini adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan sasaran: 1) menurunnya jumlah PMKS, 2) terwujudnya stabilitas tingkat pengangguran terbuka, dan 3). meningkatnya ketahanan pangan daerah. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan penanganan PMKS
- b. Meningkatkan akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi tenaga kerja
- c. Meningkatkan ketahanan pangan

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan rehabilitasi sosial,
- b. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Meningkatkan penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
- d. Meningkatkan pemberdayaan sosial
- e. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif
- f. Meningkatkan sarana, prasarana, jumlah instruktur pelatihan, serta produktivitas tenaga kerja
- g. Meningkatkan hubungan industrial dengan stakeholder
- h. Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan
- i. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- j. Menanggulangi kerawanan pangan masyarakat
- k. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat

Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan sasaran meningkatnya keberdayaan gender. Strategi yang akan ditempuh adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Adapun arah kebijakannya adalah :

- a. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

- perempuan
 - b. Meningkatkan perlindungan perempuan
 - c. Meningkatkan perlindungan terhadap anak
 - d. Meningkatkan pemenuhan hak anak
2. Misi Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
- Misi ini ingin mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi.
- Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
- Tujuan dalam misi ini adalah meningkatnya daya saing daerah dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu: 1) meningkatnya daya saing ekonomi daerah, 2) tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik, dan 3) meningkatnya cakupan layanan infrastruktur
- Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan misi dan sasaran ini adalah :
- a. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri
 - b. Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing
 - c. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
 - d. Meningkatkan kinerja UMKM.
 - e. Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan
 - f. Meningkatkan pelayanan investasi di daerah.
 - g. Meningkatkan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
 - h. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana
 - i. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
 - j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
 - k. Mengembangkan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
 - l. Mengembangkan produk peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
 - m. Mengembangkan produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
 - n. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
 - o. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

- p. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas
- q. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan data industri
- c. Menjaga stabilisasi harga barang terutama barang kebutuhan pokok dan barang penting
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan
- e. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- f. Mengembangkan ekspor
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar rakyat untuk menunjang peningkatan sektor perdagangan
- h. Mengoptimalkan standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen
- i. Optimalisasi kelembagaan koperasi
- j. Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi
- k. Meningkatkan omzet penjualan produk usaha mikro.
- l. Meningkatkan keberdayaan UMKM
- m. Meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata
- n. Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- o. Meningkatkan pemasaran pariwisata
- p. Mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif
- q. Mengembangkan sebaran investasi PMA dan PMDN
- r. Meningkatkan upaya promosi penanaman modal
- s. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- t. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- u. Meningkatkan pelayanan penanaman modal terutama kepatuhan terhadap SOP perizinan dan pengembangan perizinan berbasis IT
- v. Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan Trantibumlinmas
- w. Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
- x. Meningkatkan penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak
- y. Menguatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
- z. Meningkatkan keberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- aa. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

- bb. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial
- cc. Peningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- dd. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa untuk mendukung kemandirian desa
- ee. Meningkatkan kerjasama desa
- ff. Meningkatkan fasilitasi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- gg. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya
- hh. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian
- ii. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- jj. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- kk. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha pertanian
- ll. Penguatan penyuluhan pertanian
- mm. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan
- nn. Mengoptimalkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- oo. Mengoptimalkan perizinan usaha sektor pertanian sub sektor peternakan, khususnya pengawasan peredaran obat hewan
- pp. Meningkatkan penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan
- qq. Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya
- rr. Meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan
- ss. Meningkatkan kualitas dan jenis produk olahan hasil perikanan serta pemasarannya
- tt. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- uu. Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- vv. Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
- ww. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- xx. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas
- yy. Meningkatkan penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup
- zz. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
- aaa. Meningkatkan pengakuan dan pembinaan terhadap masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait PPLH

- bbb. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- ccc. Meningkatkan penyelenggaraan jalan
- ddd. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
- eee. Meningkatkan penataan bangunan gedung
- fff. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
- ggg. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- hhh. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- iii. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- jjj. Meningkatkan pengembangan permukiman
- kkk. Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS
- lll. Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi
- mmm. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
- nnn. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- ooo. Meningkatkan pengembangan perumahan
- ppp. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU di kawasan permukiman yang diduga kumuh
- qqq. Meningkatkan penanganan PSU perumahan
- rrr. Meningkatkan layanan sertifikasi kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perumahan
- sss. Meningkatkan kawasan permukiman layak
- ttt. Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

3. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator kinerja tujuan adalah indeks reformasi birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu: 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, 2) meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3) meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, 4) meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan 5) meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi dan sasaran ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan Pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- c. Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah
- d. Meningkatkan fasilitasi layanan lembaga DPRD
- e. Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan

- elayanan publik di kecamatan
- f. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah
 - g. Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah
 - h. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - i. Meningkatkan pelaksanaan *e-government*
 - j. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - k. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
 - l. Meningkatnya pengelolaan aset daerah
 - m. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - n. Meningkatkan pelayanan kearsipan
 - o. Meningkatkan kualitas aparatur

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan
- b. Mengoptimalkan perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- c. Meningkatkan kualitas penataan organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum kesekretariatan daerah
- d. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan
- f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- g. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
- h. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
- i. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- j. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- k. Meningkatkan implementasi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
- l. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah
- m. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan
- n. Meningkatkan mutu perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan
- o. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
- p. Meningkatkan diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat

- q. Menyediakan sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar
- r. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik
- s. Meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan
- t. Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
- u. Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan aset daerah
- v. Meningkatkan pendataan dan penataan administrasi kependudukan
- w. Meningkatkan pencatatan sipil terutama kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan
- x. Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
- y. Meningkatkan pengelolaan profil kependudukan
- z. Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan
- aa. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
- bb. Optimalisasi kepegawaian daerah terutama pemenuhan formasi ASN, layanan pemberhentian dan pengembangan informasi

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Pendidikan Formal/kesetaraan
			Meningkatkan mutu pendidikan	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga	Meningkatkan kapasitas daya saing olahraga
				Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda
			Meningkatkan pengelolaan kebudayaan	Meningkatkan pengembangan kebudayaan
				Meningkatkan pengembangan kesenian tradisional
				Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan minat baca masyarakat	Meningkatkan pembinaan perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
				Meningkatkan ketersediaan farmasi, dan alat kesehatan serta penjaminan kesehatan makanan minuman di masyarakat
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
				Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan pengendalian penduduk
				Meningkatkan pemberdayaan pembangunan ketahanan keluarga
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan rehabilitasi sosial
				Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
				Meningkatkan penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
				Meningkatkan pemberdayaan sosial
		Terwujudnya stabilitas tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan sarana, prasarana, jumlah Instruktur pelatihan, serta produktivitas Tenaga kerja
				Meningkatkan hubungan industrial dengan stakeholder
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan
				Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Menanggulangi kerawanan pangan Masyarakat			
	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat			
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender	Meningkatnya keberdayaan gender	Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
				Meningkatkan perlindungan perempuan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan perlindungan terhadap anak
				Meningkatkan pemenuhan hak anak
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Optimalisasi perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri
				Meningkatkan kualitas pengelolaan data industri
			Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Menjaga stabilisasi harga barang terutama barang kebutuhan pokok dan barang penting
				Meningkatkan pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
				Mengembangkan ekspor
				Meningkatkan sarana dan prasarana pasar rakyat untuk

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				menunjang peningkatan sektor perdagangan
				Mengoptimalkan standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen
			Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Optimalisasi kelembagaan koperasi
				Meningkatkan kapasitas SDM koperasi
			Meningkatkan kinerja UMKM.	Meningkatkan omzet penjualan produk usaha mikro.
				Meningkatkan keberdayaan UMKM
			Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Meningkatkan atraksi, amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata
				Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
				Meningkatkan pemasaran pariwisata
				Mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pengembangan ekonomi kreatif
			Meningkatkan pelayanan investasi di daerah	Mengembangkan sebaran investasi PMA dan PMDN
			Meningkatkan pelayanan perijinan	Meningkatkan upaya promosi penanaman modal
				Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
				Meningkatkan pelayanan penanaman modal terutama kepatuhan terhadap SOP perizinan dan pengembangan perizinan berbasis IT
			Meningkatkan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan trantibumlinmas
				Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				non kebakaran
			Meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
				Meningkatkan keberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
				Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
				Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial
				Peningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Desa	Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa untuk mendukung kemandirian desa
				Meningkatkan kerjasama desa
				Meningkatkan fasilitasi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa
				Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya
			Mengembangkan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian
				Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Pengendalian dan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penanggulangan bencana pertanian
				Meningkatkan pelayanan perizinan usaha pertanian
				Penguatan penyuluhan pertanian
			Mengembangkan produk peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan
				Mengoptimalkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
				Mengoptimalkan perizinan usaha sektor pertanian sub sektor peternakan, khususnya pengawasan peredaran obat hewan
				Meningkatkan penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengembangkan produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya
				Meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan
				Meningkatkan kualitas dan jenis produk olahan hasil perikanan serta pemasarannya
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
				Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
				Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatkan penyelenggaraan jalan
				Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
				Meningkatkan penataan bangunan gedung
				Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
				Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
				Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
				Meningkatkan pengembangan permukiman
				Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS
				Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi
				Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
				Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
			Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan pengembangan perumahan
				Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU di kawasan permukiman yang diduga kumuh
				Meningkatkan penanganan PSU perumahan
				Meningkatkan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan kawasan permukiman layak
			Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Mengoptimalkan perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan
			Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Mengoptimalkan perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Meningkatkan kualitas penataan organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum kesekretariatan daerah
			Meningkatkan fasilitasi layanan lembaga DPRD	Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
				Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
				Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatkan kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan	Peningkatan implementasi Penelitian dan Pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			teknologi dan inovasi daerah	Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan
				Meningkatkan mutu perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan
			Meningkatkan pelaksanaan <i>e-government</i>	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
				Meningkatkan diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat
				Menyediakan sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar
				Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan
			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya pengelolaan aset daerah	Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan aset daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pendataan dan penataan administrasi kependudukan
				Meningkatkan pencatatan sipil terutama kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian
				Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

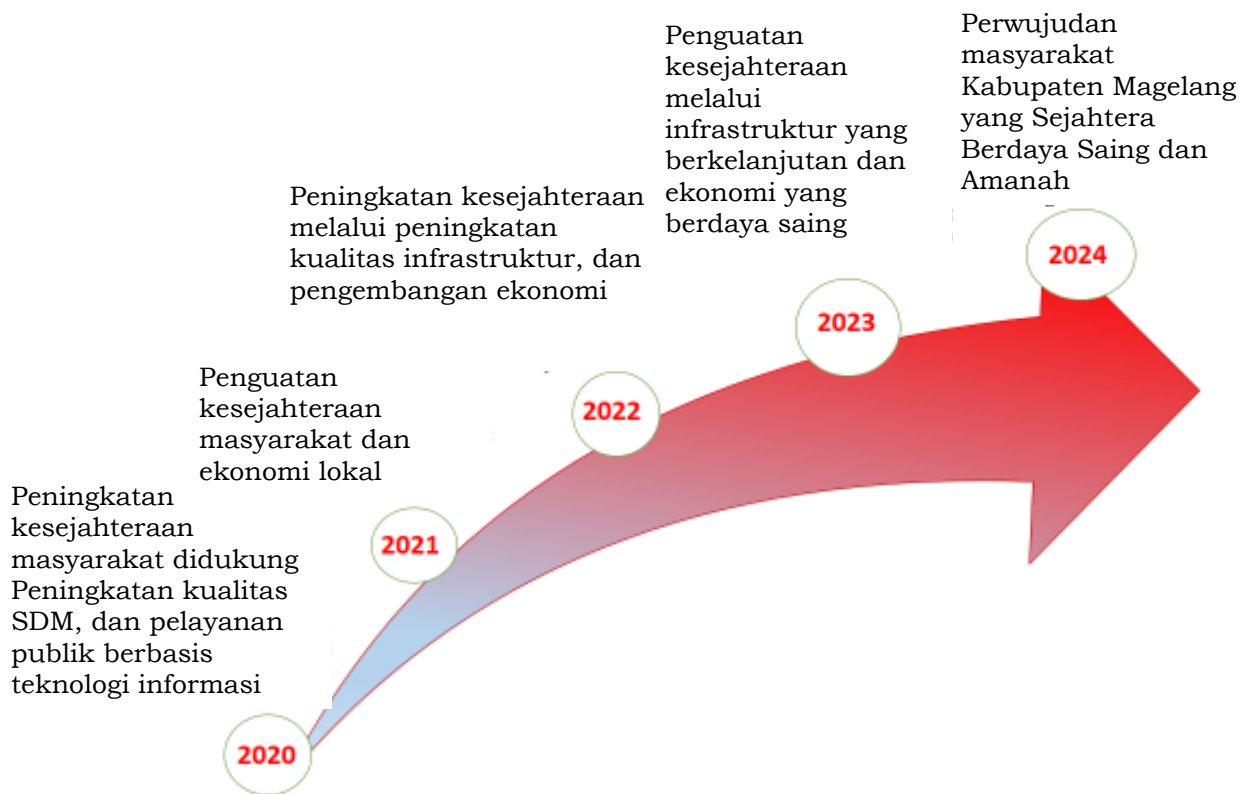
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				kependudukan
				Meningkatkan pengelolaan profil kependudukan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan kearsipan	Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian		Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	Meningkatkan kualitas aparatur	Optimalisasi kepegawaian daerah terutama pemenuhan formasi ASN, layanan pemberhentian dan pengembangan informasi
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2021; data diolah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Gambar 6.1.

Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Tahun 2020-2024



1. Arah Kebijakan Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang lima tahun kedepan. Fokus Pembangunan tahun 2020 adalah Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Pendidikan Formal/kesetaraan
- b. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
- d. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU di kawasan permukiman yang diduga kumuh
- e. Meningkatkan pengembangan perumahan

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan jalan
 - c. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
2. Arah Kebijakan Tahun 2021
- Fokus Pembangunan tahun 2021 semula Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemerataan Infrastruktur Publik disesuaikan menjadi Penguatan Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi Lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Pendidikan Formal/kesetaraan
 - b. Meningkatkan ketersediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan serta kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU di kawasan perumahan yang diduga kumuh
 - d. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - f. Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - g. Meningkatkan keberdayaan UMKM
 - h. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 - i. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya
 - j. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
 - k. Meningkatkan diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat
 - l. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
3. Arah Kebijakan Tahun 2022
- Fokus Pembangunan tahun 2022 semula Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal disesuaikan menjadi Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas SDM, kualitas infrastruktur, dan pengembangan ekonomi, dengan arah kebijakan meliputi:
- a. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
 - c. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - d. Penguatan penyuluhan pertanian
 - e. Meningkatkan penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar rakyat untuk menunjang

- peningkatan sektor perdagangan
 - g. Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi
 - h. Meningkatkan kawasan permukiman layak
 - i. Meningkatkan omzet penjualan produk usaha mikro
 - j. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif
 - k. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa untuk mendukung kemandirian desa
4. Arah Kebijakan Tahun 2023
- Fokus Pembangunan Tahun 2023 semula Penguatan kesejahteraan melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang berdaya saing disesuaikan menjadi Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing, dengan arah kebijakan meliputi :
- a. Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
 - c. Meningkatkan pemberdayaan sosial
 - d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
 - e. Mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
 - f. Meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing
 - g. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif
 - h. Meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata
 - i. Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan
 - j. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
 - k. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
5. Arah Kebijakan Tahun 2024
- Fokus pembangunan Tahun 2024 adalah Perwujudan masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah, dengan arah kebijakan meliputi :
- a. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - b. Mewujudkan ketahanan pangan daerah
 - c. Menjamin ketahanan infrastruktur yang berkualitas
 - d. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - e. Mengembangkan ekonomi kreatif
 - f. Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak,
 - g. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - h. Meningkatkan kualitas aparatur

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Implementasi program unggulan ini antara lain melalui:

a. Pembangunan *Islamic Center*

Pembangunan *Islamic Center* pada periode tahun 2019-2024 direncanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan *feasibility study* (FS), penyusunan *masterplan* pembangunan *Islamic Center*, pengadaan tanah, penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (*Detail Engineering Design*, dokumen lingkungan, dokumen analisis dampak lalu lintas) dan tahap pembangunan fisik. *Islamic Center* dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Magelang.

Pembangunan *Islamic Center* akan diintegrasikan dengan pembangunan MAJT di Kabupaten Magelang.

b. Bantuan pembangunan tempat ibadah

Pemerintah Kabupaten Magelang pada saat ini sudah memberikan bantuan pembangunan untuk tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, kapel dan wihara. Bantuan ini akan tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada periode pembangunan tahun 2019-2024 melalui mekanisme hibah.

c. Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter. Bantuan ini menggunakan mekanisme hibah dengan nominal tertentu, yang didukung dengan regulasi yang mengatur tentang besaran hibah dan teknis pelaksanaan penyaluran hibah.

d. Peningkatan kesejahteraan guru mengaji

Implementasi pemberian bantuan kepada guru mengaji harus didukung data yang valid dan lengkap. Sumber data guru mengaji berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Guna memenuhi ketersediaan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan koordinasi dan advokasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Untuk menghindari pelanggaran implementasi bantuan kepada guru mengaji, perlu disusun regulasi yang menjadi payung hukum atau memasukkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati Magelang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

2. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang antara lain terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan akses pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan antara lain diarahkan pada beasiswa bagi siswa miskin

untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. pemberian beasiswa bagi siswa miskin;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
- c. meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK;
- d. peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut;
- e. fasilitasi peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan kejuruan.

3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas yang ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta upaya peningkatan manajemen kesehatan melalui partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat. Sebagai bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam bidang kesehatan, telah ditetapkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu dari sepuluh prioritas pembangunan.

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, diantaranya adalah fasilitas puskesmas dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat dan merata hingga pelosok wilayah.

Adapun strategi yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas diatas dilakukan melalui:

- a. Bantuan ambulan desa
Pemerintah Kabupaten Magelang berencana akan memberikan bantuan ambulan desa khususnya bagi desa kategori merah (miskin) dan rawan bencana pada periode 2019-2024 melalui mekanisme bantuan keuangan.
- b. Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap
Pemerintah Kabupaten Magelang pada saat ini memiliki 9 puskesmas rawat inap. Pada periode RPJMD Tahun 2019-2024 akan ditingkatkan menjadi 12 puskesmas rawat inap untuk melayani wilayah yang jaraknya jauh dari rumah sakit.
- c. Peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit
Pada saat ini Kabupaten Magelang telah meningkatkan status Puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit kelas D yaitu Puskesmas Salaman 1. Pada periode 2019-2024 akan ditambah dengan peningkatan status Puskesmas Rawat Inap Grabag 1 menjadi rumah

- sakit kelas D untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah
Rumah Sakit Daerah Merah Putih telah beroperasi mulai tahun 2020. Hal ini sebagai upaya dalam pelayanan kesehatan masyarakat selain Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Pada periode 2019-2024 akan terus ditingkatkan pelayanannya, sehingga masyarakat akan dapat menggunakan layanan yang memuaskan.
 - e. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit
Pada periode 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus meningkatkan sarana dan prasarana di 29 puskesmas baik puskesmas rawat inap, puskesmas rawat jalan maupun rumah sakit sesuai kebutuhan dengan standar yang diatur oleh pemerintah.
 - f. Peningkatan kesejahteraan kader posyandu
Pemerintah Kabupaten Magelang akan memberikan bantuan operasional Posyandu yang di dalamnya termasuk untuk peningkatan kesejahteraan kader Posyandu
 - g. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan.
4. Penanggulangan Kemiskinan
- Dalam rangka meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Upaya percepatan tersebut dimulai dari penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran dan penguatan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.
- Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, diantaranya melalui:
- a. RTLH Plus dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial.
Sasaran penanganan bantuan RTLH Plus yaitu:
 - 1) seluruh masyarakat yang termasuk data *by name by adres* yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 2) penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;

- 3) masyarakat yang tidak termasuk data *by name by address* pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari OPD pelaksana.
 - b. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun). Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor.
 - c. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jaminan kesehatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS melalui peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, dengan pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif dan terlantar, penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin, serta peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pemberdayaan sosial dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial.
 - d. Bantuan modal dan alat bagi warga miskin. Kebijakan pemberian bantuan modal, bantuan alat dan pelatihan ketrampilan ditujukan untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
5. Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM
- Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Magelang diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Sedangkan pembangunan kepariwisataan meliputi aspek destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. UKM di Kabupaten Magelang selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Masalah klasik yang dihadapi UKM yakni akses pasar, modal, dan teknologi. Pengembangan pertanian, pariwisata dan UKM untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:
- a. pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik;
 - b. pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat;
 - c. pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis;
 - d. pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
 - e. pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumber daya lokal.

6. Sarana dan Prasarana Publik

Prioritas sarana dan prasarana publik diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, diantaranya melalui:

- a. peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi)

Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan dalam rangka memenuhi ketersediaan jalan sesuai peraturan perundangan peraturan perundangan dan pembangunan jalan berbasis pengembangan wilayah. Di dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud jalan adalah kesatuan jalan (lajur yang digunakan untuk lalu lintas) beserta bangunan pelengkapannya, seperti jembatan, trotoar, drainase, dan talud penahan jalan. Ketersediaan jalan sesuai peraturan perundangan meliputi :

- 1) pelebaran jalan dan jembatan kabupaten sampai dengan lebar standar jalan kabupaten;
- 2) pembangunan jalan yang terintegrasi dengan bangunan pelengkap jalan berupa drainase dan trotoar di kawasan perkotaan dan ibukota-ibukota kecamatan; dan
- 3) pembangunan jalan yang terintegrasi dengan bangunan pelengkap jalan berupa talud/dinding penahan jalan di kawasan-kawasan yang memiliki topografi yang cukup ekstrim dan rawan longsor.

Sedangkan pembangunan jalan yang berbasis pengembangan wilayah dilaksanakan pada kawasan-kawasan strategis dan kawasan potensial sebagai pusat pertumbuhan, meliputi :

- 1) kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan;
- 2) kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur ;
- 3) kawasan strategis/kawasan potensial lainnya seperti kawasan peruntukan industri;
- 4) kawasan rawan bencana melalui pembangunan jalan-jalan evakuasi dalam rangka mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam konsep pengembangan wilayah

Kondisi wilayah Kabupaten Magelang yang sebagian besar merupakan daerah tangkapan air hujan, dan berada di DAS Progo – Bogowonto dengan curah hujan potensial 4.067,14 m³/tahun, memberikan arti bahwa ketersediaan air di Kabupaten Magelang cukup berlimpah. Melalui peningkatan infrastruktur bendung, pembangunan 6 buah embung sampai dengan tahun 2024, dan peningkatan saluran beserta bangunan irigasi di Daerah Irigasi dimaksudkan untuk menggali potensi ketersediaan air baku dan

menjamin ketersediaan dan distribusi air baku tetap terjaga, sehingga diharapkan konflik pemanfaatan air baku untuk air minum dan air irigasi dapat dihindarkan. Dengan terjaganya ketersediaan air baku untuk irigasi dan didukung peningkatan infrastruktur irigasi dapat mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian.

Sarana dan prasarana ekonomi pada suatu wilayah dibutuhkan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana ekonomi perlu dianalisis untuk melihat jangkauan pelayanan dari ketersediaan fasilitas ekonomi yang mencakup seluruh penduduk pada suatu wilayah atau bahkan wilayah sekitarnya. Sarana dan prasarana ekonomi mencakup pasar, warung, toko, hotel, rumah makan atau restoran.

- b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah.

Kabupaten Magelang memiliki banyak kawasan potensial yang dapat dikembangkan guna memberikan *multiplier effect* yang lebih luas bagi wilayah di sekitarnya. Pengembangan kawasan-kawasan potensial sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang mendukung terciptanya interaksi antara dua kawasan atau lebih. Adanya hubungan antara dua kawasan dalam memenuhi suatu kebutuhan dan tersedianya sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas akan memicu terjadinya arus pergerakan baik barang ataupun orang antarkawasan tersebut.

7. Lingkungan Hidup

Prioritas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat

Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemanfaatan potensi yang ada di kawasan Borobudur, Merapi dan Sumbing dengan tetap memperhatikan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada.

Secara pengaturan tata ruang di Borobudur dan Merapi secara detail mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

- b. Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri dari dua hal pokok yaitu pengurangan sampah

dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat masuk dalam pengurangan sampah yang dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Permasalahan persampahan di Kabupaten Magelang sudah sangat mendesak untuk dicarikan solusi. Keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir sampah tidak memungkinkan untuk menampung semua timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu perlu upaya pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mencakup *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Salah satu wujud dari upaya tersebut adalah fasilitasi pembentukan bank sampah dan pembangunan TPS3R yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat. Pembentukan bank sampah ini dinilai sangat efektif untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar melakukan pemilahan dari tingkat keluarga sehingga dapat mengurangi beban sampah yang harus diolah di TPA. Disamping itu perlu upaya pengurangan sampah dengan incinerator yang berizin.

c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan

Penanganan sampah di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penyediaan layanan kebersihan di 10 (sepuluh) kecamatan meliputi Kecamatan Mungkid, Muntilan, Borobudur, Salaman, Mertoyudan, Secang, Grabag, Tegalrejo, Bandongan, dan Salam. Namun demikian, pelayanan yang menjangkau sampai tingkat rumah tangga hanya mencakup 7 (tujuh) kecamatan, sedangkan 3 (tiga) kecamatan lainnya yaitu Tegalrejo, Bandongan, dan Salam masih berupa layanan pengangkutan sampah dari pasar, sapuan jalan dan kebersihan taman.

Penanganan sampah meliputi tiga cara yaitu: 1) pengolahan sampah menjadi bahan baku, 2) pengolahan sampah menjadi sumber energi, dan 3) pemrosesan akhir sampah. Sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kabupaten Magelang masih sangat terbatas.

Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini menyelenggarakan pengolahan sampah melalui TPS3R dan TPA. Pengolahan sampah di TPS3R dilakukan dengan cara pemanfaatan kembali sampah yang bernilai ekonomi dan pengomposan. Sedangkan pengolahan sampah di TPA dilakukan pemrosesan akhir secara sederhana dengan menggunakan teknologi *semi controlled landfill, recovery* plastik oleh pemulung, dan pengomposan. Belum ada penerapan teknologi untuk pengolahan sampah di TPA menjadi sumber energi.

Sampai dengan saat ini, Kabupaten Magelang hanya mempunyai satu tempat pemrosesan akhir sampah yaitu TPA Pasuruhan seluas 1,7 ha. Kondisi saat ini TPA tersebut sudah melebihi kemampuan daya tampung sehingga perlu ada alternatif solusi untuk pengolahan

sampah di TPST dan pusat daur ulang sampah. Selain itu perlu juga pembangunan rumah kompos untuk menampung sampah organik dari bank sampah dan TPS3R. Berkaitan dengan sarana persampahan, perlu adanya prioritas penyediaan sarana persampahan meliputi sarana pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

TPST Regional di Kabupaten dibangun sebagai salah satu solusi untuk mengatasi over capacity TPA Pasuruhan. TPST Regional Kabupaten Magelang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Untuk penanganan sampah di Kawasan Borobudur dan sekitarnya perlu Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur.

d. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air

Konservasi lingkungan hidup dimaknai sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Salah satu bentuk konservasi lingkungan hidup yang menjadi prioritas adalah perlindungan mata air.

Perlindungan mata air menjadi prioritas unggulan Kabupaten Magelang didasarkan pada ketersediaan mata air akan mempengaruhi ketersediaan air di Kabupaten Magelang. Dengan demikian perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong keberlanjutan mata air, dimulai dari penyusunan profil mata air secara berkelanjutan, penyusunan kajian kerentanan mata air, dan penyusunan kajian lainnya sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menjaga keberlangsungan mata air di Kabupaten Magelang.

e. Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018, didapatkan hasil bahwa RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Magelang sebesar 1,88% merupakan RTH publik dan 37,71% merupakan RTH privat. Dengan demikian masih diperlukan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Magelang. Selain memenuhi amanah UU, penyediaan RTH ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan indeks kualitas tutupan lahan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *universal acces* 100-0-100 yaitu target 100% akses masyarakat terhadap air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah penataan hunian kumuh. Penataan hunian kumuh

meliputi penanganan kawasan hunian kumuh dan pencegahan hunian yang berpotensi kumuh. Penanganan hunian kumuh dilakukan pada 9 (sembilan) kawasan seluas 85,09 ha sebagaimana yang tertuang pada SK Bupati Nomor 188.45/498/KEP/25/2014. Sedangkan pencegahan hunian yang berpotensi kumuh diarahkan pada kawasan perumahan dan permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, baik yang berada di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, ataupun kawasan strategis. Kriteria penanganan hunian kumuh mengacu pada Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Program prioritas ini diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui:

- a. *E-Government / Smart Regency*;
- b. optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, Obligasi Daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
- c. peningkatan layanan publik;
- d. peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
- e. sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
- f. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan);
- g. meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;
- h. melanjutkan reformasi birokrasi;
- i. penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel.

9. Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya melalui:

- a. peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban;
- b. penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan).

Berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

10. Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pengarusutamaan pemuda dimaksudkan sebagai strategi yang sistematis untuk melibatkan pemuda dalam setiap level struktur, pengambilan kebijakan dan proses pembangunan. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana keterlibatan dimungkinkan terjadi. Dalam hal ini pemerintah harus membuka semua pintu partisipasi dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda dan memiliki paradigma positif tentang kepentingan pemuda, dimana pemuda harus dilihat sebagai aset dan stakeholder utama dalam pembangunan sehingga aspirasi, kepentingan dan cita-cita mereka menjadi paradigma utama pembangunan.

Sedangkan peran olahraga dalam mendukung terciptanya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab, dan kerja sama. Peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi, diantaranya melalui:

- a. peningkatan peran serta kepemudaan;
- b. pembangunan *sport centre* dan pengembangan pembinaan olahraga berprestasi;
- c. peningkatan pengembangan olahraga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
- d. penghargaan atlet berprestasi.

Penjabaran program prioritas daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.2.
Implementasi Program Prioritas Daerah Tahun 2019 – 2024

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kehidupan beragama dan akhlak mulia				
	a. Pembangunan <i>Islamic Center</i>	- Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	Pengadaan tanah	BPPKAD	Pembangunan <i>Islamic Center</i> akan diintegrasikan dengan pembangunan MAJT di Kabupaten Magelang.
	b. Bantuan Pembangunan tempat ibadah	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan stimulan untuk pembangunan tempat ibadah dalam bentuk Belanja hibah untuk pembangunan tempat ibadah	Bagian Kesra Setda	Jumlah tempat ibadah sebanyak 3.932 unit
	c. Bantuan Kepada ormas Keagamaan, Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA, TPQ, Majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belanja Hibah untuk ormas Keagamaan, Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA, TPQ, Majelis taklim	Bagian Kesra Setda	Jumlah calon penerima sebanyak 2.316 unit

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	d. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemberian hibah uang untuk peningkatan kesejahteraan kepada guru rohani	Bagian Kesra Setda	Jumlah guru rohani sejumlah 3.932 orang
2	Pendidikan				
	a. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin	- Program Pengelolaan Pendidikan	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin melalui Belanja Bantuan Sosial a. Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD di 21 Kecamatan b. Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SMP di 21 Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	b. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan a. Peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan kemasyarakatan b. Pembangunan talud dan mebelair SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	<p>d. Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK</p> <p>e. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut.</p>	<p>- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>c. Peningkatan mutu sarana dan prasarana SMP antara lain melalui: pembangunan talud, pengadaan komputer jaringan, pengadaan komputer personal pada jenjang SMP</p> <p>d. Pembangunan dan rehap gedung sekolah</p> <p>a. Pemberian insentif bagi GTT dan PTT di sekolah negeri</p> <p>b. Pemberian insentif bagi GTT dan PTT di sekolah swasta</p> <p>Pemberian beasiswa sekolah lanjut berupa biaya SPP bagi pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	c. Fasilitasi Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. d. Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan SMA dan SMK ke pemerintah Provinsi Peningkatan keahlian/ keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disperinaker	
3	Kesehatan				
	a. Bantuan Ambulan Desa	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bantuan ambulan desa akan diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa. Bantuan ambulan dipergunakan untuk sarana transportasi warga yang menderita sakit khususnya diperuntukan bagi desa yang masuk dalam kategori miskin dan rawan bencana	BPPKAD dan Dinkes	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	b. Mengoptimalkan layanan Puskesmas Rawat Inap	- Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan layanan melalui 12 Puskesmas rawat inap.	Dinas Kesehatan	
	c. Peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit (Grabag dan Salaman).	- Program Pelayanan Kesehatan	Rumah sakit tipe D yang menyediakan fasilitas gratis untuk pasien kelas III. Peningkatan status Puskesmas menjadi rumah sakit (Grabag 1 dan Salaman 1)	Dinas Kesehatan	
	d. Peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah	- Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Meningkatkan nilai akreditasi	RSUD Muntilan	
	e. Peningkatan sarana prasarna puskesmas dan rumah sakit	- Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Meningkatkan nilai akreditasi	Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	e. Peningkatan kesejahteraan kader posyandu	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bantuan operasional Posyandu melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus, di dalamnya termasuk untuk peningkatan kesejahteraan kader Posyandu	BPPKAD dan Dispermades	
	f. Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan. SDM	- Program Sumber Daya Kesehatan	Penambahan jumlah tenaga medis dan para medis melalui CPNS dan P3K	Dinas Kesehatan	
4	Penanggulangan Kemiskinan				
	a. RTLH Plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin	- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin agar memiliki rumah yang layak huni, bersanitasi layak. Basis data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	DPRKP	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	b. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun)	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi kinerja TKPK tingkat Kabupaten-Dusun melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas antara pelaku kepentingan lintas sektor yang bertujuan untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan	Bappeda dan Litbangda, Dinsos PPKB PPPA	
	c. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel	- Program Perlindungan dan jaminan sosial	Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Dinsos PPKB PPPA	Tahun 2019 sebanyak ±68.000 jiwa.
	d. Bantuan Modal dan Alat bagi warga miskin	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Bantuan Sosial untuk rumah tangga miskin berupa bantuan sarana produksi, unggas, bibit ikan, bibit tanaman dan ternak	Distan dan Pangan, Dispeterikan, Disdagkop UKM	Sasaran utama program adalah kepala rumah tangga miskin yang mata pencahariannya sebagai buruh tani dan pemberian bantuan sarana produksi, unggas, bibit ikan, bibit

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
					tanaman dan ternak
5	Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UMKM				
	a. Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk Pertanian Organik	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Penyuluhan Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 	<p>Perluasan lahan bersertifikasi organik dan membangun organik center, dengan jenis komoditas yang dikembangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padi di Kawasan Merapi Merbabu, Kawasan Sumbing dan Kawasan Telomoyo; 2. Kopi di Grabag; 3. Salak di Srumbung; 4. Kelapa di Candimulyo; 5. Sayuran dataran tinggi di Pakis, Ngablak, Sawangan, Dukun, Kaliangkrik, Kajoran dan Windusari. 	Distanpangan Dispeterikan	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			<p>Agribisnis berorientasi pasar yang dikembangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopi arabica di Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngabak, Dukun, dan Sawangan. 2. Kelengkeng di Borobudur. 3. Durian, duku, manggis di Tempuran, Candimulyo, Tegalrejo dan Salaman. 4. Tanaman rempah dan obat-obatan di Tempuran, Grabag dan daerah lainnya. 5. Bawang putih di Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Ngablak, Pakis dan Sawangan. 6. Sapi potong di Ngablak, Pakis, Sawangan. 7. Sapi perah di Ngablak. 8. Berbagai jenis ikan, baik benih maupun konsumsi melalui Gerakan Seribu Kolam. 		

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	<p>b. Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat</p> <p>c. Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis</p> <p>d. Pembangunan Pusat Seni Budaya dan Pariwisata/ Anjungan Cerdas</p> <p>e. Pemberdayaan UKM dan Koperasi berbasis sumberdaya lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat b. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif c. Pembinaan desa wisata a. Pengembangan destinasi wisata b. <i>Destination Branding</i> Fasilitasi dan advokasi ke Pemerintah Pusat Pembinaan koperasi sehat, penataan pedagang kaki lima, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi pelaku UKM 	<p>Disparpora</p> <p>Disparpora</p> <p>Disparpora</p> <p>Disdagkop UKM</p>	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
6	Sarana dan Prasarana Publik				
	a. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi).	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan drainase, pembangunan trotoar, pelebaran jalan kabupaten, dan pelebaran jembatan b. Pembangunan saluran irigasi dan bangunan irigasi, pembangunan embung c. Pembangunan landmark di kawasan perbatasan, pembangunan sarpras air minum dan sanitasi dan Pembangunan 1 unit IPLT 	DPUPR	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penataan dan penyediaan angkutan, penyediaan: halte, terminal, dan sarpras lainnya yang mendukung pertumbuhan wilayah b. Pemasangan rambu, APILL, PJU	Dishub	
7	Lingkungan Hidup				
	a. Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat	- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ijin lingkungan b. Implementasi Kampung Proklim, mata air yang dikonservasi, konservasi di kawasan rawan bencana dan resapan air	DLH	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	b. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	- Program Pengelolaan Persampahan	a. Pembentukan bank sampah, pembinaan pengelola bank sampah b. Bantuan hibah alat pengolah sampah kepada kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat	DLH	
	c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	- Program Pengelolaan Persampahan	a. Pembangunan TPST, TPS 3R, TPSS, pengadaan incinerator b. Revitalisasi TPA	DLH	
	d. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air.	- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Konservasi mata air	DLH	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	e. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	a. Penyediaan, pengelolaan dan revitalisasi RTH Publik b. Penanganan permukiman kumuh sesuai pemutakhiran SK Kumuh serta pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar Kawasan kumuh	DLH, DPRKP	
8	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan				
	a. <i>E-Goverment/ Smart Regency</i>	- Program Aplikasi Informatika - Program Informasi dan Komunikasi Publik	a. Penyediaan dan pengelolaan <i>dashboard</i> bupati, pembangunan <i>command centre</i> , dan <i>call centre</i> b. Integasi informasi ke dalam BIG DATA c. Pengelolaan <i>website</i> dan sistem informasi perangkat daerah dan desa,	Diskominfo	Pembangunan <i>command centre</i> telah dilaksanakan pada tahun 2019

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	<p>b. Optimalisasi Pemanfaatan berbagai sumber pendapatan yang inovatif (CSR, Obligasi daerah dan kerjasama dengan dunia usaha)</p> <p>c. Peningkatan layanan publik professional dan akuntabel.</p>	<p>- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p>	<p>Semua PD berkontribusi terhadap <i>e-government</i>, dengan koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) menyiapkan konsep KPBU untuk Deyangan, Kalibening</p> <p>Pemanfaatan CSR untuk konservasi, penanganan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, penanganan TBC, HIV, dan kanker</p> <p>a. Pengembangan inovasi pelayanan publik</p> <p>b. Pembangunan gedung kecamatan (3 unit),</p>	<p>Bagian Perekonomian, BPPKAD, Disdikbud, Dinkes</p> <p>Bagian Organisasi, DPUPR</p>	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	<p>d. Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup</p> <p>e. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian dan Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Iklim Investasi - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Kepegawaian Daerah - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 	<p>Pengembangan sistem informasi kepegawaian perencanaan penganggaran monitoring evaluasi terpadu</p>	<p>DPMPTSP</p> <p>Bappeda & Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Inspektorat, Bagian Adminbang</p>	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	<p>f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (dokumen kependudukan)</p> <p>g. Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta</p> <p>h. Melanjutkan Reformasi birokrasi</p> <p>i. Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara professional dan akuntabel.</p>	<p>- Program Pencatatan Sipil</p> <p>- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>- Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>- Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>- Program Pengelolaan barang Milik Daerah</p> <p>- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>SOP, penyusunan kerjasama, Promosi Investasi, perjanjian kerjasama, monev</p> <p>Penyusunan APBD Tepat Waktu, Transparansi pengadaan barang jasa, Peningkatan inovasi ASN</p> <p>Evaluasi SOT, Evaluasi Jabatan, Peningkatan kapasitas</p>	<p>Disdukcapil</p> <p>Bagian Pemerintahan, Bappeda & Litbangda, DPMPSTP</p> <p>BPPKAD, Bagian Adminbang, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, BKPPD</p> <p>Bagian Organisasi, BKPPD</p>	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
9	Kententeraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana				
	a. Peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Program Penanggulangan Kebakaran	a. Peningkatan kondusifitas masyarakat, b. Penertiban dan penindakan pelanggaran perda c. Pembentukan Wilayah Manajemen Bencana (WMK) kebakaran di setiap kecamatan d. Peningkatan wawasan kebangsaan	Satpol PP & PK	
	b. Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan)	- Program Penanggulangan Bencana	Pengembangan <i>sister village</i> , desa tangguh bencana, TEA dan sistem informasi kebencanaan	BPBD	
10	Pemuda dan Olah Raga				
	a. Peningkatan peran serta Kepemudaan	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Disparpora	
	b. Pembangunan <i>Sport Centre</i> dan pengembangan pembinaan olah raga berprestasi	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembangunan gedung olah raga di stadion	Disparpora	

No	Program Kerja Dasa Cita	Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019	Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	c. Peningkatan pengembangan olah raga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Disparpora	
	d. Penghargaan atlet berprestasi	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Disparpora	

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2021; data diolah

Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN MAGELANG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia												
1.1	Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,58 angka (0-100)	0,00	69,82 angka (0-100)	471.500.484.575,00	70,65 angka (0-100)	326.278.247.318,00	71,20 angka (0-100)	326.366.087.052,00	71,75 angka (0-100)	375.780.945.051,00	
1.1.1	Sasaran : 1.1. Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah	7,86 tahun	0,00	7,89 tahun	223.153.169.152,00	8,00 tahun	197.886.884.067,00	8,11 tahun	197.097.872.995,00	8,22 tahun	235.936.011.150,00	
2. Harapan Lama Sekolah		12,76 tahun	12,57 tahun		12,60 tahun		12,63 tahun		12,66 tahun				
3. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B		94,41 persen	94,41 persen		94,79 persen		95,12 persen		95,56 persen				
1.1.1.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase PNF terakreditasi (LKP, PKBM)	N/A %	0,00	67,39 %	163.945.656.056,00	N/A %	155.829.778.250,00	N/A %	155.779.778.250,00	N/A %	181.323.805.550,00	
		2. Persentase PNF Terakreditaasi (PKBM)	N/A %		N/A %		77,27 %		86,36 %		90,91 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	N/A %		N/A %		86,38 %		86,58 %		86,75 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	N/A %		92 %		N/A %		N/A %		N/A %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		5. Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter	N/A %		N/A %		75 %		90 %		100 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		6. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	N/A %		80,45 %		N/A %		N/A %		N/A %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		7. Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	N/A %		60,22 %		52,13 %		58,88 %		67,30 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.1.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berrsertifikat	N/A %	0,00	92 %	51.900.534.500,00	93 %	26.847.748.864,00	94 %	25.593.859.745,00	95 %	34.027.205.600,00	
1.1.1.2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pembinaan pemuda	na %	0,00	44,00 %	603.900.000,00	44,44 %	225.000.000,00	46,30 %	345.000.000,00	48,15 %	450.000.000,00	
1.1.1.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	na %	0,00	44,00 %	3.547.500.000,00	44,25 %	12.924.500.000,00	48,43 %	13.400.000.000,00	51,02 %	14.900.000.000,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1. 2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kepramukaan	na %	0,00	16,67 %	200.000.000,00	25,76 %	200.000.000,00	28,03 %	225.000.000,00	30,30 %	225.000.000,00	
1.1.1. 2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1. Persentase Karya Budaya yang terlayani	N/A %	0,00	4,20 %	2.276.105.000,00	4,430 %	200.000.000,00	4,44 %	200.000.000,00	4,51 %	500.000.000,00	
		2. Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	N/A %		84,13 %		N/A %		N/A %		N/A %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Persentase Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A %		11,53 %		N/A %		N/A %		N/A %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.1. 2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	N/A %	0,00	N/A %	0,00	84,14 %	750.000.000,00	84,34 %	750.000.000,00	84,54 %	2.500.000.000,00	
1.1.1. 2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	N/A %	0,00	N/A %	0,00	12,64 %	234.235.000,00	13,7 %	234.235.000,00	14,75 %	1.250.000.000,00	
1.1.1. 2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten	NA %	0,00	0.0230 %	679.473.596,00	0.0205 %	675.621.953,00	0.0206 %	570.000.000,00	0.0207 %	760.000.000,00	
		2. Angka kepuasan pemustaka	NA Skala a-d		80 Skala a-d		80,5 Skala a-d		81 Skala a-d		81,5 Skala a-d		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		3. Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan yang mengikuti bimtek sosialisai dan workshop	NA -		56,25 -		68,75 -		84,37 -		100 -		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.1.2	Sasaran : 1.2. Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	73.56 tahun	0,00	73,61 tahun	247.459.759.423,00	73,65 tahun	127.029.486.451,00	73,7 tahun	127.785.337.257,00	73,75 tahun	138.228.957.101,00	
1.1.2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %	0,00	na %	218.229.659.011,00	87 %	115.326.238.645,00	89 %	107.782.240.975,00	94 %	118.000.860.819,00	
		2. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		3. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SALAMAN II

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS BOROBUDUR
		5. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS NGLUWAR
		6. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SALAM
		7. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SRUMBUNG
		8. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS DUKUN
		9. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SAWANGAN I
		10. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SAWANGAN II
		11. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MUNTILAN I
		12. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MUNTILAN II
		13. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MUNGKID
		14. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		15. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN II

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		16. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS TEMPURAN
		17. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KAJORAN I
		18. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KAJORAN II
		19. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KALIANGKRIK
		20. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS BANDONGAN
		21. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS CANDIMULYO
		22. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS PAKIS
		23. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS NGABLAK
		24. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS GRABAG I
		25. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS GRABAG II
		26. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS TEGALREJO
		27. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SECANG I

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		28. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SECANG II
		29. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS WINDUSARI
		30. Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KOTA MUNGKID
		31. Prosentase Capaian SPM Rumah Sakit	na %		73,4 %		85,1 %		88,3 %		100 %		RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH
		32. Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	na %		79,80 %		80 %		80,50 %		81 %		RSUD Muntilan
		33. Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat	79,60 %		79,80 %		80 %		80,50 %		81 %		
1.1.2.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	na %	0,00	na %	15.349.541.182,00	95 %	989.155.077,00	98 %	9.399.003.553,00	100 %	9.399.003.553,00	
		2. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		3. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		4. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS BOROBUDUR
		5. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS NGLUWAR
		6. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SALAM
		7. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SRUMBUNG
		8. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS DUKUN
		9. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN I

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		10. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN II
		11. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN I
		12. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN II
		13. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MUNGKID
		14. Cakupan sumber daya manusia kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		15. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		16. Cakupan sumber daya manusia kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS TEMPURAN
		17. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KAJORAN I
		18. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KAJORAN II
		19. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KALIANGKRIK
		20. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS BANDONGAN
		21. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS CANDIMULYO
		22. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS PAKIS
		23. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS NGABLAK
		24. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS GRABAG I
		25. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS GRABAG II

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		26. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS TEGALREJO
		27. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SECANG I
		28. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SECANG II
		29. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS WINDUSARI
		30. Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KOTA MUNGKID
		31. Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	na %		100 %		0 %		0 %		0 %		RSUD Muntilan
1.1.2.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT	na %	0,00	na %	225.420.770,00	90 %	255.420.770,00	95 %	255.420.770,00	100 %	255.420.770,00	
		2. Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	na %		na %		70 %		75 %		80 %		DINAS KESEHATAN
1.1.2.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Cakupan Pembinaan UKBM	na %	0,00	na %	6.248.643.960,00	100 %	2.031.315.459,00	100 %	1.971.315.459,00	100 %	1.971.315.459,00	
		2. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		3. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		4. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS BOROBUDUR
		5. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS NGLUWAR
		6. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAM
		7. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SRUMBUNG
		8. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS DUKUN
		9. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN I

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		10. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN II
		11. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN I
		12. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN II
		13. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MUNGKID
		14. Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		15. Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		16. Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS TEMPURAN
		17. Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS KAJORAN I
		18. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS KAJORAN II
		19. Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS KALIANGKRIK
		20. Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS BANDONGAN
		21. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS CANDIMULYO
		22. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS PAKIS
		23. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS NGABLAK
		24. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS GRABAG I
		25. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS GRABAG II
		26. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS TEGALREJO
		27. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SECANG I
		28. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SECANG II

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		29. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %			PUSKESMAS WINDUSARI
		30. Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %			PUSKESMAS KOTA MUNGKID
1.1.2. 2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Usia Kawin Pertama (UKP)	na tahun	0,00	21,3 tahun	97.033.500,00	21,5 tahun	176.641.500,00	21,8 tahun	176.641.500,00	22 tahun	176.641.500,00		
1.1.2. 2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Presentase Peningkatan partisipasi ber-KB	na Persen	0,00	2.42 Persen	7.309.461.000,00	na Persen	8.000.715.000,00	na Persen	7.950.715.000,00	na Persen	8.075.715.000,00		
		2. Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*	na %		na %		13,51 %		12,98 %		12,42 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		3. Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	na %		75,50 %		70,30 %		71,20 %		72,10 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		4. Presentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	na %		39,6 %		16,66 %		29,83 %		25,00 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.1.2. 2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pembangunan ketahanan keluarga	na %	0,00	na %	0,00	58,5 %	250.000.000,00	60,32 %	250.000.000,00	62,29 %	350.000.000,00		
1.2	Tujuan : 2. Meningkatkan paritas daya beli masyarakat	1. Inflasi	2,5 - 4,5 persen	0,00	2,0 - 4,0 persen	3.321.252.691,00	2,0 - 4,0 persen	10.223.556.430,00	2,0 - 4,0 persen	10.422.158.600,00	2,0 - 4,0 persen	12.700.417.318,00		
		2. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	9.401,64 ribu rupiah		9.762,42 ribu rupiah		9.456,00 ribu rupiah		9.636,00 ribu rupiah		9.858,00 ribu rupiah			
		3. Angka Kemiskinan	13,90-12,80 persen		12,44-11,52 persen		11,27-10,52 persen		10,67-9,92 persen		10,07-9,32 persen			
1.2.1	Sasaran : 2.1. Menurunnya jumlah PMKS	1. Presentase penurunan PMKS	0,58 persen	0,00	0,58 persen	701.870.700,00	0,58 persen	7.196.558.600,00	0,58 persen	7.241.558.600,00	0,58 persen	7.775.817.318,00		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)	na persen	0,00	8,96 persen	126.000.000,00	10,1 persen	300.000.000,00	10,1 persen	300.000.000,00	10,1 persen	300.000.000,00	
1.2.1.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ***	na persen	0,00	100 persen	284.877.500,00	100 persen	6.123.015.600,00	100 persen	6.123.015.600,00	100 persen	6.400.817.318,00	
		2. Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	na persen		33,95 persen		0,04 persen		0,05 persen		0,05 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.2.1.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	na persen	0,00	na persen	238.189.500,00	87,18 persen	485.000.000,00	72,38 persen	510.000.000,00	57,59 persen	675.000.000,00	
		2. Persentase Fakir Miskin Yang Divalidasi	na persen		100 persen		na persen		na persen		na persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.2.1.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten***	na persen	0,00	100 persen	52.803.700,00	100 persen	288.543.000,00	100 persen	308.543.000,00	100 persen	400.000.000,00	
		2. Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana	na persen		na persen		6,47 persen		7,29 persen		8,22 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.2.2	Sasaran : 2.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan	78,42 angka (0-100)	0,00	79,47 angka (0-100)	990.784.221,00	81,30 angka (0-100)	1.752.000.000,00	81,57 angka (0-100)	1.869.000.000,00	82,62 angka (0-100)	3.377.000.000,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2. 2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan protein per kapita	Na gram	0,00	53 gram	930.547.770,00	53 gram	914.000.000,00	53 gram	934.000.000,00	53 gram	1.117.000.000,00	
		2. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	Na persen		91 persen		91 persen		91 persen		91 persen		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		3. Penguatan Cadangan Pangan	Na persen		65 persen		65 persen		65 persen		65 persen		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		4. Ketersediaan energi per kapita	Na kkal		2000 kkal		2000 kkal		2000 kkal		2000 kkal		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.2.2. 2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan rawan pangan	Na %	0,00	Na %	5.000.000,00	17,0 %	37.000.000,00	16,5 %	90.000.000,00	16,0 %	100.000.000,00	
1.2.2. 2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Na persen	0,00	90 persen	55.236.451,00	90 persen	251.000.000,00	90 persen	285.000.000,00	90 persen	330.000.000,00	
1.2.3	Sasaran : 2.3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,38-6,25 persen	0,00	4,54-5,17 persen	1.628.597.770,00	3,93-3,87 persen	1.274.997.830,00	2,4-3,0 persen	1.311.600.000,00	2,25-2,65 persen	1.547.600.000,00	
1.2.3. 2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
1.2.3. 2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	na %	0,00	90 %	511.237.990,00	90 %	880.997.830,00	90 %	882.600.000,00	90 %	997.600.000,00	
1.2.3. 2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	0 %	0,00	80,6 %	992.589.000,00	80,6 %	239.000.000,00	80,6 %	225.000.000,00	80,6 %	235.000.000,00	
1.2.3. 2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial	0 %	0,00	82,74 %	121.270.780,00	82,74 %	135.000.000,00	82,74 %	134.000.000,00	82,74 %	200.000.000,00	
1.2.3. 3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan pembinaan transmigrasi	na %	0,00	80 %	3.500.000,00	80 %	20.000.000,00	80 %	70.000.000,00	80 %	115.000.000,00	
1.3	Tujuan : 3. Meningkatnya pembangunan berbasis gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,21 angka (0-100)	0,00	93,31 angka (0-100)	630.694.670,00	92,40 angka (0-100)	590.000.000,00	92,70 angka (0-100)	590.000.000,00	92,99 angka (0-100)	610.000.000,00	
1.3.1	Sasaran : 3.1. Meningkatnya keberdayaan gender	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,33 angka (0-100)	0,00	69,75 angka (0-100)	630.694.670,00	69,93 angka (0-100)	590.000.000,00	70,23 angka (0-100)	590.000.000,00	70,53 angka (0-100)	610.000.000,00	
		2. Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya Kategori		Nindya Kategori		Nindya Kategori		Nindya Kategori				

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1. 2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*	na indeks	0,00	45,13 indeks	37.650.000,00	14,46 indeks	290.000.000,00	14,52 indeks	290.000.000,00	14,62 indeks	260.000.000,00	
		2. Persentase lembaga yang melaksanakan PUG	na persen		na persen		4,76 persen		5,24 persen		5,70 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.3.1. 2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	na persen	0,00	na persen	225.915.000,00	100 persen	50.000.000,00	100 persen	50.000.000,00	100 persen	50.000.000,00	
		2. Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standard	na Persen		71 Persen		na Persen		na Persen		na Persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.3.1. 2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	na %	0,00	na %	141.214.670,00	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	250.000.000,00	
		2. Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	na Persen		100 Persen		na Persen		na Persen		na Persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.3.1. 2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	na %	0,00	na %	225.915.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	
		2. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	na Persen		100 Persen		na Persen		na Persen		na Persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Misi : 2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup												

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Tujuan : 1. Meningkatkan daya saing daerah	1. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	na persen	0,00	na persen	231.204.619.506,00	71,91 persen	222.447.260.775,00	74,76 persen	220.779.365.606,00	82,21 persen	228.960.092.530,00	
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1,7 - 2,9 persen		3,3-4,3 persen		3,4-4,4 persen		3,5-4,5 persen		3,6-4,6 persen		
		4. PDRB Perkapita	26,7 juta rupiah		28,21 juta rupiah		27,78 juta rupiah		28,68 juta rupiah		29,52 juta rupiah		
2.1.1	Sasaran : 1.1. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	1. IKLH	71,30 angka (0-100)	0,00	71,32 angka (0-100)	15.422.336.050,00	71,34 angka (0-100)	15.669.150.450,00	71,36 angka (0-100)	15.476.262.555,00	71,38 angka (0-100)	16.850.804.815,00	
2.1.1. 1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan	na %	0,00	na %	0,00	0 %	0,00	50 %	0,00	100 %	0,00	
2.1.1. 2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100 %	0,00	100 %	291.960.000,00	100 %	220.000.000,00	100 %	220.000.000,00	100 %	270.000.000,00	
		2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.1.1. 2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	na %	0,00	31,24 %	604.228.775,00	33,71 %	433.000.000,00	36,18 %	635.000.000,00	38,65 %	805.000.000,00	
		2. Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	38 %		46 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	34,5 %		42,5 %		50,5 %		59 %		67 %		
2.1.1. 2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1. Persentase RTH Publik yang terkelola	25,69 %	0,00	25,7 %	2.455.446.200,00	25,75 %	4.110.000.000,00	25,80 %	2.525.000.000,00	25,85 %	2.730.000.000,00	
		2. Persentase RTH Publik yang terkelola	25,32 %		25,49 %		25,65 %		25,82 %		25,98 %		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.1.1. 2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100 %	0,00	100 %	76.380.000,00	100 %	395.000.000,00	100 %	330.000.000,00	100 %	230.000.000,00	
		2. Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.1.1.1. 2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1. Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	NA %	0,00	NA %	59.726.500,00	100 %	60.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	
		2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	10 %		69 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		
2.1.1.1. 2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1. Cakupan konservasi jogo tuk	9,35 %	0,00	10,40 %	155.685.490,00	11,39 %	90.000.000,00	12,43 %	150.000.000,00	13,47 %	200.000.000,00	
		2. Persentase mata air dikonservasi	17 %		19 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Cakupan konservasi kearifan lokal jogo tuk	9,35 %		10,40 %		11,39 %		12,43 %		13,47 %		
2.1.1.1. 2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	22,37 %	0,00	23,12 %	178.388.600,00	23,85 %	65.000.000,00	24,57 %	150.000.000,00	25,27 %	150.000.000,00	
		2. Persentase sekolah Adiwiyata	15,88 %		16,82 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan LH	22,37 %		23,12 %		23,85 %		24,57 %		25,27 %		
2.1.1. 2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	na %	0,00	na %	0,00	100 %	5.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	200.000.000,00	
		2. Persentase penghargaan di bidang LH	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.1.1. 2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	NA %	0,00	100 %	17.500.000,00	100 %	24.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	
		2. Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangan	100 %		100 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.1.1. 2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Persentase pengelolaan sampah	34,29 %	0,00	42,89 %	11.583.020.485,00	47,99 %	10.267.150.450,00	53,50 %	11.296.262.555,00	54,91 %	12.155.804.815,00	
		2. Persentase jumlah sampah yang tertangani	20 %		21,12 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	21,20 %		21,78 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		4. Persentase pengelolaan sampah	34,29 %		42,89 %		47,99 %		53,5 %		54,91 %		
2.1.2	Sasaran : 1.2. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur	1. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	NA persen	0,00	na persen	135.599.014.495,00	72,48 persen	129.131.471.973,00	78,16 persen	129.115.045.502,00	93,05 persen	151.933.529.175,00	
2.1.2. 1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Cakupan layanan Sumber Daya Air	Na %	0,00	75,65 %	7.548.610.605,00	76,11 %	6.308.104.485,00	77,43 %	7.333.104.485,00	78,76 %	8.288.104.485,00	
		2. Cakupan Layanan Jaringan Irigasi	Na %		85,25 %		Na %		Na %		Na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	Na %		79,72 %		72,67 %		79,08 %		85,49 %		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.2. 1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Cakupan layanan air minum ***	Na %	0,00	89.91 %	8.105.450.145,00	91.03 %	9.805.103.130,00	92.15 %	8.700.103.130,00	93.27 %	9.074.103.130,00	
		2. Cakupan layanan air minum	Na %		Na %		91.,03 %		92.15 %		93.27 %		
2.1.2. 1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik ***	87,70 %	0,00	88.73 %	4.802.703.405,00	89.76 %	5.002.703.385,00	90.79 %	5.002.703.385,00	91.82 %	5.002.703.385,00	
		2. Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	Na %		Na %		89.76 %		90.79 %		91.82 %		
2.1.2. 1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan layanan drainase lingkungan	na %	0,00	na %	0,00	0 %	0,00	39.03 %	0,00	100 %	500.000.000,00	
2.1.2. 1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan infrastruktur permukiman	na %	0,00	na %	0,00	0 %	202.499.855,00	100 %	202.499.855,00	100 %	202.499.855,00	
2.1.2. 1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Persentase Terbangunnya Landmark	na %	0,00	75 %	46.623.214.960,00	na %	16.530.697.110,00	na %	16.470.697.110,00	na %	16.530.697.110,00	
		2. Cakupan Penataan Bangunan Gedung	na %		na %		99.86 %		99.93 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Cakupan Pembangunan Gedung Pemerintah Dan Publik	na %		99,52 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		4. Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	na %		25 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.2. 1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	na %	0,00	na %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	0,00	
2.1.2. 1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Cakupan Penyelenggaraan jalan	na %	0,00	na %	42.131.713.583,00	82.93 %	36.216.298.091,00	83.21 %	36.344.860.790,00	83.48 %	56.132.462.705,00	
		2. Cakupan Ketersediaan Jalan Dan Bangunan Pelengkap Jalan	na %		95,77 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Persentase Jalan Dan Bangunan Pelengkap Jalan Dalam Kondisi Baik	na %		78,89 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.2.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi	na %	0,00	na %	18.479.610,00	89,92 %	69.999.620,00	94,96 %	109.999.620,00	100 %	149.999.620,00	
		2. Cakupan Sarana Prasarana Ke PU-an	na %		86,00 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Cakupan Layanan Jasa Konstruksi	na %		62,95 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.2.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	na %	0,00	na %	221.245.760,00	66,67 %	272.998.735,00	83,33 %	292.998.735,00	100 %	292.998.735,00	
		2. Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	na %		45,96 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Persentase Kesesuaian Tata Ruang	na %		50,87 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.2.1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Layanan Pengembangan Perumahan	n/a Persen	0,00	100 Persen	44.193.000,00	100 Persen	85.000.000,00	100 Persen	507.700.867,00	100 Persen	659.582.625,00	
2.1.2.1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas	n/a persen	0,00	100 persen	1.399.424.007,00	100 persen	1.860.142.000,00	100 persen	1.265.000.000,00	100 persen	1.265.000.000,00	
2.1.2.1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	n/a persen	0,00	48,16 persen	575.004.500,00	52,71 persen	30.550.000.000,00	57,27 persen	31.500.000.000,00	61,83 persen	31.500.000.000,00	
2.1.2.1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan	n/a persen	0,00	100 persen	677.900.000,00	100 persen	1.188.270.787,00	100 persen	30.000.000,00	100 persen	30.000.000,00	
2.1.2.1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	n/a Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	
2.1.2.2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1. Cakupan layanan kinerja pertanahan	na %	0,00	na %	0,00	100 %	49.999.090,00	100 %	49.999.090,00	100 %	49.999.090,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Cakupan Kinerja Pertanahan	na %		50,00 %		na %		na %		na %			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.2. 2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	81.10 %	0,00	85.82 %	23.451.074.920,00	na %	20.949.655.970,00	na %	21.255.378.720,00	na %	22.205.378.720,00		
		2. Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	91.38 %		91.70 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN	
		3. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	na %		na %		25,00 %		25,00 %		100,00 %		DINAS PERHUBUNGAN	
		4. Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	43.69 %		55.73 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN	
		5. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	na %		na %		88,06 %		94,03 %		100,00 %		DINAS PERHUBUNGAN	
		6. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	59.69 %		69.24 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN	
		7. Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	na %		na %		65,00 %		68,00 %		70,00 %		DINAS PERHUBUNGAN	
2.1.3	Sasaran : 1.3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	1. Nilai PDRB sektor perdagangan	4.868,86 milyar rupiah	0,00	5.208,43 milyar rupiah	80.183.268.961,00	5.547,99 milyar rupiah	77.646.638.352,00	5.887,55 milyar rupiah	76.188.057.549,00	6.227,11 milyar rupiah	60.175.758.540,00		
		2. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	7.373,16 milyar rupiah		7.748,63 milyar rupiah		8.124,10 milyar rupiah		8.499,56 milyar rupiah		8.875,03 milyar rupiah			
		3. Nilai PDRB sektor industri pengolahan	7.648,6 milyar rupiah		8.139,8 milyar rupiah		8.631,00 milyar rupiah		9.122,20 milyar rupiah		9.613,39 milyar rupiah			
		4. Nilai PDRB sektor pariwisata	1.523,19 milyar rupiah		1.630,14 milyar rupiah		1.737,10 milyar rupiah		1.844,05 milyar rupiah		1.951,00 milyar rupiah			
		5. Pertumbuhan Investasi	5 persen		5 persen		10 persen		10 persen		10 persen			
		6. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	86,42 persen		83,62 persen		84,99 persen		86,33 persen		87,76 persen			
		7. Indeks Desa Membangun	0,68 angka (0-1)		0,69 angka (0-1)		0,70 angka (0-1)		0,71 angka (0-1)		0,72 angka (0-1)			
2.1.3. 1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	na %	0,00	na %	2.926.443.500,00	100 %	6.668.972.000,00	100 %	4.747.079.000,00	100 %	4.847.079.000,00		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Persentase Penertiban yang dilaksanakan	na %		100 %		na %		na %		na %			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		3. Persentase Penegakan Perda	na %		95,80 %		na %		na %		na %			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
2.1.3.1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na %	0,00	41,39 %	2.128.174.000,00	Na %	1.673.570.708,00	Na %	1.671.345.019,00	Na %	1.774.000.762,00		
		2. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na %		Na %		100 %		100 %		100 %			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Na %		100 %		Na %		Na %		Na %			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Na %		Na %		100 %		100 %		100 %			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		5. Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Na %		85 %		Na %		Na %		Na %			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		6. Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Na %		36,96 %		Na %		Na %		Na %			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.3.1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	na %	0,00	na %	7.271.783.000,00	65 %	7.827.084.000,00	70 %	8.148.249.000,00	75 %	8.148.249.000,00		
		2. Persentase layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	na %		61 %		na %		na %		na %			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
2.1.3.2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Peningkatan Status Desa	NA %	0,00	13,62 %	0,00	15,26 %	50.000.000,00	16,89 %	50.000.000,00	18,53 %	100.000.000,00		
2.1.3.2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	NA %	0,00	100 %	79.668.065,00	100 %	29.999.785,00	100 %	85.000.000,00	100 %	85.000.000,00		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.3. 2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	NA %	0,00	79,38 %	5.541.966.183,00	48,66 %	5.610.437.609,00	50,20 %	5.495.320.371,00	51,12 %	5.779.318.103,00	
2.1.3. 2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	NA %	0,00	64,56 %	2.320.186.130,00	51,57 %	455.012.495,00	58,52 %	425.632.266,00	62,71 %	535.921.516,00	
2.1.3. 2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	na %	0,00	na %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
2.1.3. 2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase koperasi yang meningkat kualitas pengelolanya	na %	0,00	na %	36.663.050,00	30 %	55.000.000,00	30 %	55.000.000,00	30 %	75.000.000,00	
		2. Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	na %		78,13 %		na %		na %		na %		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.1.3. 2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam yang dinilai	na %	0,00	na %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
2.1.3. 2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	na %	0,00	50 %	0,00	50 %	10.000.000,00	55 %	10.000.000,00	60 %	10.000.000,00	
2.1.3. 2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kerjasama antar koperasi dan lembaga lain	0 %	0,00	0 %	0,00	15 %	30.000.000,00	15 %	30.000.000,00	15 %	45.000.000,00	
2.1.3. 2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase peningkatan kapasitas usaha mikro	na %	0,00	5 %	1.086.099.040,00	5 %	400.000.000,00	5 %	400.000.000,00	5 %	455.000.000,00	
2.1.3. 2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase peningkatan omset usaha mikro	na %	0,00	na %	0,00	5 %	25.000.000,00	5 %	25.000.000,00	5 %	30.000.000,00	
2.1.3. 2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Persentase realisasi investasi	Na %	0,00	61,2 %	0,00	Na %	45.000.000,00	Na %	65.000.000,00	Na %	70.000.000,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Persentase peningkatan realisasi investasi	Na %		Na %		10 %		10 %		10 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.1.3. 2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kependaftaran/pendaftar penanaman modal	Na NIB	0,00	Na NIB	0,00	2300 NIB	75.000.000,00	2400 NIB	80.000.000,00	2500 NIB	85.000.000,00	
2.1.3. 2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan	Na %	0,00	1 %	247.255.000,00	100 %	276.127.479,00	100 %	263.127.479,00	100 %	281.127.479,00	
2.1.3. 2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase pemantauan dan pengendalian investasi	Na %	0,00	0,01 %	372.462.000,00	Na %	45.000.000,00	Na %	30.000.000,00	Na %	50.000.000,00	
		2. Persentase pengendalian investasi	Na %		Na %		5 %		5 %		5 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.1.3. 2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengolahan data	Na %	0,00	Na %	26.250.000,00	30 %	35.000.000,00	30 %	35.000.000,00	30 %	35.000.000,00	
2.1.3. 3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	na %	0,00	3 %	1.218.277.000,00	na %	390.000.000,00	na %	506.000.000,00	na %	706.000.000,00	
		2. Cakupan pengembangan budidaya perikanan	na %		na %		5 %		5 %		5 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		3. Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	na %		100 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		4. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	na %		5 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1.3. 3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	na %	0,00	na %	65.000.000,00	9,6 %	30.000.000,00	9,6 %	30.000.000,00	9,6 %	65.000.000,00	
2.1.3. 3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	na %	0,00	5 %	1.050.000.000,00	5 %	445.000.000,00	5 %	265.000.000,00	5 %	265.000.000,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Angka konsumsi ikan	na kg/kapita/tahun		19,90 kg/kapita/tahun			20,10 kg/kapita/tahun		20,30 kg/kapita/tahun		20,50 kg/kapita/tahun		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1.3. 3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik	na %	0,00	45,45 %	12.545.375.000,00	40,13 %	9.180.674.000,00	41,71 %	9.271.093.000,00	43,29 %	9.271.093.000,00		
2.1.3. 3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan promosi/pemasaran pariwisata	na %	0,00	50,77 %	400.000.000,00	52,64 %	238.489.000,00	74,53 %	300.000.000,00	76,44 %	425.000.000,00		
2.1.3. 3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	na %	0,00	1,05 %	10.000.000,00	24,56 %	0,00	36,84 %	35.000.000,00	49,12 %	35.000.000,00		
2.1.3. 3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif	na %	0,00	59,67 %	1.106.877.000,00	50,00 %	86.512.000,00	55,88 %	300.000.000,00	61,76 %	300.000.000,00		
2.1.3. 3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Na %	0,00	Na %	23.889.168.856,00	2,55 %	2.160.595.150,00	2,55 %	1.905.595.150,00	2,55 %	2.085.595.150,00		
		2. Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		3. Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	na %		na %		50 %		50 %		50 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		4. Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	na %		2 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		5. Cakupan penerapan teknologi peternakan	na %		75 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
2.1.3. 3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Na %	0,00	Na %	5.135.587.457,00	1,75 %	30.298.678.806,00	1,75 %	30.510.745.806,00	1,75 %	12.239.678.806,00		
		2. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Na %		3,59 %		Na %		Na %		Na %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	na %		na %		70 %		70 %		70 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		4. Cakupan peningkatan prasarana peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1.3. 3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	na %	0,00	100 %	629.000.000,00	100 %	446.096.000,00	100 %	443.096.000,00	100 %	443.096.000,00	
2.1.3. 3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Na %	0,00	Na %	106.082.442,00	9.25 %	153.000.000,00	9.25 %	165.845.000,00	9.25 %	170.000.000,00	
2.1.3. 3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Cakupan perizinan usaha pertanian	Na %	0,00	Na %	19.449.860,00	100 %	41.000.000,00	100 %	41.000.000,00	100 %	43.000.000,00	
		2. Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	na %		3 %		3 %		3 %		3 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		3. Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1.3. 3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	Na %	0,00	37.6 %	735.511.970,00	40.01 %	593.115.000,00	42.15 %	643.115.000,00	44.5 %	643.115.000,00	
		2. Cakupan pembinaan kelompok ternak	na %		na %		3 %		3 %		3 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1.3. 3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	na %	0,00	50 %	0,00	50 %	5.000.000,00	50 %	5.000.000,00	50 %	15.000.000,00	
2.1.3. 3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	na %	0,00	86 %	6.647.376.237,00	86 %	5.613.871.000,00	86 %	5.588.471.202,00	86 %	6.100.000.000,00	
2.1.3. 3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga	na %	0,00	30 %	217.220.584,00	30 %	125.000.000,00	30 %	125.000.000,00	30 %	145.000.000,00	
2.1.3. 3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai Ekspor barang non migas	na %	0,00	na %	0,00	3 %	10.000.000,00	3 %	10.000.000,00	3 %	20.000.000,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.3. 3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah	0 %	0,00	50 %	270.000.000,00	50 %	240.000.000,00	55 %	240.000.000,00	65 %	325.000.000,00	
2.1.3. 3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi dan pemasaran	na %	0,00	na %	0,00	50 %	0,00	50 %	0,00	50 %	0,00	
2.1.3. 3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Persentase industri terbina	na %	0,00	na %	1.003.804.930,00	1.1 %	1.378.855.870,00	1.2 %	1.288.651.530,00	1.3 %	1.288.651.530,00	
		2. Persentase pertumbuhan industri	na %		1,44 %		na %		na %		na %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.1.3. 3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	na %	0,00	na %	0,00	67,01 %	20.000.000,00	82,47 %	35.000.000,00	100 %	50.000.000,00	
2.1.3. 8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Aktif Dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Na %	0,00	Na %	323.489.707,00	98,5 %	200.000.000,00	99 %	190.000.000,00	99,5 %	250.000.000,00	
2.1.3. 8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Persentase Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Lembaga Pemerintah	Na %	0,00	Na %	2.734.097.950,00	100 %	2.579.547.450,00	100 %	2.579.547.450,00	100 %	2.677.833.194,00	
		2. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	99,17 %		99,33 %		Na %		Na %		Na %		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1.3. 8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Yang Aktif	Na %	0,00	98 %	40.000.000,00	98,5 %	0,00	99 %	14.144.276,00	99,5 %	17.000.000,00	
2.1.3. 8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Ketahanan Kebangsaan	Na %	0,00	Na %	0,00	98,5 %	50.000.000,00	99 %	40.000.000,00	99,5 %	90.000.000,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.3. 8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1. Persentase Pemantauan Situasi Daerah yang Dilaksanakan	Na %	0,00	Na %	0,00	90 %	50.000.000,00	90.5 %	40.000.000,00	91 %	100.000.000,00	
		2. Jumlah konflik sosial tertangani	2.4 Kejadian/10.000 Penduduk		2.5 Kejadian/10.000 Penduduk		Na Kejadian/10.000 Penduduk		Na Kejadian/10.000 Penduduk		Na Kejadian/10.000 Penduduk		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Misi : 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah												
3.1	Tujuan : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	65,53 angka (0-100)	0,00	67,25 angka (0-100)	790.557.372.099,00	68,96 angka (0-100)	763.219.268.431,00	70,68 angka (0-100)	759.645.300.443,00	72,39 angka (0-100)	799.773.761.151,00	
3.1.1	Sasaran : 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Nilai AKIP	63,03 (B) angka (0-100) (huruf)	0,00	60,33 (B) angka (0-100) (huruf)	40.314.460.213,00	61,04 (B) angka (0-100) (huruf)	32.214.365.905,00	63,03 (B) angka (0-100) (huruf)	32.059.755.992,00	65,02 (B) angka (0-100) (huruf)	34.350.069.271,00	
3.1.1. 4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	80 persen	0,00	82 persen	18.676.972.402,00	84 persen	16.553.835.500,00	89 persen	16.526.378.599,00	90 persen	17.515.340.302,00	
		2. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		BAGIAN PEMERINTAHAN
		3. Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	NA %		100 %		NA %		NA %		NA %		BAGIAN PEMERINTAHAN
		4. Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		BAGIAN HUKUM
		5. Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.1.1. 4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dijalankan	na persen	0,00	100 persen	4.715.850.886,00	100 persen	4.179.768.445,00	100 persen	4.175.900.963,00	100 persen	4.425.171.801,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
		3. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	SEKRETARIAT DAERAH
		4. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	Na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		5. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		6. Indeks Kematangan UKPBj	na level		level 4 level		na level		na level		na level		na level	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		7. Tingkat Kematangan UKPBj	na level (progress)		na level (progress)		level 3 (4/9) level (progress)		level 3 (6/9) level (progress)		level 3 (9/9) level (progress)		level 3 (9/9) level (progress)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.1.1. 4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	na %	0,00	na %	13.681.465.750,00	75 %	9.520.004.732,00	75 %	9.421.899.706,00	75 %	9.930.305.809,00		
		2. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	na %		na %		83,33 %		83,33 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		3. Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	na %		83.33 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		4. Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		5. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		6. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	na %		na %		75 %		75 %		75 %		75 %	SEKRETARIAT DPRD
		7. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	na %		100 %		75 %		75 %		75 %		75 %	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.1. 5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur	na %	0,00	90,32 %	913.248.845,00	na %	723.668.355,00	na %	694.207.144,00	na %	870.668.355,00	
		2. Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	na %		na %		53,85 %		58,97 %		69,23 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		3. Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam	na %		59 %		na %		na %		na %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		4. Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam	na %		na %		79,25 %		83,02 %		84,91 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		5. Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	na %		55 %		na %		na %		na %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		6. Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	na %		na %		69,89 %		73,12 %		81,72 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.1.1. 5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	na %	0,00	100 %	1.012.796.615,00	100 %	311.108.000,00	100 %	334.008.000,00	100 %	548.966.514,00	
		2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.1.1. 6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase dokumen SPII PD yang memadai	NA %	0,00	100 %	360.818.000,00	100 %	146.263.830,00	100 %	142.644.537,00	100 %	190.000.000,00	
		2. Persentase pendampingan dan asistensi	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		INSPEKTORAT

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		INSPEKTORAT
		4. Persentase dokumen SPIP PD yang memadai	NA %		100 %		NA %		NA %		NA %		INSPEKTORAT
3.1.2	Sasaran : 1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	1. Indeks SPBE	2,31-2,50 angka (0-5)	0,00	2,51-2,61 angka (0-5)	7.821.520.692,00	na angka (0-5)	5.840.828.369,00	na angka (0-5)	5.823.035.611,00	na angka (0-5)	6.463.907.495,00	
		2. Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	na angka (0-5)		na angka (0-5)		3,0-3,20 angka (0-5)		3,21-3,40 angka (0-5)		3,41-3,60 angka (0-5)		
3.1.2. 2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Cakupan diseminasi informasi melalui media publik	n/a %	0,00	n/a %	1.346.783.132,00	100 %	1.183.373.490,00	100 %	1.183.373.490,00	100 %	1.183.373.490,00	
		2. Cakupan diseminasi informasi melalui media massa	n/a %		86,66 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.1.2. 2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	n/a %	0,00	20,68 %	5.675.974.000,00	n/a %	4.116.425.429,00	n/a %	4.098.632.671,00	n/a %	4.739.504.555,00	
		2. Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi	n/a %		n/a %		100 %		100 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		3. Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	n/a %		n/a %		73,62 %		85,61 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		4. Cakupan PD dan desa/kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	n/a %		60,19 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.1.2. 2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	48,16 persen	0,00	56,89 persen	284.589.110,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00	
		2. Persentase ketersediaan data statistik	n/a %		100 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.1.3	Sasaran : 1.3. Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	1. Opini BPK	WTP	0,00	WTP	726.173.167.914,00	WTP	708.958.304.551,00	WTP	703.766.818.217,00	WTP	739.385.181.157,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.3. 5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	NA %	0,00	100 %	710.476.074.813,00	100 %	669.759.695.519,00	100 %	671.705.153.091,00	100 %	682.272.245.390,00	
		2. Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		3. Persentase serapan APBD	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4. Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.1.3. 5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	NA %	0,00	100 %	5.804.975.612,00	100 %	11.822.332.455,00	100 %	9.669.824.352,00	100 %	17.225.308.015,00	
3.1.3. 5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase kenaikan Pajak	NA %	0,00	11,28 %	9.892.117.489,00	10,70 %	27.376.276.577,00	10,17 %	22.391.840.774,00	9,69 %	39.887.627.752,00	
		2. Persentase kenaikan retribusi	NA %		-16,15 %		4,89 %		9,10 %		-3,31 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		3. Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.1.4	Sasaran : 1.4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (1-100) kriteria	0,00	83,75 (1-100) kriteria	9.738.460.280,00	84,5 (1-100) kriteria	9.328.596.606,00	85,25 (1-100) kriteria	9.175.690.623,00	86 (1-100) kriteria	10.714.603.228,00	
3.1.4. 2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. . Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	na persen	0,00	98.2 persen	812.676.885,00	99 persen	554.718.205,00	99.5 persen	554.718.205,00	100 persen	554.718.205,00	
		2. Persentase penerbitan KK	na persen		97.85 persen		98.45 persen		99.05 persen		99.5 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		3. Persentase Penerbitan KIA	na persen		na persen		71.5 persen		76.5 persen		81.5 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.4. 2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase penerbitan Akta Kelahiran	na persen	0,00	92.5 persen	259.050.442,00	95 persen	277.515.737,00	97.5 persen	277.515.737,00	100 persen	450.881.520,00	
		2. Persentase Penerbitan Akta Kematian	na persen		70 persen		80 persen		90 persen		100 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		3. Persentase Penerbitan Akta perkawinan	na persen		60 persen		70 persen		80 persen		90 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.1.4. 2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	na persen	0,00	75 persen	714.159.348,00	80 persen	579.707.283,00	85 persen	567.360.519,00	90 persen	663.004.677,00	
3.1.4. 2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1. Persentase Pemanfaatan Data	na %	0,00	90 %	100.715.480,00	na %	100.715.480,00	na %	100.715.480,00	na %	100.715.480,00	
		2. Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.1.4. 2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1. Persentase Pengelolaan Arsip	NA %	0,00	NA %	175.562.252,00	39.16 %	106.456.000,00	47.865 %	138.000.000,00	56.25 %	158.620.166,00	
		2. Persentase peningkatan arsip yang dikelola	Na %		6,45 %		NA %		NA %		NA %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		3. Persentase pencipta arsip yang tertib arsip	NA %		53,85 %		NA %		NA %		NA %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.1.4. 2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1. Persentase arsip yang dimusnahkan	na %	0,00	na %	0,00	33.33 %	0,00	66.67 %	55.000.000,00	100 %	55.000.000,00	
		2. Persentase arsip yang diselamatkan	na %		na %		33.33 %		66.67 %		100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.1.4. 2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
3.1.4. 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100 %	0,00	100 %	644.816.527,00	100 %	600.439.760,00	100 %	648.529.505,00	100 %	667.639.512,00	
		2. Persentase pelayanan publik sesuai SP dan SOP	na %		90 %		90 %		100 %		100 %		KECAMATAN BOROBUDUR

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGLUWAR
		4. Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	na %		90 %		90 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SALAM
		5. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SRUMBUNG
		6. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN DUKUN
		7. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SAWANGAN
		8. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN MUNTILAN
		9. Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen		93,00 Persen	KECAMATAN MUNGKID
		10. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN MERTOYUDAN
		11. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		93 %		95 %		96 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEMPURAN
		12. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KAJORAN
		13. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KALIANGKRIK
		14. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN BANDONGAN
		15. Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN CANDIMULYO
		16. Persentase pelayanan Publik sesuai SOP dan SP.	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN PAKIS
		17. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGABLAK
		18. Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SPP	0 persentase		83,71 persentase		87,19 persentase		88,68 persentase		90,16 persentase		90,16 persentase	KECAMATAN GRABAG
		19. Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		20. Presentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG
		21. Presentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na %		100 %		na %		na %		na %		na %	KELURAHAN SECANG
		22. Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN WINDUSARI
3.1.4. 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	0,00	100 %	5.963.557.516,00	100 %	5.511.029.910,00	100 %	5.429.071.980,00	100 %	5.972.003.603,00		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		80 %		85 %		85 %		85 %		85 %	KECAMATAN BOROBUDUR
		3. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGLUWAR
		4. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	na %		41,66 %		75 %		83,33 %		83,33 %		83,33 %	KECAMATAN SALAM
		5. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		60 %		75 %		90 %		100 %		100 %	KECAMATAN SRUMBUNG
		6. Persentase desa yang tertib administrasi	NA Persen		82 Persen		84 Persen		85 Persen		86 Persen		86 Persen	KECAMATAN DUKUN
		7. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		80 %		82 %		85 %		90 %		90 %	KECAMATAN SAWANGAN
		8. Persentase desa/kel yang tertib administrasi	na Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		93 Persen		93 Persen	KECAMATAN MUNTILAN
		9. Persentase desa/kel yang tertib administrasi	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KELURAHAN MUNTILAN
		10. Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen		93,00 Persen	KECAMATAN MUNGKID
		11. Prosentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KELURAHAN MENDUT
		12. Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A Persen		N/A Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KELURAHAN SAWITAN
		13. Persentase desa yang tertib administrasi	82 %		82,5 %		83 %		83 %		83 %		83 %	KECAMATAN MERTOYUDAN
		14. Persentase desa yang tertib administrasi	na angka (0-100)		82 angka (0-100)		82,5 angka (0-100)		83 angka (0-100)		83 angka (0-100)		83 angka (0-100)	KELURAHAN SUMBERREJO
		15. Presentase desa tertib administrasi	na %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEMPURAN
		16. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KAJORAN
		17. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		82 %		84 %		85 %		86 %		86 %	KECAMATAN KALIANGKRIK
		18. Persentase desa yang tertib administrasi	na Persen		50 Persen		50 Persen		71,42 Persen		85,71 Persen		85,71 Persen	KECAMATAN BANDONGAN
		19. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		84.21 %		89.47 %		94.73 %		100 %		100 %	KECAMATAN CANDIMULYO
		20. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN PAKIS
		21. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %	KECAMATAN NGABLAK
		22. Persentase desa yang tertib Administrasi	100 persentase		100 persentase		100 persentase		100 persentase		100 persentase		100 persentase	KECAMATAN GRABAG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		23. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		24. Presentase desa yang tertib administrasi	na %		65 %		75 %		85 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG
		25. Persentase Kelurahan yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KELURAHAN SECANG
		26. Persentase desa yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN WINDUSARI
3.1.4. 7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	0,00	100 %	446.197.830,00	100 %	1.042.219.641,00	100 %	722.452.107,00	100 %	1.395.451.975,00		
		2. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		85 %		90 %		90 %		90 %		90 %	KECAMATAN BOROBUDUR
		3. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGLUWAR
		4. Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SALAM
		5. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		87 %		87 %		87 %		87 %		87 %	KECAMATAN SRUMBUNG
		6. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN DUKUN
		7. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SAWANGAN
		8. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN MUNTILAN
		9. Prosentase Kegiatan Yang di Koordinasikan	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen		93,00 Persen	KECAMATAN MUNGKID
		10. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN MERTOYUDAN
		11. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)	KELURAHAN SUMBERREJO
		12. Presentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEMPURAN
		13. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KAJORAN
		14. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KALIANGKRIK
		15. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN BANDONGAN
		16. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		17. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN PAKIS
		18. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGABLAK
		19. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN GRABAG
		20. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		21. Presentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG
		22. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		na %		100 %		na %		na %		na %	KELURAHAN SECANG
		23. Persentase desa yang tertib administrasi	0 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %	KECAMATAN WINDUSARI
3.1.5	Sasaran : 1.5. Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	1. Indeks Sistem Merit	0,55 angka (0-1)	0,00	0,58 angka (0-1)	6.509.763.000,00	0,6 angka (0-1)	6.877.173.000,00	0,7 angka (0-1)	8.820.000.000,00	0,76 angka (0-1)	8.860.000.000,00		
3.1.5.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	na %	0,00	9,7 %	6.509.763.000,00	na %	6.877.173.000,00	na %	8.820.000.000,00	na %	8.860.000.000,00		
		2. Persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN	na %		na %		95 %		98 %		100 %			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		3. Persentase ASN yang terevaluasi kerjanya	na %		80 %		na %		na %		na %			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		4. Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian	na %		na %		84 %		85 %		86 %			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		5. Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	na %		75 %		na %		na %		na %			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		6. Persentase keterisian Jabatan	na %		na %		83 %		84 %		85 %			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7. Persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas	na %		82 %		na %		na %		na %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		8. Persentase pengembangan kompetensi ASN	na %		na %		14.17 %		15.50 %		15.52 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN MAGELANG

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Rencana Tata Ruang di wilayah Kabupaten Magelang menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

7.1 Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Di Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kebijakan/pengaturan terkait pengembangan wilayah, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030,
Tujuan penataan ruang dalam Perda 5 tahun 2011 adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Borobudur untuk menjamin kelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi.
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai alat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal –Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, berdasarkan amanat Perpres 79 Tahun 2019 terdapat kurang lebih 15 kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

7.2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Tujuan penataan ruang Kabupaten Magelang adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air. Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sedaya Semanah (Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah) sejalan dengan tujuan Penataan Ruang.

7.2.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah mendasarkan pada implementasi struktur ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan yakni:

- 1). Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perdesaan
Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana disusun untuk menumbuhkan kawasan perdesaan sesuai potensi yang ada dengan tetap mempertahankan ciri khas perdesaan.
- 2). Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan
Kebijakan pengembangan kawasan perkotaan disusun untuk mengembangkan kawasan perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah kabupaten dan sekitarnya.
- 3). Kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah
Kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana utama yang terdiri atas pengembangan jaringan jalan dan jaringan kereta api, serta pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.
 - a. Kebijakan pengembangan jaringan jalan utama, dengan strategi meliputi:
 1. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan
 2. Pengembangan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah.
 3. Pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh kecamatan.

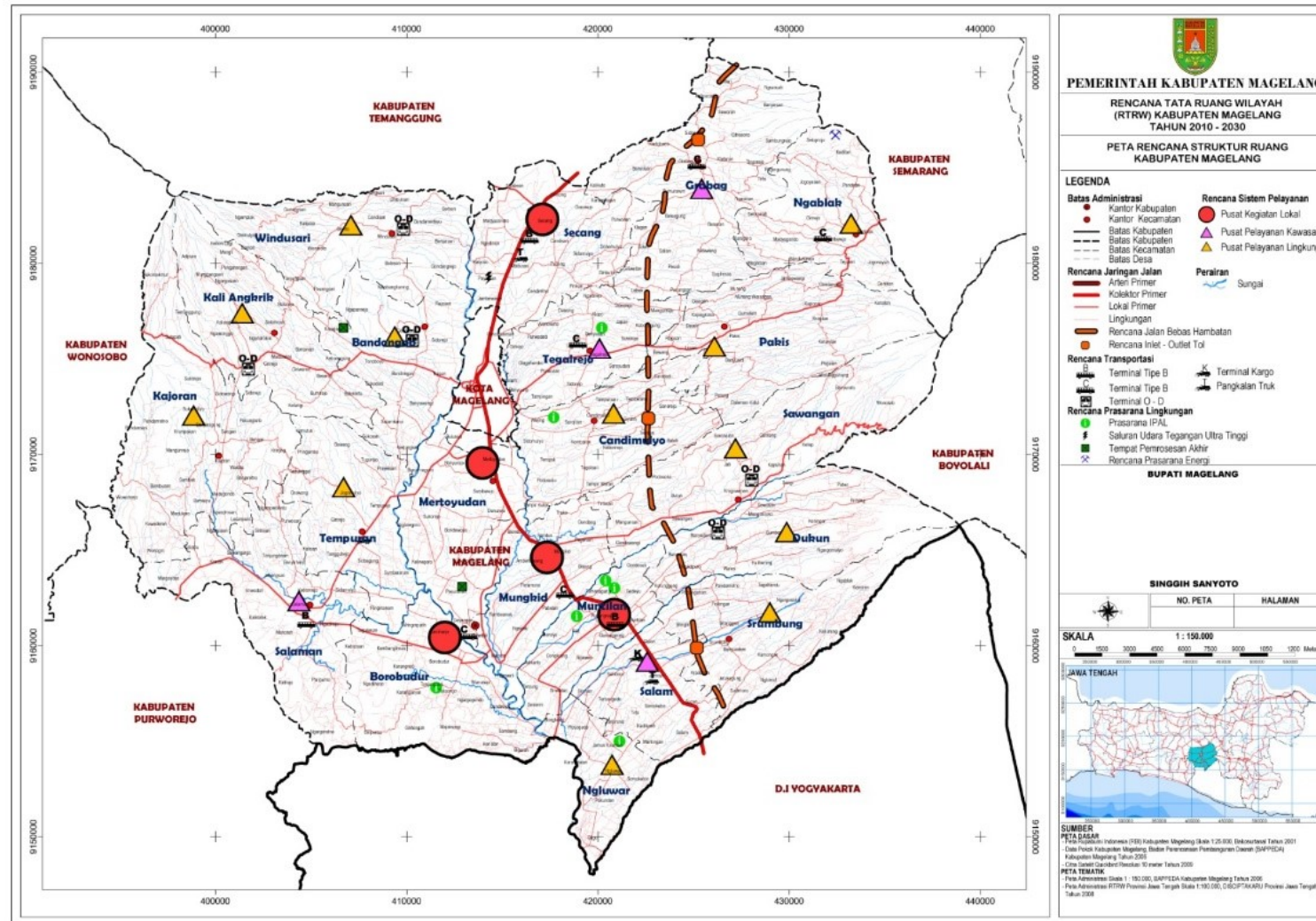
- b. Kebijakan pengembangan sistem jaringan kereta api dengan strategi sebagai berikut:
 1. Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api.
 2. Pengembangan stasiun kereta api.
- c. Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi, strategi sebagai berikut:
 1. Pengembangan energi panas bumi.
 2. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
- d. Kebijakan pengembangan pembangkit listrik, dengan strategi meliputi pengoptimalan pembangkit listrik dengan mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik yang meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 2. pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan/atau minihidro;
 3. pembangkit listrik tenaga surya; dan
 4. pembangkit listrik tenaga listrik lainnya.
- e. Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. Pengembangan jaringan sumberdaya air kabupaten, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 2. Pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota dengan strategi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
 3. Pelestarian/konservasi lingkungan DAS Mikro; strategi yang disusun adalah dengan mengembangkan penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, dan melakukan rekayasa daerah tangkapan air.
 4. Penyediaan, pengembangan dan pelayanan irigasi
 5. Penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih
 6. Penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna, dengan strategi meliputi menggunakan sumber air yang telah ada dan telah memenuhi syarat air bersih dan mendistribusikan air bersih melalui sistem gravitasi dan/atau sistem perpompaan sesuai dengan karakteristik wilayah.
- f. Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, dengan strategi meliputi :

1. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel;
 2. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan nirkabel yang harus memanfaatkan menara secara bersama; dan
 3. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi satelit.
- g. Kebijakan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan, dengan strategi meliputi :
1. Pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan
 2. Pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik
 3. Pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan air bersih.
 4. Pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase
- h. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa pengembangan jaringan evakuasi bencana, fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan olahraga, dengan strategi meliputi :
1. Pengembangan jaringan evakuasi bencana
 2. Pengembangan fasilitas kesehatan
 3. Pengembangan fasilitas pendidikan
 4. Pengembangan fasilitas ekonomi
 5. Pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi

7.2.2. Perwujudan Struktur Ruang

Rencana struktur ruang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan. Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat pelayanan dibagi menjadi dua yaitu sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- 1) Sistem Perkotaan meliputi:
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PPK ; dan
 - c. pengembangan PPL.
- 2) Sistem Perdesaan meliputi:
Sistem perdesaan meliputi kawasan terpilih pusat pengembangan desa yang terdiri dari Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Pendukung (*hinterland*).



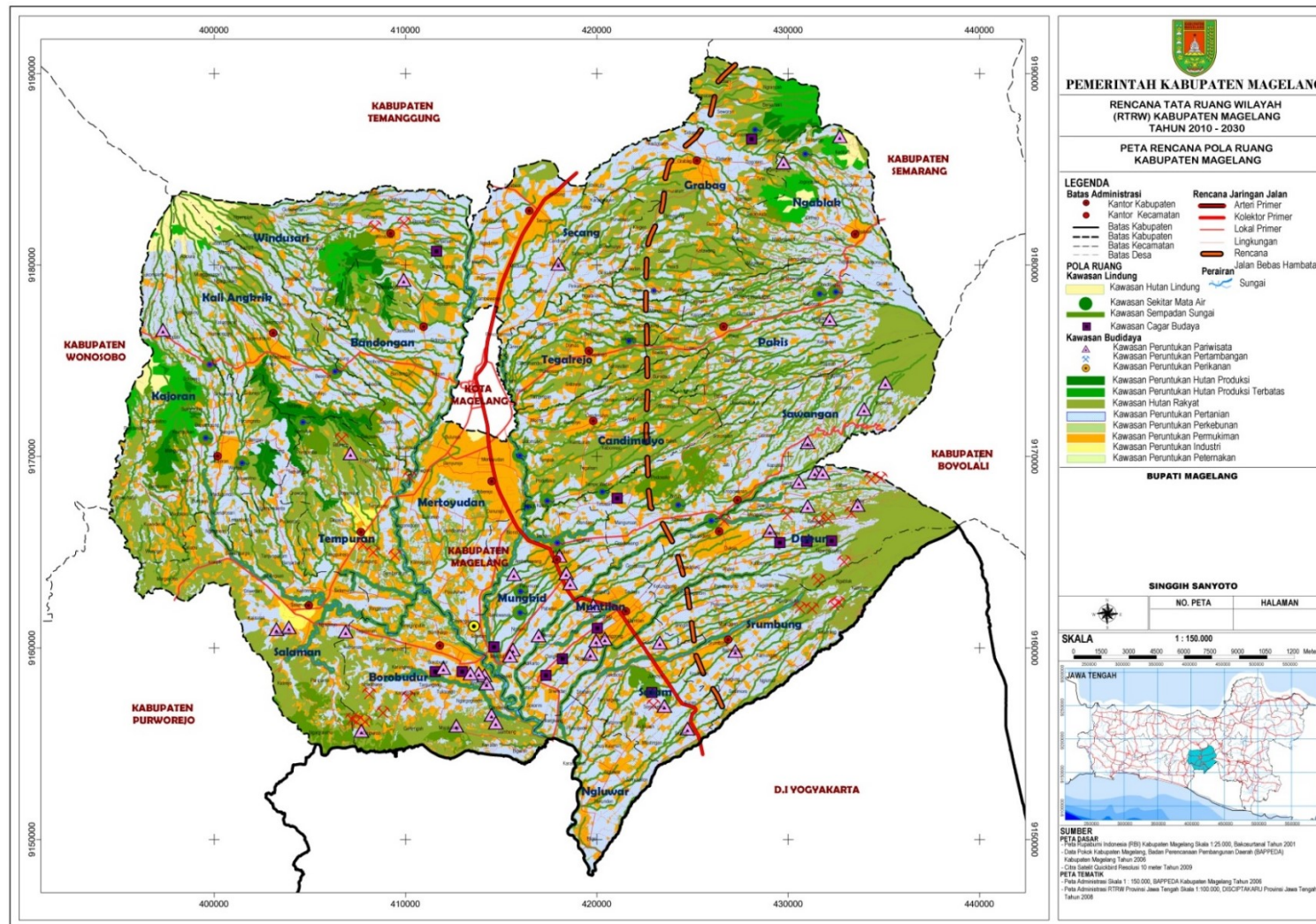
Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 7.1
Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

7.2.3. Perwujudan Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Magelang dibagi menjadi 2 yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya.



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 7.2
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
 VII-7

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki kondisi fisik dan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

7.3 Peraturan Penataan Ruang Lainnya

Selain Perda 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, peraturan perundangan yang mengatur tentang penataan ruang yang ada yaitu Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, dan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

7.3.1. Perpres Nomor 58 Tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014 mengamanatkan bahwa penataan ruang Kawasan Borobudur bertujuan mewujudkan tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Rencana pola ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia. Rencana pola ruang Kawasan Borobudur yang ada di Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1) kawasan situs candi termasuk taman candi,
- 2) kawasan sempadan sungai;
- 3) kawasan sekitar mata air,
- 4) kawasan hutan rakyat,
- 5) kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba,
- 6) kawasan peruntukan permukiman

7.3.2. Perpres Nomor 70 Tahun 2014

Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana.

Rencana Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelayanan evakuasi bencana, dan jaringan prasarana Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi guna menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana.

Rencana Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi terdiri atas:

- 1) Rencana sistem pusat permukiman

2) Rencana sistem jaringan prasarana

Di dalam rencana pola ruang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Untuk kawasan lindung di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 terdiri atas:

- 1) Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan Taman Nasional yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
- 2) Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berdampak langsung.
- 3) Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan sungai;
- 4) Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantong (enclave) permukiman;

Sedangkan untuk kawasan budidaya di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 terdiri atas:

- 1) Zona Budi Daya 1 (Zona B1) yang merupakan kawasan permukiman perkotaan;
- 2) Zona Budi Daya 2 (Zona B2) yang merupakan kawasan permukiman perdesaan;
- 3) Zona Budi Daya 3 (Zona B3) yang merupakan kawasan budidaya hortikultura dan perkebunan;
- 4) Zona Budi Daya 4 (Zona B4) yang merupakan Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan,
- 5) Zona Budi Daya 5 (Zona B5) yang merupakan kawasan hutan rakyat,

7.3.3. Perda Nomor 16 Tahun 2019

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk dapat dijadikan pedoman dalam:

- 1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- 4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- 5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- 6) penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- 7) penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Secara umum, untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan strategi dan kebijakan perencanaan ruang wilayah serta strategi perencanaan ruang wilayah.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
- b. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung , meliputi :

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, meliputi:

- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi :

- a. Peningkatan keterpaduan pembangunan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
- b. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
- c. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;

Sistem Perwilayahan dilakukan melalui:

- a. Pembagian Wilayah Pengembangan; dan
- b. Penentuan arah pengembangan.

Wilayah Pengembangan Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang dengan arahan pengembangan meliputi:

1. Memadukan pembangunan Kota Magelang dan wilayah disekitarnya;
2. Menerpadukan pembangunan perbatasan dengan Provinsi DIY;
3. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;

4. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) pariwisata;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) industri; dan
 - e) panas bumi.

7.4 Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten Magelang sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang diintegrasikan ke dalam RPJMD, melalui penelaahan rencana tata ruang wilayah guna menjamin arah kebijakan dalam RPJMD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Kabupaten Magelang, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRWN.

7.4.1. Keterkaitan antara RPJMD dengan Indikasi Program RTRW Kabupaten Magelang

Dalam menyusun Revisi RPJMD Tahun 2019-2024 perlu memperhatikan Indikasi Program RTRW yang telah ditetapkan sebagai arah pembangunan di Kabupaten Magelang. Tabel 7.1. tentang keterkaitan RPJMD dengan indikasi program RTRW Kabupaten Magelang .

Tabel 7.1
Keterkaitan Indikasi Program RTRW

No	Indikasi Program RTRW	OPD
1	Studi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (PPK)	Bappeda dan Litbangda
2	Studi Rencana Detail Tata Ruang Perdesaan (PPL)	Bappeda dan Litbangda
3	Pengembangan Prasarana Jalan	DPUPR
4	Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang dan Angkutan Barang	DISHUB
5	Pengembangan Jalur Kereta Api	DISHUB
6	Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik	Bappeda dan Litbangda
7	Pengembangan Jaringan Prasarana Energi	Bappeda dan Litbangda

No	Indikasi Program RTRW	OPD
8	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	DPUPR
9	Pengembangan Jaringan Air Bersih	DPUPR
10	Pengembangan Jaringan Irigasi	DPUPR
11	Pengembangan Sistem Jaringan Kabel	Diskominfo
12	Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel	Diskominfo
13	Pengembangan Sistem Jaringan Satelit	Diskominfo
14	Pembangunan TPS (Tempat Pemrosesan Sampah) di pusat pertumbuhan	DLH
15	Penetapan areal sebagai daerah resapan air dan drainase tertutup	DLH
16	Pengembangan pengelolaan sampah melalui recycle, reduce, dan reuse	DLH
17	Pengembangan pengelolaan limbah dari permukiman perkotaan dengan sistem sanitasi IPAL dan IPLT	DLH
18	Pengembangan pengelolaan limbah IKM berupa biogas menjadi sumber energi alternatif	DLH
19	Pembuatan Rencana Pengolahan Sampah Regional	DLH
20	Pengembangan Sarana Perumahan	DPRKP
21	Pengembangan sarana Pendidikan	Disdikbud

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Diperlukan pula beberapa pembangunan infrastruktur yang sangat mendukung dalam pelayanan masyarakat dan cakupan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang, serta sebagai program pendukung ditetapkan Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), diantaranya adalah:

1. Pembangunan jalan strategis untuk megantisipasi volume kendaraan di Kabupaten Magelang
 - a. Pembangunan jalan lingkaran Muntilan
 - b. Pembangunan jalan lingkaran Mertoyudan
 - c. Peningkatan jalan kolektor primer III
 - d. Peningkatan konektivitas destinasi wisata kabupaten
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, sebagai pemenuhan layanan sanitasi untuk limbah domestik.
3. Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah
4. Pengembangan Kawasan perumahan di pusat-pusat kegiatan, diantaranya melalui Penataan perumahan dan Kawasan permukiman serta Pencegahan dan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh.

5. Peningkatan layanan keselamatan dan keamanan lalu lintas melalui peningkatan sarana dan prasarana jalan serta peningkatan kualitas pelayanan uji kendaraan bermotor.

7.4.2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah berdasarkan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan diwilayah Kabupaten Magelang yang menjadi bagian dari sistem perwilayahan Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.

Pengembangan WP Purwomanggung yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi selatan tidak akan terlepas dari Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulon Progo. WP ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan kewilayahan baik dari sisi sosial, ekonomi dan kewilayahan.

Tabel 7.2

Keterkaitan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Tengah dengan RPJMD Kabupaten Magelang

No	Indikasi Program RTRW Jawa Tengah	RTRW Kabupaten Magelang	Substansi Rencana Perubahan RPJMD Kab. Magelang
1.	Pembangunan Jalan Tol Jogja Bawen- KSPN Borobudur	Pasal 99 ayat 2 KUPZ jaringan jalan	Penyiapan dokumen lingkungan, kajian kelayakan dan masterplan Anjungan Cerdas
2	Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta – Magelang	Pasal 99 ayat 3 KUPZ Jaringan Kereta Api	
3	Pembangunan TPS (Tempat Pemrosesan Sampah) di pusat pertumbuhan	Pasal 17 ayat 2 Strategi persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4	Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Magelang	Pasal 9 ayat 3 Strategi pengembangan sis.jar jalan yang terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

		dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah	Angkutan Jalan (LLAJ)
5	Pembangunan Jaringan Jalan Provinsi (Jl. Penghubung Purworejo-DIY-Muntilan) (Jl. Magelang-Wonosobo)	Pasal 51 ayat 3 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sumber: Hasil Olahan, 2021

7.4.3. Keterkaitan Perpres 79 tahun 2019 dengan RPJMD.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas :

- a. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal – Kota Semarang – Semarang – Kota Salatiga – Demak – Grobogan;
- b. Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo – Wonosobo – Magelang – Kota Magelang – Temanggung; dan
- c. Kawasan Bregasmalang yang terdiri dari Brebes – Kota Tegal – Tegal – Pemasang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung, dan Bregasmalang dilakukan pengembangan kawasan pendukung sebagai berikut :

- a. Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara – Purbalingga – Banyumas – Cilacap – Kebumen;
- b. Kawasan Petanglong yang terdiri atas Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan;

- c. Kawasan Wanarakuti yang terdiri atas Jepara – Kudus – Pati;
- d. Kawasan Banglor yang terdiri atas Rembang – Blora; dan
- e. Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang yang selanjutnya disebut Rencana Induk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dan program /kegiatan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan Kawasan Barlingmascakep, kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) *quick wins* yang menjadi dasar penetapan 3 (tiga) kawasan prioritas yaitu :

- a. Kawasan Prioritas Kedungsepur dengan quick win Pengembangan Kawasan Industri Kendal
Kawasan Industri (KI) Kendal dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kendal sendiri telah ditentukan sebesar 4.500 Ha.
- b. Kawasan Prioritas Purwomanggung dengan quick win Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur
Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan Cultural Heritage Masterpiece – Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan manca Negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung
- c. Kawasan Prioritas Bregasmalang dengan quick win Pembangunan Kawasan Industri Brebes
Kawasan Industri (KI) Brebes ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sisi Ekonomi, diarahkan sebagai pembentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan di Bregasmalang.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Percepatan

pembangunan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan.

Dalam Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 terdapat 15 rencana program/kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Program/kegiatan tersebut dipastikan akan berdampak pada pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang sehingga diperlukan dukungan pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan program/kegiatan ke dalam RPJMD Kabupaten Magelang.

Tabel 7.3.
Kesesuaian RTRW dalam Kegiatan Perpres 79 tahun 2019

NO.	Program/ Kegiatan	Estimasi Biaya (Milyar)/ Sumber Dana	Kesesuaian Dengan RTRW
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500 /APBN	Rencana pembangunnn sudah sesuai dengan RTRW Pasal 15 berupa kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000 / KPBU	Pembangunan jalan tol ruas Bawen – Yogyakarta sudah sesuai dalam RTRW Pasal 51 dan indikasi program RTRW, namun detail trasenya akan diakomodir dalam revisi RTRW
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik B.ts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45/APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW, berupa pengembangan jalan strategis Magelang - Wonosobo
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52 /APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran II RTRW berupa rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65/ APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100/ APBN	Rencana peningkatan infrastruktur sudah sesuai dengan indikasi program dalam RTRW berupa perwujudan kawasan strategis sosial budaya di Borobudur, secara detail akan dimasukkan dalam revisi RTRW

NO.	Program/ Kegiatan	Estimasi Biaya (Milyar)/ Sumber Dana	Kesesuaian Dengan RTRW
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100 / APBN	Rencana penyediaan TPST sudah sesuai dengan RTRW berupa pembangunan pengolahan sampah di Kabupaten Magelang, secara detail kegiatan ini akan dimasukkan dalam revisi RTRW
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200/ APBN	Rencana pembangunan TPA/TPST Regional sudah sesuai dengan RTRW dan lampiran RTRW berupa pembuatan rencana pengolahan sampah regional
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57 / APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50/ APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68 / APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100 / KPBU	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265/ APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 58 yaitu Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa fasilitas ekonomi, berupa pembangunan pasar tradisional dan

NO.	Program/ Kegiatan	Estimasi Biaya (Milyar)/ Sumber Dana	Kesesuaian Dengan RTRW
			modern skala wilayah di lokasi strategis kawasan perkotaan PKL
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50 /APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 37 yaitu Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berupa pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang ramah lingkungan dimana Taman Rekreasi Mendut masuk dalam pariwisata buatan
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200 /APBN	Rencana pembangunan sudah sesuai dengan RTRW Pasal 18 yaitu salah satu Strategi pengembangan fasilitas pendidikan berupa meningkatkan pelayanan fasilitas pendidikan menengah secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dukungan kegiatan yang wajib dilaksanakan guna mendukung Peraturan Presiden ini adalah pengadaan lahan, penyusunan dokumen perencanaan teknis (Studi Kelayakan, DED dan dokumen pendukung lainnya) untuk kegiatan :

- a. Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang
- b. Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang.
- c. Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang
- d. Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang.
- e. Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang.
- f. Pembangunan Jalan dan Jembatan Rejosari sebagai pendukung Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang.
- g. Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur.
- h. Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur dan Kawasan pendukung sekitarnya.

7.4.4. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang mengakomodir program/kegiatan dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun

2011, Peraturan Presiden nomor 58 Tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 16 Tahun 2019 akan disinkronisasikan kedalam Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Sinkronisasi dalam Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Magelang dapat dituangkan dalam indikasi program utama yang menjadi lampiran peraturan daerah.

Tabel 7.4 Matrik kebutuhan kegiatan pendukung Perpres 79 Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan	1.500	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	300.000
2	Pembangunan Jalan Tol ruas Tol Bawen-Yogya	30.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi	115.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi	115.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi	115.000	335.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
			Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	Pembangunan Jalan Magelang – Kaliangkrik Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang – Kaliangkrik Kab. Wonosobo. PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang – Kaliangkrik Kab. Wonosobo. PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang – Kaliangkrik Kab. Wonosobo. PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	700.000
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Fasilitasi dan koordinasi teknis PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Fasilitasi dan koordinasi teknis PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Fasilitasi dan koordinasi teknis PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	700.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	-		Bentuk Dukungan: Penyusunan Dokumen FS PD: SATPOL PP DAN PK Program: Penanggulangan Kebakaran	100.000	Bentuk Dukungan: Penyusunan Dokumen DED PD: SATPOL PP DAN PK Program: enanggulangan Kebakaran	100.0000	200.000
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	Bentuk dukungan: Penyusunan DED Jalan, Drainase ruas jalan di Kawasan Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Bentuk dukungan: Penyusunan DED Jalan, Drainase ruas jalan di Kawasan Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	Bentuk dukungan: Penyusunan DED Jalan, Drainase ruas jalan di Kawasan Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	700.000
					Bentuk dukungan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Terminal Borobudur PD: DISHUB Program: Penyelenggaraan Lalu	100.000	Bentuk dukungan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Terminal Salaman PD: DISHUB Program: Penyelenggaraan Lalu	100.000	100.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
					Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	Bentuk dukungan: Operasional TPS3R PD: Dinas Lingkungan Hidup Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	Bentuk dukungan: Operasional TPS3R PD: Dinas Lingkungan Hidup Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	Bentuk dukungan: Operasional TPS3R PD: Dinas Lingkungan Hidup Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	600.000
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	-		Bentuk dukungan: Penyusunan dokumen DED jalan Rejosari PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Bentuk dukungan: Peningkatan jalan Rejosari PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	1.000.000	1.100.000
9	Penataan akses poros Mendut- Pawon-	57	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros	100.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros	300.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros	300.000	700.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
	Borobudur, Kab. Magelang		Mendut-Pawon- Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Mendut-Pawon- Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Mendut-Pawon- Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
10	Pembangunan Gerbang dan Koridor Palbapang, Borobudur, Gerbang/Rest Area-Koridor Kembang Limus- Borobudur, Kab. Magelang	50	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon- Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon- Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon- Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000	700.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
11	Penataan Kawasan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	300.000
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	345.000
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan,	265,5			Bentuk Pendampingan: Penyusunan dok AMDAL Pasar Salaman & Kaponan, Review	1.450.00 0	Bentuk Pendampingan: Penyusunan Review DED Pasar Mungkid, AMDAL Pasar Mungkid,	1.150.000	2.600.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
	Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang				DED Pasar Ngablak, DED Pasar sementara Ngablak, Sewa Pasar Sementara untuk Pasar Ngablak, Pembangunan Pasar Sementara Pasar Ngablak PD: Disdagkop UKM Program: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			ANDALALIN Pasar Mungkid, DED Pasar Sementara Mungkid, Sewa tanah Pasar Sementara Mungkid, Pembangunan Pasar Sementara Mungkid, Review DED Pasar Windusari PD: Disdagkop UKM Program: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	Bentuk dukungan: Penyusunan Dokumen Lingkungan PD: Disparpora Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	700.000					700.000
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK	50			Bentuk dukungan: Pengadaan tanah SMK Pariwisata PD:	22.000.000			22.000.000

No	Program/ Kegiatan Perpres 79/2019	Estimasi Nilai Investasi (APBN/KPB U) (Milyar)	Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang)						TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
			2022		2023		2024		
			Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	Uraian	Anggaran (ribu)	
	Pariwisata, Kab. Magelang				Disdikbud Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota				
	JUMLAH	33.703		1.830.000		26.180.000	0	4.330.000	32.340.000

BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Pada periode RPJMD tahun 2019-2024 diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat cenderung meningkat, asumsi pendapatan daerah juga mengalami peningkatan, sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksi meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan bersumber dari peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, utamanya hasil investasi pemerintah Kabupaten Magelang ke Bank Jawa Tengah, PDAM Kabupaten Magelang, Bank Bapas 69, dan BPR/BKK. Belanja diutamakan untuk mendanai urusan pemerintah wajib pelayanan dasar dan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi wilayah serta pembangunan berkelanjutan. Rencana proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2021-2024 dituangkan dalam tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021-2024 pada Perubahan RPJMD 2019-2024

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	2.468.095.584.817	2.440.920.608.359	2.534.277.740.359	2.588.084.722.284
A	Pendapatan Asli Daerah	357.421.620.890	352.421.620.890	424.421.620.890	483.840.647.815
1	Pajak Daerah	112.347.877.076	120.827.282.454	161.822.957.906	167.849.077.763
2	Retribusi Daerah	15.676.434.886	24.414.190.110	30.925.190.014	32.104.775.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.715.782.928	29.084.407.273	30.239.029.928	31.134.481.017
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	202.681.526.000	178.095.741.053	201.434.443.042	252.752.314.196
B	Pendapatan Transfer	1.996.404.363.927	1.973.979.387.469	1.992.768.919.469	2.006.650.274.469
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.810.903.420.349	1.795.749.287.469	1.795.749.287.469	1.795.749.287.469
a	Dana Perimbangan	1.391.916.735.349	1.404.705.178.469	1.404.705.178.469	1.404.705.178.469
-	Dana Transfer Umum	1.009.571.985.000	1.008.031.887.469	1.008.031.887.469	1.008.031.887.469
1)	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.554.688.000	33.014.590.469	33.014.590.469	33.014.590.469
2)	Dana Alokasi Umum	975.017.297.000	975.017.297.000	975.017.297.000	975.017.297.000
-	Dana Transfer Khusus	382.344.750.349	396.673.291.000	396.673.291.000	396.673.291.000

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1)	DAK Fisik	146.978.657.000	146.978.657.000	146.978.657.000	146.978.657.000
2)	DAK Non Fisik	235.366.093.349	249.694.634.000	249.694.634.000	249.694.634.000
b	Dana Insentif Daerah (DID)	27.942.576.000	-	-	-
c	Dana Desa	391.044.109.000	391.044.109.000	391.044.109.000	391.044.109.000
2	Transfer Pemerintah Daerah	185.500.943.578	178.230.100.000	197.019.632.000	210.900.987.000
a	Pendapatan Bagi Hasil	168.798.943.578	178.230.100.000	197.019.632.000	210.900.987.000
b	Bantuan Keuangan	16.702.000.000	-	-	-
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	114.269.600.000	114.519.600.000	117.087.200.000	97.593.800.00
1	Pendapatan Hibah	21.675.800.000	21.925.800.000	24.493.400.000	5.000.000.000
2	Dana Darurat	-	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000
2	BELANJA DAERAH	2.740.083.440.920	2.532.903.276.124	2.528.751.853.379	2.678.280.673.350
A	Belanja Operasi	1.745.176.107.816	1.540.298.139.160	1.618.026.436.403	1.754.981.854.007
1	Belanja Pegawai	991.783.224.268	1.129.295.669.248	1.168.771.256.248	1.223.419.883.711
2	Belanja Barang dan Jasa	637.941.628.522	200.320.646.712	236.005.756.955	337.805.947.096
3	Belanja Bunga	0	0	0	0

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
5	Belanja Hibah	103.977.891.200	168.973.038.200	171.540.638.200	152.047.238.200
6	Belanja Bantuan Sosial	11.473.363.826	41.708.785.000	41.708.785.000	41.708.785.000
B	Belanja Modal	278.148.201.914	244.714.482.842	251.622.254.832	263.475.086.731
1	Belanja Tanah	1.667.850.000			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	90.654.225.797			
3	Belanja Bangunan dan Gedung	129.645.281.119			
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.803.398.535			
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.377.446.463			
C	Belanja Tidak Terduga	74.895.309.115	102.188.159.514	8.650.000.000	8.650.000.000
D	Belanja Transfer	641.863.822.075	645.702.494.608	650.453.162.144	651.173.732.612
1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kab/Kota/Desa	13.219.497.782	14.745.647.256	19.496.314.792	20.216.885.260
2	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	628.644.324.293	630.956.847.352	630.956.847.352	630.956.847.352
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.740.083.440.920	2.532.903.276.124	2.528.751.853.379	2.678.280.673.350
	Surplus/Defisit	(271.987.856.102)	(91.982.667.765)	5.525.886.980	(90.195.951.066)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	287.691.856.120	120.482.667.765	27.974.113.020	93.695.951.066
1	SiLPA	287.691.856.120	120.482.667.765	27.974.113.020	28.695.951.066
2	Pencairan Dana Cadangan			0	65.000.000.000
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	287.691.856.102	120.482.667.765	27.974.113.020	93.695.951.066
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.704.000.000	28.500.000.000	33.500.000.000	3.500.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
3	Pembayaran pokok utang				
4	Pemberian pinjaman daerah				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.704.000.000	28.500.000.000	33.500.000.000	3.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	271.987.856.102	91.982.667.765	(5.525.886.980)	90.195.951.066
	Total APBD	3.012.071.297.022	2.624.885.943.889	2.523.225.966.399	2.768.476.624.416
	SiLPA Tahun Berkenaan				

Sedangkan proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2021 -2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2
Rencana Pendanaan dan Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.866.088.000.506	1.505.335.961.089	1.487.105.627.398	1.624.558.046.653
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	1.179.504.485.343	696.271.521.324	650.041.499.080	764.600.504.079
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH dan Prioritas Pembangunan Daerah	987.191.585.921	445.035.129.554	487.592.599.288	536.431.033.819
1	Bantuan Hibah BOS	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000	92.593.800.000
	Hibah KPU dan Bawaslu (Pilkada)				65.000.000.000
2	Bantuan Sosial :	10.906.930.350	41.708.785.000	41.708.785.000	41.708.785.000
3	Belanja Bagi Hasil Kepada prov /Kab/Kota	13.916.859.958	14.745.647.256	19.496.314.792	20.216.885.260
4	Belanja Bunga Obligasi	-	-	-	-
5	Belanja Tidak Terduga	74.895.309.114	102.188.159.514	8.650.000.000	8.650.000.000
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	686.583.515.163	809.064.439.765	837.064.128.318	859.957.542.574
1	Tambahan Penghasilan	62.611.061.070	101.728.354.213	127.160.442.766	169.547.257.022
2	Bantuan Hibah :				
	Hibah Lainnya	7.713.241.200	76.379.238.200	78.946.838.200	59.453.438.200
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa	616.259.212.893	630.956.847.352	630.956.847.352	630.956.847.352
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Belanja pegawai meliputi gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya. Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN (termasuk PPPK), DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tambahan penghasilan pegawai, honorarium, insentif pemungutan pajak dan retribusi.
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Belanja hibah diprioritaskan untuk belanja hibah mengikat sesuai peraturan

- perundangan, belanja hibah keagamaan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah kehidupan beragama dan akhlak mulia.
- f. belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial diprioritaskan untuk pemugaran rumah tidak layak huni dan bantuan sosial untuk lanjut usia terlantar, cacat dan fakir miskin.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal meliputi :
- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi baik;
 - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja tidak terduga
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga diprioritaskan untuk belanja bantuan sosial tidak terencana dan belanja tidak terduga untuk mengantisipasi bencana alam.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer meliputi:

- a. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran tersebut digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, dan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran daerah;

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi-misi dan pelayanan masyarakat. Konsep "*money follow function*" selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya, program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep *money follow program* belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti: pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah;
- 2) dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarnya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah akan tetapi besarnya belum dapat dimasukkan dalam proyeksi pendapatan dan kerangka pendanaan APBD sebelum ada aturan yang ditetapkan dan dipublikasikan serta dalam melaksanakan harus sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah, sehingga

dengan kondisi tersebut daerah tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah;

- 3) Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kabupaten Magelang pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 11,25 persen dari total pendapatan daerah.

Namun demikian, penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada. Oleh karena berbagai keterbatasan tersebut, ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk menyikapinya, sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum, beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain, pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut:

I. Periode Tahun 2020

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. program pendidikan sekolah dasar, diarahkan pada penurunan angka putus sekolah SD/MI, peningkatan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, persentase SD dengan siswa ideal, persentase SD yang menerapkan pendidikan karakter serta persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. program pendidikan sekolah menengah pertama, diarahkan pada penurunan angka putus sekolah SMP/MTs, angka melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA, persentase SMP yang menerapkan pendidikan karakter, persentase SMP dengan jumlah siswa ideal, serta Persentase SMP dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- c. program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, diarahkan pada peningkatan persentase PNF terakreditasi (LKP, PKBM) dan persentase PAUD terakreditasi.
- d. program pembinaan guru dan tenaga kependidikan, diarahkan pada peningkatan persentase guru bersertifikat, dan persentase guru yang lulus uji kompetensi guru.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. program pelayanan kesehatan diarahkan pada Cakupan Mutu Pelayanan RS, Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium dan Cakupan mutu pelayanan FKTP;

- b. program sumber daya kesehatan diarahkan pada peningkatan cakupan sumber daya manusia kesehatan, dan cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan;
- c. program pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan pada cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, cakupan surveilans dan imunisasi, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga TB, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- d. program kesehatan masyarakat diarahkan pada cakupan kesehatan ibu, anak, lansia, gizi, cakupan kesehatan lingkungan, kesjaor, cakupan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- e. program peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit diarahkan pada peningkatan Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dan Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan akses dan kualitas jalan diarahkan pada cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan dan persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik;
- b. program peningkatan layanan sumber daya air dan jaringan irigasi diarahkan pada peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi serta cakupan layanan sumber daya air;
- c. program peningkatan dan pengembangan bangunan gedung dan AMPL diarahkan pada cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik, cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, serta persentase terbangunnya landmark;
- d. program pengembangan sarana dan prasarana ke-PU-an diarahkan pada peningkatan cakupan sarana prasarana ke-PU-an dan cakupan layanan jasa konstruksi;
- e. program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, diarahkan pada peningkatan persentase dokumen rekomendasi perijinan, persentase kesesuaian tata ruang, dan cakupan kinerja pertanahan;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan diarahkan pada peningkatan persentase penanganan PSU perumahan, persentase penanganan rumah tidak layak huni, persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR, persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, dan persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah.
- b. program pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, diarahkan pada persentase penanganan kawasan permukiman kumuh, persentase pengendalian kawasan permukiman, persentase penyediaan TPU, dan persentase penanganan PSU permukiman;

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diarahkan pada peningkatan persentase penertiban yang dilaksanakan, persentase satlinmas yang aktif, dan persentase pengamanan dan pengawalan;
- b. program penegakan perda diarahkan pada peningkatan persentase penegakan perda;
- c. program penanggulangan kebakaran diarahkan pada peningkatan Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap;
- d. program penanggulangan bencana diarahkan pada peningkatan persentase pencegahan dan esiapsiagaan terhadap bencana, persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi, persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan persentase pelayanan informasi rawan bencana;
- e. program peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat diarahkan pada persentase ormas yang aktif, persentase konflik sosial tertangani, dan persentase kegiatan pembinaan politik.

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penanganan dan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diarahkan pada peningkatan persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial, persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak

potensial yang telah menerima jaminan sosial, dan persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten;

- b. program pemberdayaan sosial diarahkan pada peningkatan persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), persentase fakir miskin yang diberdayakan, dan persentase fakir miskin yang divalidasi.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja diarahkan pada cakupan pengembangan kompetensi, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar, persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar serta persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada Ketersediaan energi per kapita, ketersediaan protein per kapita, penguatan cadangan pangan, pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, penanganan daerah rawan pangan, ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah, dan stabilitas harga dan pasokan pangan.

4. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang diarahkan pada peningkatan cakupan kinerja pertanian.

5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca diarahkan pada peningkatan persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara, proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri), persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian

- pencemaran air, dan persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi;
- b. program peningkatan kapasitas dan tata lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan, persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah, persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani serta Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH;
 - c. program peningkatan kinerja pengelolaan sampah diarahkan pada peningkatan persentase jumlah sampah yang tertangani, persentase cakupan area pelayanan sampah, dan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;
 - d. program peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau diarahkan pada peningkatan persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan, persentase RTH publik yang terkelola, dan persentase ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan.
 - e. program konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim diarahkan pada persentase sekolah Adiwiyata, persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi, persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi, persentase mata air yang dikonservasi dan cakupan desa/kelurahan program kampung iklim.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pelayanan administrasi kependudukan diarahkan pada peningkatan persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP dan persentase penerbitan KK;
- b. program pelayanan pencatatan sipil diarahkan pada persentase penerbitan akta kelahiran, persentase penerbitan akta perkawinan serta persentase penerbitan akta kematian;
- c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data diarahkan pada persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan persentase pemanfaatan data.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), persentase pasar desa dengan pengelolaan baik, persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh, persentase TTG yang difasilitasi, persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri, serta persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- b. program pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa diarahkan pada persentase pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya, persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi, dan persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan;

- c. program perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa diarahkan pada persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu, persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya dan persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program keluarga berencana diarahkan pada persentase peningkatan partisipasi ber-KB, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (*unmet need*), persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR) serta persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
- b. program pembangunan ketahanan keluarga diarahkan pada cakupan pembangunan ketahanan keluarga, persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera, persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB serta Usia Kawin Pertama (UKP).

9. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan diarahkan pada persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan;
- b. program peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas diarahkan pada persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, serta persentase masyarakat sadar keselamatan berlalu lintas;
- c. program peningkatan pelayanan angkutan diarahkan pada persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji.

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi diarahkan pada cakupan PD dan desa/kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil; serta cakupan layanan komunikasi;
- b. program pengelolaan aplikasi informatika diarahkan pada persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA, persentase layanan domain dan subdomain pemerintah dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK;
- c. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik diarahkan

pada peningkatan persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria, cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat, cakupan diseminasi melalui media interpersonal, cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang, persentase diseminasi informasi melalui media massa, cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah, cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.

11. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program persandian, diarahkan pada persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

12. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi diarahkan pada peningkatan indeks kualitas kelembagaan koperasi;
- b. peningkatan pemberdayaan usaha mikro diarahkan pada peningkatan cakupan pemberdayaan usaha mikro.

13. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan dan pelayanan investasi diarahkan pada peningkatan persentase realisasi investasi;
- b. program pemantauan dan pengendalian investasi diarahkan pada persentase pemantauan dan pengendalian investasi;
- c. program pelayanan perizinan diarahkan pada peningkatan persentase pelayanan perizinan.

14. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pembinaan dan peningkatan sarana prasarana olahraga dengan cakupan pembinaan olahraga;
- b. program peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan cakupan pembinaan pemuda.

15. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan statistik diarahkan pada persentase ketersediaan data statistik sektoral dan persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

16. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program perlindungan dan pengembangan kebudayaan diarahkan pada persentase karya budaya yang terlayani, persentase kelompok seni budaya yang aktif dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program

pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, diarahkan pada peningkatan rasio judul koleksi bahan pustaka di perpustakaan kabupaten, angka kepuasan pemustaka dan rasio pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop.

18. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan diarahkan pada peningkatan persentase pencipta arsip yang tertib;
- b. program pengelolaan dan pelestarian arsip diarahkan pada persentase peningkatan arsip yang dikelola.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan diarahkan pada peningkatan cakupan pengembangan budidaya perikanan dan cakupan kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan diarahkan pada peningkatan cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, angka konsumsi ikan, dan cakupan bina kelompok pembudidaya ikan serta cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar;

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan industri pariwisata diarahkan pada cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik;
- b. program pengembangan kelembagaan, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif diarahkan pada cakupan pengembangan kelembagaan, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan produksi pertanian/perkebunan diarahkan pada peningkatan produktivitas padi, produktivitas jagung dan produktivitas kopi;
- b. program peningkatan sarana dan prasarana pertanian diarahkan pada peningkatan cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan;
- c. program pemberdayaan sumber daya manusia pertanian diarahkan pada peningkatan cakupan pembinaan kelembagaan tani;
- d. program peningkatan Daya Saing Produk Pertanian diarahkan

- pada persentase peningkatan kerjasama/kemitraan yang terjalin dan persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik;
- e. program peningkatan produksi hasil peternakan diarahkan pada peningkatan cakupan peningkatan produksi peternakan, Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan, Cakupan penerapan teknologi peternakan, dan Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
 - f. program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan diarahkan pada peningkatan cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan dan pengembangan perdagangan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas dan persentase disparitas harga antar pasar;
- b. program pemberdayaan dan penataan pasar diarahkan pada peningkatan persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik;
- c. program Peningkatan dan pengembangan kemetrolgian diarahkan pada persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah.

5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan industri diarahkan pada cakupan bina industri kecil.

D. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada persentase kesepakatan musrenbang yang masuk ke dalam RKPD, persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD;
- b. program perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pengembangan wilayah dan infrastruktur diarahkan pada peningkatan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- c. program perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya diarahkan pada peningkatan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan persentase kenaikan pajak, persentase kenaikan retribusi, persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah;
- b. program pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerimaan pendapatan di RKUD, penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar;
- c. program pengelolaan aset daerah diarahkan pada peningkatan persentase PD tertib administrasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset);

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan pengadaan pegawai diarahkan pada peningkatan persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG, serta persentase keterisian formasi pegawai;
- b. program pengembangan sumber daya aparatur diarahkan pada peningkatan persentase ASN yang lulus diklat, persentase ASN yang meningkat kualifikasinya, persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dan persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya;
- c. program kesejahteraan dan pembinaan pegawai diarahkan pada persentase pembinaan ASN dan persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengkajian daerah, diarahkan pada peningkatan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

5. Pengawasan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, diarahkan pada peningkatan persentase jumlah Laporan Hasil Pengawasan, persentase jumlah tindak lanjut yang terselesaikan, persentase dokumen SPIP PD yang memadai, serta angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi.

6. Fungsi Lainnya

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pelayanan publik kecamatan diarahkan pada peningkatan persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP;
- b. program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan diarahkan pada peningkatan persentase kegiatan yang dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi;
- c. program peningkatan pelayanan kedinasan DPRD diarahkan pada peningkatan persentase pemenuhan fasilitasi raperda, kebijakan

- anggaran dan rekomendasi APBD;
- d. program penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum diarahkan pada peningkatan persentase produk hukum daerah yang disusun tepat asas, persentase kesesuaian produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas, serta persentase permasalahan hukum yang didampingi;
 - e. program perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan diarahkan pada peningkatan persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan;
 - f. program perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan diarahkan pada cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
 - g. program perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian diarahkan pada peningkatan persentase kebijakan perekonomian yang dijalankan, persentase BUMD yang berkinerja baik, serta persentase peningkatan sumbangan BUMD pada PAD;
 - h. program perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan diarahkan pada cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - i. program pengembangan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan kinerja organisasi diarahkan pada peningkatan persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti, persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan, persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik, serta persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu;
 - j. program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah diarahkan pada cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - k. program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa diarahkan pada peningkatan indeks kematangan UKPBJ;
 - l. program kehumasan dan layanan keprotokolan diarahkan pada peningkatan cakupan kinerja kehumasan dan layanan keprotokolan.

Di samping program prioritas, direncanakan ada program pendukung operasional perangkat daerah, yaitu:

1. Program manajemen administrasi pelayanan umum, dan kepegawaian perangkat daerah;
2. Program perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif tertuang dalam Tabel 8.3 yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

II. Periode Tahun 2021-2024

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban pemerintah kabupaten Magelang dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkelanjutan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs, persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS), Persentase PNF Terakreditasi (LKP, PKBM).

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemberian BOSDA untuk pendidik dan tenaga kependidikan, bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan studi lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

Program ini diarahkan pada pembangunan puskesmas, pengembangan rumah sakit, pengembangan gedung laboratorium kesehatan masyarakat, pengembangan gedung IFK, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat dan vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan Mutu Pelayanan FKTL, Cakupan alkes, perbekes, obat dan pembinaan SDK sesuai standar, Cakupan Mutu Pelayanan FKTP. Pelaksanaan program ini dalam rangka intervensi pencegahan dan penanganan stunting.

b. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan, pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan sumber daya manusia kesehatan.

- c. program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman; Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- d. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Program ini diarahkan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan Sumber Daya Air
Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan sumber daya air.
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase layanan air minum.
- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

Program ini diarahkan pada Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase layanan infrastuktur pengelolaan persampahan.

- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
Program ini diarahkan pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan sanitasi air limbah domestik.
- e. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
Program ini diarahkan pada Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan drainase lingkungan.
- f. program pengembangan permukiman;
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian indikator persentase penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis.
- g. program penataan bangunan gedung;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penataan Bangunan Gedung.
- h. program penataan bangunan dan lingkungannya;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya.
- i. program penyelenggaraan jalan;
Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jalan, penggantian jembatan dan pemeliharaan rutin jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penyelenggara jalan.
- j. program pengembangan jasa konstruksi;
Program ini diarahkan pada pelatihan tenaga trampil konstruksi, fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi dan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase layanan Pengembangan Jasa konstruksi.
- k. program penyelenggaraan penataan ruang.
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan;
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman;
Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan kumuh, dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas.
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
Program ini diarahkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);
Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan.
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil, dengan indikator kinerja persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

- b. program penanggulangan bencana;
Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.
- c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap.

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

b. Program penempatan tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

c. Program hubungan industrial;

Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan Persentase lembaga yang melaksanakan PUG.

b. Program perlindungan perempuan;

Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan

Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator berupa Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

- c. Program pemenuhan hak anak (PHA);
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.
- d. Program perlindungan khusus anak.
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, dengan indikator capaian ketersediaan energi per kapita
- b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, Penguatan Cadangan Pangan, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.
- c. Program penanganan kerawanan pangan;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dan Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator penurunan persentase daerah rentan rawan pangan.
- d. Program pengawasan keamanan pangan.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanian.

5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen kajian, perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.
- b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.
- d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
- e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan.
- f. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;
Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator capaian cakupan konservasi jogo tuk.
- g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup.
- h. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan

Hidup, dengan indikator capaian Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup.

- i. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM.
- j. program pengelolaan persampahan.
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pendaftaran penduduk;
Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan penduduk, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP, Persentase penerbitan KK dan Persentase Penerbitan KIA.
- b. program pencatatan sipil;
Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil, penyelenggaraan pencatatan sipil, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil, dengan indikator capaian persentase penerbitan akta kelahiran, persentase penerbitan akta kematian, persentase penerbitan akta perkawinan.
- c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK);
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- d. Program pengelolaan profil pendidikan.
Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan, dengan indikator capaian persentase pemanfaatan data.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penataan desa;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian Persentase Peningkatan Status Desa.
- b. Program peningkatan kerjasama desa;

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan.

c. Program administrasi pemerintahan desa;

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

d. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pengendalian penduduk;

Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama.

b. program pembinaan keluarga berencana;

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan program ini, dilibatkan seluruh stakeholder termasuk pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator capaian cakupan pembangunan ketahanan keluarga.

9. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program informasi dan komunikasi publik;

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator capaian cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media publik.

b. program aplikasi informatika.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain, pengelolaan e-government dengan indikator capaian Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi dan Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, dengan indikator capaian cakupan pelayanan izin koperasi.
- b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- c. Program penilaian KSP/USP Koperasi;
Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- d. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas sdm koperasi.
- e. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator capaian jumlah pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya.
- f. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan skala usaha mikro.
- g. Program pengembangan UMKM.
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator capaian persentase usaha mikro yang naik kelas.

12. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan iklim penanaman modal;

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal, dan pembuatan peta potensi investasi. program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi.

- b. program promosi penanaman modal;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal.
- c. program pelayanan penanaman modal;
Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian persentase pelayanan perizinan.
- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi.
- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.
- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.
- c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.

14. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

15. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan kebudayaan;
Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.
- b. program pengembangan kesenian tradisional;
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.
- c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
Program ini diarahkan pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan.

18. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan arsip;
Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah, dengan indikator capaian persentase pengelolaan arsip.
- b. program perlindungan dan penyelamatan arsip.
Program ini diarahkan pada pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dan perlindungan dan penyelamatan arsip karena bencana, dengan indikator capaian persentase arsip yang dimusnahkan dan persentase arsip yang diselamatkan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan perikanan budidaya;
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.
- b. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya,

dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan.

- c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.
- b. program pemasaran pariwisata;
program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/ pemasaran pariwisata.
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan

- dan pengembangan sarana produksi peternakan.
- b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
 - c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;
Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
 - d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - e. program perizinan usaha pertanian;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, dengan indikator capaian cakupan perizinan usaha pertanian.
 - f. program penyuluhan pertanian.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stp), penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c, dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.
- b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator

capaian persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana pengelolaan yang baik.

- c. program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan indikator capaian cakupan promosi dan pemasaran.
- d. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.
- e. program pengembangan ekspor;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai Ekspor barang non migas.
- f. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase uttp bertanda tera sah.

5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program perencanaan dan pengembangan industri;
Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator capaian indeks pertumbuhan industri.
- b. Program pengelolaan sistem informasi industrial nasional.
Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI, dengan indikator capaian cakupan pengelolaan sistem informasi industri nasional.

6. Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penempatan transmigrasi, dengan indikator capaian persentase penempatan transmigrasi

D. Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum

daerah, cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan tingkat kematangan UKPBJ.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

E. Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan ketercapaian

indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan keuangan daerah;
Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerimaan pendapatan di RKUD dan penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.
- b. program pengelolaan barang milik daerah;
Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.
- c. program pengelolaan pendapatan daerah.
Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian Persentase kenaikan Pajak, Persentase kenaikan retribusi dan persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah.

3. Kepegawaian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian, persentase keterisian jabatan, persentase peningkatan kapasitas ASN, dan persentase evaluasi kinerja ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

F. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penyelenggaraan pengawasan;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase penyelenggaraan pengawasan.
- b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pendampingan dan asistensi dan persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
- b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
- c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.
- d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator capaian jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase peningkatan pembinaan partai politik dan koordinasi lembaga pemerintah.

- c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase peningkatan ormas yang aktif.

- d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang memahami ketahanan bangsa.

- e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian peningkatan fasilitasi penanganan konflik sosial di masyarakat.

Di samping program prioritas, terdapat program untuk mendukung operasional perangkat daerah yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah dan persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif tertuang dalam Tabel 8.4 yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

8.2. Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, sumber dana Non APBD yang akan digali adalah sebagai berikut.

1. Skema KPBU merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Magelang, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain. Beberapa kegiatan yang potensial untuk dilaksanakan melalui KPBU, antara lain:

- a. pemanfaatan aset lahan di Desa Deyangan;
 - b. pengelolaan *water park* Kali Bening;
 - c. revitalisasi pasar;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana, antara lain: pariwisata, perdagangan, air bersih dan pengelolaan sampah.
2. Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) perusahaan swasta, serta program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN dan BUMD. Perusahaan yang telah dan akan digali potensinya antara lain:
- a. PDAM dengan program pengurangan kemiskinan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam;
 - b. BAPAS 69 melalui program pembinaan usaha kecil dan menengah;
 - c. Bank Jateng mempunyai program pembinaan usaha kecil dan menengah serta pelestarian lingkungan hidup;
 - d. PD BKK Tempuran dengan program penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
3. Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), partisipasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat, dan swasta. Lembaga seperti LAZIS, IUWASH PLUS, KOTAKU, Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta rumah layak huni.

Tabel 8.4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN MAGELANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	NON URUSAN			0,00		1.247.939.344.939,00		1.213.601.414.942,00		1.214.622.945.950,00		1.265.546.802.572,00	
0.0	NON URUSAN			0,00		1.247.939.344.939,00		1.213.601.414.942,00		1.214.622.945.950,00		1.265.546.802.572,00	
0.0.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	0,00	-	1.247.939.344.939,00	-	1.213.601.414.942,00	-	1.214.622.945.950,00	-	1.265.546.802.572,00	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	N/A %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	N/A %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS KESEHATAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS KESEHATAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS BOROBUKUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS BOROBUDUR
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah, keuangan dan umum kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS NGLUWAR
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS NGLUWAR
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SALAM
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SALAM
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SRUMBUNG
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SRUMBUNG
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS DUKUN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS DUKUN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SAWANGAN I
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SAWANGAN I
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SAWANGAN II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SAWANGAN II

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNTILAN I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNTILAN I
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNTILAN II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNTILAN II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNGKID
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNGKID
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS TEMPURAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS TEMPURAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KAJORAN I

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KAJORAN I
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KAJORAN II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KAJORAN II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KALIANGKRIK
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KALIANGKRIK
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS BANDONGAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS BANDONGAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS CANDIMULYO
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS CANDIMULYO
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS PAKIS
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS PAKIS
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS NGABLAK
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS NGABLAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS GRABAG I
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS GRABAG I
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS GRABAG II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS GRABAG II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS TEGALREJO
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS TEGALREJO
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SECANG I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SECANG I
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SECANG II
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SECANG II
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS WINDUSARI
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS WINDUSARI
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KOTA MUNGKID

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KOTA MUNGKID
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH
		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	na %		69,5 %		71,5 %		73,5 %		75 %		75 %	RSUD Muntilan
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na persen		100 persen		100 persen			100 persen		100 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na persen		100 persen		100 persen			100 persen		100 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	0 %		100 %		100 %			100 %		100 %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	0 %		100 %		100 %			100 %		100 %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %		100 %		100 %			100 %		100 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %			100 %		100 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na persen		100 persen		100 persen			100 persen		100 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na persen		100 persen		100 persen			100 persen		100 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Ketercapaian perencanaan, Evaluasi kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	NA %		100 %		100 %			100 %		100 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %			100 %		100 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD	na %		50,00 %		66,67 %			83,33 %		100,00 %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian PD	na %		50,00 %		66,67 %			83,33 %		100,00 %		DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	n/a %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah	n/a %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase ketercapaian Perencanaan Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah.	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PEMERINTAHAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PEMERINTAHAN
		Persentase ketercapaian penataan organisasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ORGANISASI
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ORGANISASI
		Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ORGANISASI
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN HUKUM
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN HUKUM
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Presentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN UMUM
		Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN UMUM
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN UMUM
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %			100 %		100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %			100 %		100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	NA %		100 %		100 %			100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %			100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %			100 %		100 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %			100 %		100 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA %		100 %		100 %			100 %		100 %		INSPEKTORAT
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	NA %		100 %		100 %			100 %		100 %		INSPEKTORAT
		Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	88 %		88 %		89 %			89 %		89 %		KECAMATAN SALAMAN
		Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %			100 %		100 %		KECAMATAN SALAMAN
		Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %			100 %		100 %		KECAMATAN BOROBUKUR
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %			100 %		100 %		KECAMATAN BOROBUKUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGLUWAR
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGLUWAR
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SALAM
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SALAM
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SRUMBUNG
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %	KECAMATAN SRUMBUNG
		Persentase Ketercapaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN DUKUN
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN DUKUN
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SAWANGAN
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SAWANGAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN MUNTILAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Perangkat Daerah	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KELURAHAN MUNTILAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen		KECAMATAN MUNGKID
		Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		KELURAHAN MENDUT
		Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	91,00 Persen		91,00 Persen		92,00 Persen		92,00 Persen		92,00 Persen		KELURAHAN SAWITAN
		presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		KECAMATAN MERTOYUDAN
		Presentase ketercapaian pelayanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		KECAMATAN MERTOYUDAN
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD	na angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		KELURAHAN SUMBERREJO
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN TEMPURAN
		Persentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN KAJORAN
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN KAJORAN
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN KALIANGKRIK
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN KALIANGKRIK
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN BANDONGAN
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN CANDIMULYO
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN CANDIMULYO
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN PAKIS
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	83 %		83,75 %		84,50 %		85,25 %		86 %		86 %	KECAMATAN PAKIS
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGABLAK
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGABLAK
		Indikator Program : Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		5 dokumen		5 dokumen	KECAMATAN GRABAG
		Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN GRABAG
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG
		Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KELURAHAN SECANG
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KELURAHAN SECANG
		Prosentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	na indeks		na indeks		100% indeks		100% indeks		100% indeks		100% indeks	KECAMATAN WINDUSARI
		Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na indeks		na indeks		100% indeks		100% indeks		100% indeks		100% indeks	KECAMATAN WINDUSARI
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH NON URUSAN				0,00		1.247.939.344.939,00		1.213.601.414.942,00		1.214.622.945.950,00		1.265.546.802.572,00		
1	Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00		577.514.618.694,00		431.788.858.904,00		429.450.717.681,00		496.252.108.814,00		
1.01	Bidang : Pendidikan			0,00		215.846.190.556,00		182.677.527.114,00		181.373.637.995,00		215.351.011.150,00		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		-	0,00	-	163.945.656.056,00	-	155.829.778.250,00	-	155.779.778.250,00	-	181.323.805.550,00		
		Persentase PNF terakreditasi (LKP, PKBM)	N/A %		67,39 %		N/A %		N/A %		N/A %		N/A %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase PNF Terakreditaasi (PKBM)	N/A %		N/A %		77,27 %		86,36 %		90,91 %		90,91 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	N/A %		N/A %		86,38 %		86,58 %		86,75 %		86,75 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	N/A %		92% %		N/A %		N/A %		N/A %		N/A %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter	N/A %		N/A %		75 %		90 %		100 %		100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	N/A %		80,45 %		N/A %		N/A %		N/A %		N/A %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	N/A %		60,22 %		52,13 %		58,88 %		67,30 %		67,30 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		-	0,00	-	51.900.534.500,00	-	26.847.748.864,00	-	25.593.859.745,00	-	34.027.205.600,00	
		Persentase Guru Bersertifikat	N/A %		92 %		93 %		94 %		95 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02	Bidang : Kesehatan			0,00		236.492.217.363,00		117.613.329.569,00		118.459.180.375,00		128.677.800.219,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	0,00	-	218.229.659.011,00	-	115.326.238.645,00	-	107.782.240.975,00	-	118.000.860.819,00	
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS BOROBUUDUR
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS NGLUWAR
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SALAM
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SRUMBUNG
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS DUKUN
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SAWANGAN I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SAWANGAN II

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MUNTILAN I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MUNTILAN II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MUNGKID
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS TEMPURAN
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KAJORAN I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KAJORAN II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KALIANGKRUK
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS BANDONGAN
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS CANDIMULYO
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS PAKIS
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS NGABLAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS GRABAG I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS GRABAG II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS TEGALREJO
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SECANG I
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS SECANG II
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS WINDUSARI
		Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	na %		na %		87 %		89 %		94 %		PUSKESMAS KOTA MUNGKID
		Prosentase Capaian SPM Rumah Sakit	na %		73,4 %		85,1 %		88,3 %		100 %		RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH
		Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	na %		79,80 %		80 %		80,50 %		81 %		RSUD Muntilan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		-	0,00	-	15.349.541.182,00	-	989.155.077,00	-	9.399.003.553,00	-	9.399.003.553,00	
		Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS BOROBUDUR
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS NGLUWAR
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SALAM

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SRUMBUNG
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS DUKUN
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MUNGKID
		Cakupan sumber daya manusia kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		Cakupan sumber daya manusia kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS TEMPURAN
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KAJORAN I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KAJORAN II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KALIANGKRIK
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS BANDONGAN
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS CANDIMULYO
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS PAKIS
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS NGABLAK
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS GRABAG I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS GRABAG II
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS TEGALREJO
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SECANG I
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS SECANG II

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS WINDUSARI
		Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	na %		na %		95 %		98 %		100 %		PUSKESMAS KOTA MUNGKID
		Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	na %		100 %		0 %		0 %		0 %		RSUD Muntilan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		-	0,00	-	225.420.770,00	-	255.420.770,00	-	255.420.770,00	-	255.420.770,00	
		Cakupan Sediaan Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT	na %		na %		90 %		95 %		100 %		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	na %		na %		70 %		75 %		80 %		DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	0,00	-	2.687.596.400,00	-	1.042.515.077,00	-	1.022.515.077,00	-	1.022.515.077,00	
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN I
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAMAN II
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS BOROBUDUR
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS NGLUWAR
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SALAM
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SRUMBUNG
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS DUKUN
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN I
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS SAWANGAN II
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN I
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		PUSKESMAS MUNTILAN II

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MUNGKID
		Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MERTOYUDAN I
		Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS MERTOYUDAN II
		Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS TEMPURAN
		Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KAJORAN I
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KAJORAN II
		Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KALIANGKRİK
		Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS BANDONGAN
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS CANDIMULYO
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS PAKIS
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS NGABLAK
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS GRABAG I
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS GRABAG II
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS TEGALREJO
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SECANG I
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS SECANG II
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS WINDUSARI
		Cakupan Pembinaan UKBM	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	PUSKESMAS KOTA MUNGKID
1.03	Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			0,00		109.451.418.068,00		74.448.404.126,00		74.496.966.825,00		96.213.568.740,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-	0,00	-	7.548.610.605,00	-	6.308.104.485,00	-	7.333.104.485,00	-	8.288.104.485,00	
		Cakupan layanan Sumber Daya Air	Na %		75,65 %		76,11 %		77,43 %		78,76 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Layanan Jaringan Irigasi	Na %		85,25 %		Na %		Na %		Na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		-	0,00	-	8.105.450.145,00	-	9.805.103.130,00	-	8.700.103.130,00	-	9.074.103.130,00	
		Cakupan layanan air minum ***	Na %		89,91 %		91,03 %		92,15 %		93,27 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		-	0,00	-	0,00	-	39.999.715,00	-	39.999.715,00	-	39.999.715,00	
		Cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan	na %		na %		0 %		50 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	0,00	-	4.802.703.405,00	-	5.002.703.385,00	-	5.002.703.385,00	-	5.002.703.385,00	
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik ***	87,70 %		88,73 %		89,76 %		90,79 %		91,82 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	500.000.000,00	
		Cakupan layanan drainase lingkungan	na %		na %		0 %		39,03 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		-	0,00	-	0,00	-	202.499.855,00	-	202.499.855,00	-	202.499.855,00	
		Cakupan layanan infrastruktur permukiman	na %		na %		0 %		100 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		-	0,00	-	46.623.214.960,00	-	16.530.697.110,00	-	16.470.697.110,00	-	16.530.697.110,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Terbangunnya Landmark	na %		75 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Penataan Bangunan Gedung	na %		na %		99.86 %		99.93 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Pembangunan Gedung Pemerintah Dan Publik	na %		99,52 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	na %		25 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	na %		na %		0 %		0 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		-	0,00	-	42.131.713.583,00	-	36.216.298.091,00	-	36.344.860.790,00	-	56.132.462.705,00	
		Cakupan Penyelenggaraan jalan	na %		na %		82.93 %		83.21 %		83.48 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Ketersediaan Jalan Dan Bangunan Pelengkap Jalan	na %		95,77 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Jalan Dan Bangunan Pelengkap Jalan Dalam Kondisi Baik	na %		78,89 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-	0,00	-	18.479.610,00	-	69.999.620,00	-	109.999.620,00	-	149.999.620,00	
		Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi	na %		na %		89.92 %		94.96 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Sarana Prasarana Ke PU-an	na %		86,00 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Layanan Jasa Konstruksi	na %		62,95 %		na %		na %		na %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		-	0,00	-	221.245.760,00	-	272.998.735,00	-	292.998.735,00	-	292.998.735,00	
		Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	na %		na %		66.67 %		83.33 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	na %		45,96 %		na %		na %		na %			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	na %		50,87 %		na %		na %		na %			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	Bidang : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			0,00		2.696.521.507,00		33.683.412.787,00		33.312.700.867,00		33.464.582.625,00		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	0,00	-	44.193.000,00	-	85.000.000,00	-	507.700.867,00	-	659.582.625,00		
		Persentase Layanan Pengembangan Perumahan	n/a Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	0,00	-	1.399.424.007,00	-	1.860.142.000,00	-	1.265.000.000,00	-	1.265.000.000,00		
		Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas	n/a persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		-	0,00	-	575.004.500,00	-	30.550.000.000,00	-	31.500.000.000,00	-	31.500.000.000,00		
		Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	n/a persen		48,16 persen		52,71 persen		57,27 persen		61,83 persen			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		-	0,00	-	677.900.000,00	-	1.188.270.787,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00		
		Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan	n/a persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase Layanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	n/a Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	Bidang : Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			0,00		12.326.400.500,00		16.169.626.708,00		14.566.673.019,00		14.769.328.762,00		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	0,00	-	2.926.443.500,00	-	6.668.972.000,00	-	4.747.079.000,00	-	4.847.079.000,00		
		Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	na %		na %		100 %		100 %		100 %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
		Persentase Penertiban yang dilaksanakan	na %		100 %		na %		na %		na %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
		Persentase Penegakan Perda	na %		95,80 %		na %		na %		na %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		-	0,00	-	2.128.174.000,00	-	1.673.570.708,00	-	1.671.345.019,00	-	1.774.000.762,00		
		Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na %		41,39 %		Na %		Na %		Na %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na %		Na %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Na %		100 %		Na %		Na %		Na %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Na %		Na %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Na %		85 %		Na %		Na %		Na %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Na %		36,96 %		Na %		Na %		Na %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		-	0,00	-	7.271.783.000,00	-	7.827.084.000,00	-	8.148.249.000,00	-	8.148.249.000,00	
		Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	na %		na %		65 %		70 %		75 %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		Persentase layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	na %		61 %		na %		na %		na %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
1.06	Bidang : Sosial			0,00		701.870.700,00		7.196.558.600,00		7.241.558.600,00		7.775.817.318,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		-	0,00	-	126.000.000,00	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
		Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)	na persen		8,96 persen		10,1 persen		10,1 persen		10,1 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		-	0,00	-	284.877.500,00	-	6.123.015.600,00	-	6.123.015.600,00	-	6.400.817.318,00	
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ***	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	na persen		33,95 persen		0,04 persen		0,05 persen		0,05 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		-	0,00	-	238.189.500,00	-	485.000.000,00	-	510.000.000,00	-	675.000.000,00	
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	na persen		na persen		87,18 persen		72,38 persen		57,59 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Fakir Miskin Yang Divalidasi	na persen		100 persen		na persen		na persen		na persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		-	0,00	-	52.803.700,00	-	288.543.000,00	-	308.543.000,00	-	400.000.000,00	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten***	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana	na persen		na persen		6,47 persen		7,29 persen		8,22 persen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00		76.427.695.294,00		78.504.035.235,00		79.149.257.533,00		89.796.353.766,00	
2.07	Bidang : Tenaga Kerja			0,00		1.625.097.770,00		1.254.997.830,00		1.241.600.000,00		1.432.600.000,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		-	0,00	-	511.237.990,00	-	880.997.830,00	-	882.600.000,00	-	997.600.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	na %		90 %		90 %		90 %		90 %			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		-	0,00	-	992.589.000,00	-	239.000.000,00	-	225.000.000,00	-	235.000.000,00		
		Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	0 %		80,6 %		80,6 %		80,6 %		80,6 %			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		-	0,00	-	121.270.780,00	-	135.000.000,00	-	134.000.000,00	-	200.000.000,00		
		Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial	0 %		82,74 %		82,74 %		82,74 %		82,74 %			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.08	Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			0,00		630.694.670,00		590.000.000,00		590.000.000,00		610.000.000,00		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		-	0,00	-	37.650.000,00	-	290.000.000,00	-	290.000.000,00	-	260.000.000,00		
		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*	na indeks		45,13 indeks		14,46 indeks		14,52 indeks		14,62 indeks			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase lembaga yang melaksanakan PUG	na persen		na persen		4,76 persen		5,24 persen		5,70 persen			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		-	0,00	-	225.915.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00		
		Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	na persen		na persen		100 persen		100 persen		100 persen			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standard	na Persen		71 Persen		na Persen		na Persen		na Persen			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		-	0,00	-	141.214.670,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	250.000.000,00		
		Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	na %		na %		100 %		100 %		100 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	na Persen		100 Persen		na Persen		na Persen		na Persen			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		-	0,00	-	225.915.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00		
		Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	na %		na %		100 %		100 %		100 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	na Persen		100 Persen		na Persen		na Persen		na Persen			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09	Bidang : Pangan			0,00		990.784.221,00		1.752.000.000,00		1.869.000.000,00		3.377.000.000,00		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		-	0,00	-	930.547.770,00	-	914.000.000,00	-	934.000.000,00	-	1.117.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Ketersediaan protein per kapita	Na gram		53 gram		53 gram		53 gram		53 gram		53 gram	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	Na persen		91 persen		91 persen		91 persen		91 persen		91 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Penguatan Cadangan Pangan	Na persen		65 persen		65 persen		65 persen		65 persen		65 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Ketersediaan energi per kapita	Na kkal		2000 kkal		2000 kkal		2000 kkal		2000 kkal		2000 kkal	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		-	0,00	-	5.000.000,00	-	37.000.000,00	-	90.000.000,00	-	100.000.000,00		
		persentase daerah rentan rawan pangan	Na %		Na %		17,0 %		16,5 %		16,0 %		16,0 %	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		-	0,00	-	55.236.451,00	-	251.000.000,00	-	285.000.000,00	-	330.000.000,00		
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Na persen		90 persen		90 persen		90 persen		90 persen		90 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.10	Bidang : Pertanahan			0,00		0,00		49.999.090,00		49.999.090,00		49.999.090,00		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	0,00	-	0,00	-	49.999.090,00	-	49.999.090,00	-	49.999.090,00		
		Cakupan layanan kinerja pertanahan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Cakupan Kinerja Pertanahan	na %		50,00 %		na %		na %		na %		na %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11	Bidang : Lingkungan Hidup			0,00		15.422.336.050,00		15.669.150.450,00		15.476.262.555,00		16.850.804.815,00		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		-	0,00	-	291.960.000,00	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	270.000.000,00		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		-	0,00	-	604.228.775,00	-	433.000.000,00	-	635.000.000,00	-	805.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	na %		31,24 %		33,71 %		36,18 %		38,65 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	38 %		46 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		-	0,00	-	2.455.446.200,00	-	4.110.000.000,00	-	2.525.000.000,00	-	2.730.000.000,00	
		Persentase RTH Publik yang terkelola	25,69 %		25,7 %		25,75 %		25,80 %		25,85 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		-	0,00	-	76.380.000,00	-	395.000.000,00	-	330.000.000,00	-	230.000.000,00	
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		-	0,00	-	59.726.500,00	-	60.000.000,00	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	
		Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	10 %		69 %		na %		na %		na %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		-	0,00	-	155.685.490,00	-	90.000.000,00	-	150.000.000,00	-	200.000.000,00	
		Cakupan konservasi jogo tuk	9,35 %		10,40 %		11,39 %		12,43 %		13,47 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase mata air dikonservasi	17 %		19 %		na %		na %		na %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		-	0,00	-	178.388.600,00	-	65.000.000,00	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00		
		Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	22,37 %		23,12 %		23,85 %		24,57 %		25,27 %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase sekolah Adiwiyata	15,88 %		16,82 %		na %		na %		na %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		-	0,00	-	0,00	-	5.000.000,00	-	60.000.000,00	-	200.000.000,00		
		Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	na %		na %		100 %		100 %		100 %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		-	0,00	-	17.500.000,00	-	24.000.000,00	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00		
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangan	100 %		100 %		na %		na %		na %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		-	0,00	-	11.583.020.485,00	-	10.267.150.450,00	-	11.296.262.555,00	-	12.155.804.815,00		
		Persentase pengelolaan sampah	34,29 %		42,89 %		47,99 %		53,50 %		54,91 %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	20 %		21,12 %		na %		na %		na %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	21,20 %		21,78 %		na %		na %		na %			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	Bidang : Administrasi Kependudukan dan Cakil			0,00		1.886.602.155,00		1.512.656.705,00		1.500.309.941,00		1.769.319.882,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		-	0,00	-	812.676.885,00	-	554.718.205,00	-	554.718.205,00	-	554.718.205,00	
		. Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	na persen		98.2 persen		99 persen		99.5 persen		100 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase penerbitan KK	na persen		97.85 persen		98.45 persen		99.05 persen		99.5 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Penerbitan KIA	na persen		na persen		71.5 persen		76.5 persen		81.5 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		-	0,00	-	259.050.442,00	-	277.515.737,00	-	277.515.737,00	-	450.881.520,00	
		Persentase penerbitan Akta Kelahiran	na persen		92.5 persen		95 persen		97.5 persen		100 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	na persen		70 persen		80 persen		90 persen		100 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Penerbitan Akta perkawinan	na persen		60 persen		70 persen		80 persen		90 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		-	0,00	-	714.159.348,00	-	579.707.283,00	-	567.360.519,00	-	663.004.677,00	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	na persen		75 persen		80 persen		85 persen		90 persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		-	0,00	-	100.715.480,00	-	100.715.480,00	-	100.715.480,00	-	100.715.480,00	
		Persentase Pemanfaatan Data	na %		90 %		na %		na %		na %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	na %		na %		100 %		100 %		100 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa			0,00		7.941.820.378,00		6.145.449.889,00		6.055.952.637,00		6.500.239.619,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		-	0,00	-	0,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	100.000.000,00	
		Prosentase Peningkatan Status Desa	NA %		13,62 %		15,26 %		16,89 %		18,53 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		-	0,00	-	79.668.065,00	-	29.999.785,00	-	85.000.000,00	-	85.000.000,00	
		Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		-	0,00	-	5.541.966.183,00	-	5.610.437.609,00	-	5.495.320.371,00	-	5.779.318.103,00	
		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	NA %		79,38 %		48,66 %		50,20 %		51,12 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		-	0,00	-	2.320.186.130,00	-	455.012.495,00	-	425.632.266,00	-	535.921.516,00	
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	NA %		64,56 %		51,57 %		58,52 %		62,71 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			0,00		7.406.494.500,00		8.427.356.500,00		8.377.356.500,00		8.602.356.500,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		-	0,00	-	97.033.500,00	-	176.641.500,00	-	176.641.500,00	-	176.641.500,00	
		Usia Kawin Pertama (UKP)	na tahun		21,3 tahun		21,5 tahun		21,8 tahun		22 tahun		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		-	0,00	-	7.309.461.000,00	-	8.000.715.000,00	-	7.950.715.000,00	-	8.075.715.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Presentase Peningkatan partisipasi ber-KB	na Persen		2.42 Persen		na Persen		na Persen		na Persen			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*	na %		na %		13,51 %		12,98 %		12,42 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	na %		75,50 %		70,30 %		71,20 %		72,10 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	na %		39,6 %		16,66 %		29,83 %		25,00 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		-	0,00	-	0,00	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	350.000.000,00		
		Cakupan pembangunan ketahanan keluarga	na %		na %		58,5 %		60,32 %		62,29 %			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15	Bidang : Perhubungan			0,00		23.451.074.920,00		20.949.655.970,00		21.255.378.720,00		22.205.378.720,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		-	0,00	-	23.451.074.920,00	-	20.949.655.970,00	-	21.255.378.720,00	-	22.205.378.720,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	81.10 %		85.82 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	91.38 %		91.70 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	na %		na %		25,00 %		25,00 %		100,00 %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	43.69 %		55.73 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	na %		na %		88,06 %		94,03 %		100,00 %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	59.69 %		69.24 %		na %		na %		na %		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	na %		na %		65,00 %		68,00 %		70,00 %		DINAS PERHUBUNGAN
2.16	Bidang : Komunikasi dan Informatika			0,00		7.022.757.132,00		5.299.798.919,00		5.282.006.161,00		5.922.878.045,00	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	0,00	-	1.346.783.132,00	-	1.183.373.490,00	-	1.183.373.490,00	-	1.183.373.490,00	
		Cakupan diseminasi informasi melalui media publik	n/a %		n/a %		100 %		100 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan diseminasi informasi melalui media massa	n/a %		86,66 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		-	0,00	-	5.675.974.000,00	-	4.116.425.429,00	-	4.098.632.671,00	-	4.739.504.555,00	
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	n/a %		20,68 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi	n/a %		n/a %		100 %		100 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	n/a %		n/a %		73,62 %		85,61 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan PD dan desa/kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	n/a %		60,19 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17	Bidang : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			0,00		1.122.762.090,00		520.000.000,00		520.000.000,00		615.000.000,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Persentase koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	na %		na %		0 %		0 %		0 %		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		-	0,00	-	36.663.050,00	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-	75.000.000,00	
		Persentase koperasi yang meningkatkan kualitas pengelolaannya	na %		na %		30 %		30 %		30 %		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	na %		78,13 %		na %		na %		na %		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Persentase usaha simpan pinjam yang dinilai	na %		na %		0 %		0 %		0 %		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		-	0,00	-	0,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
		Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	na %		50 %		50 %		55 %		60 %		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		-	0,00	-	0,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	45.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase peningkatan kerjasama antar koperasi dan lembaga lain	0 %		0 %		15 %		15 %		15 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		-	0,00	-	1.086.099.040,00	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	455.000.000,00		
		persentase peningkatan kapasitas usaha mikro	na %		5 %		5 %		5 %		5 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		-	0,00	-	0,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	30.000.000,00		
		persentase peningkatan omset usaha mikro	na %		na %		5 %		5 %		5 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	Bidang : Penanaman Modal			0,00		645.967.000,00		476.127.479,00		473.127.479,00		521.127.479,00		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		-	0,00	-	0,00	-	45.000.000,00	-	65.000.000,00	-	70.000.000,00		
		Persentase realisasi investasi	Na %		61,2 %		Na %		Na %		Na %			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase peningkatan realisasi investasi	Na %		Na %		10 %		10 %		10 %			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		-	0,00	-	0,00	-	75.000.000,00	-	80.000.000,00	-	85.000.000,00		
		Jumlah kepedinasan/pendaftar penanaman modal	Na NIB		Na NIB		2300 NIB		2400 NIB		2500 NIB			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		-	0,00	-	247.255.000,00	-	276.127.479,00	-	263.127.479,00	-	281.127.479,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase pelayanan perizinan	Na %		1 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		-	0,00	-	372.462.000,00	-	45.000.000,00	-	30.000.000,00	-	50.000.000,00	
		Persentase pemantauan dan pengendalian investasi	Na %		0,01 %		Na %		Na %		Na %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase pengendalian investasi	Na %		Na %		5 %		5 %		5 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		-	0,00	-	26.250.000,00	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	
		Persentase pengolahan data	Na %		Na %		30 %		30 %		30 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	Bidang : Kepemudaan dan Olahraga			0,00		4.351.400.000,00		13.349.500.000,00		13.970.000.000,00		15.575.000.000,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		-	0,00	-	603.900.000,00	-	225.000.000,00	-	345.000.000,00	-	450.000.000,00	
		Cakupan pembinaan pemuda	na %		44,00 %		44,44 %		46,30 %		48,15 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		-	0,00	-	3.547.500.000,00	-	12.924.500.000,00	-	13.400.000.000,00	-	14.900.000.000,00	
		Cakupan pembinaan olahraga	na %		44,00 %		44,25 %		48,43 %		51,02 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		-	0,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	225.000.000,00	-	225.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan pembinaan kepramukaan	na %		16,67 %		25,76 %		28,03 %		30,30 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.20	Bidang : Statistik			0,00		284.589.110,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	0,00	-	284.589.110,00	-	115.000.000,00	-	115.000.000,00	-	115.000.000,00	
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	48,16 persen		56,89 persen		100 persen		100 persen		100 persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase ketersediaan data statistik	n/a %		100 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	Bidang : Persandian			0,00		514.174.450,00		426.029.450,00		426.029.450,00		426.029.450,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	0,00	-	514.174.450,00	-	426.029.450,00	-	426.029.450,00	-	426.029.450,00	
		Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a %		n/a %		61,70 %		68,08 %		76,59 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a %		20 %		n/a %		n/a %		n/a %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22	Bidang : Kebudayaan			0,00		2.276.105.000,00		1.184.235.000,00		1.184.235.000,00		4.250.000.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		-	0,00	-	2.276.105.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	500.000.000,00	
		Persentase Karya Budaya yang terlayani	N/A %		4,20 %		4,430 %		4,44 %		4,51 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	N/A %		84,13 %		N/A %		N/A %		N/A %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A %		11,53 %		N/A %		N/A %		N/A %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		-	0,00	-	0,00	-	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	2.500.000.000,00	
		Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	N/A %		N/A %		84,14 %		84,34 %		84,54 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		-	0,00	-	0,00	-	234.235.000,00	-	234.235.000,00	-	1.250.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	N/A %		N/A %		12,64 %		13,7 %		14,75 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23	Bidang : Perpustakaan			0,00		679.473.596,00		675.621.953,00		570.000.000,00		760.000.000,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		-	0,00	-	679.473.596,00	-	675.621.953,00	-	570.000.000,00	-	760.000.000,00	
		Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten	NA %		0.0230 %		0.0205 %		0.0206 %		0.0207 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Angka kepuasan pemustaka	NA Skala a-d		80 Skala a-d		80,5 Skala a-d		81 Skala a-d		81,5 Skala a-d		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan yang mengikuti bimtek sosialisai dan workshop	NA -		56,25 -		68,75 -		84,37 -		100 -		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	Bidang : Kearsipan			0,00		175.562.252,00		106.456.000,00		193.000.000,00		213.620.166,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		-	0,00	-	175.562.252,00	-	106.456.000,00	-	138.000.000,00	-	158.620.166,00	
		Persentase Pengelolaan Arsip	NA %		NA %		39.16 %		47.865 %		56.25 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase peningkatan arsip yang dikelola	Na %		6,45 %		NA %		NA %		NA %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase pencipta arsip yang tertib arsip	NA %		53,85 %		NA %		NA %		NA %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00	
		Persentase arsip yang dimusnahkan	na %		na %		33.33 %		66.67 %		100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase arsip yang diselamatkan	na %		na %		33.33 %		66.67 %		100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
3	Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			0,00		55.052.231.336,00		51.475.886.826,00		51.778.612.688,00		34.750.229.486,00	
3.25	Bidang : Kelautan dan Perikanan			0,00		2.333.277.000,00		865.000.000,00		801.000.000,00		1.036.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		-	0,00	-	1.218.277.000,00	-	390.000.000,00	-	506.000.000,00	-	706.000.000,00	
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan	na %		na %		5 %		5 %		5 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	na %		100 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	na %		5 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		-	0,00	-	65.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	65.000.000,00	
		Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	na %		na %		9,6 %		9,6 %		9,6 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		-	0,00	-	1.050.000.000,00	-	445.000.000,00	-	265.000.000,00	-	265.000.000,00	
		Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	na %		5 %		5 %		5 %		5 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Angka konsumsi ikan	na kg/kapita/tahun		19,90 kg/kapita/tahun		20,10 kg/kapita/tahun		20,30 kg/kapita/tahun		20,50 kg/kapita/tahun		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.26	Bidang : Pariwisata			0,00		14.062.252.000,00		9.505.675.000,00		9.906.093.000,00		10.031.093.000,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		-	0,00	-	12.545.375.000,00	-	9.180.674.000,00	-	9.271.093.000,00	-	9.271.093.000,00	
		Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik	na %		45,45 %		40,13 %		41,71 %		43,29 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		-	0,00	-	400.000.000,00	-	238.489.000,00	-	300.000.000,00	-	425.000.000,00	
		Cakupan promosi/pemasaran pariwisata	na %		50,77 %		52,64 %		74,53 %		76,44 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		-	0,00	-	10.000.000,00	-	0,00	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	na %		1,05 %		24,56 %		36,84 %		49,12 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		-	0,00	-	1.106.877.000,00	-	86.512.000,00	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
		Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif	na %		59,67 %		50,00 %		55,88 %		61,76 %		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.27	Bidang : Pertanian			0,00		30.514.800.585,00		33.692.484.956,00		33.709.396.956,00		15.624.484.956,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	0,00	-	23.889.168.856,00	-	2.160.595.150,00	-	1.905.595.150,00	-	2.085.595.150,00	
		Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Na %		Na %		2,55 %		2,55 %		2,55 %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	na %		2 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	na %		na %		50 %		50 %		50 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan penerapan teknologi peternakan	na %		75 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	0,00	-	5.135.587.457,00	-	30.298.678.806,00	-	30.510.745.806,00	-	12.239.678.806,00	
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Na %		3,59 %		Na %		Na %		Na %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Na %		Na %		1,75 %		1,75 %		1,75 %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan peningkatan prasarana peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	na %		na %		70 %		70 %		70 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	0,00	-	629.000.000,00	-	446.096.000,00	-	443.096.000,00	-	443.096.000,00	
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	0,00	-	106.082.442,00	-	153.000.000,00	-	165.845.000,00	-	170.000.000,00	
		Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Na %		Na %		9.25 %		9.25 %		9.25 %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		-	0,00	-	19.449.860,00	-	41.000.000,00	-	41.000.000,00	-	43.000.000,00	
		Cakupan perizinan usaha pertanian	Na %		Na %		100 %		100 %		100 %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	na %		3 %		3 %		3 %		3 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	na %		3 %		na %		na %		na %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	0,00	-	735.511.970,00	-	593.115.000,00	-	643.115.000,00	-	643.115.000,00	
		Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	Na %		37.6 %		40.01 %		42.15 %		44.5 %		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Cakupan pembinaan kelompok ternak	na %		na %		3 %		3 %		3 %		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.30	Bidang : Perdagangan			0,00		7.134.596.821,00		5.993.871.000,00		5.968.471.202,00		6.605.000.000,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		-	0,00	-	0,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	15.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	na %		50 %		50 %		50 %		50 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		-	0,00	-	6.647.376.237,00	-	5.613.871.000,00	-	5.588.471.202,00	-	6.100.000.000,00		
		Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	na %		86 %		86 %		86 %		86 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		-	0,00	-	217.220.584,00	-	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	145.000.000,00		
		Koefisien Variasi Harga	na %		30 %		30 %		30 %		30 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		-	0,00	-	0,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	20.000.000,00		
		Pertumbuhan nilai Ekspor barang non migas	na %		na %		3 %		3 %		3 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		-	0,00	-	270.000.000,00	-	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-	325.000.000,00		
		Persentase UTTP bertanda tera sah	0 %		50 %		50 %		55 %		65 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		Cakupan promosi dan pemasaran	na %		na %		50 %		50 %		50 %			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31	Bidang : Perindustrian			0,00		1.003.804.930,00		1.398.855.870,00		1.323.651.530,00		1.338.651.530,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		-	0,00	-	1.003.804.930,00	-	1.378.855.870,00	-	1.288.651.530,00	-	1.288.651.530,00	
		Persentase industri terbina	na %		na %		1.1 %		1.2 %		1.3 %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Persentase pertumbuhan industri	na %		1,44 %		na %		na %		na %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	0,00	-	0,00	-	20.000.000,00	-	35.000.000,00	-	50.000.000,00	
		Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	na %		na %		67,01 %		82,47 %		100 %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.32	Bidang : Transmigrasi			0,00		3.500.000,00		20.000.000,00		70.000.000,00		115.000.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	0,00	-	3.500.000,00	-	20.000.000,00	-	70.000.000,00	-	115.000.000,00	
		Cakupan pembinaan transmigrasi	na %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4	Urusan : UNSUR PENDUKUNG			0,00		37.074.289.038,00		30.253.608.677,00		30.124.179.268,00		31.870.817.912,00	
4.01	Bidang : Sekretariat Daerah			0,00		23.392.823.288,00		20.733.603.945,00		20.702.279.562,00		21.940.512.103,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		-	0,00	-	18.676.972.402,00	-	16.553.835.500,00	-	16.526.378.599,00	-	17.515.340.302,00	
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	80 persen		82 persen		84 persen		89 persen		90 persen		SEKRETARIAT DAERAH
		Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	NA %		100 %		NA %		NA %		NA %		BAGIAN PEMERINTAHAN
		Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		BAGIAN PEMERINTAHAN
		Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		BAGIAN HUKUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	0,00	-	4.715.850.886,00	-	4.179.768.445,00	-	4.175.900.963,00	-	4.425.171.801,00		
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dijalankan	na persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	Na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Indeks Kematangan UKPBJ	na level		level 4 level		na level		na level		na level		na level	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Tingkat Kematangan UKPBJ	na level (progress)		na level (progress)		level 3 (4/9) level (progress)		level 3 (6/9) level (progress)		level 3 (9/9) level (progress)		level 3 (9/9) level (progress)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.02	Bidang : Sekretariat DPRD			0,00		13.681.465.750,00		9.520.004.732,00		9.421.899.706,00		9.930.305.809,00		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-	0,00	-	13.681.465.750,00	-	9.520.004.732,00	-	9.421.899.706,00	-	9.930.305.809,00		
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	na %		na %		75 %		75 %		75 %		75 %	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	na %		na %		83,33 %		83,33 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	na %		83.33 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	na %		na %		75 %		75 %		75 %		75 %	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	na %		100 %		75 %		75 %		75 %		75 %	SEKRETARIAT DPRD
5	Urusan : UNSUR PENUNJANG			0,00		735.221.491.289,00		717.487.870.396,00		714.217.649.851,00		750.282.432.516,00		
5.01	Bidang : Perencanaan			0,00		1.525.763.760,00		1.341.284.845,00		1.296.823.634,00		1.488.284.845,00		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		-	0,00	-	612.514.915,00	-	617.616.490,00	-	602.616.490,00	-	617.616.490,00		
		Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		-	0,00	-	913.248.845,00	-	723.668.355,00	-	694.207.144,00	-	870.668.355,00		
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur	na %		90,32 %		na %		na %		na %		na %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	na %		na %		53,85 %		58,97 %		69,23 %		69,23 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam	na %		59 %		na %		na %		na %		na %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam	na %		na %		79,25 %		83,02 %		84,91 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	na %		55 %		na %		na %		na %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	na %		na %		69,89 %		73,12 %		81,72 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02	Bidang : Keuangan			0,00		726.173.167.914,00		708.958.304.551,00		703.766.818.217,00		739.385.181.157,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	0,00	-	710.476.074.813,00	-	669.759.695.519,00	-	671.705.153.091,00	-	682.272.245.390,00	
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase serapan APBD	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		-	0,00	-	5.804.975.612,00	-	11.822.332.455,00	-	9.669.824.352,00	-	17.225.308.015,00	
		Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-	0,00	-	9.892.117.489,00	-	27.376.276.577,00	-	22.391.840.774,00	-	39.887.627.752,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase kenaikan Pajak	NA %		11,28 %		10,70 %		10,17 %		9,69 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase kenaikan retribusi	NA %		-16,15 %		4,89 %		9,10 %		-3,31 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	NA %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.03	Bidang : Kepegawaian			0,00		6.509.763.000,00		6.877.173.000,00		8.820.000.000,00		8.860.000.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		-	0,00	-	6.509.763.000,00	-	6.877.173.000,00	-	8.820.000.000,00	-	8.860.000.000,00	
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	na %		9,7 %		na %		na %		na %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN	na %		na %		95 %		98 %		100 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya	na %		80 %		na %		na %		na %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian	na %		na %		84 %		85 %		86 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	na %		75 %		na %		na %		na %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase keterisian Jabatan	na %		na %		83 %		84 %		85 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas	na %		82 %		na %		na %		na %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase pengembangan kompetensi ASN	na %		na %		14.17 %		15.50 %		15.52 %		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.05	Bidang : Penelitian dan Pengembangan			0,00		1.012.796.615,00		311.108.000,00		334.008.000,00		548.966.514,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		-	0,00	-	1.012.796.615,00	-	311.108.000,00	-	334.008.000,00	-	548.966.514,00	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	Urusan : UNSUR PENGAWAS			0,00		701.610.800,00		308.364.383,00		304.745.090,00		442.000.000,00	
6.01	Bidang : Inspektorat			0,00		701.610.800,00		308.364.383,00		304.745.090,00		442.000.000,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		-	0,00	-	340.792.800,00	-	162.100.553,00	-	162.100.553,00	-	252.000.000,00	
		Persentase penyelenggaraan pengawasan	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		INSPEKTORAT
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan	NA %		100 %		NA %		NA %		NA %		INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-	0,00	-	360.818.000,00	-	146.263.830,00	-	142.644.537,00	-	190.000.000,00	
		Persentase pendampingan dan asistensi	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		INSPEKTORAT
		Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %		INSPEKTORAT
		Persentase dokumen SPIP PD yang memadai	NA %		100 %		NA %		NA %		NA %		INSPEKTORAT
7	Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN			0,00		7.676.295.873,00		7.709.483.901,00		7.482.380.682,00		8.731.663.180,00	
7.01	Bidang : Kecamatan			0,00		7.676.295.873,00		7.709.483.901,00		7.482.380.682,00		8.731.663.180,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	0,00	-	644.816.527,00	-	600.439.760,00	-	648.529.505,00	-	667.639.512,00	
		Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN SALAMAN
		Persentase pelayanan publik sesuai SP dan SOP	na %		90 %		90 %		100 %		100 %		KECAMATAN BOROBUUDUR
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN NGLUWAR
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	na %		90 %		90 %		100 %		100 %		KECAMATAN SALAM
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN SRUMBUNG
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN DUKUN
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN SAWANGAN
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN MUNTILAN
		Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen		KECAMATAN MUNGKID
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN MERTOYUDAN
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		93 %		95 %		96 %		100 %		KECAMATAN TEMPURAN
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN KAJORAN
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN KALIANGKRIK
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		KECAMATAN BANDONGAN
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN CANDIMULYO
		Persentase pelayanan Publik sesuai SOP dan SP.	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN PAKIS
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN NGABLAK
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SPP	0 persentase		83,71 persentase		87,19 persentase		88,68 persentase		90,16 persentase		KECAMATAN GRABAG
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN TEGALREJO
		Presentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		KECAMATAN SECANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Presentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	na %		100 %		na %		na %		na %			KELURAHAN SECANG
		Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP	na %		100 %		100 %		100 %		100 %			KECAMATAN WINDUSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	0,00	-	5.963.557.516,00	-	5.511.029.910,00	-	5.429.071.980,00	-	5.972.003.603,00		
		Persentase desa yang tertib administrasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			KECAMATAN SALAMAN
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		80 %		85 %		85 %		85 %			KECAMATAN BOROBUKUR
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		80 %		85 %		90 %		100 %			KECAMATAN NGLUWAR
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	na %		41,66 %		75 %		83,33 %		83,33 %			KECAMATAN SALAM
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		60 %		75 %		90 %		100 %			KECAMATAN SRUMBUNG
		Persentase desa yang tertib administrasi	NA Persen		82 Persen		84 Persen		85 Persen		86 Persen			KECAMATAN DUKUN
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		80 %		82 %		85 %		90 %			KECAMATAN SAWANGAN
		Persentase desa/kel yang tertib administrasi	na Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		93 Persen			KECAMATAN MUNTILAN
		Persentase desa/kel yang tertib administrasi	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			KELURAHAN MUNTILAN
		Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen			KECAMATAN MUNGKID
		Prosentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			KELURAHAN MENDUT
		Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A Persen		N/A Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			KELURAHAN SAWITAN
		Persentase desa yang tertib administrasi	82 %		82,5 %		83 %		83 %		83 %			KECAMATAN MERTOYUDAN
		Persentase desa yang tertib administrasi	na angka (0-100)		82 angka (0-100)		82,5 angka (0-100)		83 angka (0-100)		83 angka (0-100)			KELURAHAN SUMBERREJO
		Presentase desa tertib administrasi	na %		80 %		85 %		90 %		100 %			KECAMATAN TEMPURAN
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %			KECAMATAN KAJORAN
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		82 %		84 %		85 %		86 %			KECAMATAN KALIANGKRIK
		Persentase desa yang tertib administrasi	na Persen		50 Persen		50 Persen		71,42 Persen		85,71 Persen			KECAMATAN BANDONGAN
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		84.21 %		89.47 %		94.73 %		100 %			KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		na %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN PAKIS
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %	KECAMATAN NGABLAK
		Persentase desa yang tertib Administrasi	100 persentase		100 persentase		100 persentase		100 persentase		100 persentase		100 persentase	KECAMATAN GRABAG
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		Presentase desa yang tertib administrasi	na %		65 %		75 %		85 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG
		Persentase Kelurahan yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KELURAHAN SECANG
		Persentase desa yang tertib administrasi	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN WINDUSARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	0,00	-	446.197.830,00	-	1.042.219.641,00	-	722.452.107,00	-	1.395.451.975,00		
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SALAMAN
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		85 %		90 %		90 %		90 %		90 %	KECAMATAN BOROBUDUR
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGLUWAR
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SALAM
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		87 %		87 %		87 %		87 %		87 %	KECAMATAN SRUMBUNG
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN DUKUN
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SAWANGAN
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN MUNTILAN
		Prosentase Kegiatan Yang di Koordinasikan	91,00 Persen		91,50 Persen		92,00 Persen		92,50 Persen		93,00 Persen		93,00 Persen	KECAMATAN MUNGKID
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN MERTOYUDAN
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)	KELURAHAN SUMBERREJO
		Presentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEMPURAN
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KAJORAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN KALIANGKRIK
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	KECAMATAN BANDONGAN
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN CANDIMULYO
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN PAKIS
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN NGABLAK
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN GRABAG
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN TEGALREJO
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	KECAMATAN SECANG
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %		na %		100 %		na %		na %		na %	KELURAHAN SECANG
		Persentase desa yang tertib administrasi	0 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %	KECAMATAN WINDUSARI
8	Urusan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			0,00		3.097.587.657,00		2.879.547.450,00		2.863.691.726,00		3.134.833.194,00		
8.01	Bidang : Kesatuan Bangsa dan Politik			0,00		3.097.587.657,00		2.879.547.450,00		2.863.691.726,00		3.134.833.194,00		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		-	0,00	-	323.489.707,00	-	200.000.000,00	-	190.000.000,00	-	250.000.000,00		
		Persentase Masyarakat yang Aktif Dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Na %		Na %		98,5 %		99 %		99,5 %		99,5 %	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		-	0,00	-	2.734.097.950,00	-	2.579.547.450,00	-	2.579.547.450,00	-	2.677.833.194,00		
		Persentase Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Lembaga Pemerintah	Na %		Na %		100 %		100 %		100 %		100 %	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	99,17 %		99,33 %		Na %		Na %		Na %		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-	0,00	-	40.000.000,00	-	0,00	-	14.144.276,00	-	17.000.000,00	
		Persentase Ormas Yang Aktif	Na %		98 %		98,5 %		99 %		99,5 %		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		-	0,00	-	0,00	-	50.000.000,00	-	40.000.000,00	-	90.000.000,00	
		Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Ketahanan Kebangsaan	Na %		Na %		98,5 %		99 %		99,5 %		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		-	0,00	-	0,00	-	50.000.000,00	-	40.000.000,00	-	100.000.000,00	
		Persentase Pemantauan Situasi Daerah yang Dilaksanakan	Na %		Na %		90 %		90,5 %		91 %		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah konflik sosial tertangani	2.4 Kejadian/10.000 Penduduk		2.5 Kejadian/10.000 Penduduk		Na Kejadian/10.000 Penduduk		Na Kejadian/10.000 Penduduk		Na Kejadian/10.000 Penduduk		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH URUSAN				0,00		1.492.144.095.981,00		1.319.301.861.182,00		1.314.128.907.429,00		1.412.733.870.778,00	
JUMLAH				0,00		2.740.083.440.920,00		2.532.903.276.124,00		2.528.751.853.379,00		2.678.280.673.350,00	

BAB IX
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

9.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019–2024 merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, yang merupakan indikator tujuan pembangunan daerah.

Tabel 9.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)				Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	angka (0-100)	69,58	69,58	69,83	70,25	70,09	70,33	70,57	69,87	70,64	71,03	71,42	Sekretariat Daerah	

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Inflasi	Persentase kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	persen	2,5-4,0	2,5-4,5	2,5-4,0	2,0-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	Sekretariat Daerah
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Pengeluaran per kapita riil/konstan dengan tahun dasar 2012=100 yang kemudian disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (PPP)	ribu rupiah	9.400,64	9.401,64	9.762,42	9.443,22	9.900,38	10.262,16	10.400,12	9.301,00	9.587,62	9.734,22	9.883,06	Sekretariat Daerah
4	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	persen	9,43-10,43	13,90-12,80	8,78-9,78	12,44-11,52	8,13-9,13	7,48-8,48	6,83-7,83	11,27	11,27-10,52	10,67-9,92	10,07-9,32	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pembangunan Gender	IPM Perempuan dibagi dengan IPM Laki-laki dikali 100	angka (0-100)	93,21	93,21	93,31	91,91	93,81	94,11	94,41	91,81	92,40	92,70	92,99	Sekretariat Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) dikali 100 dibagi dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun	persen	5,1-5,6	1,7 - 2,9	5,2-5,7	3,3-4,3	5,3-5,8	5,4-5,9	5,5-6,0	-1,68	3,4-4,4	3,5-4,5	3,6-4,6	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ke-t-1 (nominal) dikurangi 100													
7	PDRB Per Kapita	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk	juta rupiah	26,7	26,7	28,21	26,84	29,71	31,21	32,72	24,94	27,78	28,68	29,52	Sekretariat Daerah
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Indeks pembangunan infrastruktur wilayah)/2	persen	69,93	69,93	72,98	72,98	76,42	79,83	83,29	66,60	71,91	74,76	82,21	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Th. 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	-	65,53 (Baik)	65,53 (Baik)	67,25 (Baik)	67,25 (Baik)	68,96 (Baik)	70,68 (Sangat Baik)	72,39 (Sangat Baik)	61,07 (Baik)	68,96 (Baik)	70,68 (Sangat Baik)	72,39 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah

Keterangan: *) Target perubahan akibat adanya pandemi Covid-19

Di samping indikator tujuan pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Magelang, tabel berikut ini menyajikan indikator sasaran daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024.

Tabel 9.2.
Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rata-rata Lama Sekolah	Lama sekolah (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas.	tahun	7,86	7,86	8,00	7,89	8,14	8,27	8,41	7,78	8,00	8,11	8,22	DISDIKBUD
2	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana dalam penghitungan IPM dengan metode baru, umur yang digunakan adalah 7 (tujuh) tahun	tahun	12,76	12,76	12,92	12,57	13,02	13,17	13,27	12,54	12,60	12,63	12,66	DISDIKBUD
3	Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	$((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) \times 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) \times 100\%) / 2$	persen	94,41	94,41	94,79	94,41	95,19	95,56	95,94	93,10	94,79	95,12	95,56	DISDIKBUD
4	Angka Harapan Hidup	Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk (BPS)	tahun	73,56	73,56	73,61	73,85	73,65	73,7	73,75	73,72	73,97	74,10	74,22	DINKES

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang+Cakupan Penyelenggaran Layanan Perhubungan+Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	72,48	78,16	93,05	DPUPR, DISHUB, DPR KP
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah **)	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang+Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan)/2	persen	67,74	67,74	73,81	73,81	80,68	87,48	94,38	61,90	-	-	-	DPUPR, DISHUB
	Cakupan hunian layak dan berkualitas **)	(Persentase ketersediaan rumah layak huni+persentase kawasan permukiman berkualitas)/2	persen	63,77	63,77	68,66	68,66	86,04	90,93	95,81	67,73	-	-	-	DPRKP
6	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	(Cakupan pelayanan trantibumlinmas+Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3	persen	82,2	86,42	83,62	83,62	84,99	86,33	87,76	94,00	84,99	86,33	87,76	SATPOL PP PK, KANTOR KESBANGPOL DAN BPBD
7	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks yang tersusun dari komponen sebagai berikut: Ipar=Indek keterwakilan perempuan di parlemen; IDM=Indek pengambilan keputusan, dan Linc-dist=indek distribusi pendapatan	-	69,33	69,33	69,63	69,75	69,39	70,23	70,53	69,65	69,93	70,23	70,53	DINSOS PPKB PPPA

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS tahun n - jumlah PMKS tahun 2018)x100%	persen	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,63	0,58	0,58	0,58	DINSOS PPKB PPPA
9	Kategori Kabupaten Layak Anak	Mengacu Permen PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak	-	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	utama	nindya	nindya	nindya	nindya	DINSOS PPKB PPPA
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja) x 100%	persen	2,4-3,0	5,38-6,25	2,25-2,65	4,54-5,17	2,25-2,65	2,25-2,60	2,25-2,55	4,27	3,93-3,87	2,4-3,0	2,25-2,65	DISPERINNAKE R
11	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Total nilai tambah dari sektor industri pengolahan (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	7.648,6	7.648,6	8.139,8	8.139,8	8.631	9.122,2	9.613,39	7.264,81	8.631	9.122,2	9.613,39	DISPERINNAKE R
12	Indeks ketahanan pangan	Hasil penghitungan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	angka (0-100)	78,42	78,42	79,47	79,47	80,52	81,57	82,62	81,27	81,30	81,57	82,62	DISTAN PANGAN
13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Total nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	7.373,16	7.373,16	7.748,63	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	6.914,81	8.124,10	8.499,56	8.875,03	DISTAN PANGAN, DISPETERIKAN

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219) Berdasar pembobotan antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL) sesuai surat dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020	angka (0-100)	-	-	-	-	-	-	-	-	71,34	71,36	71,38	DLH
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH **)	(IKAx30%) + (IKUx30%) + (IKTLx40%)	angka (0-100)	72,12	72,12	72,14	72,14	72,16	72,18	72,2	71,30	-	-	-	DLH
15	Indeks Desa Membangun	Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (IDM = 1/3 (IKS+IKE+IKL))	angka (0-1)	0,68	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,68	0,70	0,71	0,72	DISPERMADES
16	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	angka (1-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0-3,20	3,21-3,40	3,41-3,60	DISKOMINFO
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik **)	Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	angka (0-5)	2,31-2,50	2,31-2,50	2,51-2,61	2,51-2,61	2,62-2,72	2,73-2,85	2,86-3,1	2,94	-	-	-	DISKOMINFO

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	Total nilai tambah dari sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	4.868,86	4.868,86	5.208,43	5.208,43	5.547,99	5.887,55	6.227,11	4.306,14	5.547,99	5.887,55	6.227,11	DISDAGKOP UKM
18	Nilai PDRB sektor pariwisata	Total nilai tambah dari subsektor gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa-jasa (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	1.523,19	1.523,19	1.630,14	1.630,14	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.274,04	1.737,10	1.844,05	1.951,00	DISPARPORA
19	Pertumbuhan Investasi	((Investasi tahun n - Investasi tahun n-1)/Investasi tahun n-1) x 100 %	persen	5	5	5	5	5	5	5	13	10	10	10	DPMPTSP
20	Nilai AKIP	Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	63,03 (Baik)	63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	60,33 (Baik)	67,01 (Baik)	69,00 (Baik)	71,00 (Sangat Baik)	60,33 (Baik)	61,04 (Baik)	63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	SETDA
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	-	83 (Baik)	83 (Baik)	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84,5 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	83,69 (Baik)	84,5 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	SETDA
22	Opini BPK	Opini BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Indeks Sistem Merit	Peraturan KASN No 9 Th 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah	angka (0-1)	0,55	0,55	0,60	0,58	0,66	0,69	0,71	0,60	0,60	0,70	0,76	BKPPD

Keterangan: *) Target perubahan akibat adanya pandemi *Covid-19*

***) Indikator yang tidak menjadi sasaran daerah pada Perubahan RPJMD 2019 - 2024

9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 9.3.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Kasar (APK)	(APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTS/Paket B)/3	angka (0-100)	89,02	89,02	90,12	87,41	91,22	92,31	93,41	85,47	88,64	90,21	91,44	93,41	91,44
2	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Murni (APM)	(APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTS/Paket B)/2	angka (0-100)	84,50	84,50	85,19	80,28	85,87	86,56	87,24	79,60	80,97	81,65	82,34	87,24	82,34
3	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	(APS PAUD + APS SD + APS SMP)/3	angka (0-100)	95,96	95,96	96,40	88,74	97,03	97,65	98,28	88,18	89,06	89,64	90,00	98,28	90,00
4	DISDIKBUD	Angka Kelulusan	(Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2	angka (0-100)	99,92	99,92	99,94	99,94	99,96	99,98	100	100	99,96	99,98	100	100	100
	DISDIKBUD	Rerata Nilai UN **)	(Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP)/2	angka (0-10)	6,67	6,67	6,71	6,71	6,74	6,77	6,81	-	-	-	-	6,81	-
5	DISDIKBUD	Cakupan pengelolaan kebudayaan	((Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3	persen	32,86	32,86	33,31	33,31	33,69	34,16	34,60	30,10	33,69	34,16	34,60	34,60	34,60

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	DINKES	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	(Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang terakreditasi)/(Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang ada) x 100 %	persen	25	25	30	30	35	40	45	25	35	40	45	45	45
7	DINKES	Angka kesakitan	(Jumlah penderita yang ditemukan pada tahun n/jumlah penduduk pada tahun n) x 100%	persen	41,19	41,19	40,87	40,87	40,55	40,24	39,93	41,19	40,55	40,24	39,93	39,93	39,93
8	DINKES	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun	jumlah kasus	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6
9	DINKES	Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	5,70	5,70	5,69	5,69	5,68	5,67	5,66	4,40	5,68	5,67	5,66	5,66	5,66
10	DINKES	Angka Kematian Balita (AKABa)	(Jumlah Kematian Balita (berumur kurang dari 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	6,68	6,68	6,67	6,67	6,66	6,65	6,64	5,28	6,66	6,65	6,64	6,64	6,64
11	DINKES	Angka Kematian Neonatal (AKN)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari 1 bulan) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	3,98	3,98	3,97	3,97	3,96	3,95	3,94	3,40	3,96	3,95	3,94	3,94	3,94
12	DINKES	Kualitas Puskesmas/RS dan Rumah Sakit	(Jumlah puskesmas/RS yang berkualitas)/(jumlah puskesmas/RS yang ada) x 100 %	persen	60	60	65	65	70	75	80	60	70	75	80	80	80
13	RSUD MUNTILAN	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang akreditasi RS	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	DPUPR	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	(Cakupan Penyelenggaraan jalan + cakupan pengelolaan SDA + Cakupan penataan bangunan gedung + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik + Cakupan layanan drainase lingkungan + cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan + Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang)/8	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	63,30	76,98	93,42	-	93,42
	DPUPR	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang **)	(Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan + Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik + cakupan layanan jaringan irigasi + Cakupan layanan Sumber Daya Air + Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik + Cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase terbangunnya landmark + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik+ Cakupan sarana prasarana ke PU-an + cakupan layanan Jasa konstruksi + Persentase dokumen rekomendasi perijinan + Persentase kesesuaian tata ruang + Cakupan kinerja pertanahan)/14	persen	66,51	66,51	72	72	78,75	85,42	92,27	69,90	-	-	-	92,27	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	DPRKP	Cakupan hunian layak dan berkualitas	((Persentase penanganan RTLH + persentase penanganan Kawasan permukiman kumuh) / 2	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	94,78	95,16	95,73	-	95,73
	DPRKP	Persentase ketersediaan rumah layak huni **)	((Persentase peningkatan rumah layak huni + Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR+Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana+Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak proyek pemerintah+Persentase Penanganan PSU Perumahan)/5) x 100%	persen	67,24	67,24	73,74	73,74	79,43	85,53	91,63	72,06	-	-	-	91,63	-
	DPRKP	Persentase kawasan permukiman berkualitas **)	((persentase penangan kawasan permukiman kumuh + persentase pengendalian kawasan permukiman)/2 x 100%	persen	60,31	60,31	63,98	63,98	92,65	96,33	100	63,39	-	-	-	100	-
16	SATPOL PP PK	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	((jumlah penindakan/jumlah pelanggaran) x 0,50 + ((jumlah penertiban/(jumlah target perencanaan penertiban + jumlah aduan)) x 0,50	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	86,87	88,27	89,58	-	89,58
	SATPOL PP PK	Cakupan penegakan hukum **)	((jumlah penindakan/jumlah pelanggaran) x 100% + (jumlah penertiban/(jumlah target perencanaan penertiban + jumlah aduan)) x 100%)/2)	persen	84,53	84,53	85,70	85,70	86,87	88,27	89,68	84,53	-	-	-	89,68	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	BPBD	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	((jml penduduk di Kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana/jml penduduk di kawasan rawan bencana) x 100%) + ((jml desa tangguh bencana/jml desa rawan bencana) x 100) + ((jml penanganan tanggap darurat yg dilakukan / jml sasaran dampak bencana yg harus dilakukan tanggap bencana) x 100) + ((jml kejadian bencana yg direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi / jml kejadian bencana yg harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi) x 100))/4	persen	62,89	62,89	65,84	65,84	68,6	71,04	73,78	94	100	100	100	73,78	100
18	KESBANGPOL	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	(Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan + Persentase Peningkatan Ormas Yang Aktif) + Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Bangsa + Persentase peningkatan fasilitasi dan penanganan konflik sosial)/4	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	98,50	99,00	99,50	-	99,50
	KESBANGPOL	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat **)	((Jml ormas, LSM dan OKP yg aktif tahun n-Jml ormas, LSM dan OKP yg aktif tahun n-1)/ Jml ormas, LSM dan OKP yg tercatat tahun n-1) + (Jml konflik sosial tertangani tahun n - Jml konflik sosial tertangani tahun n-1)/Jml konflik sosial tahun n)+(Jumlah	persen	99,17	99,17	99,33	99,33	99,50	99,67	99,83	98,95	-	-	-	98,93	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			kegiatan pembinaan politik tahun n - Jumlah kegiatan pembinaan politik tahun n-1)/ Jumlah kegiatan tahun n-1))/3														
19	KESBANGPOL	Persentase peningkatan fasilitasi partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah daerah	(Persentase Realisasi Kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Tahun n/ Persentase Realisasi Kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Tahun n-1) x 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
20	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan penanganan PMKS	(Persentase PMKS yang tertangani + Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS)/2	persen	47,46	47,46	48,04	48,04	48,63	49,21	49,80	104,52	48,63	49,21	49,80	49,80	49,80
21	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	((((Jumlah perempuan di legislatif/jumlah jabatan legislatif) x 100% + (jumlah peserta perempuan yang dilatih atau sosialisasi/ jumlah sasaran peserta perempuan yang akan dilatih atau sosialisasi) x 100% + (jumlah PD (kecamatan, PD, desa) yang akan dilatih PPRG/ Jumlah PD (kecamatan, PD, desa) x 100 %))) / 3)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	22,59	23,46	24,34	-	24,34

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan Pemberdayaan perempuan **)	((Perempuan di lembaga legislatif+ peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi+ PD yang melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)))/(jumlah jabatan di legislatif + jumlah pekerja perempuan + jumlah PD)) x 100	persen	66,46	66,46	66,69	66,69	66,72	66,97	67,22	66,45	-	-	-	67,22	-
22	DINSOS PPKB PPPA	Rasio kekerasan	(jumlah kasus ditangani/jumlah rumah tangga) x 100%	persen	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
23	DINSOS PPKB PPPA	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$P_t = P_o (1+r)^t$	persen	0,73	0,73	0,71	0,71	0,69	0,67	0,65	0,93	0,93	0,91	0,89	0,65	0,89
24	DINSOS PPKB PPPA	Persentase keluarga Pra Sejahtera	(Jumlah Keluarga Pra sejahtera/Jumlah keluarga) x 100%	persen	20,15	20,15	19,61	19,61	19,07	18,53	18	20,15	19,07	18,53	18	18	18
25	DISPERINNAKER	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	((jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja + jumlah penduduk yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja + jumlah pengangguran)/jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas)) x 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	74,34	74,24	74,14	-	74,14
	DISPERINNAKER	Indeks Produktivitas tenaga kerja **)	nilai PDRB/Total angkatan kerja yang bekerja	rupiah	31.104.864	31.104.864	31.194.768	31.194.768	31.292.023	31.397.568	31.512.510	32.387.942	-	-	-	31.512.510	-
26	DISPERINNAKER	Indeks industri yang terbina	((Jumlah industri terbina/jumlah industri) x 0.7) + ((jumlah industri terdaftar IUI/jumlah industri) x 0.3))	indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,3	-	1,3

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DISPERINNAKER	Persentase Pertumbuhan Industri **)	((jumlah industri tahun n-jumlah industri tahun (n-1) / (jumlah industri s/d tahun n)) x 100%	persen	2,33	2,33	2,39	1,44	2,42	2,47	2,55	2,39	-	-	-	12,16	-
27	DISTAN PANGAN	Stabilitas harga dan pasokan pangan	$\frac{2 - \text{realisasi harga rata-rata komoditas}}{\text{target harga rata-rata komoditas}} \times 100\%$	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	93,20	93,20	93,20	-	93,20
	DISTAN PANGAN	Stabilitas harga pangan **)	inflasi harga bahan pangan pokok (BPS)	persen	93,97	93,97	93,98	93,98	94	94,15	94,3	92,41	-	-	-	94,3	-
	DISTAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama beras **)	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama beras per Tahun/Jumlah Penduduk)	kg/jiwa/tahun	211,22	211,22	210,66	210,66	210,10	209,55	208,99	205,82	-	-	-	208,99	-
28	DISTAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	(konsumsi pangan riil masyarakat/standar konsumsi pangan nasional) x 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	84,90	85,00	85,10	-	85,10
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi) **)	Perentase angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	persen	87,98	87,98	88	88,20	88,10	88,25	88,40	87,90	-	-	-	88,40	-
29	DISTAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	Jumlah seluruh skor PPH actual dari masing-masing kelompok pangan	persen	-	-	-	-	-	-	--		70,80	70,90	71,00	-	71,00
	DISTAN PANGAN	Produksi Padi **)	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun	ton (GKP)	478.500	478.500	479.000	479.000	479.500	480.000	480.500	296.209	-	-	-	480.500	-
	DISTAN PANGAN	Produksi Jagung **)	Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun	ton (pipilan kering)	51.450	51.450	51.500	51.500	51.550	51.600	51.650	40.611	-	-	-	51.650	-
	DISTAN PANGAN	Produksi Cabai **)	Jumlah produksi cabai dalam 1 tahun	ton (segar)	39.457	39.457	40.071	40.071	40.399	40.783	41.183	32.578	-	-	-	41.183	-
	DISTAN PANGAN	Produksi Kopi **)	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun	ton (ose kering)	1.490	1.490	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530	1.490,70	-	-	-	1.530	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DISTAN PANGAN	Produksi Cengkeh **)	Jumlah produksi cengkeh dalam 1 tahun	ton (bunga kering)	165	165	167	167	169	171	173	165,7	-	-	-	173	-
	DISTAN PANGAN	Produksi kelengkeng **)	Jumlah produksi kelengkeng dalam 1 tahun	ton (segar)	93	93	95	95	97	99	100	75	-	-	-	100	-
	DISTAN PANGAN	Produksi jeruk **)	Jumlah produksi jeruk dalam 1 tahun	kuintal (segar)	2.655	2.655	2.660	2.660	2.665	2.670	2.675	2.379	-	-	-	2.675	-
	DISTAN PANGAN	Produksi kelapa dalam **)	Jumlah produksi kelapa dalam 1 tahun	ton (kopra)	7.530	7.530	7.535	7.535	7.540	7.545	7.550	7.531	-	-	-	7.550	-
	DISTAN PANGAN	Produksi Salak **)	Jumlah produksi salak dalam 1 tahun	ton (segar)	69.380	69.380	69.390	69.390	69.400	69.410	69.420	53.739	-	-	-	69.420	-
	DISTAN PANGAN	Produksi Bawang putih **)	Jumlah produksi bawang putih dalam 1 tahun	ton (askip)	2.264	2.264	2.377,20	2.377,20	2.424,70	2.473,20	2.522,70	7.510	-	-	-	2.522,70	-
30	DISTAN PANGAN	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	$\frac{\sum((\text{prod komoditas 1 tahun } n\text{-prod komoditas 1 tahun } n-1)/(\text{prod komoditas 1 tahun } n-1)) \times 100\% + \dots + ((\text{prod komoditas 10 tahun } n\text{-prod komoditas 10 tahun } n-1)/(\text{produksi komoditas 10 tahun } n-1)) \times 100\%}{10}$ <p>Komoditas: padi, jagung, cabai, bawang putih, kopi, cengkeh, kelapa dalam, salak, jeruk, kelengkeng</p>	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	0,73	0,73	-	2,19
31	DISTAN PANGAN	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	$\frac{\sum((\text{prod komoditas 1 tahun } n\text{-prod komoditas 1 tahun } n-1)/(\text{prod komoditas 1 tahun } n-1)) \times 100\% + \dots + ((\text{prod komoditas 5 tahun } n\text{-prod komoditas 5 tahun } n-1)/(\text{produksi komoditas 5 tahun } n-1)) \times 100\%}{5}$	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	3,40	-	13,20

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Komoditas pertanian unggulan: padi, kopi, kelapa, salak, empon-empon														
	DISTAN PANGAN	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi **)	(produksi produk unggulan terstandarisasi : total produksi produk unggulan) x 100 %	persen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,28	-	-	-	1,5	-
32	DLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, ijin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	(Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	6,98	9,30	11,63	-	11,63
	DLH	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru **)	((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper) x 100 %	persen	10	10	13	13	15	18	22	2	-	-	-	22	-
33	DLH	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor K.333/menlhk/setjen/set.1/8/2020 tentang IKU KLHK tahun 2020-2024	Angka (1-100)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	50	55	-	55

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DLH	Persentase pengelolaan sampah **)	Neraca Jakstrada pengelolaan sampah	persen	41,2	41,2	42,9	42,9	47,99	53,5	54,91	34,29	-	-	-	54,91	-
34	DLH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi jogo tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup + Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup)/4	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	40,25	40,70	41,15	-	41,15
	DLH	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan **)	(Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan+Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan)	persen	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	-	-	-	39,59	-
	DLH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim **)	(Persentase luasan daerah resapan air dan rawan longsor yang dikonservasi+Persentase mata air yang dikonservasi+Persentase luas daerah rawan longsor yang dikonservasi terhadap luas lahan keseluruhan+Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim+Persentase sekolah Adiwiyata)/5	persen	7,53	7,53	8,97	8,97	10,34	11,67	12,98	8,94	-	-	-	12,98	-
35	DISDUKCAPIL	Rasio Perekaman KTP-elektronik, Keluarga yang ber-KK dan penerbitan KIA	(Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik+Persentase penerbitan KK + Persentase penerbitan KIA)/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,65	91,68	93,67	-	93,67
	DISDUKCAPIL	Rasio Perekaman KTP-elektronik dan Keluarga yang ber KK **)	(Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP+Persentase penerbitan KK)/2	angka	97,48	97,48	98,03	98,03	99,03	99,28	99,75	85,47	-	-	-	99,75	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	DISDUKCAPIL	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	(Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta Perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3	angka	66,67	66,67	74,16	74,16	81,67	89,16	96,67	81,57	81,67	89,16	96,67	96,67	96,67
37	DISDUKCAPIL	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	(Persentase Pengelolaan Informasi+Persentase Pemanfaatan Data)/2	angka	77,5	77,5	82,5	82,5	87,5	92,5	95	75	87,5	92,5	95	95	95
38	DISPERMADES	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	(Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang)/Jumlah Seluruh Desa) x 100%	persen	85,01	85,01	87,74	87,74	90,46	93,19	100	95,37	90,46	93,19	100	100	100
39	DISHUB	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	(Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	59,35	62,34	90,00	-	90,00
	DISHUB	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan **)	(Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas + Persentase angkutan umum layak	persen	68,96	68,96	75,62	75,62	82,62	89,54	96,49	53,89	-	-	-	96,49	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			jalan)/4														
40	DISKOMINFO	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	(Jumlah PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah/Jumlah PD) x 100%	persen	44,52	44,68	52,44	53,19	61,56	67,81	76,67	57,63	61,70	68,08	76,59	76,67	76,59
41	DISKOMINFO	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	(Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi/ jumlah data statistik sektoral yang tersedia) x 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
		Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD **)	(Jumlah data sektoral yang tersedia/Jumlah data sektoral yang seharusnya tersedia) x 100%	persen	48,16	48,16	56,89	56,89	70,23	84,67	98,32	56,46	-	-	-	98,32	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	DISKOMINFO	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	((Jumlah informasi melalui media luar ruang yang terlaksana/jumlah informasi melalui media luar ruangan yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui media publik yang dilaksanakan/jumlah informasi melalui media publik yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang dilaksanakan/jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang direncanakan) x 100% + (jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang dilaksanakan/jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui media surat kabar yang dilaksanakan /jumlah informasi melalui media surat kabar yang direncanakan) x 100%)/5	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik **)	((Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria+Persentase diseminasi informasi melalui media massa+Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat+Cakupan diseminasi melalui media interpersonal+Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang+Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah+Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan+Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar)/8	persen	83,94	84,00	87,74	86,67	89,88	92,02	94,15	80,18	-	-	-	94,15	-
43	DISKOMINFO	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	((Jumlah PD dan desa atau kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil/jumlah PD dan desa atau kelurahan) x 100% + (jumlah aplikasi PD dan desa atau kelurahan yang terfasilitasi/jumlah aplikasi PD dan desa atau kelurahan yang diajukan fasilitasi) x 100 %)/2	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	86,81	92,80	100	-	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI **)	(Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi Jaringan Internet dan Jaringan internet Intra Pemerintah Daerah yang Optimal dan Stabil+Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK+ Persentase Jumlah aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi+Persentase pengembangan dan pengelolaan eksosistem kabupaten)/4	persen	75	75,06	83,33	83,33	91,67	95,83	100	82,02	-	-	-	100	-
44	DISDAGKOP UKM	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	((Nilai ekspor tahun n-1)/Nilai ekspor tahun n-1) x 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	DISDAGKOP UKM	Cakupan Pelayanan Perdagangan **)	((Cakupan legalitas pelayanan perdagangan x 0,5) + (Cakupan Promosi perdagangan x 0,2) + (Cakupan Sarpras perdagangan x 0,3)	miliar rupiah	70	70	72	72	74	76	78	68,99	-	-	-	78	-
	DISDAGKOP UKM	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur **)	Penilaian dari Kementerian Perdagangan	unit	8	8	9	9	10	11	12	7	-	-	-	12	-
45	DISDAGKOP UKM	Persentase koperasi aktif	(jumlah koperasi aktif/Jumlah total koperasi) x 100%	persen	78,13	78,13	80,20	80,20	80,4	80,7	81	38,31	80,40	80,70	81	81	81
46	DISDAGKOP UKM	Peningkatan Omzet Usaha Mikro	((nilai omzet tahun n - nilai omzet tahun n-1)/nilai omzet tahun n-1) x 100%	persen	5	5	5	5	5	5	5	3,75	5	5	5	5	5

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	DPMPTSP	Nilai investasi PMA	Jumlah investasi yang masuk dari LN (PMA)	rupiah	78,750 milyar	78,750 milyar	82,687 milyar	82,687 milyar	86,821 milyar	91,162 milyar	95,721 milyar	69,679 milyar	69.451.431.968	69.618.826.286	69.794.590.320	95.721.000.000	69.794.590.320
48	DPMPTSP	Nilai investasi PMDN	Jumlah investasi yang masuk dar DN (PMDN)	rupiah	2,391 triliun	2,391 triliun	2,630 triliun	2,630 triliun	2,893 triliun	3,182 triliun	3,501 triliun	2,412 triliun	2.792.794.453.844	3.072.073.899.233	3.379.281.289.156	3.501.000.000	3.379.281.289.156
49	DPMPTSP	Survei kepuasan pelayanan perizinan	Mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	angka	87	87	87,50	87,50	88	88,5	89	87,15	88	88,50	89	89	89
50	DISPARPORA	Cakupan prestasi generasi muda	$((\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah kepesertaan lomba kepemudaan}) \times 100\%) \times 0,50 + ((\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet peserta kejuaraan}) \times 100\%) \times 0,50)$	persen	41	41	44	37,50	46,5	49	52	53,63	43,89	44,44	45,00	52	45,00
51	DISPARPORA	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	$((\text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n-1) / \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n-1) \times 100\% \times 0,35 + (((\text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n-1) / \text{jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke } n-1) \times 100\%) \times 0,65)$	persen	5	5	5	5	5	5	5	-81,39	5	5	5	25	25

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
52	DISPARPORA	Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan	$\frac{(((\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n-1) / \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n-1) \times 100\%) \times 0,35) + (((\text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n-1) / \text{lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke } n-1) \times 100\%) \times 0,65)}{1}$	persen	5,3	5,3	5,6	5,6	6	6,3	6,8	NA	3,70	3,73	3,75	30	20,13
53	DISPUSPA	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten} / \text{jumlah penduduk} \times 100\%}{1}$	persen	0,07	0,07	0,08	0,08	0,087	0,09	0,10	0,0175	0,0188	0,0205	0,0224	0,10	0,0224
54	DISPUSPA	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	$\frac{\text{Pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku} / \text{jumlah pengolah arsip} \times 100\%}{1}$	persen	38,46	38,46	53,85	53,85	69,23	84,62	100	30,76	69,23	84,62	100	100	100
55	DISPETERIKAN	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	16.831,65	17.091,81	17.382,71	-	51.306,17
	DISPETERIKAN	Produksi daging (**)	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	16.393,30	16.393,30	16.680,20	16.680,20	16.972,10	17.269,10	17.571,30	16.484,37	-	-	-	90.997,40	-
56	DISPETERIKAN	Produksi telur	Jumlah produksi telur dalam 1 tahun	ton	17.071,20	17.071,20	17.359,80	17.359,80	17.653,10	17.951,50	18.254,90	17.071,88	17.653,10	17.951,50	18.254,90	105.078	105.078
57	DISPETERIKAN	Produksi susu	Jumlah produksi susu dalam 1 tahun	liter	818.257	818.257	833.804	833.804	849.646	865.789	882.238	818.461	849.646	865.789	882.238	4.249.734	4.249.734

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58	DISPETERIKAN	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Jumlah produksi benih ikan dalam satu tahun	Ekor (x1000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.788.662	1.842.232	1.897.501	-	5.528.395
	DISPETERIKAN	Produksi benih ikan **)	Jumlah produksi benih dalam 1 tahun (ekor)	ekor (x1000)	2.100.000	2.100.000	2.205.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563	1.719.206,10	-	-	-	13.603.826	-
59	DISPETERIKAN	Produksi ikan konsumsi	Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun	ton	25.000,00	25.000,00	25.357,50	18.847,50	26.625,38	27.956,64	29.354,45	18.476	19.224,60	19.804	20.400	156.444,00	103.276,10
	DISPETERIKAN	Produksi perikanan tangkap **)	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun	ton	294,53	294,53	309,25	309,25	324,71	340,95	358	230,63	-	-	-	-	-
60	DISPETERIKAN	Produksi ikan hias	Jumlah produksi ikan hias dalam satu tahun	ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	2.457.200	2.530.900	2.606.900	-	7.595.000
61	SETDA	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	((Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang tersusun/jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya) x 100%)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	SETDA	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah **)	((jumlah kebijakan yang tidak bermasalah/jumlah kebijakan yang ada (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan bersama)) + ((jumlah kkebijakan yang ada/jumlah kebijakan yang seharusnya ada) x 100%))/2	persen	70	70	72,5	72,5	75	77,5	80	70	-	-	-	80	-
62	SETDA	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang))	-	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84 (Baik)	84 (Baik)	84,25 (Baik)	84,50 (Baik)	85 (Baik)	83,69 (Baik)	84,25 (Baik)	84,50 (Baik)	85 (Baik)	85 (Baik)	85 (Baik)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	SETDA	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	((Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tersusun/Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang seharusnya) x 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	94,5	100	-	100
64	SETWAN	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	((jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100% + (jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan) x 100%)/3	persen	94	94	94	94,44	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	BAPPEDA & LITBANGDA	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	((Jumlah indikator kinerja program daerah yang berpredikat sangat tinggi (≥91%) dan tinggi (76 % - 90%)/Jumlah indikator kinerja program) x 100%) + (jumlah program RPJMD yang dijabarkan pada RKPD pada tahun berkenaan)/jumlah program pada RPJMD tahun berkenaan) x 100%)/2	persen	85,38	85,38	86,92	83,09	88	89,54	93,38	85,38	84,71	86,51	90,29	93,38	90,29

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	BAPPEDA & LITBANGDA	Persentase implementasi rencana kelitbangan	(Jumlah kelitbangan dalam RKPD/Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
67	BPPKAD	Persentase kenaikan PAD	$((PAD\ th-n - PAD\ th-n-1))/PAD\ th\ n-1) \times 100\%$	persen	-6,3	-6,3	7	7	7	7	7	-22,26	7	7	7	7	7
68	BPPKAD	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	(Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu/jumlah APBD) x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
69	BPPKAD	Persentase kejelasan status aset daerah	(Jumlah aset yang jelas statusnya/Jumlah aset seluruhnya) x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	BKPPD	Indeks profesionalitas ASN	$IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - 6 SI(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$	angka (0-100)	67	67	69	53	72	74	76	63	53	59	64	76	64
71	INSPEKTORAT	Level kapabilitas APIP	Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	level	3	3	3	3	3+	3+	3+	3	3	3	3	3+	3
72	INSPEKTORAT	Nilai maturitas SPIP	Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP	level (0-5)	3	3	3,1	3	3,2	3,3	3,4	3	3	3	3	3,4	3
73.1	KECAMATAN BANDONGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	83	83	84	84	85	86	87	83	85	86	87	87	87
73.2	KECAMATAN BOROBUKUR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	84,23 (Baik)	84,24 (Baik)	85,71 (Baik)	85,71 (Baik)	87,19 (Baik)	88,68 (Sangat Baik)	88,68 (Sangat Baik)	88,78 (Sangat Baik)	87,19 (Sangat Baik)	88,68 (Sangat Baik)	88,68 (Sangat Baik)	88,68 (Sangat Baik)	88,68 (Sangat Baik)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
73.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	82,67 (Baik)	82,67 (Baik)	83,99 (Baik)	83,99 (Baik)	85,31 (Baik)	86,63 (Baik)	87,95 (Baik)	83,07 (Baik)	85,31 (Baik)	86,63 (Baik)	87,95 (Baik)	87,95 (Baik)	87,95 (Baik)	
73.4	KECAMATAN DUKUN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	82 (Baik)	82 (Baik)	83 (Baik)	83 (Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	88,87 (Sangat Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	
73.5	KECAMATAN GRABAG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	85,50 (Baik)	85,51 (Baik)	85,71 (Baik)	85,71 (Baik)	87,19 (Baik)	88,68 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)	87,73 (Baik)	87,19 (Baik)	88,68 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)	
73.6	KECAMATAN KAJORAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	83 (Baik)	83 (Baik)	83,75 (Baik)	85,74 (Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	80,25 (Baik)	87,19 (Baik)	88,58 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)	86,00 (Baik)	90,16 (Sangat Baik)	
73.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	84,89 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	
73.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	89,83 (Sangat Baik)	89,83 (Sangat Baik)	89,83 (Sangat Baik)	89,83 (Sangat Baik)	89,83 (Sangat Baik)	89,83 (Sangat Baik)	89,83 (Sangat Baik)	89,93 (Sangat Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	89,83 (Sangat Baik)	86 (Baik)	
73.9	KECAMATAN MUNGKID	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87,50 (Baik)	87,50 (Baik)	87,60 (Baik)	87,60 (Baik)	87,70 (Baik)	87,80 (Baik)	87,90 (Baik)	89,75 (Sangat Baik)	87,70 (Baik)	87,70 (Baik)	87,80 (Baik)	87,90 (Baik)	87,90 (Baik)	
73.10	KECAMATAN MUNTILAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	88,50 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	86,30 (Baik)	89,50 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90,25 (Sangat Baik)	90,25 (Sangat Baik)	86,35 (Baik)	86,40 (Baik)	86,45 (Baik)	90,25 (Sangat Baik)	86,45 (Baik)	
73.11	KECAMATAN NGABLAK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	83 (Baik)	83 (Baik)	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	89,46 (Sangat Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	
73.12	KECAMATAN NGLUWAR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	89,50 (Sangat Baik)	89,50 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	89,50 (Sangat Baik)	89,50 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73.13	KECAMATAN PAKIS	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	86 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)	88,24 (Baik)	90 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)
73.14	KECAMATAN SALAM	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	83 (Baik)	83 (Baik)	84 (Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	87 (Baik)	80,10 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	87 (Baik)	87 (Baik)	87 (Baik)
73.15	KECAMATAN SALAMAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87 (Baik)	87 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	86 (Baik)	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)	88 (Baik)	89 (Sangat Baik)
73.16	KECAMATAN SAWANGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	83 (Baik)	83 (Baik)	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	90 (Sangat Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)
73.17	KECAMATAN SECANG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	89,50 (Sangat Baik)	89,50 (Sangat Baik)	89,60 (Sangat Baik)	89,60 (Sangat Baik)	89,75 (Sangat Baik)	89,85 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90,52 (Sangat Baik)	89,75 (Sangat Baik)	89,85 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
73.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	83 (Baik)	83 (Baik)	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	86,39 (Baik)	84,50 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)
73.19	KECAMATAN TEGALREJO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	86 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	86 (Baik)	90 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	94 (Sangat Baik)	84,49 (Baik)	87 (Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)	94 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
73.20	KECAMATAN TEMPURAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	86,50 (Baik)	86,50 (Baik)	87 (Baik)	87 (Baik)	87,20 (Baik)	87,50 (Baik)	88,30 (Baik)	85,28 (Baik)	87 (Baik)	87,50 (Baik)	88,30 (Baik)	88,30 (Baik)	88,30 (Baik)
73.21	KECAMATAN WINDUSARI	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	82 (Baik)	82 (Baik)	82,10 (Baik)	82,10 (Baik)	82,20 (Baik)	82,30 (Baik)	82,40 (Baik)	88,87 (Sangat Baik)	85,75 (Baik)	85,90 (Baik)	86,00 (Baik)	82,40 (Baik)	86,00 (Baik)
74.1	KECAMATAN BANDONGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33	90,47	95,23	-	95,23

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			kebencanaan)/3														
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) \times 100\%)/2$	persen	100	100	100	75	100	100	100	100	-	-	-	100	-
74.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	-	90
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) \times 100\%)/2$	persen	90	90	90	85	92,50	92,50	92,50	99,20	-	-	-	92,50	-
74.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	96,49	98,24	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) \times 100\%)/2$	persen	89,47	89,47	92,10	92,10	94,73	97,36	100	89,47	-	-	-	100	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74.4	KECAMATAN DUKUN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
74.5	KECAMATAN GRABAG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
74.6	KECAMATAN KAJORAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	70,69	70,70	74,14	100	77,59	81,04	84,49	72,45	-	-	-	84,49	-
74.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	94,60	95	95,3	-	95,3
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	90,50	90,50	91	91	92	92	93	100	-	-	-	93	-
74.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	82	82	82	82	82,50	83	83	82	-	-	-	83	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74.9	KECAMATAN MUNGKID	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	95	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	91	91	91,50	91,50	92	92,50	93	99,98	-	-	-	93	-
74.10	KECAMATAN MUNTILAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92	93	-	94
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	82	82	83	90	84	85	86	86	-	-	-	86	-
74.11	KECAMATAN NGABLAK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	-	95

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100\%) / 2$	persen	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	100	-	-	-	92,50	-
74.12	KECAMATAN NGLUWAR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$(\text{Persentase desa yang tertib administrasi} + \text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan} + \text{Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan}) / 3$	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	95	96,70	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100\%) / 2$	persen	85	85	90	90	92,50	95	100	85	-	-	-	100	-
74.13	KECAMATAN PAKIS	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$(\text{Persentase desa yang tertib administrasi} + \text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan} + \text{Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan}) / 3$	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	95	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100\%) / 2$	persen	87,50	87,50	90	90	92,50	95	97,50	90	-	-	-	97,50	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74.14	KECAMATAN SALAM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66	94,44	94,44	-	94,44
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	66,70	66,70	70,80	70,80	75	79,10	83,30	64,44	-	-	-	83,30	-
74.15	KECAMATAN SALAMAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen		--	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	95	95	95	100	95	95	95	95	-	-	-	95	-
74.16	KECAMATAN SAWANGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95	96,7	-	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	80	80	85	85	90	95	100	88	-	-	-	100	-
74.17	KECAMATAN SECANG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66	95	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	77,50	77,50	82,50	82,50	87,50	92,50	100	100	-	-	-	100	-
74.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	87,33	92,33	95,66	-	95,66
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	66	66	73,50	73,50	81	88,50	93,50	73,54	-	-	-	93,50	-

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74.19	KECAMATAN TEGALREJO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	93	94	95	-	95
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	91,50	91,50	92,50	92,50	93	94	95	91,50	-	-	-	95	-
74.20	KECAMATAN TEMPURAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	95	100	-	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan) x 100%)+ ((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa) x 100%)/2	persen	97,50	97,50	90	90	92,50	95	100	100	-	-	-	100	-
74.21	KECAMATAN WINDUSARI	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	95	100	-	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)						Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan **)	$\frac{((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{Jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100\%)}{2}$	persen	92,50	92,50	95	85	97,50	100	100	100	-	-	-	100	-

Keterangan: *) Target perubahan akibat adanya pandemi *Covid-19*

***) Indikator yang tidak menjadi IKU PD pada Perubahan RPJMD 2014 – 2024

9.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU PD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 9.4.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT															
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	69,58	69,58	69,83	70,25	70,09	70,33	70,57	69,87	70,64	71,03	71,42	70,57	71,42	
2	Angka Kemiskinan	persen	9,43-10,43	13,90-12,80	8,78-9,78	12,44-11,52	8,13-9,13	7,48-8,48	6,83-7,83	11,27	11,27-10,52	10,67-9,92	10,07-9,32	6,83-7,83	10,07-9,32	
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	93,21	93,21	93,31	91,91	93,81	94,11	94,41	91,81	92,40	92,70	92,99	94,41	92,99	
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,33	69,33	69,63	69,75	69,93	70,23	70,53	69,65	69,93	70,23	70,53	70,53	70,53	
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	utama	nindya	nindya	nindya	nindya	utama	nindya	
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,56	73,61	73,85	73,65	73,7	73,75	73,72	73,97	74,10	74,22	73,75	74,22	
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	7,86	8	7,89	8,14	8,27	8,41	7,78	8,00	8,11	8,22	8,41	8,22	
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,76	12,92	12,57	13,02	13,17	13,27	12,54	12,60	12,63	12,66	13,27	12,66	
10	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41	94,41	94,79	94,41	95,19	95,56	95,94	93,10	94,79	95,12	95,56	95,94	95,56	
11	Indeks ketahanan pangan	angka (1-100)	78,42	78,42	79,47	79,47	80,52	81,57	82,62	81,27	81,30	81,57	82,62	82,62	82,62	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Cakupan hunian layak dan berkualitas **)	persen	63,77	63,77	68,66	68,66	86,04	90,93	95,81	67,73	-	-	-	95,81	-
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,1-5,6	1,7 - 2,9	5,2-5,7	3,3-4,3	5,3-5,8	5,4-5,9	5,5-6,0	-1,68	3,4-4,4	3,5-4,5	3,6-4,6	5,5-6,0	3,6-4,6
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,4-3,0	5,38-6,25	2,25-2,65	4,54-5,17	2,25-2,65	2,25-2,60	2,25-2,55	4,27	3,93-3,87	2,4-3,0	2,25-2,65	2,25-2,55	2,25-2,65
14	PDRB Per Kapita	juta rupiah	26,7	26,7	28,21	26,84	29,71	31,21	32,72	24,94	27,78	28,68	29,52	32,72	29,52
15	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.400,64	9.401,64	9.762,42	9.443,22	9.900,38	10.262,16	10.400,12	9.301,00	9.587,62	9.734,22	9.883,06	10.400,12	9.883,06
16	Inflasi	persen	2,5-4,0	2,5-4,5	2,5-4,0	2,0-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	2,5-4,0	2,0-4,0
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.868,86	4.868,86	5.208,43	5.208,43	5.547,99	5.887,55	6.227,11	4.306,14	5.547,99	5.887,55	6.227,11	6.227,11	6.227,11
18	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	7.373,16	7.373,16	7.748,63	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	6.914,81	8.124,10	8.499,56	8.875,03	8.875,03	8.875,03
19	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	7.648,6	7.648,6	8.139,8	8.139,8	8.631	9122,2	9613,39	7.264,81	8.631	9.122,2	9.613,39	9.613,39	9.613,39
20	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.523,19	1.523,19	1.630,14	1.630,14	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.274,04	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.951,00	1.951,00
B. ASPEK PELAYANAN UMUM															
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
	PENDIDIKAN														
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (1-100)	89,02	89,02	90,12	87,41	91,22	92,31	93,41	85,47	88,64	90,21	91,44	93,41	91,44
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (1-100)	84,50	84,50	85,19	80,28	85,87	86,56	87,24	79,60	80,97	81,65	82,34	87,24	82,34
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (1-100)	95,96	95,96	96,40	88,74	97,03	97,65	98,28	88,18	89,06	89,64	90,00	98,28	90,00
4	Rerata Nilai UN ***)	angka (1-100)	6,67	6,67	6,71	6,71	6,74	6,77	6,81	-	-	-	-	6,81	-
5	Angka Kelulusan	angka (1-100)	99,92	99,92	99,94	99,94	99,96	99,98	100	100	99,96	99,98	100	100	100
	KESEHATAN														

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	25	25	30	30	35	40	45	25	35	40	45	45	45
7	Angka kesakitan	persen	41,19	41,19	40,87	40,87	40,55	40,24	39,93	41,19	40,55	40,24	39,93	39,93	39,93
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka per 1000 KH	5,70	5,70	5,69	5,69	5,68	5,67	5,66	4,40	5,68	5,67	5,66	5,66	5,66
10	Angka Kematian Balita (AKABa)	Angka per 1000 KH	6,68	6,68	6,67	6,67	6,66	6,65	6,64	5,28	6,66	6,65	6,64	6,64	6,64
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	angka	3,98	3,98	3,97	3,97	3,96	3,95	3,94	3,40	3,96	3,95	3,94	3,94	3,94
12	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	persen	60	60	65	65	70	75	80	60	70	75	80	80	80
13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	63,30	76,98	93,42	-	93,42
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang ***)	persen	66,51	66,51	72,00	72,00	78,75	85,42	92,27	69,90	-	-	-	92,27	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
15	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	94,78	95,16	95,73	-	95,73
	Persentase ketersediaan rumah layak huni ***)	persen	67,24	67,24	73,74	73,74	79,43	85,53	91,63	72,06	-	-	-	91,63	-
	Persentase kawasan permukiman berkualitas ***)	persen	60,31	60,31	63,98	63,98	92,65	96,33	100	63,39	-	-	-	100	-
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
16	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	86,87	88,27	89,58	-	89,58
	Cakupan penegakan hukum ***)	persen	84,53	84,53	85,70	85,70	86,87	88,27	89,68	84,53	-	-	-	89,68	-
17	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	62,89	62,89	65,84	65,84	68,6	71,04	73,78	94	100	100	100	73,78	100
18	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	98,50	99,00	99,50	-	99,50
	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat **)	persen	99,17	99,17	99,33	99,33	99,50	99,67	99,83	98,95	-	-	-	99,83	-
19	Persentase peningkatan fasilitasi partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah daerah	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
	SOSIAL														
20	Cakupan penanganan PMKS	persen	47,46	47,46	48,04	48,04	48,63	49,21	49,80	104,52	48,63	49,21	49,80	49,80	49,80
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
	TENAGA KERJA														

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	74,34	74,24	74,14	-	74,14
	Indeks Produktivitas tenaga kerja ***)	rupiah	31.104.864	31.104.864	31.194.768	31.194.768	31.292.023	31.397.568	31.512.510	32.387.942	-	-	-	31.512.510	-
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
22	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	22,59	23,46	24,34	-	24,34
	Cakupan Pemberdayaan perempuan ***)	persen	66,46	66,46	66,69	66,69	66,72	66,97	67,22	66,45	-	-	-	67,22	-
23	Rasio kekerasan	persen	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PANGAN														
24	Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	70,80	70,90	71,00	-	71,00
25	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	84,90	85,00	85,10	-	85,10
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi) ***)	persen	87,98	87,98	88	88,20	88,10	88,25	88,4	87,9	-	-	-	88,40	-
26	Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	93,20	93,20	93,20	-	93,20
	Ketersediaan pangan utama beras ***)	kg/jiwa / tahun	211,22	211,22	210,66	210,66	210,10	209,55	208,99	205,82	-	-	-	208,99	-
	Stabilitas harga pangan ***)	persen	93,97	93,97	93,98	93,98	94	94,15	94,3	92,41	-	-	-	94,3	-
	LINGKUNGAN HIDUP														
27	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	6,98	9,30	11,63	-	11,63
	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru ***)	persen	10	10	13	13	15	18	22	2	-	-	-	22	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	45	50	55	-	55
	Persentase pengelolaan sampah ***)	persen	41,2	41,2	42,9	42,9	47,99	53,5	54,91	34,29	-	-	-	54,91	-
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	40,25	40,70	41,15	-	41,15
	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan ***)	persen	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	-	-	-	39,59	-
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim ***)	persen	7,53	7,53	8,97	8,97	10,34	11,67	12,98	8,94	-	-	-	12,98	-
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII														
30	Rasio Perekaman KTP – elektronik, Keluarga yang Ber KK dan Penerbitan KIA	angka	-	-	-	-	-	-	-	-	89,65	91,68	93,67	-	93,67
	Rasio Perekaman KTP- elektronik dan Keluarga yang Ber-KK ***)	angka	97,48	97,48	98,03	98,03	99,03	99,28	99,75	85,47	-	-	-	99,75	-
31	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka	66,67	66,67	74,16	74,16	81,67	89,16	96,67	81,57	81,67	89,16	96,67	96,67	96,67
32	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka	77,5	77,5	82,5	82,5	87,5	92,5	95	75	87,5	92,5	95	95	95
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
33	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	85,01	85,01	87,74	87,74	90,46	93,19	100	95,37	90,46	93,19	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB														
34	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,73	0,73	0,71	0,71	0,69	0,67	0,65	0,93	0,93	0,91	0,89	0,65	0,89
35	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	20,15	20,15	19,61	19,61	19,07	18,53	18	20,15	19,07	18,53	18	18	18
	PERHUBUNGAN														
36	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	59,35	62,34	90,00	-	90,00
	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan ***)	persen	68,96	68,96	75,62	75,62	82,62	89,54	96,49	53,89	-	-	-	96,49	-
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
37	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik ***)	persen	83,94	84	87,74	86,67	89,88	92,02	94,15	80,18	-	-	-	94,15	-
38	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	86,81	92,80	100	-	100
	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI ***)	persen	75	75,06	83,33	83,33	91,67	95,83	100	82,02	-	-	-	100	100
	KOPERASI DAN UKM														
39	Persentase koperasi aktif	persen	78,13	78,13	80,20	80,20	80,4	80,7	81	38,31	80,40	80,70	81	81	81
40	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	5	5	5	5	5	5	3,75	5	5	5	5	5
	PENANAMAN MODAL														
41	Nilai investasi PMA	rupiah	78.750 milyar	78.750 milyar	82.687 milyar	82.687 milyar	86.821 milyar	91.162 milyar	95.721 milyar	69.679,52 milyar	69.451.431.968	69.618.826.286	69.794.590.320	95.721.000.000	69.794.590.320

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Nilai investasi PMDN	rupiah	2.391 triliun	2.391 triliun	2.630 triliun	2.630 triliun	2.893 triliun	3.182 triliun	3.501 triliun	2.412,95 triliun	2.792.794.453.844	3.072.073.899.233	3.379.281.289.156	3.501.000.000	3.379.281.289.156
43	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (1-100)	87	87	87,50	87,50	88	88,5	89	87,15	88	88,50	89	89	89
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
44	Cakupan prestasi generasi muda	persen	41	41	44	37,50	46,5	49	52	53,63	43,89	44,44	45,00	52	45,00
	STATISTIK														
45	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100
	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD ***)	persen	48,16	48,16	56,89	56,89	70,23	84,67	98,32	56,46	-	-	-	98,32	-
	PERSANDIAN														
46	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	44,52	44,52	52,44	53,19	61,56	67,81	76,67	57,63	61,70	68,08	76,59	76,67	76,59
	KEBUDAYAAN														
47	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	32,86	32,86	33,31	33,31	33,69	34,16	34,60	30,10	33,69	34,16	34,60	34,60	34,60
	PERPUSTAKAAN														
48	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,07	0,07	0,08	0,08	0,087	0,09	0,10	0,0175	0,0188	0,0205	0,0224	0,10	0,0224
	KEARSIPAN														
49	Persentase pengolahan arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	38,46	38,46	53,85	53,85	69,23	84,62	100	30,76	69,23	84,62	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	URUSAN PILIHAN														
	KELAUTAN DAN PERIKANAN														
50	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	16.831,65	17.091,81	17.382,71	-	51.306,17
	Produksi daging ***)	ton	16.393,30	16.393,30	16.680,20	16.680,20	16.972,10	17.269,10	17.571,30	16.484,37	-	-	-	90.997,40	-
51	Produksi Telur	ton	17.071,20	17.071,20	17.359,80	17.359,80	17.653,10	17.951,50	18.254,90	17.071,88	17.653,10	17.951,50	18.254,90	105.078	105.078
52	Produksi susu	liter	818.257	818.257	833.804	833.804	849.646	865.789	882.238	818.461	849.646	865.789	882.238	4.249.734	4.249.734
53	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.788.662	1.842.232	1.897.501	-	5.528.395
	Produksi benih ikan ***)	ekor (x1000)	2.100.000	2.100.000	2.205.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563	1.719.206,10	-	-	-	13.603.826	-
54	Produksi ikan konsumsi	ton	25.000,00	25.000,00	25.357,50	18.847,50	26.625,38	27.956,64	29.354,45	18.476	19.224,60	19.804	20.400	156.444,00	103.276,10
	Produksi perikanan tangkap ***)	ton	294,53	294,53	309,25	309,25	324,71	340,95	358	230,63	-	-	-	-	-
55	Produksi ikan hias	ekor	-	-	-	2.385.500	-	-	-	-	2.457.200	2.530.900	2.606.900	-	7.595.000
	PARIWISATA														
56	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	5	5	5	5	5	5	5	-81,39	5	5	5	25	25
57	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	5,3	5,3	5,6	5,6	6	6,3	6,8	NA	3,70	3,73	3,75	30	20,13
	PERTANIAN														
	Produksi Padi ***)	ton (GKP)	478.500	478.500	479.000	479.000	479.500	480.000	480.500	296.209	-	-	-	480.500	-
	Produksi Jagung ***)	ton (pipilan kering)	51.450	51.450	51.500	51.500	51.550	51.600	51.650	40.611	-	-	-	51.650	-
	Produksi Cabai ***)	ton (segar)	39.457	39.457	40.071	40.071	40.399	40.783	41.183	32.578	-	-	-	41.183	-
	Produksi Kopi ***)	ton (ose kering)	1.490	1.490	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530	1.490,70	-	-	-	1.530	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Produksi Cengkeh ***)	ton (bunga kering)	165	165	167	167	169	171	173	165,7	-	-	-	173	-
	Produksi kelengkeng ***)	ton (segar)	93	93	95	95	97	99	100	75	-	-	-	100	-
	Produksi jeruk ***)	kuintal (segar)	2.655	2.655	2.660	2.660	2.665	2.670	2.675	2.379	-	-	-	2.675	-
	Produksi kelapa dalam ***)	ton (kopra)	7.530	7.530	7.535	7.535	7.540	7.545	7.550	7.531	-	-	-	7.550	-
	Produksi Salak ***)	ton (segar)	680	69.380	69.390	69.390	69.400	69.410	69.420	53.739	-	-	-	69.420	-
	Produksi Bawang putih ***)	ton (askip)	2.264	2.264	2.377,20	2.377,20	2.424,70	2.473,20	2.522,70	7.510	-	-	-	2.522,70	-
58	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	0,73	0,73	-	2,19
59	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	3,40	-	13,20
	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi ***)	persen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,28	-	-	-	1,5	-
	PERDAGANGAN														
60	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	Cakupan Pelayanan Perdagangan ***)	miliar rupiah	70	70	72	72	74	76	78	68,99	-	-	-	78	-
	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur ***)	unit	8	8	9	9	10	11	12	7	-	-	-	12	-
	PERINDUSTRIAN														
61	Indeks industri yang terbina	indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,3	-	1,3
	Persentase Pertumbuhan Industri ***)	persen	2,33	2,33	2,39	1,44	2,42	2,47	2,55	2,39	-	-	-	12,16	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	PERENCANAAN														
62	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	85,38	85,38	86,92	83,09	88	89,54	93,38	85,38	84,71	86,51	90,29	93,38	90,29
	KEUANGAN														
63	Persentase kenaikan PAD	persen	-6,3	-6,3	7	7	7	7	7	-22,26	7	7	7	7	7
64	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
66	Indek profesionalitas ASN	Angka (1-100)	67	67	69	53	72	74	76	63	53	59	64	76	64
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
67	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	PENGAWASAN														
68	Level kapabilitas APIP	Level (1-5)	3	3	3	3	3+	3+	3+	3	3	3	3	3+	3
69	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3	3	3,1	3	3,2	3,3	3,4	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,3
	FUNGSI LAINNYA														
70	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah ***)	persen	70	70	72,5	72,5	75	77,5	80	70	-	-	-	80	-	
71	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84 (Baik)	84 (Baik)	84,25 (Baik)	84,5 (Baik)	85 (Baik)	83,69 (Baik)	84,25 (Baik)	84,50 (Baik)	85 (Baik)	85 (Baik)	85 (Baik)	
72	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	94	94	94	94,44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
73	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	94,5	100	-	100	
C. ASPEK DAYA SAING																
74	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	69,93	69,93	72,98	72,98	76,42	79,83	83,29	66,60	71,91	74,76	82,21	83,29	82,21	
75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219)	Angka (0-100)	-	-	-	-	-	-	-	-	71,34	71,36	71,38	-	71,38	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IKAx30%)+(IKUx30%)+(IKTLx40%) **)	Angka (0-100)	72,12	72,12	72,14	72,14	72,16	72,18	72,2	71,30	-	-	-	72,2	-	
76	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	65,53 (Baik)	65,53 (Baik)	67,25 (Baik)	67,25 (Baik)	68,96 (Baik)	70,68 (Sangat Baik)	72,39 (Sangat Baik)	61,07 (Baik)	68,96 (Baik)	70,68 (Sangat Baik)	72,39 (Sangat Baik)	72,39 (Sangat Baik)	72,39 (Sangat Baik)	
77	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	82,2	86,42	83,62	83,62	84,99	86,33	87,76	94,00	84,99	86,33	87,76	87,76	87,76	
78	Nilai AKIP	-	63,03 (Baik)	63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	60,33 (Baik)	67,01 (Baik)	69,00 (Baik)	71,00 (Sangat Baik)	60,33 (Baik)	61,04 (Baik)	63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	71,00 (Sangat Baik)	65,02 (Baik)	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024	Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (1-5)	-	-	-	2,51-2,61	-	-	-	-	3,0-3,20	3,21-3,40	3,41-3,60	-	3,41-3,60
	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik **)	angka (0-5)	2,31-2,50	2,31-2,50	2,51-2,61	-	2,62-2,72	2,73-2,85	2,86-3,1	2,94	-	-	-	2,86-3,1	-
80	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83 (Baik)	83 (Baik)	83,75 (Baik)	83,75 (Baik)	84,5 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	83,69 (Baik)	84,5 (Baik)	85,25 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)	86 (Baik)
82	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,55	0,55	0,6	0,58	0,66	0,69	0,71	0,60	0,60	0,70	0,76	0,71	0,76
83	Pertumbuhan Investasi	persen	5	5	5	5	5	5	5	13	10	10	10	5	10
84	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	72,48	78,16	93,05	-	93,05
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah **)	persen	67,74	67,74	73,81	73,81	80,68	87,48	94,38	61,90	-	-	-	94,38	-
85	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,68	0,68	0,69	0,69	0,7	0,71	0,72	0,68	0,7	0,71	0,72	0,72	0,72

Keterangan: *) Target perubahan akibat adanya pandemi *Covid-19*

***) Indikator yang tidak menjadi sasaran daerah pada Perubahan RPJMD 2019 – 2024

****) Indikator yang tidak menjadi indikator kinerja daerah pada Perubahan RPJMD 2019 – 2024

BAB X

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Magelang merespon berbagai dinamika yang berkembang secara global dan regional, serta dinamisnya regulasi dari pemerintah pusat dengan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah, yaitu dengan melakukan penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dalam penyusunan perubahan RPJMD ini tentunya dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Selain itu pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan besar yang menuntut kebiasaan baru di berbagai sektor, dengan regulasi yang terbit dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditengah-tengah implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang, memberikan tantangan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah berupa perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2024.

Perubahan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ditekankan pada perubahan untuk perencanaan 3 (tiga) tahun terakhir masa RPJMD, yaitu untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Perubahan tersebut mencakup target Indikator Kinerja Utama Daerah antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu juga dilakukan perubahan pada target indikator kinerja terkait kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, proyeksi besaran pendapatan daerah dan struktur pendanaan daerah, khususnya untuk tahun 2022-2024.

Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan melalui proses yang cukup panjang sampai dengan penetapan Peraturan Daerah sebagai legitimasi perubahan RPJMD ini. Penyusunan Perubahan RPJMD ini tetap memperhatikan pendekatan perencanaan secara partisipatif, yaitu mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki komitmen untuk turut serta dalam membangun dan memajukan Kabupaten Magelang. Melalui proses ini diharapkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan skala prioritas dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan tahun 2022-2024. Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

Melalui perubahan RPJMD ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang semakin realistis untuk dicapai. Dengan melakukan penajaman kembali atas berbagai program berikut target indikator kerjanya, dan selanjutnya dilakukan penajaman pada tataran kegiatan berikut target indikator kerjanya pada level Renstra Perangkat Daerah. Harapannya dalam implementasi Perubahan RPJMD ini didukung oleh seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Magelang akan semakin sejahtera, dan memiliki daya saing yang kuat, serta mampu berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

